Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA

Republik Bhinneka Tunggal Ika:

MENGURAI ISU-ISU KONFLIK, MULTIKULTURALISME, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta 2012
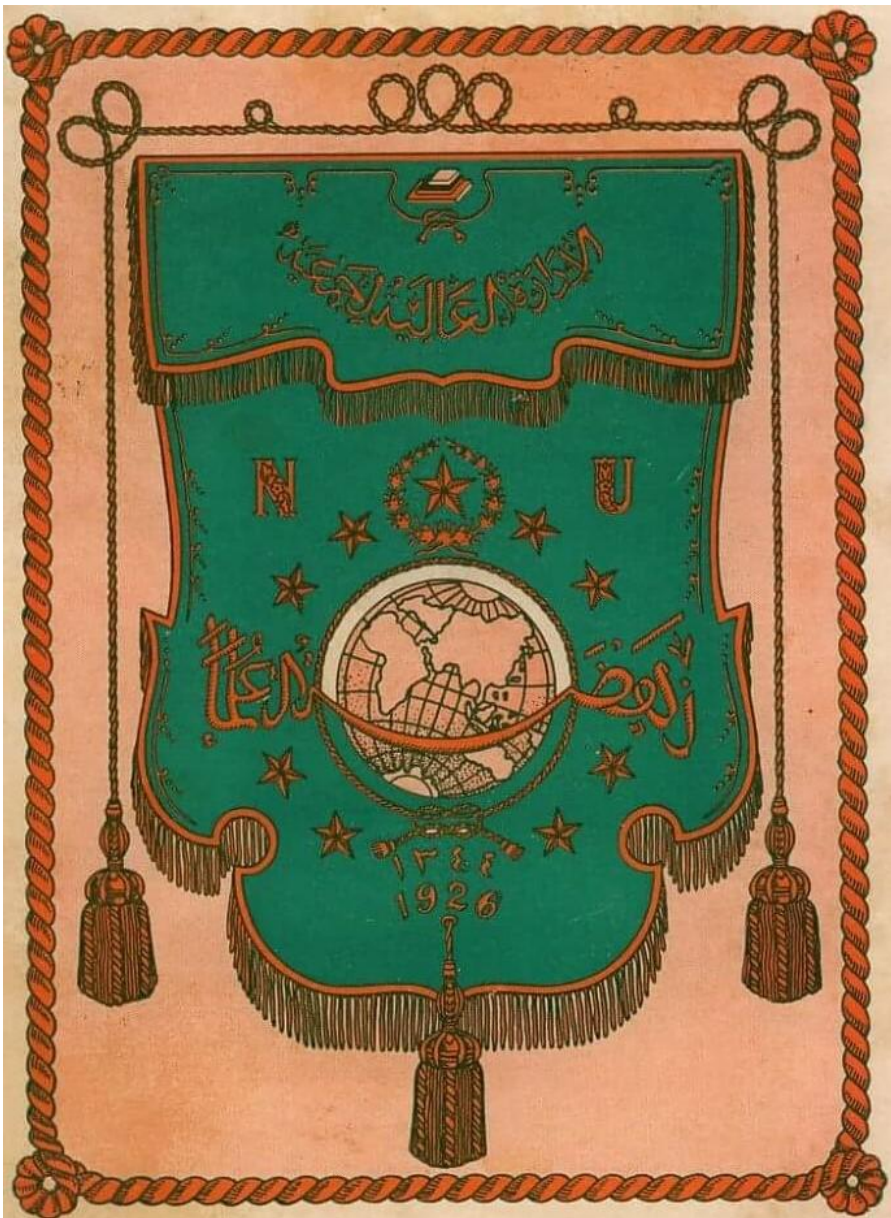
Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

republik bhinneka tunggal ika: mengurai isu-isu konflik, multikulturalisme, agama dan sosial budaya/Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Ed. I. Cet. 1. ----
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
xxiv + 363 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8739-10-8

....

Cetakan Pertama, Oktober 2012

....

REPUBLIK BHINNEKA TUNGGAL IKA: MENGURAI ISU-ISU KONFLIK, MULTIKULTURALISME, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

....

Penulis :
Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA

Editor :
Prof. Dr. Koeswinarno

Tata Letak :
Sugeng

Design Cover
Firdaus

....

Foto Ilustrasi Cover:
Rotan yang diikat dengan kuat

Penerbit:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
Telp/Fax. (021) 3920425, 3920421
puslitbang1@kemenag.go.id

Kata Pengantar
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya "Penerbitan Naskah Buku Kehidupan Keagamaan". Penerbitan buku Tahun 2012 ini, sebagian besar merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2011. Kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada para pakar dalam menulis prolog, juga kepada para peneliti sebagai editor buku ini yang secara tekun telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi buku, yang akhirnya dapat hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Pada tahun 2012 ini ditetapkan 9 (sembilan) naskah buku yang diterbitkan, buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Respon Masyarakat terhadap Aliran dan Paham Keagamaan Kontemporer di Indonesia.
2. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia.
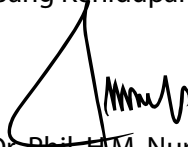
3. Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Konsultan BP4 dan Penyuluh.
4. Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia
5. Gerakan Dakwah Islam dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama
6. Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/ Perselisihan Rumah Ibadat.
7. Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya.
8. Peningkatan Integritas Birokrasi : Arah Baru Disiplin Pegawai.
9. Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada para peneliti serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. Semoga penerbitan karya-karya hasil penelitian yang lebih banyak menyampaikan data dan fakta ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, serta sebagai bahan formulasi kebijakan kepada masyarakat secara luas tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia. Penerbitan buku-buku ini dilakukan secara simultan dan berkelanjutan setiap tahun oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat untuk memberikan cakrawala dan wawasan kita sebagai bangsa yang amat kaya dan beragam dalam kehidupan keagamaan.

Apabila penerbitan ini masih memiliki beberapa kekurangan, baik substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas

berbagai kekurangan tersebut. Akhirnya, ucapan terimakasih kami haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan demi tercapainya tujuan dan sasaran penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini.

Jakarta, Oktober 2012
Kepala
Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan
NIP. 19691110 199403 1 005

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selama satu dasawarsa ini, kehidupan keagamaan dan kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia mengalami ritme naik-turun yang sulit diprediksi. Banyak pengamat, salah satunya George Soros dalam bukunya *Open Society : Reforming Global Capitalism,* menyebut Indonesia, sebagai negara yang menyerupai negara-negara Balkan yang memiliki persoalan dalam stabilitas ekonomi dan politik. Bahkan Soros melihat Indonesia merupakan versi lain dari Yugoslavia yang menghadapi persoalan konflik. Kalau pertikaian tersebut tidak mampu diatasi dengan komprehensif dan substansial, maka bayangan Soros tentu saja beralasan.

Bisa jadi bayangan Soros teramat menakutkan dan bersifat pesimis. Kenyataannya lebih dari 10 tahun Soros menulis, Indonesia masih tetap terjaga persatuannya, di tengah konflik etnis dan agama. Salah satu sebab mengapa bayangan para ahli tentang Indonesia yang bersifat pesimis itu tidak terjadi, karena memang ada usaha yang sangat keras dari pemerintah Indonesia

dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bahwa pemerintah tidak "tidur" harus dijawab melalui berbagai aksi dan kebijakan. Di sinilah sebenarnya posisi Kementerian Agama RI menjadi penting untuk dilihat secara empiris, bukan secara politis.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Faisal Ismail ini merupakan pengalaman empiris yang dituangkan dalam serangkaian artikel yang pernah dimuat di media massa maupun yang belum sempat dimuat. Sebagai tulisan yang dibuat selama kariernya sebagai pejabat Kementerian Agama RI, tentu dapat menjawab berbagai kritik yang ditujukan Kementerian Agama RI, baik oleh pengamat, akademisi, LSM maupun media massa. Tulisan ini juga membuktikan bahwa di tengah hiruk-pikuk konflik terutama yang berbau agama, Kementerian Agama RI sebenarnya telah berbuat banyak untuk bangsa dan Negara ini. Contoh paling kongkrit adalah lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006. Aturan ini menjadi sangat fenomenal karena mampu meredam berbagai konflik latent antaragama, meskipun di lain pihak masih saja muncul riak-riak kecil konflik. Berbagai kasus-kasus keagamaan dikupas dari kacamata pemerintah untuk mengimbangi analisis-analisis kritis yang terkadang minim data.

Pengalaman hidup bersama secara berbeda menjadi penting untuk memahami masing-masing kelompok sosial, budaya dan agama di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia merupakan lanskap budaya paling kaya dan sekaligus paling rumit di antara negara-negara yang ada di dunia ini. Dengan cara yang sama, multikulturalisme di Indonesia menjadi wajib dipahami sebagai sebuah makna cara hidup bersama untuk tetap menjaga keutuhan NKRI.

Sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, saya tentu menyambut baik upaya Puslitbang

Kehidupan Keagamaan untuk menerbitkan buku ini. Selain menjadi bukti akuntabilitas publik, juga diharapkan dengan penerbitan buku ini para *stakeholder* Kementerian Agama RI dapat lebih memahami dan melihat posisi Kementerian Agama dalam percaturan kehidupan dan kebijakan keagamaan di Indonesia. Sebab, di tengah perubahan politik dari sistem yang dianggap kurang demokratis menjadi sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka, tentu melahirkan cara pandang yang berbeda terhadap agama. Lahirnya Khong Hu Chu sebagai "agama baru" yang dilayani Kementerian Agama RI merupakan dampak perubahan politik yang lebih demokratis. Kasus kekerasan yang menimpa Ahmadiyah juga lahir di tengah perkembangan demokrasi yang masih mencari bentuk. Belum lagi tuntutan pelayanan ibadah haji, pelayanan perkawinan di KUA dan sebagainya.

Sebagai institusi yang berada dalam tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, buku ini dapat menjadi media refleksi, seberapa jauh kebijakan-kebijakan Kementerian Agama RI berbasis penelitian. Kemudian, sejauhmana program-program pengembangan direspons oleh masyarakat. Keduanya memiliki arti penting yang sama.

Jakarta, Oktober 2012
Pgs. Kepala
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 19561013 198103 1 003

PROLOG

ISLAM DAN PELEMBAGAAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Oleh: Ali Munhanif

- Pengajar Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Salah satu perdebatan paling hangat dalam literatur Islam dan ilmu-ilmu sosial sepanjang dua dasawarsa adalah isu mengenai apakah Islam mendukung prinsip-prinsip multikulturalisme. Maraknya aksi-aksi kekerasan dan konflik sosial di Dunia Islam, khususnya yang berkaitan dengan sikap-sikap anti-Barat, anti-penistaan agama, dan anti-pluralisme, seringkali ditunjuk sebagai ilustrasi tentang minimnya komitmen masyarakat Islam pada multikulturalisme. Di Indonesia, semakin banyaknya jumlah organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada kekerasan dan anti-keragaman pada satu dasawarsa terakhir juga dimaknai sebagai adanya pertentangan normatif antara Islam dan multikulturalisme.

Munculnya perdebatan ini bukan tanpa alasan. Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar bagi pengamat dan ilmuwan sosial untuk mempertentangkan Islam dengan semangat multikulturalisme. Pertama adalah alasan doktrinal, yakni

ditemukannya ajaran-ajaran Islam dan praktik kehidupan masyarakat Muslim yang tidak jarang berbenturan dengan prinsip keaneka-ragaman masyarakat. Pada tingkat gagasan ke-Islaman, tidak sedikit tokoh agama, pemimpin masyarakat dan bahkan pejabat di lingkungan lembaga negara, yang secara eksplisit menolak adanya kemajemukan iman dan kebudayaan.

Alasan kedua lebih bersifat politis. Yakni bahwa dari semua negara di dunia yang sedang atau telah berhasil melembagakan multikulturalisme pada abad 20—Eropa Selatan (dekade 1970an), Amerika Latin (1980an), masyarakat bekas-pemerintahan komunis Eropa Timur (1990an)—hanya negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang gagal berpartisipasi dalam melembagakan multikulturalisme dalam konstitusi kenegaraannya. Meskipun gelombang demokratisasi di Timur Tengah mengisyaratkan adanya kesadaran yang meningkat akan komitmen terhadap multikulturalisme di Dunia Islam, seberapa jauh pelembagaan multikulturalisme itu akan bertahan belumlah bisa dipastikan.

Dalam konteks demikian, Indonesia di samping Republik Mali di Afrika Barat merupakan satu dari sedikit negara Muslim yang mempunyai jejak rekam relatif baik. Indonesia, misalnya, secara konstitusional telah melembagakan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam Konstitusinya sejak 1945. Secara sistem pemerintahan, Indonesia berhasil melewati masa kritis dalam pelembagaan demokrasi sejak 1998. Sementara Mali, hingga terjadinya krisis politik yang berakibat pada kudeta militer pada April 2012, tercatat sebagai negara yang berhasil menerapkan demokrasi sejak 1969. Karena itulah, isu mengenai kesesuaian antara Islam dan prinsip-prinsip multikulturalisme sedikit banyak menemukan pijakan politisnya di Indonesia, di mana meminjam istilah Larry Diamond dkk (1995:118)—"…. (Indonesia) telah menjadi negara yang masyarakatnya dibentuk oleh budaya dan

pandangan hidup yang mendukung tumbuhnya multikulturalime dan demokrasi".

Buku *Republik Bhineka Tunggal Ika* yang ada di hadapan pembaca ini tampaknya bermaksud memberi sumbangan penjelasan tentang Islam Indonesia dan perjuangan untuk melembagakan multikulturalisme. Pesan penting yang ingin disampaikan adalah, Islam bukahlah problem bagi multikulturalisme. Tetapi bagaimana masyarakat Muslim menjaga komitmennya untuk menerjemahkan pesan Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan penghargaan pada perbedaan dalam konteks historis tertentu itulah, yang mestinya menjadi perhatian ilmuwan sosial. Harus diakui bahwa, dari sejumlah pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia yang menuntut terciptanya pemerintahan yang baik, sikap menghargai pada non-Muslim, tersedianya lembaga kontrol bagi pemerintah yang berkuasa, terbangunnya lembaga hukum yang independen, diilhami oleh organisasi *civil society* yang berbasis Islam. Akibat dari kuatnya tradisi *civil society* inilah, Islam Indonesia juga tumbuh membentuk inspirasi dibangunnya "*institusi civic*" di tanah air.

Robert Putnam, seorang ilmuwan politik yang banyak mengkaji soal tradisi *civic* di dunia modern, menyebut bahwa yang dimaksud dengan "*institusi civic*" adalah bentuk struktur dan sistem sosial-budaya dan politik yang mendukung tumbuhnya pemerintahan yang baik (*good governance*), dan, dengan bagitu, mendorong tumbuhnya komitmen terhadap multikulturalisme (Putnam, 1996:44-46). Masalahnya adalah, banyak negara—khususnya di Dunia Islam—tidak berhasil menumbuhkan tradisi *civic* akibat berbagai persoalan sosial politik di masa lalu. Di sejumlah negara Islam di Timur Tengah, misalnya, tradisi tribal yang melekat dalam struktur masyarakat Arab dan warisan kolonial Barat terbukti menjadi penghalang utama bagi

tumbuhnya institusi *civic* di kawasan itu. Institusi yang tidak menopang budaya *civic* ini tergambar dalam bentuk struktur lembaga-lembaga negara yang cenderung membungkam artikulasi kepentingan publik, seperti pluarlisme, kebebasan individu, toleransi, dan moderasi. Parahnya, institusi ini tetap bertahan meskipun negara-negara Muslim mengalami transfromasi di sektor sosial dan ekonomi pada tiga dasawarsa terakhir.

Pada lapisan paling atas, institusi otoriter tercermin pada konstitusi politik yang secara eksplisit mencantumkan Islam sebagai agama negara, atau etnis tertentu menjadi pemangku resmi otoritas dan kekuasaan negara. Iran di dunia Syiah dan Saudi Arabia di dunia Sunni adalah contohnya. Bahkan rezim sekuler seperti Syria, Tunisia, dan Irak sebelum 2003, mencantumkan ideologi tunggal yang memberi legetimasi pada kekuasaan partai tunggal. Pada lapisan institusi di bawahnya, sistem pemerintahan negara-negara Muslim menganut pola pemerintahan yang relatif sama: belasan di antaranya diperintah sistem monarchi tradisional yang mengesahkan segelintir keluarga sebagai penguasa tunggal. Sebagian besar yang lain dipimpin oleh tentara akibat pelembagaan revolusi republik di Timur Tengah pada pertengahan abad 20.

Di sinilah letak pesan penting buku ini, yaitu membangun institusi kenegaraan yang berorientasi pelembagaan multikulturalsime. Lemahnya institusi *civic* berakibat pada bertahannya sistem politik totalitarian, meskipun perubahan pemimpin politik datang silih berganti. Di satu pihak, sistem pemerintahan di Dunia Islam sangat lentur merespon berbagai perubahan sosial dan tuntutatn oposisi. Di pihak lain, hingga akhir-akhir ini dengan bangkitnya Musim Semi Arab pada awal 2012, masyarakat seakan ikhlas menerima kepemimpinan otoriter dalam

bentuk pasifisme politik dan cenderung menempuh kekerasan dalam artikulasi kepentingan sosial politik mereka.

Implikasi dari kuatnya institusi politik semacam ini sangat luas. Salah satunya adalah membentuk cara berpikir masyarakat Muslim bahwa radikalisme, kudeta militer, atau revolusi, dipandang sebagai cara ampuh mengakhiri satu pemerintahan dan menggantinya dengan yang baru. Padahal, pola pergantian rezim semacam itu hanya memberi peluang bagi otoritarianime untuk terus bertahan, dari satu rezim ke rezim yang lain. Dalam konteks demikian, sulit membayangkan kemunculan negara yang menghargai multikulturalisme di Dunia Islam tanpa dukungan tradisi *civil society* yang kuat. Salah satu ilustrasi dari fenomena ini adalah, bagaimana Revolusi Islam Iran pada 1979, yang semula mencita-citakan terbentuknya sistem pemerintah yang baik dan terbuka, ternyata melahirkan otoritarianisme baru yang dibingkai dengan doktrin agama. Shah Iran adalah penguasa totaliter, tetapi revolusi yang menumbangkannya mereproduksi totalitarianisme dalam bentuk baru yang berupa "institusi ulama Syiah" dan "politik jalanan".

Dalam perspektif institusi dan pelembagaan multikulturalisme inilah, tiga tantangan besar menghadang negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Pertama adalah tantangan yang muncul dari dalam Islam itu sendiri. Banyaknya tokoh atau pemimpin agama yang secara spesifik menunjuk adanya "sistem atau ideologi Islam" akan terus menghalangi tumbuhnya *tradisi civic*. Kedua, cita-cita untuk membangun negara dengan Konstitusi Islam akan terus mengganggu karena ia berkaitan dengan posisi agama dalam negara modern yang sudah semestinya memandang semua warga negara sama. Hampir negara-negara Muslim mencantumkan Islam sebagai agama negara dan *shari'ah* sebagai sumber hukum

nasional. Anehnya, pengakuan konstitusional ini hanya ingin meneguhkan identitas agama, tanpa disertai petunjuk tegas tentang batas-batas dan cara kerja kelembagaan hukum Islam. Ketiga, konstitusi politik yang menampilkan "identitas agama" sangat mudah terpeleset ke dalam jurang ketertutupan etnis, sektarianisme dan ketegangan komunal.

Dalam perspektif tentang perlunya menjaga komitmen terhadap multikulturalisme inilah, penerbitan buku *Republik Bhineka Tunggal Ika: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya* oleh Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, perlu disambut baik. Meskipun masih saja terjadi konflik sosial dan peristiwa kekerasan atas nama agama, bukan berarti para pengambil kebijakan di bidang agama akan membiarkan Indonesia terjebak dalam kekerasan politik dan komunal yang berlarut-larut. Karena itu, sesuai dengan semangat penerbitan buku-buku ilmiah semacam ini, Kementerian Agama RI sudah semestinya mengambil peran terdepan dalam usaha pelembagaan multikulturalisme di masa depan.

Bibliography

Diamond, Larry, Juan Linz, Seymor M. Lipset (1988). *Democracy in Developing Areas*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.

Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

PRAKATA EDITOR

Buku ini merupakan mozaik kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama di Indonesia, yang dituangkan secara diakronis. Dikatakan mozaik, karena dari bab yang satu ke bab lainnya tidak memiliki ketersambungan tema dan pembahasan. Hal ini disebabkan karena tulisan ini merupakan kumpulan artikel yang disusun secara terpisah. Pembagian bab semata-mata hanya untuk memudahkan pembacaan. Penulisan semacam ini menjadi sangat penting, karena tidak hanya menuangkan gagasan-gagasan kekinian, tetapi juga peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Buku ini mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan baik, karena penulis memiliki kemampuan merekam peristiwa-peristiwa selama menjabat sebagai birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

Karena merupakan kumpulan artikel dan refleksi pengalaman selama menjabat jabatan publik, maka pembaca akan dibawa ke dalam sebuah ranah praktis yang berdimensi luas. Bahkan dalam beberapa hal pembaca di bawa dalam pemikiran akademis, karena memang penulis sebelum duduk sebagai pejabat, cukup lama berada di kampus. Oleh sebab itu, tulisan ini sebenarnya lebih cocok disebut sebagai bunga rampai pemikiran

penulis dalam dua dunia, pejabat publik dan akademisi. Oleh sebab itu, pembaca dibawa ke dalam sebuah jembatan pemikiran yang menyambungkan antara pemikiran akademis dengan pengalaman di birokrasi.

Penyajian buku dibagi ke dalam 5 bagian atau bab. Sekali lagi, pembagian ke dalam 5 bagian selain diklasifikasi atas dasar tema, juga kemudahan bagi pembaca. Pada bagian satu menjelaskan aspek-aspek kehidupan multikultural yang dikaitkan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia, termasuk bagaimana peran Negara dalam mendorong kehidupan keberagamaan berbasis multikultural tersebut. Hal yang cukup menarik adalah bagaimana multikulturalisme dilihat dari Negara asal lahirnya, Amerika.

Bagian dua masih mendiskusikan dimensi multikulturalisme, namun lebih difokuskan pada persoalan dan akar konflik di berbagai tempat di Indonesia. Pada bagian ini juga disajikan peran penting nilai-nilai lokal dan etika Islam dalam membentuk konstruksi perdamaian. Termasuk dalam sajian kumpulan artikel ini adalah kajian perspektif historis Gerakan Non-Blok dan isu internasional Samuel Huntington yang sangat terkenal dengan istilah benturan peradaban.

Bagian tiga berisi tentang komitmen ormas Islam, terutama NU dan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Bagaimanapun juga, sejarah pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua ormas Islam besar tersebut.

Bagian empat mendiskusikan persoalan ibadah, terutama yang menyangkut puasa, ibadah haji, kurban dan aktualisasi hijrah.

Bagian lima ditutup dengan isu-isu yang berkaitan dengan kebudayaan, utamanya beberapa persoalan hukum Islam.

Secara ringan tapi memiliki interest yang cukup menarik adalah uraian tentang histeria massa sepakbola sampai nilai humanisme puisi.

Melalui 5 bagian dan rangkaian artikel yang tersusun, pikiran-pikiran penulis dapat terbaca, bahwa ada benang merah antara problem-problem praksis dalam masyarakat dengan kerangka teoritik yang sering dan selelu menjadi diskusi di kampus-kampus. Kesenjangan antara teori dan praksis, tidak selalu harus dipertentangkan. Selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2012
Editor

Prof. Dr. Koeswinarno

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU

Mengurai Isu-isu Multikulturalisme

ISLAM, DOKTRIN DAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Islam: Makna, Visi dan Misi

Menurut bahasa, kata Islam berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Jadi karakteristik dan watak dasar Islam sebenarnya adalah gagasan komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam hidup dan kehidupan manusia. Islam, sebagai agama, diturunkan untuk tujuan mewujudkan salam (keselamatan), kedamaian dan perdamaian. Dengan demikian, segala bentuk terorisme, brutalisme, anarkisme, perusakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim radikal yang mengatasnamakan Islam sebenarnya bertentangan dengan watak dasar, visi dan misi damai Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, hendaknya perlu dipisahkan antara perilaku orang Islam dengan Islam sebagai doktrin. Tidak ada doktrin dalam Islam (juga dalam agama-agama lain), baik secara eksplisit maunpun secara implisit, yang mengajarkan terorisme, brutalisme, anarkisme, perusakan, pembakaran atau pun tindak-tanduk kekerasan lainnya terhadap komunitas, baik yang seagama maupun tidak seagama. Dengan kata lain, terorisme dan segala

bentuk tindakan kekerasan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam atau ajaran suatu agama. Islam adalah agama *missionary* (dakwah) yang, menurut kodrat dan wataknya, harus tersebar, tersiar dan disiarkan oleh para pemeluknya. Dalam menyiarkan Islam, Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an telah menggariskan tata cara, prinsip-prinsip atau metode dakwah yang harus ditempuh oleh umat Islam:

> Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik (pula).[1]

> Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.[2]

Dari firman Allah tersebut di atas, jelaslah bahwa upaya-upaya penyiaran Islam oleh umatnya haruslah menempuh cara-cara dakwah yang baik, yaitu dengan cara yang bijaksana, disampaikan dengan cara memberi pelajaran yang baik dan dengan cara berdiskusi (berdialog atau berargumentasi) dengan tata cara yang baik pula. Tidak ada ajaran dalam Islam, baik dalam Alqur'an maupun Sunnah Rasul, yang menyuruh pemeluknya untuk menyiarkan Islam dengan cara-cara paksaan dan kekerasan. Karena Tuhan sendiri benan-benar melarang umat Islam untuk menyiarkan Islam dengan cara-cara paksaan dan kekerasan:

> Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dari jalan yang salah.[3]

Ungkapan "tidak ada paksaan" yang terdapat dalam Al-Qur'an di atas harus diartikan dalam pengertian yang dalam dan

---

[1] QS Al Baqarah: 256.
[2] QS Ali Imran: 159.
[3] QS Al Baqarah: 256.

luas. Bahwa cara-cara dakwah yang dilakukan oleh umat Islam harus tidak ada motif memaksa, baik itu paksaan secara terang-terangan atau diam-diam, baik itu paksaan secara nyata atau paksaan secara halus dan terselubung. Segala bentuk paksaan dalam penyiaran dan dakwah adalah bertentangan dengan visi dan misi suci agama itu sendiri. Setiap bentuk pemaksaan agama (baik dengan cara halus atau terang-terangan) adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi dan kebebasan beragama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ketika terjadi "Fathu Makkah," Nabi dan para pengikutnya tidak melakukan tindakan balas dendam dan tidak pula memaksa orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab lainnya untuk memeluk agama Islam. Justru para kepala suku masyarakat Arab di jazirah Arab berbondong-bondong datang kepada Nabi dan dengan kesadaran sendiri yang mendalam, mereka menyatakan diri memeluk agama Islam.

Prinsip-prinsip kebebasan beragama ini pulalah yang telah dipraktikkan di Madinah oleh Nabi Muhammad ketika dia meletakkan dasar-dasar kerukunan hidup antara umat Islam, komunitas Yahudi dan komunitas Arab non-Muslim lewat Piagam Madinah yang telah ditandatangani dan disepakati oleh para wakil dari masing-masing kelompok. Piagam Madinah, sebagaimana dikenal dalam sejarah, merupakan suatu piagam atau konstitusi tertulis pertama di dunia yang memuat dasar-dasar toleransi, harmoni dan kebebasan beragama yang dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, ide tentang toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama sebenarnya memiliki akar-akar teologis-sosiologis-historis yang sangat kuat dalam struktur ajaran Islam dan menemukan bukti-buktinya yang jelas dan nyata dalam praktik-praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Begitu pula ketika Yerussalem masuk ke dalam kekuasaan Islam, Umar Ibnu Khattab memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen dan kaum Yahudi dan membiarkan rumah-numah ibadat (gereja dan sinagog) tetap berfungsi seperti sediakala. Sebagaimana kita lihat, Yerussalem sekarang ini mempunyai rumah-rumah ibadat dari berbagai agama (Islam, Kristen dan Yahudi) yang diwarisi dari sejarah toleransi umat Islam di masa lampau.

Begitu pula, ketika Amru bin Ash berhasil menaklukkan negeri Mesir, tidak terjadi pemaksaan oleh umat Islam kepada penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Keberadaan komunitas Kopti (yang beragama Kristen) di Meslr dewasa ini yang diperlakukan dengan baik dan adil oleh pemerintah dan rakyat Mesir merupakan bukti nyata tentang toleransi umat Islam terhadap kelompok minoritas, dan keadaan ini sebenarnya merupakan kesinambungan dan warisan sejarah toleransi umat Islam di masa lampau. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga membuktikan bahwa Islam disiarkan dengan cara-cara yang santun, bijak, arif, persuasif dan damai. Hal ini secara jelas dapat dilihat, misalnya, dari cara-cara dakwah yang ditempuh oleh Wali Songo yang menggunakan pendekatan kultural edukatif dalam dakwah mereka. Candi-candi Hindu (Prambanan) dan candi Budha (Borobudur) tetap utuh dan tidak dihancurkan oleh umat Islam ketika Islam datang dan tersebar di Jawa. Ini berarti bahwa Islam di Indonesia disiarkan dengan cara-cara persuasif dan tidak menggunakan cara-cara radikal konfrontatif, cara-cara kekerasan atau dengan jalan perang.

Beberapa Ide untuk Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama

Sudah sejak lama para ahli ilmu perbandingan agama dan para pemikir keagamaan menggagas cara-cara untuk menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Pemikiran ini dipandang sangat penting karena masalah agama, kapan dan di mana pun di dunia ini, adalah merupakan salah satu masalah yang teramat peka dalam kehidupan manusia. Ketersinggungan terhadap sensitivitas emosi keagamaan sudah barang tentu akan menimbulkan terjadinya ketidakharmonisan dan bahkan bisa menyulut konflik yang sengit antarpemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Ada beberapa gagasan, cara atau jalan yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Gagasan-gagasan yang diontarkan oleh para pemikir di bidang keagamaan dan para ahli perbandingan agama untuk merukunkan antarkelompok pemeluk agama dapat dirangkum sebagai berikut.[4]

Pertama, dengan jalan sinkretisme. Paham ini berkeyakinman bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretisme berpendapat bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dari manifestasi dan keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudra yang satu. Aliran sinkretisme ini disebut pula pan-theisme, pan-kosmisme, universlisme, atau theopanisme. Maksud dari istilah-istilah ini adalah bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua (pan) adalah alam (kosmos). Salah seorang juru bicara sinikretisme

---

[4] Dikutip dan disarikan dari A. Mukti Ali. *Kuliah Agama Islam di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Lembang* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1973), hlm. 17-24.

yang terkenal di Asia adalah S. Radhaknishnan, seorang ahli pikir India. Jalan sinkretisme yang ditawarkan di atas, menurut Profesor Mukti Ali, tidak dapat diterima sebab menurut konsepsi ajaran Islam, misalnya, Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhluk harus ada garis batas pemisah, sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa orang itu berbakti dan mengabdi.

Kedua, dengan jalan rekonsepsi. Pandangan ini menawarkan pemikiran bahwa orang harus menyelami secara mendalam dan meninjau kembali ajaran-ajaran agamanya sendiri dalam rangka konfrontasinya dengan agama-agama lain. Tokohnya yang terkenal adalah W. E. Hocking, yang berpendapat bahwa semua agama sama saja. Obsesi Hocking yang menonjol adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara agama-agama yang terdapat di dunia ini, dan bagaimana dengan cara rekonsepsi tadi dapat terpenuhi rasa kebutuhan akan adanya satu agama dunia. Dengan demikian, kelak akan muncul suatu agama yang mengandung unsur-unsur dari berbagai agama. Misalnya, kandungan itu bisa berupa ajaran kasih sayang dari agama Kristen, pengertian tentang kemuliaan Allah dari agama Islam, perikemanusiaan dari ajaran Kong Hu Cu dan perenungan dari agama Hindu. Paham ini menekankan bahwa orang harus tetap menganut agamanya sendiri, akan tetapi ia harus memasukkan unsur-unsur dari agama-agama lain. Mukti Ali berpendapat, cara kedua ini pun tidak bisa diterima karena dengan menempuh cara itu agama tak ubahnya hanya merupakan produk pemikiran manusia semata. Padahal, agama secara fundamental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal pikiran yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang

memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya.

Ketiga, dengan jalan sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari agama-agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama akan tercipta dan terbina. Pendekatan dengan menggunakan cara sintesis ini, dalam pandangan Mukti Ali, juga tidak bisa diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa diciptakan karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu saja. Dengan kata1ain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan kuat kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.

Keempat, dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama-agama orang lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama orang lain tadi harus diganti dengan agama yang ia peluk. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup antarumat beragama dapat dicipta dan dikembangkan. Akan halnya cara keempat ini, Mukti Ali juga tidak dapat menerima karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu menurut kodratnya adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya dan cara hidup. Pluralitas kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan beragama, sudah menjadi watak dan realitas masyarakat itu sendiri. Cara-cara

penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup antarumat beragama, tetapi sebaliknya justu intoleransi dan ketidakrukunan yang akan terjadi. Karena cara-cara tersebut akan mendorong seseorang atau sekelompok orang berupaya keras dengan segala cara (entah cara yang baik atau yang tidak baik) untuk menarik orang-orang lain menganut agama yang ía peluk.

Kelima, dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbedaan *(agree in disagreement)*. Gagasan ini menekankan bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang baik. Walaupun demikian, ia mengakui antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling menghargai dan saling menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok-kelompok pemeluk agama yang lain. Dalam visi Mukti Ali, pendekatan yang kelima inilah yang tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina dan mengembangkan toleransi, harmoni dan kerukunan hidup antarumat beragama, terutama di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat majemuk.

Setiap pemeluk agama hendaknya meyakini seutuhnya dan mempercayai sepenuhnya kebenaran agama yang dipeluknya. Sikap demikian adalah sikap yang wajar dan logis. Kalau ia tidak meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya, ia telah berbuat "bodoh" terhadap agama yang dianutnya itu. Keyakinan akan kebenaran agama yang dipeluknya ini tidak membuatnya bersikap ekslusif, akan tetapi justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di samping –tentu saja– menyadari adanya persamaan--persamaan dengan agama yang dipeluk penganut agama lain

terutama yang berkaitan dengan ajaran kemasyarakatan. Sikap seperti ini akan rnembawa kepada terciptanya sikap ”setuju dalam perbedaan” yang sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Indonesia: Sosok Masyakarat Majemuk

Setelah memahami doktrin Islam tentang kerukunan antarumat beragama dan contoh-contoh riil yang terjadi dalam sejarah Islam serta beberapa pemikiran dari para ahli untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, kita coba sekarang untuk melihat kondisi di Tanah Air kita sendiri. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik karena ia menyimpan akar-akar keberagaman dalam hal agama, etnis, seni, tradisi, budaya, pandangan dan cara hidup. Sosok keberagaman yang indah ini, dengan latar belakang mosaik-mosaik yang memiliki ciri-ciri khas masingmasing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia. Motto nasional “Bhinneka Tunggal Ika” yang dipakai oleh bangsa Indonesia jelas mempertegas pengakuan adanya “kesatuan dalam keberagaman atau keragaman dalam kesatuan” dalam seluruh spektrum kehidupan kebangsaan kita. Pluralitas kehidupan bangsa Indonesia sudah sejak lama menjadi bahan kajian para ahli antropologi, sosiologi, histori dan para pakar lainnya. Hildred Geertz menggambarkan keberagaman kehidupan bangsa Indonesia sebagai berikut:

> Terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang benbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa

> yang berbeda-beda dipakai ... hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali.[5]

Sejauh menyangkut agama, ada enam agama yang telah dikelola secara resmi oleh pemerintah (negara). Pengelolaan secara resmi ini direalisasikan dalam bentuk teknis administratif penanganan urusan agama-agama tersebut di bawah naungan Kementerian Agama. Kelima agama tersebut adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Kementerian Agama atau pemerintah tentu saja hanya bertugas sebatas mengelola pembinaan kehidupan keagamaan dan umat beragama dari masing-masing agama ini, dan tidak berhak atau pun tidak berwenang untuk mencampuri urusan akidah dan ibadat dari masing-masing agama tersebut. Karena urusan akidah dan ibadat merupakan urusan interen dari masing-masing agama sesuai dengan ajaran kitab suci masing-masing. Doktrin akidah dan ibadat terlalu suci dan sakral untuk diurus atau diintervensi oleh negara (pemerintah) dan lembaga-lembaga duniawi lainnya karena kedua doktrin ini dipercayai oleh para pemeluknya sebagai doktrin Ilahiah yang transendental.

Dengan demikian, tugas penting dan fungsi pokok Kementerian Agama (pemerintah) antara lain adalah membina dan memelihara serta mengembangkan terciptanya toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Pembinaan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama ini tentu saja bukan hanya merupakan tugas Kementerian Agama, akan tetapi juga merupakan tugas semua pihak, terutama masing-masing

[5] Heldred Geertz, "Indonesian Cultures and Communities," dalam Ruth T. McVey (peny.), *Indonesia* (New Haven: Yale University Press, 1963), hlm. 24.

kelompok dari umat beragama itu. Setiap kelompok umat beragama (termasuk agama yang tidak dikelola secara resmi oleh pemerintah) juga ikut bertanggung jawab atas terciptanya toleransi dan terwujudnya kerukunan hidup antarumat beragama di Tanah Air.

Kebijakan Pembangunan Agama

Sebagaimana dikatakan di atas, Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang menyimpan berbagai warna dan panorama kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Pada suatu sisi, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan yang positif dan konstruktif apabila diarahkan secara positif dan konstruktif pula. Sebaliknya, pada sisi lain, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan yang negatif dan destruktif apabila tidak diarahkan secara positif. Situasi semacam ini sangat disadari oleh Para Pendiri *(founding fathers)* Republik ini. Itulah sebabnya, Para Pendiri Republik ini –setelah melalui perdebatan konstitusional yang panjang– tidak mendirikan negara Indonesia menjadi negara agama, tetapi sepakat memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Indonesia dalam perjalanan sejarahnya terkenal sebagai "negara Pancasila." Ia bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokratis.

Sejauh menyangkut agama, negara telah meletakkan dasar-dasar konstitusional yang kuat dengan memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap penduduk dan setiap kelompok pemeluk agama untuk menjalankan akidah dan ibadat agamanya

menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Tak ada pembatasan dan pengekangan terhadap setiap warga negara untuk melaksanakan doktrin akidah dan ibadat agamanya masing-masing karena kebebasan agama merupakan hak asasi yang sangat fundamental bagi setiap warga negara di republik ini. Negara benar-benar memberikan kebebasan berakidah, beribadat dan beragama sesuai agama yang dipeluk oleh setiap warga negara. Hal ini secara jelas dan tegas telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

> Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pemerintah tidak saja menaruh perhatian terhadap kebebasan beragama di Tanah Air, akan tetapi juga sangat menaruh perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap pembinaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama ini telah menjadi kebijakan nasional yang (pernah) dimasukkan dalam GBHN. Sebagaimana dalam GBHN-GBHN sebelumnya, GBHN 1993 tetap memberikan perhatian penting terhadap bidang agama dan pembinaan kerukunan antarumat beragama sebagai salah satu tujuan pembangunan jangka panjang kedua (PJP II). Secara jelas tujuan tersebut diarahkan untuk:

> Tercapainya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara

> bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.[6]

Tujuan penting di atas dipertegas kembali dalam Bab IV GBHN 1993 ketika membicarakan secara khusus tentang kebijakan dan sasaran pembangunan lima tahun keenam. Sasaran pembangunan lima tahun keenam di bidang agama (terkait di dalamnya pembinaan dan pengembangan kerukunan hidup antarumat beragama) dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dinyatakan sebagai berikut:

> Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam makin meningkatnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat dan di sekolah, bersamaan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadat masing-masing.[7]

---

[6] Lihat *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Garis-Garis BesarHaluan Negara (Ketetapan MPR No. 1I/MPR/ 1993),* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1993), hlm. 66. Pada awal tahun 2000-an, GBHN sudah ditiadakan. Akan tetapi, makna dan semangat yang terkandung dalam GBHN 1993 itu tetap relevan dan menjadi pegangan bersama dalam membina hubungan antarumat beragama di Indonesia.

[7] *Ibid.,* hlm. 90.

Kerukunan Sebagai Prasyarat Pembangunan

Berangkat dari tujuan pokok yang telah digariskan dalam GBHN 1993 sebagaimana disebutkan di atas, kita berpendapat bahwa sedikit pun tidak dapat disangkal bahwa keharmonisan, toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dan strategis. Tanpa adanya toleransi dan kerukunan hidup, hubungan antarumat beragama akan menjadi rawan dan mudah terganggu, dan gangguan ini akan mengakibatkan terjadinya instabilitas dalam kehidupan sosial politik yang tentunya tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kasus yang terjadi di Timor Timur (ketika masih bergabung dengan Indonesia) dan disusul kemudian dengan kerusuhan di Situbondo (September 1996) dapat ditunjuk sebagai dua contoh yang aktual. Kedua rangkaian kasus itu, sebagaimana diketahui bersama, telah mengakibatkan hubungan antarumat beragama menjadi kurang/tidak harmonis. Kasus Timor Timur telah sempat mengganggu hubungan umat Islam dan umat Katolik, sedang kasus Situbondo mengakibatkan terganggunya hubungan umat Kristen dan umat Islam.

Dalam peristiwa yang pertama, antara lain terjadi pembakaran masjid oleh sekelompok umat Katolik, sedang dalam kasus yang kedua, antara lain terjadi pembakaran gereja oleh sekelompok umat Islam. Kita tentu merasa prihatin dengan terjadinya kedua peristiwa tersebut. Tetapi kita juga perlu bersyukur bahwa kedua kasus tadi, dengan mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, telah terselesaikan secara bijak. Kejadian seperti ini tentunya sama sekali tidak kita inginkan, dan kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Kita harus melihat kedua kasus tersebut di atas dengan mata yang jeli, hati yang bening dan

pikiran yang jernih. Dengan penglihatan semacam ini, kita akan sampai pada suatu pemahaman bahwa terjadinya kasus-kasus tadi lebih disebabkan oleh faktor-faktor sosial budaya, ekonomi dan politik dan bukan oleh faktor doktrinal-ritual-teologis. Karena doktrin-doktrin setiap agama, termasuk Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik), sama sekali tidak mengajarkan untuk mengusik dan mengganggu, apalagi merusak, kehidupan dan harta benda umat agama lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, kita sudah barang tentu tidak menginginkan terjadinya (dan terulangnya) kasus-kasus seperti disebut di atas. Dilihat dari perspektif hubungan antarumat beragama yang lebih jauh ke masa depan, barangkali kasus Timor Timur (sebelum memisahkan diri dari Indonesia) dan Situbondo mengandung hikmah tersembunyi *(blessing in disguise)*. Kedua kasus ini barangkali menyadarkan dan mengajarkan kepada kita semua agar lebih bersikap dewasa, lebih toleran dan lebih arif dalam menjalani hidup berdampingan secara damai antarkelompok umat beragama. Kita mendapatkan pembelajaran untuk lebih mengerti adanya pluralitas agama di Tanah Air kita, yang atas dasar pengertian itu kita saling mengakui dan menghormati hak hidup dan karakteristik kehidupan kelompok-kelompok umat beragama yang berbeda-beda. Kita pun belajar untuk lebih memahami secara arif dan bijaksana tentang adanya kemajemukan umat beragama di Tanah Air, dan kemajemukan ini tidak perlu menjadi penghalang atau kendala bagi seluruh lapisan komponen bangsa Indonesia untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas, unitas dan integritas nasional.

Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia

Dewasa ini seluruh bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan program-program pembangunan di segala bidang. Keadaan ini sudah pasti memerlukan adanya stabilitas yang dinamis di segala bidang termasuk dalam hubungan antarumat beragama. Intoleransi dan ketidakrukunan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain akan ikut mengakibatkan terjadinya gangguan dan instabilitas dalam kehidupan sosial politik di Tanah Air. Tepat sekali apabila Alamsjah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama periode 1973-1978) menyerukan perlunya diciptakan tiga kerukunan, yaitu kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan internal umat beragama masing-masing. Terciptanya dan terbinanya ketiga kerukunan tadi sudah pasti akan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap lancarnya pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Menteri Agama H. Munawir Sjadzali MA (pengganti Alamsyah Ratu Perwiranegara) juga menaruh perhatian besar terhadap pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama. Menurut Munawir, kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia bukan lagi merupakan pilihan, akan tetapi sudah merupakan suatu keharusan. Dalam pandangan Munawir, masuknya agama--agama ke Indonesia berjalan dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Cara pandang ini dikaitkan oleh Munawir kepada tiga faktor. *Pertama,* semua agama yang masuk ke Indonesia tidak melalui kekerasan militer atau senjata sehingga tidak ada satu agama pun yang merasa menang atau kalah. Pihak yang kalah biasanya menunggu kesempatan untuk menumbangkan pihak yang menang. *Kedua,* karena agama-agama

yang masuk ke Indonesia ini berlangsung secara damai, maka tidak ada pemutusan batin terhadap kehidupan kultural lama; oleh karena itu, mau tidak mau saling mengakomodasi. *Ketiga,* temperamen bangsa Indonesia tidak panas. Tidak ada penindasan agama seperti terjadi di Eropa dulu, bahkan agama di Indonesia menjadi motor penggerak revolusi. Agama menjadi faktor yang memenangkan perjuangan bangsa Indonesia melawan ketidakadilan dan kezaliman penjajah.[8] Berpegang pada tesis ini, Munawir berlogika bahwa agama-agama di Indonesia yang telah berhasil dijadikan motor penggerak dalam mencapai kemerdekaan bangsa, dapat pula dijadikan motor penggerak dalam memacu gerak laju pelaksanaan pembangunan di Indonesia.[9]

Adalah suatu kebijakan yang sangat tepat bahwa persoalan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia sudah sejak awal mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa mantapnya toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan kerukunan dan integrasi nasional. Terciptanya kerukunan naslonal sudah barang tentu sangat penting bagi terlaksananya secara berkesinambungan program-program pembangunan nasional. Sebaliknya, setiap bentuk ketidakrukunan, ketidakharmonisan dan intoleransi antarumat beragama akan mengakibatkan adanya gangguan-gangguan terhadap stabilltas nasional yang, pada gilirannya, akan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Dalam rangka membina dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama, pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama Tarmizi Taher yang menggantikan Munawir Sjadzali) telah

---

[8] Lihat harian *Kompas,* 24 April 1990.
[9] *Ibid.*

mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama. Sudah barang tentu persoalan-persoalan ini perlu disadari dan diantisipasi oleh setiap komunitas agama agar kerawanan tersebut dapat dihindari dan dicegah sedini mungkin. Masalah-masalah rentan yang bisa menimbulkan kerawanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pendirian tempat ibadat*. Tempat ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama yang dapat menimbulkan konflik. Konflik terjadi karena, misalnya, pendirian rumah ibadat dari kelompok agama tertentu tidak didukung oleh jumlah minimal pengguna rumah ibadat tersebut dan tidak mendapat persetujuan yang semestinya dari masyarakat setempat yang berbeda keyakinan atau agama dengan kelompok yang akan mendirikan rumah ibadat itu.

2. *Penyiaran agama*. Penyiaran agama baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun melalui media elektronika serta media lain, dapat menimbulkan ketidakrukunan antarumat beragama. Lebih-lebih jika penyiaran agama itu ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas atau telah memeluk agama tertentu.

3. *Bantuan luar negeri.* Bantuan luar negeri untuk kepentingan penyiaran dan pengembangan suatu agama, baik berupa bantuan materi/finansial maupun tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antarumat beragama.

4. *Perkawinan beda agama.* Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama (yang pada mulanya bersifat pribadi) bisa menimbulkan konflik antarkeluarga dan tidak jarang dapat pula mengganggu keharmonisan hubungan antarumat beragama. Lebih-lebih apabila masalahnya menyangkut hukum perkawinan, hak asuh anak (bila terjadi perceraian), harta benda hasil perkawinan, warisan, dan sebagainya.

5. *Perayaan hari besar keagamaan.* Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh suatu komunitas agama dan kurang/tidak mempertimbangkan kondisi psikologis, situasi sosial budaya dan lingkungan keagamaan masyarakat setempat yang berbeda agama dapat menyebabkan timbulnya celah-celah kerentanan dan kerawanan hubungan antarumat beragama.

6. *Penodaan agama.* Pelecehkan atau penodaan oleh seseorang atau sekelompok penganut agama terhadap kitab suci, nabi, ajaran dan pemeluk agama lain dapat menyulut emosi dan membakar sensitivitas keagamaan yang berakibat terjadinya titik-titik rentan dan letupan ketidakrukunan antarumat beragama.

7. *Kegiatan aliran sempalan.* Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang jauh menyimpang dari doktrin dasar kebenaran suatu agama dapat menimbulkan kerawanan, baik di kalangan internal umat beragama maupun di kalangan antarumat beragama. Aliran sempalan ini biasanya bersifat eksklusif dan mengajukan klaim-klaim kebenaran terhadap pendirian atau paham-paham keagamaan yang mereka anut secara berlebihan. Sikap demikian dapat menimbulkan kerawanan, ketidakakuran dan ketidakrukunan hubungan internal umat beragama atau hubungan antarumat beragama.

8. *Aspek-aspek non-agama.* Aspek-aspek non-agama yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kerawanan hubungan antarumat beragama bisa berupa kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, faktor politik (politisasi agama), pelaksanaan pendidikan yang kurang/tidak mempertimbangkan nilai dan etika agama dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala nasional atau pun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama.[10]

Karena luasnya cakupan pembahasan, tidak semua hal yang menyebabkan terjadinya kerawanan hubungan antarumat beragama akan dibicarakan di sini. Kita hendak memfokuskan diri pada salah satu penyebab terjadinya ketidakrukunan antarumat beragama, yaitu yang terkait dengan penyiaran agama yang ditujukan oleh suatu kelompok pemeluk agama yang satu kepada kelompok pemeluk agama yang lain. Dalam hubungan ini, Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara mengeluarkan Surat Keputusan No. 70/1978 yang berisi pedoman tentang tata cara penyiaran agama. Pertimbangan-pertimbangan pokok yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Keputusan ini adalah:

1. Bahwa kerukunan hidup antarumat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional.
2. Bahwa dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pembangunan dan penyiaran agama.[11]

---

[10] Lihat *Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Proyek Pembinaan Lembaga Keagamaan tahun 1998/1999), hlm. 396-398.

[11] *Ibid;* hlm. 295.

Surat Keputusan Menteri Agama itu mengandung butir-butir pedoman yang cukup komprehensif dan rinci tentang bagaimana suatu agama sebaiknya disiarkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak pluralistik. Dengan kata lain, Surat Keputusan tersebut mengandung butir-butir etika penyiaran agama yang harus dipegangi dan dipedomani oleh setiap kelompok pemeluk agama dalam menyebarkan dan menyiarkan agamanya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun butir-butir penting tujuan dan pedoman penyiaran agama yang terkandung dalam Surat Keputusan Menteri Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan hidup antarumat beragama, pengembangan dan penyiaran agama harus dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *tepo sliro,* saling menghargai dan hormat menghormati antarumat beragama sesuai dengan jiwa Pancasila.

2. Penyiaran agama:

   a) Tidak dibenarkan menggunakan bujukan pemberian materi, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama.

   b) Tidak dibenarkan menggunakan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain.

3. Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua menimbulkan tenganggunya kerukunan hidup antarumat beragama, maka akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Seluruh aparat Kementerian Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dan sela1u mengadakan konsultasi, koordinasi dengan unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.[12]

Surat Keputusan Menteri Agama di atas sudah seharusnya mendapat sambutan dan tanggapan yang positif dari semua pihak, terutama dari para pemuka agama dari masing-masing agama, karena dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang baik, mulia dan luhur dalam rangka membina kerukunan antarumat beragama. Sudah seharusnya pula setiap kelompok agama dengan kesadaran teologis memiliki kewajiban moral dan etis untuk melaksanakan butir-butir pedoman tadi dengan rasa kejujuran dan ketulusan jiwa. Dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada Tuhan, masing-masing kelompok pemeluk agama harus memikul tanggung jawab untuk merealisasikan etika penyiaran agama tadi secara murni dan konsisten. Adalah tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya apabila ada seseorang atau sekelompok umat beragama menyalahi atau melanggar butir-butir pedoman etika penyiaran agama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu.

Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat

Selain etika dan pedoman pengaturan masalah penyiaran agama, pemerintah dalam upaya kebijakannya membina dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama memberikan perhatian juga secara serius terhadap pengaturan pembangunan rumah-rumah ibadat. Untuk kepentingan ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama

[12] *Ibid;* hlm. 296.

(SKB) No. 01/Ber/mdn-mag/1969. Dalam SKB ini diatur secara jelas bahwa:

(1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.

(2) Kepala daerah atau pejabat yang mendapat kuasa tadi dapat mengeluarkan izin setelah mempertimbangkan: a) pendapat Kepala Perwakilan Kementerian Agama setempat; b) planologi; dan c) kondisi dan keadaan setempat.

(3) Apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.[13]

Sesuai butir-butir ketentuan SKB tersebut, kepala daerah diminta segera melakukan penyelesaian apabila timbul perselisihan atau pertentangan antarpemeluk agama yang disebabkan oleh rencana pembangunan rumah ibadat oleh sekelompok komunitas agama. Jika masalahnya berkembang dan menimbulkan tindak pidana, maka persoalannya hendaknya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan secara hukum.[14] Secara umum, SKB tersebut ditaati dan dipatuhi oleh masing-masing umat beragama, walaupun di beberapa tempat terjadi permasalahan-permasalahan antara kalangan Muslim dan kalangan Kristen. Akibatnya, muncullah keberatan-keberatan dan protes, bahkan penolakan dan penentangan, dari kelompok komunitas agama tertentu (dalam hal ini biasanya kalangan Muslim) terhadap kelompok agama lain (dalam hal ini biasanya kalangan Kristiani) atau sebaliknya. Biasanya, protes dari pihak Muslim terhadap pihak Kristen atau sebaliknya disebabkan

---

[13] *Ibid;* hlm. 371.
[14] *Ibid;* hlm. 371-372.

oleh belum adanya izin dari masyarakat setempat untuk mendirikan tempat ibadat.

Dalam wacana yang berkembang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul desakan agar mencabut SKB tentang aturan pendirian rumah ibadat ini dicabut. Kalangan Kristen melihat SKB tadi sebagai suatu pembatasan yang kurang tepat dipandang dari perspektif kebebasan beragama dan HAM. Sebaliknya, kalangan Muslim tetap mempertahankannya sebagai aturan main dalam hubungannya dengan pembangunan rumah ibadat agar tidak terjadi bentrokan antarumat beragama. Kalangan Muslim menekankan agar SKB tersebut jangan hanya dilihat dalam konteks Jawa, misalnya, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi harus dilihat juga dalam perspektif nasional yang lebih luas. Menurut kalangan Muslim, di daerah-daerah yang berpenduduk mayoritas Kristen seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, SKB itu juga berlaku sama bagi umat Islam. Artinya, kalangan Muslim juga harus memperoleh izin untuk mendirikan rumah ibadat (masjid) di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas Kristen. Kalangan Muslim melihat SKB itu ibarat aturan atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku umum, berlaku kepada siapa saja dan di mana saja, yang perlu dipatuhi secara bersama-sama.

SKB no. 01/Ber/mdn-mag/1969 di atas akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat. Bab IV pasal 13 menjelaskan bahwa: (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan

pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa; (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan; (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan [dengan memperhatikan] batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Selanjutnya, pasal 14 merinci tentang prosedur dan tata cara pendirian rumah ibadat yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap komunitas agama agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan perselisihan antarumat beragama dalam praktik pendirian rumah ibadat di lapangan. Menurut pasal 14, prosedur dan tata cara pembangunan atau pendirian rumah ibadat itu secara eksplisit diatur sebagai berikut:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a) daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3; (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama

kabupaten/kota; (d) rekomendasi tertulis dari FKUB [Forum Kerukunan Umat Beragama] kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15 menetapkan bahwa rekomendasi dari FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Melengkapi poin-poin ketentuan tersebut, pasal 16 mengatur bahwa: (1) permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB (izin mendirikan bangunan) rumah ibadat; (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. Lebih jauh, dalam pasal 17 dinyatakan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memilki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Selain butir-butir ketentuan penting seperti diatur di atas, Peraturan Bersama Menag dan Mendagri no. 9/2006 dan no. 8/2006 Bab V pasal 18 mengatur pula tentang prosedur dan tata cara pemberian izin sementara pemanfaatan bagunan-gedung-bukan-rumah-ibadat untuk digunakan sebagai rumah ibadat. Prosedur dan ketentuan-ketentuan tata caranya diatur sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat harus mendapat surat keterangan pemberian

izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: a) laik fungsi, dan b) pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, meliputi: (a) izin tertulis pemilik bangunan; (b) rekomendasi tertulis dari lurah/kepala desa; (c) pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan (d) pelaporan tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Ketentuan-ketentuan penting di atas dirinci dan dipertegas lagi dalam pasal 19 dan pasal 20. Pasal 19 menyatakan bahwa: (1) Surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota tentang pemanfaatan bangunan-gedung-bukan-rumah-ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota; (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan-gedung-bukan-rumah-ibadat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Terkait dengan poin-poin ketentuan ini, pasal 19 mengatur bahwa: (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dapat dilimpahkan kepada camat; (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat

tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa di lapangan akan terjadi perselisihan antara dua komunitas agama terkait dengan pendirian rumah ibadat atau pemanfaatan bangunan-gedung-bukan-rumah-ibadat sebagai rumah ibadat. Oleh karena itu, Peraturan Bersama Menag dan Mendagri no. 9/2006 dan no. 8/2006 juga telah mengatur secara tegas dan jelas untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi sebagaimana tertera dalam Bab VI pasal 21 dan pasal 22. Pasal 21 mengatur bahwa: (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat; (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran dari FKUB kabupaten/kota; (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimna dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 ini dibingkai dengan rambu-rambu aturan dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Poin-poin aturan main dan ketentuan penting di atas masih dibingkai lagi dengan rambu-rambu ketentuan lain yang lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri itu. Hal ini dapat ditengarai dalam Bab VII pasal 23 dan pasal 24. Pasal 23 menyatakan bahwa: (1) Gubernur dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi melakukan

pengawasan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat; (2) bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat, lurah/kepala desa dan instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.

Melengkapi dan memperkuat ketentuan-ketentuan pasal 23 di atas, pasal 24 menegaskan bahwa: (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumahibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan, masing-masing pada bulan Januari danJuli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Kita yakin bahwa poin-poin ketentuan tentang tata cara pendirian rumah ibadat, pemanfaatan gedung-bukan-rumah-ibadat sebaga rumah ibadat, tata cara penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat dan sistem pelaporan tentang pelaksanaan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menang dan Mendagri no. 9/2006 dan no. 8/2009 itu sudah sangat memadai, bahkan sangat ideal dan sekaligus aplikatif. Peraturan Bersama itu sudah secara komprehensif mencerminkan aspirasi semua

komunitas agama di Indonesia. Jika poin-poin aturan main itu dilaksanakan oleh semua komunitas agama dalam mendirikan rumah ibadat baik di pusat maupun di daerah-daerah, kita yakin tidak akan ada gesekan dan perselisihan antarumat beragama di seluruh Tanah Air. Perselisihan dan konflik muncul kalau poin-poin aturan main dan ketentuan tentang tata cara pendirian rumah ibadat atau pemanfaatan bangunan gedung-bukan-rumah-ibadat sebagai rumah ibadat itu dilanggar oleh komunitas agama tertentu sehingga menimbulkan reaksi dari kelompok agama lain. Ha-hal inilah yang harus kita cegah agar jangan sampai terjadi sehingga persaudaraan, kerukunan, toleransi dan harmoni antarumat beragama di seluruh Tanah Air tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.Terpeliharanya kerukunan antarumat beragama akan menjadi landasan dan kontribusi besar bagi terciptanya kerukunan dan integrasi nasional.

Mengambil Pelajaran dari Konflik

Sebelumnya perlu dicatat bahwa hubungan tidak akur lebih banyak terjadi antara kalangan Muslim dengan Kristen ketimbang dengan kelompok-kelompok umat beragama lain di Tanah Air ini. Pada tahun 1960-an, karya-karya polemik yang ditulis oleh beberapa pengarang Muslim banyak bermunculan. Tema pokoknya berkisar pada 'serangan' sementara pengarang Muslim atas ajaran Trinitas Kristen. Sebagai pembelaan, para pengarang Kristen mempertahankan posisi teologis mereka. Lebih jauh, menyusul isu terjadinya Kristenisasi pasca pemberontakan PKI pada tahun 1965, kalangan Muslim bersikap cukup keras terhadap kalangan Kristiani. Sebuah gereja di Meulaboh (Aceh) dan Makassar, misalnya, dibakar oleh sekelompok Muslim. Kalangan Muslim juga menolak rencana penyelenggaraan Sidang Raya

Dewan Gereja Sedunia yang akan dilaksanakan di Indonesia yang, menurut kalangan Muslim, tidak tepat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Situasi seperti ini tentunya kurang menguntungkan bagi pengembangan keharmonisan dan kerukunan antara hubungan Muslim dan Kristen. Sangat melegakan hati karena situasi tersebut akhirnya dapat diakhiri berkat kesadaran masing-masing pihak dan berkat upaya pemerintah yang sangat menaruh perhatian terhadap penegakan ketertiban, keamanan dan perdamaian.

Dalam dua-tiga tahun terakhir di penghujung tahun 2000 ini terjadi lagi beberapa konflik antara kalangan Muslim dan Kristen di beberapa daerah di Tanah Air yang mengakibatkan munculnya serangkaian gangguan terhadap kerukunan dan keharmonisan yang sebelumnya berlangsung dengan baik. Konflik-konflik ini dapat disebut misalnya konflik di Timor Timur (ketika masih bergabung dengan Indonesia), konflik di Situbondo, konflik di Ambon dan Maluku Utara serta konflik di Poso yang kesemuanya melibatkan Muslim dan Kristen. Konflik-konflik ini pada awalnya lebih disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kelompok-kelompok masyarakat tadi menggunakan isu agama sebagai label atau simbol untuk memperkuat solidaritas kelompok. Dengan kata lain, mereka menggunakan sensitivitas agama dalam rangka menyulut emosi massa untuk menggalang dan memperkuat solidaritas kelompok.

Sentimen-sentimen etnisitas juga ikut mempertajam dan menyumbang dalam memperbesar eskalasi konflik. Ringkas kata, konflik-konflik ini lantas berdimensi sangat kompleks dan bermotif SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Konflik-konflik sosial dan antaretnis lainnya terjadi di Pontianak, Aceh dan beberapa tempat lain yang menambah deretan konflik yang terjadi di Tanah

Air akhir-akhir ini. Ambil saja konflik Ambon yang meletus pada awal Januari 1999 sebagai contoh. Dari penelitian para pakar, salah satu penyebab kasus Ambon bermula dari masalah kesenjangan sosial ekonomi. Orang-orang pendatang (etnis Bugis, Buton dan Makassar, BBM), yang beragama Islam dan dikenal sebagai para pekerja keras dan sukses, menikmati taraf kehidupan dan ekonomi yang jauh lebih baik daripada penduduk Ambon yang mayoritas beragama Kristen. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial dari masyarakat Ambon terhadap etnis BBM tadi. Akumulasi kecemburuan dan kesenjangan sosial ini, karena dipicu oleh rebutan lahan bisnis, akhirnya meletus menjadi konflik antaretnis. Konflik antaretnis ini dalam perkembangannya menggunakan simbol, label dan sensitivitas agama untuk memperkuat solidaritas kelompok yang menyebabkan kedua belah pihak semakin agresif dan brutal. Maka muncullah kelompok merah (Kristen) dan kelompok putih (Muslim) saling berhadapan dalam konflik berdarah ini yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Konflik ini telah diwarnai pula dengan pembakaran rumah-rumah ibadat oleh kedua belah pihak, suatu hal yang sangat tidak terpuji dipandang dari sudut moral, etika, hukum, HAM dan agama.

Karena simbol, label dan sensitivitas keagamaan telah dipakai, maka solidaritas dan agresivitas kelompok semakin mengeras dan meluas dengan diwarnai brutalitas yang semakin menggelegar. Keadaan demikian mendorong Pasukan Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama'ah (Islam) yang jauh bermarkas di Jawa mengambil bagian aktif dalam konflik di Ambon ini. Hal ini sebenarnya tidak diharapkan karena membuat keadaan semakin memperihatinkan dan eskalasi konflik semakin tajam, meluas dan berkepanjangan serta menyulitkan aparat keamanan dalam

menegakkan ketertiban dan perdamaian. Banyak kalangan yang menginginkan agar Laskar Jihad ini ditarik dari Ambon untuk meredakan konflik di sana. Namun keinginan dan himbauan ini tidak segera menjadi kenyataan. Jauh sebelum itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga menyerukan kepada aparat keamanan agar mencegah Laskar Jihad untuk memasuki Ambon dan Presiden meminta kepada aparat untuk menangkap mereka jika diketahui mereka membawa senjata tajam saat hendak memasuki Ambon itu.

Sudah pasti konflik Ambon yang telah berlangsung selama dua tahun ini, sebagaimana konflik-konflik lain, telah menimbulkan gangguan sangat serius terhadap sendi-sendi kerukunan sosial dan tatanan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Menaruh perhatian secara serius terhadap persoalan ini, Menteri Agama Muhammad Tolchah Hasan beberapa bulan lalu telah mengambil inisiatif dengan mengundang tokoh-tokoh Muslim dan Krsiten Ambon datang dan bertemu di Jakarta untuk mendiskusikan cara-cara bagaimana mengakhiri konflik. Pertemuan tersebut menghasilkan seruan dan kesepakatan antara mereka untuk segera menghentikan konflik di Ambon. Namun massa di tingkat akar rumput masih tetap terlibat dalam konflik sehingga seruan dan kesepakatan antara tokoh-tokoh Kristen dan Muslim itu tidak mempunyai efek sebagaimana yang mereka harapkan bersama.

Karena situasi konflik belum menunjukkan adanya tanda-tanda mereda, maka beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memberlakukan keadaan darurat sipil dengan tujuan untuk segera menanggulangi konflik di Ambon dan Maluku Utara ini. Hasilnya cukup positif. Konflik di daerah tersebut dapat diredam sehingga keadaannya dapat dikendalikan, walaupun kadang-kadang riak-riak konflik dalam skala kecil masih juga terjadi. Bagaimana pun,

konflik Ambon dan Maluku Utara ini (dan konflik-konflik di daerah-daerah lain) hendaknya bisa dicari solusinya agar rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik bisa segera dicapai sehingga tatanan kehidupan dan ketertiban dapat berjalan normal kembali dan begitu pula format administrasi serta roda pemerintahan setempat dapat berjalan secara normal dan berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pilar-pilar kerukunan sosial, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan nasional dapat dibangun kembali secara kukuh dan kuat yang pada gilirannya akan memperkuat pula sendi-sendi integrasi nasional. Dengan demikian pula, malapetaka besar yang akan menimpa bangsa ini yang berupa disintegrasi bangsa dan disintegrasi nasional dapat dicegah dan dihindari.

Semua kelompok umat beragama yang ada di Indonesia, tanpa kecuali, terutama komunitas Muslim dan komunitas Kristen, hendaknya secara arif mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari konflik-konflik yang destruktif ini. Sikap ekslusif, intoleran, mau menang sendiri, penafsiran parsial dan tidak proporsional terhadap teks-teks kitab suci, serta klaim-klaim kebenaran secara berlebih-lebihan terhadap doktrin dan teologi agama yang dianut oleh suatu komunitas agama hendaknya ditinggalkan. Sebaliknya, semangat "sepakat dalam ketidaksepakatan" *(agree in disagreement),* sikap inklusif, pluralis, humanis, arif, bijak dan toleran sudah seharusnya lebih dikedepankan dalam rangka membangun dan mengembangkan toleransi, keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama yang lebih kodusif dan lebih sejuk dan menyejukkan di Tanah Air ini.

AGAMA, KONSTITUSIONALISME DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Ketika kita mulai memasuki fokus pembicaraan tentang pluralisme, suatu hal yang terlebih dalu ingin kita ketahui dan kita pahami adalah apa arti istilah pluralisme itu sendiri. Ini berarti bahwa kita harus mengajukan suatu batasan atau definisi tentang pluralisme itu. Dari situ kita bertolak untuk melakukan kajian dan pembahasan tentang topik penting ini. Pluralisme dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai ″prinsip yang menganggap bahwa orang-orang dari berbagai ras, agama, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama.″ Inilah arti pluralisme yang dipakai dalam tulisan ini. Jadi pluralisme bertumpu pada kemajemukan ras, agama, tradisi, budaya, dan pandangan politik. Unsur-unsur penting ini sering diidentifikasi sebagai alat perekat yang membentuk ikatan emosional-primordial yang kuat di kalangan para anggotanya. Ikatan tersebut acapkali digunakan untuk tujuan-tujuan positif dan menguntungkan, tetapi bisa pula digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk motif-motif yang negatif dan merugikan.

Pluralisme merupakan salah satu gagasan besar dan agenda bersama yang dewasa ini sedang aktual diperbincangkan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi di seluruh dunia, termasuk di negeri ini. Para pakar di negeri ini dari berbagai disiplin ilmu dan para pemerhati yang sangat tertarik dengan ide dan agenda ini selalu berusaha secara aktif untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka baik yang bersifat konseptual akademis maupun yang bersifat praktikal implementatif tentang bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola dan menata sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bercorak pluralistis ini. Sejumlah akademisi dan praktisi yang sangat menaruh kepedulian terhadap pemikiran, gerakan dan penerapan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional. Mereka menuturkan pengalaman mereka yang patut dicermati dan diapresiasi dalam membina kehidupan masyarakat secara langsung. Tujuannya adalah untuk memelihara secara nyata dan konsisten tatanan kehidupan masyarakat yang diliputi oleh suasana keamanan, keharmonisan, keutuhan dan kesatuan bangsa.

Upaya-upaya untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa menuntut perhatian dan kepedulian yang sangat besar dari segenap komponen bangsa. Hal ini sangat terasa ketika terjadi berbagai konflik horisontal-komunal yang berlatar belakang etnik dan keagamaan. Sejumlah konflik sosial merebak di beberapa daerah di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup lama dan tidak begitu mudah dipadamkan secara tuntas. Berbagai kasus tadi memaksa kita untuk berpikir secara jernih dan logis agar kasus-kasus tadi tidak berkelanjutan atau pun terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita perlu belajar secara arif dan bijak dari

peristiwa sejarah yang getir dan pahit ini dan ke depan kita dengan penuh kesantunan bertekad untuk tidak lagi terseret ke dalam konflik yang sama. Ke depan kita ingin untuk tidak terjerembab lagi ke dalam jurang yang sama.

Pilar Konstitusionalisme

Semangat pluralisme sesungguhnya telah dipahami dan dihayati secara baik oleh para pendiri republik ini. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (yang tertera pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan salah satu indikator korelatif-substantif ke arah kesejatian makna itu. Para pendiri negara ini sangat menyadari jati diri kebhinnekaan, kemajemukan ataupun pluralitas di kalangan bangsa Indonesia yang tinggal di kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat dilihat sebagai modal kekayaan dan potensi untuk membangun bangsa dan negara yang kuat, maju, aman dan makmur.

Pluralitas agama di kalangan penduduk negeri ini sudah disadari sejak masa awal pembentukan negara ini. Kesadaran bersama itu telah mengantar lahirnya kesepakatan tentang kebebasan beragama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Ini berarti bahwa negara sejak semula mengakui dan memraktikkan sepenuhnya kemerdekaan dan kebebasan beragama sebagai hak asasi bagi setiap warga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan, seperti ibadat, kebaktian dan berbagai aktivitas keagamaan yang lain.

Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki landasan legal konstitusional yang kuat untuk mengelola pluralitas bangsa secara baik dan benar. Landasan legal-konstitusional ini diperkuat lagi dengan budaya bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap ramah, santun, saling menghormati, dan tolong-menolong. Selain itu, keragaman suku bangsa dan budaya diyakini sebagai bagian dari sunatullah (hukum Tuhan) dalam ciptaan-Nya. Pluralitas bangsa semestinya dilihat dengan cara pandang yang kreatif-apresiatif-positif dan disikapi dengan langkah-langkah yang dinamis-konstruktif. Dengan cara pandang seperti ini, bangsa ini dapat menjadi kukuh dan maju, atau membentuk kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang indah dan kuat. Sosok kemasyarakatan dan kebangsaan seperti itu yang semestinya menjadi dambaan dan cita-cita kita bersama sebagai suatu bangsa yang besar.

Dalam perspektif Islam, keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Seperti firman Allah dalam Alqur'an: "Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama Islam …" (*QS Al Baqarah: 256*). Doktrin Al Qur'an ini sekaligus menjadi landasan teologis yang memberikan kemerdekaan dan kebebasan agama dalam Islam. Umat Islam tidak dibenarkan untuk memaksa komunitas-komunitas non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Logikanya: komunitas-komunitas non-Muslim bebas menganut dan melaksanakan agamanya masing-masing sesuai kepercayaan dan ajaran agama masing-masing. Doktrin Al Qur'an ini, pada satu sisi, menjadi landasan etika bagi umat Islam dalam melakukan dakwah (penyiaran agama) dan, pada sisi lain, menjadi landasan etika pergaulan umat Islam dengan komunitas-komunitas agama lain. Tekanan dan paksaan dalam bentuk apa pun (baik fisik maupun psikis, baik terselubung maupun terang-terangan, baik langsung maupun tidak langsung, atau baik secara diam-diam maupun

secara terbuka) untuk memaksa komunitas-komunitas non-Muslim agar memeluk agama Islam adalah sama sekali tidak dibenarkan. Karena, secara doktrinal teologis, tekanan dan paksaan demikian pada satu sisi sangat bertentangan dengan doktrin Alqur'an sendiri dan, pada sisi lain, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Begitu pula sebaliknya, jika ada upaya-upaya atau gerakan kelompok-kelompok non-Muslim (baik secara tersembuyi maupun secara terbuka, atau baik secara langsung maupun secara tidak langsung) yang ingin mengkonversi umat Islam ke agama mereka adalah merupakan gerakan yang tidak terpuji, tidak pantas dan bertentangan dengan asas kebebasan beragama dan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia. Agama, apa pun nama agama itu, tidak pantas dan tidak perlu diperjualbelikan dan dipaksakan kepada seseorang untuk dipeluk, apalagi orang tersebut sudah menganut agama tertentu. Seseorang harus memeluk dan menganut suatu agama harus berdasarkan pertimbangan logika, rasionalitas, akal sehat dan hati nuraninya yang paling dalam. Ringkas kata, seseorang harus beragama berdasarkan suara batinnya yang paling dasar dan paling dalam.

Agama, sudah barang tentu, secara asasi bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan niali-nilai kemaslahatan bagi kepentingan umat manusia. Sejalan dengan prinsip ini, agama sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang sejati dan fitri. Jika kemudian terjadi pertikaian atau konflik antarkelompok masyarakat agama, sebenarnya hal itu pada dasarnya tidak dikehendaki oleh pihak-pihak pencinta dan penegak perdamaian. Tentu saja segala bentuk perseteruan, pertentangan dan konflik tadi perlu dikaji secara cermat dan seksama agar segera dapat diketahui akar-akar masalah yang menjadi riak-riak pemicunya. Pertikaian dapat timbul karena berbagai faktor penafsiran hitam

putih dan kaku atas teks-teks kitab suci keagamaan dan atau faktor-faktor lain yang dominan, terutama politik dan sosial ekonomi, dalam kehidupan internal dan atau antarumat beragama. Kitab suci bisa sama, akan tetapi pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci itu bisa berbeda-beda di kalangan umat beragama. Ibarat rambut sama hitam, akan tetapi pendapat bisa berbeda-beda.

Kalangan eksklusif akan mempunyai pemahaman dan penafsiran keagamaan yang berbeda dari kelompok inklusif. Ekslusivitas keberagamaan muncul akibat pola pemahaman atau interpretasi teks-teks keagamaan yang dilakukan secara sempit, kaku dan rigid, dan strategi penyiaran agama yang secara ambisius ditujukan kepada orang-orang yang sudah mempunyai identitas agama tertentu. Faktor-faktor ini dapat saling terkait sebagai variabel dan pemicu konflik antarumat beragama. Faktor-faktor internal dan eksternal itu banyak dipengaruhi oleh kemampuan dan cakupan orientasi para penganut agama dalam memahami, mengomunikasikan dan mengimplementasikan idealitas dan realitas pesan-pesan keagamaan yang sifatnya Ilahiah-transendental.

Untuk menghindari rigiditas, ekslusivitas, ekstrimitas, dan radikalitas, sudah sepatutnya teks-teks kitab suci agama perlu dipahami secara benar, tepat dan cerdas yang didasarkan pada apresiasi kritis terhadap doktrin teologis. Corak pemahaman seperti ini akan memperlihatkan wawasan keagamaan multikulturalis dan pluralis yang luas, sikap toleran-inklusif dan sikap lapang dada dari suatu kelompok komunitas agama terhadap kelompok-kelompok komunitas agama yang lain. Para penganut agama yang memiliki pemahaman seperti itu tidak mudah melecehkan pihak komunitas agama lain yang memiliki cakrawala dan sikap keberagamaan yang berbeda. Dari sudut ini,

dapat dimengerti jika konflik sosial melibatkan lebih banyak penganut agama dari lapisan bawah. Mereka ini lebih mudah terseret ke dalam ajang pertarungan konflik dengan isu-isu sensitif keagamaan. Mereka lebih mengedepankan emosi ketimbang nalar dalam merespons isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka.

Pendidikan Multikultural

Kualitas pemahaman agama pada masyarakat antara lain tak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal. Tidak ada salahnya jika faktor ini dikaji secara berkelanjutan, sebab pendidikan agama diberikan pada semua jenjang pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak beberapa dasawarsa silam. Dengan demikian, orang yang pernah duduk di bangku pendidikan formal, sedikit atau banyak, pernah mendapat sentuhan, bimbingan dan pendidikan agama. Banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang keagamaan setelah kebijakan pelaksanaan pendidikan agama itu diterapkan oleh pemerintah. Pada dekade 1970-an, denyut kehidupan keagamaan di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cukup menonjol baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Banyak orang yang semakin sadar untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadat. Banyak orang yang semakin sadar untuk menampakkan sosok identitas keagamaan mereka. Sebagian lainnya mencari perlindungan di balik jubah agama karena mereka tak ingin dianggap ateis, sebuah label yang secara paradoksal bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila.

Di kurun waktu 1970-an umat beragama baru saja melewati masa-masa kritis-tertekan yang sangat mencekam

setelah sebelumnya berhadapan dengan gerakan kaum komunis yang anti-Tuhan dan anti-agama. Pada masa itu banyak pemuka agama di sejumlah daerah sering mendapat teror dari orang-orang yang anti-agama. Bahkan ada di antara pemuka agama yang menjadi korban pembunuhan gerakan kaum komunis-ateis. Rasa lega mereka alami setelah bangsa ini berhasil menumpas pemberontakan G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965. Menyusul peristiwa tragis ini, pada penghujung tahun 1960-an pemerintah mengangkat guru agama dalam jumlah yang memadai karena kebutuhan yang dirasakan mendesak pada masa itu. Kondisi sosial dan kebijakan itu agaknya turut mempengaruhi peningkatan kesadaran beragama masyarakat pada dekade 70-an. Kesemarakan kehidupan keagamaan di seluruh Tanah Air semakin berkembang pada dasawarsa 1980-an. Jumlah rumah ibadat pada masing-masing komunitas agama di sejumlah daerah memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Umat beragama semakin bergairah untuk menampakkan identitas keagamaan mereka. Banyak orang yang terpelajar dan berpendidikan maju memelopori berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan kerja mereka atau di lingkungan pemukiman baru yang banyak dibangun pada masa itu. Motivasi pembangunan yang dikampanyekan oleh pemerintah itu turut menyentuh kehidupan beragama masyarakat secara luas.

Jika agama mempunyai tujuan utama yang luhur, maka demikian pula dengan tujuan pendidikan agama. Pendidikan Islam, misalnya, didefinisikan sebagai "proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia, untuk beramal di dunia dan meraih hasilnya di akhirat." Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan agama tidak lain merupakan upaya yang terencana untuk menyampaikan pesan-

pesan agama kepada para peserta didik agar dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh agama. Tujuan pendidikan agama dapat dirumuskan dengan formulasi yang beragam. Tetapi intinya ialah untuk mengangkat harkat dan martabat hidup manusia berdasarkan nilai-nilai agama. Tujuan itu jelas, bersifat pasti dan tetap. Persoalan yang sering muncul ialah bagaimana mencapai tujuan mulia dan luhur tersebut. Ini terkait dengan banyak hal, antara lain seperti muatan kurikulum, proses pembelajaran, lingkungan sosial, mental keilmuan dan metode evaluasi. Hal-hal semacam itu memerlukan pedoman, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, atau kebijakan dan perencanaan pada tingkat nasional dan lokal.

Pendidikan agama, secara konseptual dan secara operasional, diharapkan dapat merespons kompleksitas masalah-masalah sosial yang berkembang dan menonjol pada setiap zaman. Pada masa lalu, umat beragama sering dilanda pertikaian internal karena beberapa masalah kontroversi penafsiran agama dan perbedaan paham keagamaan. Meskipun ketegangan semacam itu kadang-kadang masih mencuat dan muncul ke permukaan, namun dinamika intensitasnya mengalami penurunan yang tajam. Umat menjadi semakin dewasa dan semakin matang dalam berpikir atau semakin cerdas dalam memandang berbagai masalah *khilafiah furu'iyah*. Dewasa ini, ada pemikiran serius dan upaya strategis yang lebih intens dari berbagai kalangan untuk mengkaji pendidikan agama dalam kaitannya dengan pengembangan semangat pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita.

Titik tekan utamanya adalah pada penerapan ide pluralisme yang dikembangkan sejalan dengan denyut ruh ajaran agama, semangat kesukubangsaan, dan semangat kebudayaan. Ini

adalah sesuatu yang positif dan konstruktif. Dikatakan demikian, karena dari aspek normatif, agama memberi sejumlah pedoman dasar untuk menyikapi kemajemukan semacam itu. Dari segi historis, umat beragama telah memiliki berbagai pengalaman yang dapat menyadarkan diri mereka bahwa keharmonisan hidup bersama merupakan suatu keniscayaan yang dapat diupayakan dalam hidup ini. Damai itu indah, sebuah semboyan yang lagi gencar-gencarnya dikampanyekan oleh mereka yang memahami perlunya hidup damai, bebas dari konflik dan bebas dari kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia.

Pendidikan agama dan pendidikan multikultural merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai suatu bangsa. Segenap umat beragama diharapkan mengambil bagian aktif dalam upaya menggapai idealisme luhur ini. Pola pemahaman agama yang kontekstual, manusiawi dan cerdas, pendekatan dialogis-inklusif-humanis perlu dikembangkan dalam membina hubungan antaragama dan hubungan lintas budaya di Tanah Air kita. Di sinilah pentingnya pendidikan multikultural dalam seluruh tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Melalui pendidikan multikultural ini, sikap saling menerima dan menghargai antaretnis, antarumat beragama dan antarbudaya terus kita pupuk dan kita kembangkan dalam mewujudkan kesatuan dalam keragamaan atau keragaman dalam kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini. Dengan cara ini, korelasi positif nasionalisme, konstitusionalisme dan multikulturalisme akan terus tumbuh dan berkembang subur di Tanah Air kita.

SINERGISITAS AGAMA DAN NEGARA DALAM MEMPERKUAT NASIONALISME, KONSTITUSIONALISME, DAN MULTIKULTURALISME

Konflik antarumat beragama biasanya terjadi apabila kepentingan-kepentingan tertentu (misi/dakwah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dll) lebih diutamakan daripada misi pembinaan internal keimanan umat beragama. Konflik antarumat beragama di suatu negara akan ikut menyebabkan terjadinya proses disintegrasi nasional. Dengan kata lain, benturan antarumat beragama di suatu negara akan menimbulkan gangguan serius tehadap pembinaan integrasi nasional yang stabil dan dinamis. Fenomena seperti ini dapat dilihat, misalnya, dari konflik antara pemeluk agama Hindu dan penganut agama Islam yang (pernah) terjadi di India yang dipicu oleh persoalan dan kepentingan sosial keagamaan dan politik antara kedua belah pihak. Umat Islam yang merupakan kelompok lebih kecil daripada umat Hindu di India sering menjadi sasaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas umat Hindu.

Tindakan-tindakan kekerasan yang bermotif agama sering juga kita dengar di Inggris. Dalam upayanya memisahkan diri dari

Inggris (Protestan), IRA (Tentara Republik Irlandia/Katolik) sering melakukan tindak kekerasan dan teror yang menewaskan dan melukai banyak korban dan merusak fasilitas umum. Sementara itu, Ulster Defence Forces (didukung oleh para pendeta Protestan) yang hendak mempertahankan Irlandia Utara sebagai bagian dari Inggris juga melakukan kekerasan. Serangkaian perang dan kekerasan berkuah darah antara Israel dan Palestina sering mencuat ke permukaan disebabkan oleh sentimen-sentimen politis, etnis, dan keagamaan yang berkepanjangan. Di Srilangka, konflik yang bermotif agama dan politik juga sering terjadi antara pasukan pemerintah dan pihak pemberontak (pasukan Elang Tamil) dan konflik ini menjadi masalah nasional yang mengancam integrasi nasional.

Agama, apa pun namanya, pada hakekatnya merupakan kekuatan positif, inspiratif, kreatif, konstruktif, sublimatif dan integratif. Ia mengajarkan perdamaian dan kedamaian, cinta asih dan kasih sayang, persahabatan, persaudaraan dan rasa prikemanusiaan yang sangat mendalam antarmanusia. Namun begitu, agama akan berubah menjadi kekuatan negatif, disintegratif dan destruktif apabila nilai-nilai positif dari agama tadi dikesampingkan karena lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan di luar ajaran-ajaran humanis agama yang positif dan konstruktif itu.

Sering kita mendengar terjadinya serangkaian tindakan kekerasan yang diberi label agama atau atas nama agama yang dilakukan oleh sekelompok radikal pemeluk agama tertentu. Oleh karena itu, yang sangat perlu dilakukan oleh setiap kelompok pemeluk agama adalah melaksanakan secara konsisten nilai-nilai luhur dan positif ajaran-ajaran agama yang mereka peluk dan menerapkan nilai-nilai luhur tadi dalam hubungan dengan kelompok-kelompok penganut agama lain. Di samping upaya-

upaya lain yang bisa dilakukan, perlu dilakukan serangkaian dialog yang lebih intensif antarumat beragama. Dengan melakukan dialog, hal itu berarti ada kemauan baik dan kesedian yang sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari dan sekaligus menemukan solusi terbaik bagi persoalan yang mereka hadapi. Sebelum membicarakan masalah ini, ada baiknya kita menurunkan beberapa permasalahan yang selama ini bisa dianggap sebagai gangguan dalam hubungan antarumat beragama, khususnya hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani.

Dengan membeberkan kasus-kasus tadi, kita menjadi semakin sadar bahwa kita memang sedang dihadapkan pada "pekerjaan rumah" bersama yang meminta kadar perhatian kita secara serius untuk secara bersama-sama menanggulangi persoalan-persoalan tersebut dalam kerangka pembinaan dan pengembangan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya integrasi nasional yang stabil, mantap dan dinamis.

Beberapa Gangguan Hubungan Muslim-Kristen

Di atas telah ditegaskan bahwa relasi Muslim-Kristen di Tanah Air pada umumnya berlangsung dalam kondisi baik. Akan tetapi kita harus akui juga bahwa ada kalanya hubungan tadi terganggu oleh hal-hal di luar ajaran murni agama masing-masing. Antara tahun 1960-an sampai 1970-an, polemik-polemik eksesif apologetis antara Muslim-Kristen sering mencuat ke permukaan. Berbagai tulisan atau karangan dari para penulis Muslim yang isinya mengritik ajaran-ajaran Kristen (terutama seputar doktrin Trinitas dan originalitas kewahyuan Injil) dan respons para penulis Kristen terhadap kritik itu banyak bermunculan. Dari kalangan

Muslim karya-karya polemis apologetis ini diwakili antara lain oleh Sidi Gazalba dan Bey Arifin. Polemik semacam ini terasa kurang menguntungkan bagi terciptanya hubungan harmonis antara kedua belah pihak. Lebih-lebih kalau disadari sejak semula bahwa, secara konseptual doktrinal teologis, ajaran-ajaran Islam dan Krsiten memang berbeda. Tradisi dialog antarumat beragama, khususnya antara Muslim dan Kristen, pada kurun waktu itu belum tercipta.

Di tahun 1970-an, atas inisiatif Menteri Agama KH Mohammad Dachlan, Musyawarah Antarumat Beragama diselenggarakan di ibu kota Jakarta. Musyawarah itu bertujuan untuk membina kerukunan antara Muslim-Kristen yang menyangkut persoalan dakwah dan misi. Musyawarah itu gagal karena pihak Kristen tidak mau menandatangani piagam yang isinya menetapkan bahwa penyiaran agama tidak boleh dilakukan kepada orang-orang sudah mempunyai identitas agama tertentu. Masa suram ini ditandai pula oleh sikap tak terkendali sekelompok orang Islam yang membakar gereja di Meulaboh (Aceh) dan kemudian penolakan keras umat Islam terhadap rencana penyelenggaraan Sidang Raya Gereja-Gereja Sedunia di Indonesia. Umat Islam menolak rencana Sidang Raya itu karena akan dilaksanakan di Indonesia yang dikenal berpenduduk mayoritas Muslim.

Memasuki dekade 90-an, hubungan Muslim-Kristen terganggu lagi dengan terjadinya insiden Situbondo. Dalam kasus Situbondo (1997) sekelompok umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama (NU), secara tak terkendali membakar beberapa gereja sehingga mengakibatkan kerusakan berat. Peristiwa ini dipicu oleh vonis pengadilan setempat kepada seseorang yang menghina seorang ustaz/kiai. Para santri memprotes pengadilan karena mereka menilai hukuman yang dijatuhkan kepada

penghina kiai tadi tidak adil/terlalu ringan. Protes ini memanas dan akhirnya memicu kemarahan dan kerusuhan massa yang mengakibatkan terjadinya perusakan beberapa gereja di Situbondo. Menyusul kasus ini, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU saat itu, KH Abdurrahman Wahid, secara tulus meminta maaf kepada umat Kristiani dan menyerukan kepada umat Islam (khususnya warga NU) di kota itu untuk ikut membangun kembali gereja-gereja yang dirusak tadi. Seruan dan himbauan Gus Dur mendapat respons positif dari para warga NU. Karena itu, mereka berpartisipasi dalam memperbaiki gereja-gereja yang rusak karena didorong oleh tanggung jawab moral yang besar.

Pada bulan Nopember 1998, ada dua peristiwa yang memprihatinkan dalam hubungan Muslim-Kristen. Peristiwa Ketapang (Jakarta) telah meyebabkan sejumlah gereja (dan bangunan-bangunan lain) dirusak dan dibakar oleh massa (orang-orang Islam). Sebaliknya, dalam Peristiwa Kupang (Nusa Tenggara Timur) sejumlah masjid (dan bangunan-bangunan lain) dirusak dan dibakar oleh sekelompok massa Kristen. Dilaporkan, kedua peristiwa itu terjadi setelah terlebih dahulu ada provokasi dari para provokator yang menyusup dan menggunakan isu agama untuk kepentingan politiknya. Baik para pemimpin Muslim maupun para pemimpin Kristen sama-sama menyerukan agar umat beragama, khususnya Muslim dan Kristen, tidak mudah terpancing untuk diadu domba. Kendatipun kedua kasus ini diyakini ada yang menunggangi, tetapi patut disayangkan masih adanya kekurangdewasaan berpikir atau kekurangmatangan sikap dari masing-masing pihak sehingga mengakibatkan jumlah rumah ibadat yang hancur dibakar cukup banyak. Sikap pengendalian diri yang diajarkan oleh Islam dan Kristen belum mengakar kuat dalam benak kesadaran para pelaku pembakaran rumah-rumah ibadat itu.

Kasus-kasus di atas hanyalah sederet contoh yang memprihatinkan kita semua sebagai suatu bangsa yang ingin terus menata diri menuju kehidupan bangsa yang moderen. Semua itu menyadarkan kita bagaimana sebaiknya kita sebagai bangsa bersikap toleran dan hidup berdampingan secara damai sehingga terbina pilar-pilar kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama, khususnya antara Muslim-Kristen, yang semakin mantap di waktu-waktu yang akan datang. Hubungan yang harmonis antarumat beragama di negeri ini tentunya akan ikut memperkukuh sendi-sendi sosial dan memperkuat pilar-pilar integrasi nasional.

Intensifikasi Dialog Antarumat Beragama

Memulai dialog antarumat beragama, sebaimana layaknya memulai sesuatu, akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan. Salah satu penyebabnya adalah karena kendala-kendala perbedaan teologis dan muatan psikologis, serta sikap antipati antarpenganut agama yang akan berdialog. Sebagaimana dikatakan oleh Charles Kinball:

> Gerakan dialog yang terorganisasi merepresentasikan sebuah bab baru dalam sejarah panjang hubungan Muslim dan Kristen. Upaya-upaya internasional untuk saling memahami dan bekerja sama adalah merupakan pertanda yang memberikan penuh harapan, utamanya bagi komunitas-komunitas agama yang interaksinya sering ditandai oleh sikap saling tidak percaya, salah paham dan antipati. Umat Islam

dan umat Kristiani yang membela dan terlibat dalam dialog masih menghadapi banyak kendala.[15]

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, dialog antarumat beragama menemukan momentum historisnya ketika Menteri Agama Mukti Ali pada awal 1980-an menyerukan perlunya dilakukan dialog secara lebih intensif. Seruan Mukti Ali ini mendapat respons sangat positif. Banyak pemuka, pemimpin dan fungsionaris dari berbagai organisasi dan majelis agama yang memulai dialog dengan tujuan untuk saling memahami ajaran dan tradisi agama-agama lain. Dengan memahami ajaran, sejarah dan tradisi agama-agama lain di luar agamanya sendiri, hal itu akan membawa para penganut agama tadi bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan para penganut agama-agama lain. Dalam hubungan ini Mukti Ali ini menyatakan:

> ... [dialog antara-pemeluk agama adalah] mempertemukan antara orang-orang atau kelompok dari agama atau ideologi yang berbeda untuk sampai pada pengertian bersama tentang berbagai isu tertentu untuk setuju dan tidak setuju dengan sikap yang penuh apresiasi dan, karena itu, untuk bekerja sama dengan mereka untuk menemukan rahasia makna kehidupan ini. Dialog adalah suatu proses di mana para individu dan kelompok berupaya untuk menghilangkan rasa takut dan rasa tidak percaya satu sama lain dan mengembangkan hubungan baru berdasarkan rasa saling percaya. Dialog adalah suatu kontak dinamis antara kehidupan dengan kehidupan

---

[15] Charles Kinball, "Muslim-Christian Dialogue," dalam J. L. Esposito, ed., *The Oxford Encyclopedia of the Modern WorlD,* vol. 3 (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 204.

–tidak saja antara satu pandangan rasional yang berlawanan satu sama lain– yang ditujukan untuk membangun dunia baru secara bersama-sama.[16]

Dialog tidak saja penting tetapi harus dirasakan sebagai suatu kebutuhan bersama dalam hubungan antarpemeluk agama. Tanpa dialog, umat beragama yang satu akan merasa sulit untuk memahami dan mengerti ajaran, sejarah perkembangan dan tradisi umat agama lain. Dengan kata lain, dialog merupakan salah satu cara yang efektif dan produktif untuk mencapai terciptanya saling pengertian antarpemeluk agama. Dialog bisa dilakukan baik secara formal maupun secara informal, dan yang paling penting adalah bahwa tujuan dialog itu tercapai dengan baik. Salah satu caranya adalah melalui studi terhadap agama lain sehingga tercipta dialog iman atau dialog batin seperti dikatakan oleh Montgomery Watt:

> Dialog bisa saja dilakukan dengan menggunakan cara-cara formal dan informal. Bahkan seperti cara saya sendiri yang selama bertahun-tahun bergumul dalam studi akademis tentang agama lain, bisa dikatakan terlibat dalam suatu dialog batin (*inner dialogue*). Kondisi esensial suatu dialog adalah bahwa para peserta hendaknya bertemu dalam posisi yang setara, dan juga bahwa, sementara masing-masing pihak harus terikat kepada agama sendiri, mereka merasa bahwa dalam dialog itu mereka akan menerima dan memberi sesuatu. Tujuan dialog adalah bahwa masing-masing kelompok hendaknya memperoleh pengertian terhadap agama lain; tetapi

---

[16] Mukti Ali, "Dialogue between Muslims and Christians in Indonesia," dalam Mukti Ali, *Dialog Antaragama* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1981), hlm. 37.

pengalaman menunjukkan bahwa, dalam melakukan yang demikian itu, mereka sepertinya memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang keyakinan mereka sendiri.[17]

Model-model Dialog

Dewasa ini dialog antarumat beragama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, memperlihatkan intensitasnya yang semakin luas dan melibatkan berbagai kelompok komunitas agama. Ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan perlu terus ditingkatkan dan digalakkan agar tujuan dialog yang hendak dicapai dapat diwujudkan. Bentuk-bentuk dialog ini dapat dilihat dalam kerangka Kimball[18] yang mengajukan cara atau pola-pola dialog yang beragam, namun dimensi-dimensinya masih saling mengait.

Pertama, dialog parlementer *(parliamentary dialogue).* Bentuk dialog ini melibatkan ratusan peserta dan contoh yang paling awal adalah World's Parliament of Religions yang berlangsung di Chicago pada tahun 1893. Dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an dialog-dialog parlementer ini semakin sering diselenggarakan di bawah pengawasan organisasi-organisasi multiagama seperti Conference on Religions and Peace dan The World Congress of Faiths. Ratusan peserta hadir dalam pertemuan-pertemuan parlementer ini dengan tujuan untuk mengembangkan kerja sama yang lebih baik dan sekaligus untuk menggalang perdamaian di antara para pemeluk agama. Dalam dialog parlementer ini, wakil-wakil Indonesia dari berbagai agama

---

[17] Montgomery W. Watt, *Muslim-Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions* (London: Routledge, 1991), hlm. 144.

[18] Kinball, "Muslim-Christian Dialogue," hlm. 204.

mengambil bagian baik sebagai peserta atau sebagai penyaji makalah.

Kedua, dialog kelembagaan *(institutional dialogue)*, yakni dialog antara wakil-wakil institusi dari berbagai organisasi agama. Bentuk dialog ini dilaksanakan untuk mendiskusikan dan memecahkan persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi oleh komunitas agama yang berbeda. Selain itu, bentuk dialog ini juga berupaya mengembangkan komunikasi di antara wakil-wakil kelembagaan dari organisasi-organisasi berbagai agama. Dialog kelembagaan ini melibatkan majelis-majelis agama yang diakui oleh pemerintah, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).

Ketiga, dialog teologi *(theological dialogue)* yang formatnya antara lain berbentuk pertemuan-pertemuan, baik reguler maupun tidak reguler, untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Tema-tema yang pernah diangkat dalam dialog ini antara lain pemahaman kaum Muslimin dan Kristen tentang Tuhan masing-masing, sifat wahyu Ilahi, tanggung jawab manusia dalam hidup bermasyarakat. Jangkauan lebih luas dalam dialog model ini, misalnya makna tradisi keagamaan seseorang dalam konteks pluralisme keagamaan dapat dimasukkan dalam dialog teologis ini. Pada umumnya, dialog teologis ini dilakukan di kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan dialog antarumat beragama, seperti Institut Dian (Dialog Antar Iman), Paramadina, MADIA, dll.

Keempat, dialog dalam masyarakat *(dialogue in community)* dan dialog kehidupan *(dialogue of life)*. Pada umumnya, bentuk

dialog ini bertujuan untuk menggarap dan menyelesaikan hal-hal praktis dan aktual dalam kehidupan yang menjadi fokus perhatian bersama. Misalnya, hubungan yang lebih patut antara agama dan negara, hak-hak minoritas agama, kemiskinan, masalah-masalah yang timbul dari perkawinan antarumat beragama, pendekatan yang lebih pantas dalam penyebaran agama atau nilai-nilai agama dalam pendidikan. Bentuk-bentuk dialog seperti ini pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi agama yang bergerak di bidang dialog dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

Kelima, dialog kerohanian *(spiritual dialog)* yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Bentuk dialog spiritual melalui aspek esoteris agama seperti yang diusulkan oleh Schuon, Schimmel, Falaturi dan Sayyed Hoesein Nasr dalam buku-buku mereka. Bentuk dan format dialog seperti ini banyak diminati dan terasa lebih bisa diterima.

Menggarisbawahi pendapat-pendapat di atas, kita berkesimpulan bahwa agenda dialog antarumat beragama di Indonesia adalah penting untuk menghilangkan rasa saling curiga, rasa saling tidak percaya dan rasa saling antipati di kalangan para pemeluk agama-agama. Hasil-hasil dialog antarpemuka agama hendaknya disosialisasikan ke kalangan akar rumput (lapisan umat tingkat bawah) agar mereka ikut saling mengetahui dan saling memahami ajaran dan tradisi agama di luar agama yang mereka peluk. Dengan demikian, dialog diharapkan tidak saja tumbuh di kalangan atas (para elit agama) akan tetapi juga muncul dari lapaisan bawah (akar rumput). Dengan demikian pula, ke depan pilar-pilar kerukunan dan sendi-sendi keharmonisan antarpemeluk agama dapat dikembangkan secara lebih kuat dan lebih mantap. Kondisi ini sekaligus akan ikut memperkukuh sendi-sendi sosial

dan memperkuat integrasi nasional. Terciptanya situasi dan kondisi semacam ini sudah pasti akan membawa keyakinan kepada kita bahwa agama-agama pada hakikatnya menjadi salah satu unsur utama perekat kesatuan nasional atau merupakan daya dorong kekuatan integrasi nasional.

KEMENTERIAN AGAMA

Perekat Kerukunan, Penguat Kebangsaan

Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Ada lima agama yang secara institusional-administratif-finansial dikelola oleh Kemenag, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Itulah sebabnya, dalam struktur organisasi Kemenag, ada lima ditjen (direktorat jenderal) yang membawahi lima agama ini, yaitu Ditjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Protestan, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Budha. Sebagai lembaga negara/pemerintah, Kemenag didanai dari sumber APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang dialokasikan ke masing-masing ditjen secara proporsional sesuai dengan ruang lingkup tugas, bobot kerja dan jumlah umat yang dilayani di seluruh Indonesia.

Pengelolaan secara formal-institusional-administratif oleh Kemenag terhadap lima agama, sebagaimana dijelaskan di atas, tidak harus diartikan sebagai suatu bentuk pengakuan resmi Kemenag (pemerintah/negara) terhadap kelima agama tadi. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada agama yang diakui atau agama yang

tidak diakui di Indonesia. Bukan tugas Kemenag untuk mengakui atau tidak mengakui eksistensi agama-agama, apalagi mengakui ”kebenaran” ajaran (akidah dan ibadat) suatu agama. Legitimasi eksistensi atau keberadaan suatu agama dikembalikan kepada komunitas agama masing-masing. Itulah sebabnya, ketika Kong Hu Cu diklaim oleh penganutnya sebagai agama (baru) di Indonesia pada awal tahun 2000-an, Kemenag (pemerintah atau negara) bersikap netral. Kemenag (pemerintah atau negara) tidak menyatakan mengakui atau tidak mengakui Confusionisme (Kong Hu Cu) yang dinyatakan oleh para pemeluknya sebagai agama (baru) di Indonesia. Confusionisme di negeri asalnya (China) adalah bukan agama, tapi dipegangi sebagai ajaran filsafat dan moral.

Tugas Kemenag hanya sebatas membangun dan membina kerukunan antarumat beragama agar tidak terjadi pertikaian, pertentangan, konflik dan bentrokan antarumat beragama dan antaretnis. Akan halnya mengapa selama ini hanya lima agama yang dikelola secara formal-institusional-administratif, hal itu tampaknya sudah menjadi kebijakan awal sejak berdirinya republik ini. Ini tidak berarti pemerintah/negara bersikap diskriminatif terhadap agama-agama di luar lima agama itu. Pemerintah/negara tetap bersikap toleran dan membiarkan semua (komunitas) agama dan para penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME memraktikkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Agama-agama lokal atau kepercayaan-kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat seperti agama Kaharingan (Kalimantan Tengah) tetap mendapat tempat yang semestinya di negara ini. Negara, pemerintah dan Kemenag tidak bersikap diskriminatif.

Salah satu tugas yang diamanatkan oleh negara/pemerintah kepada Kemenag adalah melakukan

bimbingan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Kemenag tidak mengurus, apalagi mencampuri, masalah-masalah internal suatu agama seperti masalah akidah, ibadat dan pembinaan internal keimanan dan keberagamaan suatu komunitas agama. Kemenag menyerahkan sepenuhnya masalah-masalah internal agama tadi kepada masing-masing komunitas agama. Kemenag sama sekali tidak mengatur dan mengurus –apalagi mengintervensi– masalah-masalah internal suatu agama karena agama (sebagai doktrin/wahyu yang dipercayai berasal dari Tuhan Yang Maha Esa) terlalu suci, agung dan luhur untuk diintervensi oleh manusia atau lembaga negara. Agama yang bersifat Ilahiah dan transendental tidak (akan) mungkin dan tidak boleh dicampuri dan diintervensi oleh tangan-tangan manusia atau kekuasaaan duniawiah. Yang dilakukan oleh Kemenag –sesuai dengan visi dan misinya– menumbuhkan dan membina hubungan antarumat beragama agar menjadi (lebih) baik dan harmonis. Dengan kata lain, Kemenag bertugas sebatas melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama sehingga tercipta toleransi dan harmoni antarkomunitas agama di seluruh wilayah Tanah Air.

Kemenag dan Pembinaan Kerukunan

Sebagaimana dikatakan di atas, salah satu tugas pokok Kemenag adalah melakukan pembinaan hubungan antarumat beragama agar menjadi harmonis dan toleran. Ini berarti tugas dan misi Kemenag sangat bersentuhan dengan masalah-masalah yang sangat sensitif. Karena agama merupakan masalah kepercayaan dan keyakinan yang berakar kuat dalam jiwa, batin, perasaan dan kesadaran terdalam manusia. Sensitivitas agama sangat menyentuh lubuk terdalam dari kehidupan kerohanian

manusia. Ini sudah pasti merupakan tugas yang amat berat tetapi sangat mulai dan luhur bagi Kemenag. Dalam hubungan ini, misi dan tugas Kemenag dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, menumbuhkan dan mengembangkan kondisi dan situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama dan antaretnis. Itulah sebabnya dalam struktur Kemenag dibentuk Ditjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Protestan, dan Bimas Hindu-Budha yang bertugas melakukan bimbingan dan pembinaan ke dalam dan antarumat beragama.

Kedua, membina kerukunan antarumat beragama agar lebih hormonis dan lebih toleran ke depan. Kerukunan antarumat beragama sudah pasti akan dapat memperkuat kerukunan nasional dan integrasi bangsa. *Ketiga,* mencegah agar tidak terjadi pertikaian, pertentangan, konflik dan bentrokan antarumat beragama. Karena setiap pertikaian, pertentangan dan bentrokan akan menimbulkan disharmoni sosial dan hal ini akan mengganggu stabilitas nasional dan stabilitas sosial. *Keempat,* menjadi mediator apabila terjadi pertentangan, konflik dan bentrokan antarumat beragama/antaretnis untuk dapat segera ditengahi dan diseelesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. *Kelima,* menabur dan menyebarkan wawasan multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme sejalan dengan prinsip "bhinneka tunggal ika" dalam kerangka pembinaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sepanjang sejarah eksistensinya, Kemenag telah memberikan porsi perhatian yang sangat besar dalam memikul tanggung jawab, mengelola dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kiprah, aktivitas dan peranannya selama ini. Menteri Agama Kiai Muhammad Dachlan di tahun 1970-an membentuk suatu wadah yang disebut Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAB).

Wadah ini dimaksudkan sebagai forum konsultasi para pemimpin majelis-majelis dan organisasi-organisasi agama untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang timbul antarpemeluk agama. Dengan cara demikian, masalah-masalah krusial yang timbul dalam kaitannya dengan hubungan antarumat beragama diharapkan dapat ditemukan jalan keluarnya dan dapat diselesaikan secara baik, adil dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai.

Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali, pengganti Kiai Muhammad Dachlan, juga sangat menaruh perhatian terhadap pembinaan kerukunan antarumat beragama. Ketika diangkat menjadi menteri agama di tahun 1972, Mukti Ali menyerukan perlunya dilakukan dialog antarumat beragama secara intensif. Dalam berbagai kesempatan, melalui ceramah atau pidatonya, Mukti Ali selalu melontarkan gagasan untuk digalakkannya dialog antarumat beragama. Mukti Ali menjelaskan bahwa ada lima cara atau jalan untuk membangun kerukunan antarumat beragama.

Pertama, dengan jalan sinkritisme. Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkritisme berpendapat bahwa semua kelakuan harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudra yang satu. Aliran sinkritisme ini disebut pula Pantheisme, Pankosmisme, Universalisme, atau Teopanisme. Maksud dari istilah-istilah ini adalah bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua (pan) adalah alam (kosmos). Jalan sinkritisme ini, menurut Mukti Ali, tidak dapat diterima. Sebab dalam ajaran Islam, misalnya, Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhluk harus ada garis batas pemisah sehingga dengan

demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa orang itu berbakti dan mengabdi.

Kedua, dengan jalan rekonsepsi *(reconception)*. Cara ini ditempuh untuk dapat memenuhi rasa kebutuhan akan adanya satu agama dunia. Dengan demikian, kelak akan muncul suatu agama yang mengandung paduan unsur-unsur dari berbagai agama, misalnya berupa ajaran kasih dari agama Kristen, kemuliaan Allah dari agama Islam, perikemanusiaan dari ajaran Kong Hu Cu dan perenungan dari agama Hindu. Paham ini menekankan bahwa orang harus tetap menganut agamanya sendiri, akan tetapi ia harus memasukkan unsur-unsur dari agama-agama lain. Mukti Ali berpendapat, cara kedua ini pun tidak bisa diterima karena dengan menempuh cara ini agama tak ubahnya hanya me-rupakan produk pemikiran manusia semata. Pada hal, agama secara fundamental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya.

Ketiga, dengan jalan atau metode sintesis, yakni menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari agama-agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama akan tercipta dan terbina. Pendekatan paradigmatik dengan menggunakan cara sintesis ini, dalam pandangan Mukti Ali, juga tidak bisa diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa diciptakan karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputus begitu saja.

Keempat, dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama-agama orang lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama-agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang-orang lain memeluk agama-agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, para pemeluk agama-agama lain itu haruslah diganti dengan agama yang ia peluk. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup antarumat beragama dapat dicipta dan dikembangkan. Mukti Ali juga tidak dapat menerima pendekatan keempat ini karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu, menurut kodratnya, adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya dan cara hidup. Pluralitas kehidupan masyarakat, termasuk pluralitas dalam kehidupan beragama, sudah menjadi watak dan realitas yang melekat pada masya-rakat itu sendiri. Cara-cara penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup antarumat beragama, tetapi sebaliknya justeru intoleransi dan ketidakrukunan yang akan terjadi.

Kelima, dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbedaan *(agree in disagreement).* Gagasan ini menekankan bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui di antara agama yang satu dengan agama-agama lain-nya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling harga menghargai dan saling hormat menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok-kelompok penganut agama yang lain. Dalam visi Mukti Ali, pendekatan yang kelima inilah yang tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina toleransi

dan kerukunan hidup antarumat beragama, termasuk di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang majemuk. Setiap pemeluk agama hendaknya meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya itu. Menurut Mukti Ali, ini adalah suatu sikap yang wajar dan logis.

Keyakinan akan kebenaran terhadap agama yang dipeluknya ini tidak membuat dia bersikap ekslusif, akan tetapi justeru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di samping –tentu saja– persamaan-persamaan dengan agama yang dipeluknya dalam bidang ajaran kemasyarakatan dan keduniawian. Sikap seperti ini akan membawa kepada terciptanya sikap ″setuju dalam perbedaan″ yang sangat di-perlukan untuk membina dan mengembangkan paradigma toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Prinsip "setuju dalam perbedaan" dalam kehidupan antarumat beragama yang diserukan oleh Menteri agama Mukti Ali ini memiliki dampak positif sebagaimana terlihat dari semakin tumbuhnya pengertian dan pemahaman tentang perlunya saling mengakui hak hidup umat agama lain, kesediaan untuk hidup berdampingan antarumat beragama dan sikap saling toleran antarumat beragama di Tanah Air. Mukti Ali dapat dipandang sebagai menteri agama pertama yang meletakkan dasar-dasar strategis yang kuat dan lebih konsepsional bagi perlunya dialog antarumat beragama di Indonesia, karena melalui dialog itu saling pengertian dan kerja sama antarumat beragama akan dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan dengan baik.

Pengganti Mukti Ali adalah Alamsyah Ratu Perwiranegara yang menjabat sebagai menteri agama dari 1978-1983. Ia adalah seorang purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Darat, mantan Dubes Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan mantan Sekretaris Negara yang dipercayai oleh Presiden Soeharto ketika itu untuk

memimpin Kemenag. Sejauh menyangkut kebijakannya di bidang kerukunan, ia menggagas pelaksanaan trilogi kerukunan. Trilogi kerukunan ini bertumpu pada kerukunan internal dalam suatu komunitas agama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kebijakan Alamsyah dapat dipandang sukses karena dapat menghilangkat prasangka buruk, kecurigaan dan sekat-sekat eksklusivitas antarumat beragama, antarkelompok di kalangan internal suatu komunitas agama dan antara umat beragama (khususnya umat Islam) dengan Pemerintah.

Setelah Alamsyah, Munawir Sjadzali diangkat menjadi menteri agama selama dua kali masa jabatan (183-1993). Dalam kapasistasnya sebagai menteri agama, ia meyakinkan semua pemeluk agama bahwa konflik antarumat beragama di Indonesia tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena agama-agama yang secara berturut-turut datang ke Indonesia (seperti Hindu, Budha, Kristen dan Islam) tidak melalui jalan kekerasan senjata, peperangan dan pertumpahan darah. Dengan tidak adanya konflik dan perang agama di Indonesia, itu berarti suatu komunitas agama tertentu tidak merasa disisihkan, dilecehkan dan "dikalahkan" oleh kelompok agama lain. Itulah sebabnya, tidak akan terjadi pembalasan dendam atau serangan balik dari suatu komunitas agama tertentu terhadap suatu komunitas agama lain. Semua agama yang datang ke Indonesia melalui jalan damai. Dalam visi Munawir, kondisi demikian merupakan modal yang sangat besar bagi pembinaan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Pengganti Munawir Sjadzali adalah Tarmizi Taher yang menjabat sebagai menteri agama dari 1993-2002. Seperti para pendahulunya, Tarmizi sangat menaruh perhatian terhadap kerukunan antarumat beragama sebagai realisasi dari salah satu

kebijakannya. Pada masa jabatannya, sebuah buku berjudul "Bingkai Teologis Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia" diterbitkan. Buku ini berisi karangan-karangan tentang kerukunan antarumat beragama yang ditulis oleh para tokoh agama (seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha) dan menurunkan suatu tinjauan dari bebagai perspektif teologi agama-agama. Isi penting buku ini adalah suatu penekanan bahwa semua agama mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk membangun dan melaksanakan perdamaian dan kerukunan. Tak ada agama yang menganjurkan dan mengajarkan pada umatnya untuk melakukan konflik, kekerasan dan kebrutalan. Selain itu, untuk membina kerukuan antarumat beragama, Tarmizi Taher juga mendirikan beberapa lembaga yang dinamakan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) yang beroperasi di Medan, Yogyakarta dan Ambon.

Apa yang telah dilakukan oleh para menteri agama terdahulu dilakukan pula oleh para menteri agama sesudah mereka. Quraish Shihab, Malik Fajar, Tolhah Hasan dan Said Agil Husin Al-Munawar terus melanjutkan kebijakan-kebijakan para pendahulu mereka di bidang kerukunan antarumat bergama. Tolhah Hasan, misalnya, mendirikan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kemenag sebagai salah satu lembaga baru yang secara operasional bertugas untuk melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Jika terjadi pertentangan dan konflik antarumat beragama, PKUB segera turun tangan bersama pimpinan majelis agama yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik tadi. PKUB dibentuk untuk melengkapi suatu badan yang telah ada sebelumnya, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama (yang berada di Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama) yang bertugas melakukan penelitian di bidang hubungan antarumat beragama.

Pada periode Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar (2004), gedung Pusat Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama (berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat) berhasil diresmikan penggunaannya. Di gedung ini disediakan fasilitas (kantor dan perangkat lainnya) untuk para pimpinan majelis-majelis agama seperti MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi. Dengan demikian, para pemimpin dan tokoh agama-agama tadi dapat berkumpul, berkomunikasi, berkoordinasi, berkooperasi dan berbagi saran, pendapat dan pandangan yang sangat berharga bagi pelestarian pembinaan kerukunan antarumat beragama. Baik ada masalah maupun tidak ada masalah, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka di gedung itu serta berbagi pengalaman yang sangat berguna bagi pembinaan kerukunan antarumat beragama.

Said Agil Husin Al-Munawar digantikan oleh Muhammad Maftuh Basyuni sejak 20 Oktober 2004. Sebagai menteri agama yang baru, Maftuh Basyuni juga sangat menaruh perhatian terhadap pembinaan kerukunan antarumat beragama. Mengawali karirnya sebagai menteri agama, Maftuh Basyuni melakukan kunjungan ke semua majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi) untuk membina hubungan baik dengan majelis-majelis agama tadi dalam rangka meneguhkan komitmen bersama guna membina kerukunan antarumat beragama. Maftuh mendapat sambutan yang antusias dan hangat dari majelis-majelias agama tadi dan mendukung komitmen menteri agama untuk terus melanjutkan agenda kebangsaan bersama untuk membina kerukunan antarumat beragama.

Penabur Multikulturalisme

Keberadaan Kemenag yang, secara struktural institusional, merangkum enam agama sebagaimana digambarkan di atas sekaligus mencerminkan pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya multikulturalisme dan pluralisme. Kemenag tidak hanya mengelola kepentingan Islam (yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia), tetapi juga kepentingan Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang, secara historis yuridis, diakomodasi oleh pemerintah dalam bentuk pemberian anggaran belanja melalu APBN. Selain kepada kelima agama ini, pemerintah juga memberikan perhatian dan pelayanan kepada agama-agama lain dan aliran kepercayaan secara proporsional.

Dari struktur organisasi Kemenag (yang melibatkan Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) dapatlah diketahui bahwa multikulturalisme dan pluralisme itu telah menjiwai semangat dan eksistensi Kemenag itu sendiri. Pergaulan, komunikasi, koordinasi dan kooperasi antar-ditjen dan antarpemeluk agama yang ada di Kemenag (dari pusat sampai daerah) sekaligus menggambarkan pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya pemberlakuan prinsip-prinsip multikulturalisme dan pluralisme. Di Kemenag, program-program kerukunan antarumat bergama ditangani oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang ada di bawah Sekretariat Jenderal dan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan yang ada di Badan Litbang dan Diklat. Kedua Pusat ini telah banyak melaksanakan program-program kerukunan sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Kemenag terhadap masalah ini. Program-program yang telah dilaksanakan antara lain dapat disebut sebagai berikut.

Pertama, menyelenggarakan seminar dan diskusi dengan tema multikulturalisme, pluralisme dan kerukunan antarumat

beragama. Tokoh-tokoh lintas agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu) dan tokoh-tokoh masyarakat lain diundang dalam seminar dan diskusi ini untuk memaparkan pandangannya masing-masing tentang kerukuan antarumat bergama dari sudut pandang agamanya sendiri. Kelompok-kelompok komunitas agama yang hadir dalam seminar dan diskusi ini memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan keagamaan di luar agama yang mereka peluk sehingga terjadi proses pencerahan dan pendewasaan pribadi yang bermanfaat dalam membangun pergaulan dengan komunitas-komunitas agama lain. Diskusi dan seminar ini biasanya dilanjutkan dengan dialog dan tukar pikiran yang sangat diperlukan bagi pembinaan dan penguatan kerukunan antarumat beragama. Cara ini dapat dikategorikan sebagai realisasi dialog batin atau dialog antar iman (*interfaith dialogue*).

Kedua, menulis buku yang bertemakan multikulturalisme, pluralisme dan kerukunan antarumat beragama. Artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini biasanya berasal dari makalah-makalah yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam diskusi dan seminar tersebut. Buku-buku ini ada yang diterbitkan dalam satu seri dan diterbitkan dengan menggunakan dana proyek. Buku yang secara khusus diterbitkan untuk program ini antara lain adalah "Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia." Para kontributor dari penulis-penulias lintas agama memaparkan visinya dari perspektif teologinya masing-masing tentang pentingnya pembinaan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Cara ini dapat dikategorikan sebagai dialog karya atau dialog kehidupan *(dialogue of life).*

Ketiga, menyelenggarakan temu wicara dan loka karya *(workshop)* yang bertemakan multikulturalisme, pluralisme dan

kerukunan dengan mengundang pemuda-pemuda lintas agama, wartawan-wartawan lintas agama, pelajar-mahasiswa lintas agama, dan guru-guru/dosen-dosen lintas agama. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas wawasan mereka tentang kerukunan antarumat beragama dan sekaligus memperluas jaringan komunikasi kerukunan pada lapisan masyarakat yang lebih luas. Dengan cara ini, kerukunan tidak hanya terjadi pada tingkat elit agama, akan tetapi menyebar ke berbagai domain masyarakat sehingga kerukunan antarumat beragama dapat dirasakan dan dilaksanakan di berbagai lini kehidupan masyarakat. *Keempat,* melakukan penelitian tentang hubungan antarumat beragama dan hubungan antaretnis terutama di daerah-daerah konflik seperti Ambon, Poso dan Sambas. Hasil-hasil penelitian tadi digunakan oleh Menteri Agama sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka membina dan menata hubungan antaragama dan hubungan antaretnis yang lebih baik ke masa depan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, merekomendasikan agar pranata-pranata lokal dan kearifan-kearifan lokal hendaknya dipergunakan secara maksimal dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik antaretnis atau konflik-konflik yang bermotif keagamaan. Kemenag juga merekomendasikan agar pranata dan kearifan lokal tadi tetap dipelihara dan dikembangkan dalam rangka membina dan melestarikan hubungan antarumat beragama dan antaretnis.

Kelima, melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi dan Khonghucu) dengan tujuan utama untuk memromosikan multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme. Dengan visi dan misi yang sama, para pemimpin

majelis-majelis agama tadi menabur dan menebar multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme ke alam pikiran masyarakat di daerah-daerah yang mereka kunjungi. Dengan cara ini, multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme dapat lebih berkembang dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat lapisan bawah di berbagai daerah di Indonesia. *Keenam,* melakukan kunjungan bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama (MUI. PGI, KWI, PHDI dan Walubi) ke Universitas Al-Azhar (Kairo, Mesir), Vatikan (Roma, Italia), Bangkok (Thailand) dan New Delhi (India). Kunjungan ini dimaksudkan sebagai salah satu cara bagi para pejabat Kemenag dan para pemimpin agama-agama tadi untuk memperluas wawasan dan melakukan studi banding sexcara langsung ke pusat agama Islam, Katolik, Budha dan Hindu.

Dengan demikian, perspektif para pejabat Kemenag dan para tokoh lintas agama tadi tentang kerukunan antarumat beragama akan semakin luas dan hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pembinaan dan pelestarian kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Keadaan yang kondusif ini diharapkan dapat memperkuat sendi-sendi kerukunan antarumat beragama secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Tanah Air.

Penanganan dan Penyelesaian Konflik

Menyusul lahirnya Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998, konflik antaretnis yang berlatar belakang kesukuan dan keagamaan banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di sini hanya akan dibicarakan konflik Ambon dan konflik Poso yang menyangkut hubungan antara dua komunitas, yaitu Muslim dan Kristen. Sebab-sebab terjadinya konflik dapat dibaca di beberapa buku atau laporan peneltian yang ditulis oleh para peneliti dan

penulis yang mengkaji masalah tersebut. Fokus utama tulisan ini adalah hendak menjelaskan peranan Kemenag dalam menjalankan tugasnya menangani kedua konflik tadi. Dari penjelasan-penjelasan di muka, dapat diambil suatu pemahaman bahwa Kemenag telah melaksnakan misi dan tugasnya dalam membangun dan membina kerukunan antarumat beragama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, Kemenag tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sejauh menyangkut pembinaan hubungan antarumat beragama, Kemenag tidak mengenal lelah dalam melaksanakan misinya. Tetapi mengapa masih terjadi konflik Ambon dan Poso? Kemenag berkeyakinan bahwa tidak ada komunitas agama yang menginginkan terjadinya konflik (apalagi bentrokan berdarah) dengan kelompok agama lain. Karena tidak ada agama yang mengajarkan atau menyuruh umatnya untuk melakukan perusakan dan pembakaran terhadap rumah-rumah (tinggal dan ibadat) umat agama lain. Konflik Ambon dan konflik Poso adalah dua konflik yang besar, eksplosif dan destruktif yang eskalasi dan intensitasnya di luar jangkauan kemampuan Kemenag untuk melerai dan menghentikannya. Jangankan Kemenag, aparat keamanan dan pasukan tentara saja yang berjumlah ratusan masih memerlukan banyak waktu (berbulan-bulan) untuk melerai dan menghentikan kedua konflik ini.

Peranan Kemenag dalam menangani konflik Ambon dan konflik Poso dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama perlu dijelaskan bahwa konflik Ambon dan konflik Poso ditangani antara lain oleh Menko Kesra (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) Yusuf Kalla dengan melibatkan depertemen terkait (Kementerian Agama, Depdiknas, Depkes, Kimpraswil, dan Depsos). Atas insiatif Yusuf Kalla, suatu pertemuan antara para tokoh Muslim dan para pemimpin Kristen Poso diselenggarakan di

Malino (Sulawesi) pada bulan Desember 2001. Pertemuan yang digagas oleh Yusuf Kalla ini berhasil. Setelah melalui permusyawaratan yang panjang dan alot, wakil-wakil Muslim dan wakil-wakil Kristen Poso mencapai kesepakatan dengan menandatangani suatu naskah perjanjian yang isinya kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan rekonsiliasi. Kesepakatan ini terkenal dengan nama Kesepakatan Malino I.

Saya dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Litbang Agama Kementerian Agama mewakili Menteri Agama mengambil bagian dalam menyukseskan kesepakatan rekonsiliasi itu. Menyusul Kesepakatan Malino I ini, saya selalu mewakili Kementerian Agama melakukan kunjungan-kunjungan ke Poso bersama rombongan Menko Kesra dalam rangka menabur dan menyebarluaskan kedamaian dan perdamaian atas dasar prinsip multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme. Kami mengumandangkan pesan-pesan perdamaian, misalnya antara lain dengan membawa artis Neno Warisman untuk menabur perdamaian lewat lagu-lagu di muka publik Poso dan di suatu gereja di Tentena. Senjata-senjata tajam, rakitan dan api dari kedua belah pihak dikumpulkan, dibakar dan dimusnahkan. Perdamaian, rekonsiliasi, multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme terus dikumandangkan melalui pesan-pesan perdamaian dari para tokoh agama, para tokoh masyarakat dan para tokoh pemerintahan. Kementerian Agama mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk merehabilitasi dan membangun kembali rumah-rumah ibadat (masjid dan gereja) yang rusak dan dibakar akibat konflik yang destruktif itu.

Setelah sukses merekonsiliasi komunitas Muslim dan komunitas Kristen Poso melalui Kesepakatan Malino I, Menko Kesra Jusuf Kalla menggagas ide pertemuan Malino II dengan tujuan utama untuk merekonsiliasi komunitas Kristen dan komunitas

Muslim Ambon. Pada bulan Februari 2002, pertemuan Malino II diselenggarakan dan dihadiri oleh wakil-wakil Muslim dan wakil-wakil Kristen. Pembicaraan dan permusyawaratan antara para wakil komunitas Muslim dan para wakil komunitas Krsiten akhirnya membuahkan hasil setelah melalui suatu rangkaian pembicaraan yang hangat dan alot. Lahirlah Kesepakatan Malino II yang di dalamnya berisi butir-butir persetujuan penghentian konflik dan perlunya dibangun dan dilanggengkan rekonsiliasi antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen di Ambon. Serupa dengan peristiwa lahirnya Kesepakatan Malino I, Kementerian Agama mengambil bagian aktif dan konstruktif dalam proses mengantarkan lahirnya Kesepakatan Malino II ini.

Menyusul lahirnya Kesepakatan Malino II ini, Menko Kesra dengan melibatkan Kementerian Agama membawa sejumlah tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian di Ambon. Di antara tokoh-tokoh lintas agama yang dihadirkan adalah KH Hasyim Muzadi (NU), Goodwill Zubair (Muhammadiyah), dan beberapa tokoh agama dari PGI, KWI dan Walubi. Saya sendiri (dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal Kemenag) hadir dalam acara ini dan sempat juga menyampaikan pesan-pesan perdamaian di kantor Gubernur Ambon dan Gereja Maranata. Sebagai wakil dari Kemenag, saya menyampaikan pesan-pesan perdamaian agar komunitas Muslim dan komunitas Kristen Ambon hidup berdampingan secara damai, toleran dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme. Beberapa waktu sesudahnya, Menko Kesra dengan melibatkan Kementerian Agama menghadirkan pula KH Abdullah Gymnastiar (yang dikenal Aa Gym) untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian di hadapan dua komunitas, yaitu komunitas Muslim dan Kristen.

Pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh Aa Gym memiliki pengaruh yang dalam dan luas. Sama halnya dengan kasus Poso, Kemenag juga mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk merehabilitasi dan membangun kembali rumah-rumah ibadat (gereja dan masjid) yang rusak parah dan dibakar musnah akibat eskalasi dan intensitas konflik yang brutal dan destruktif antara Muslim dan Kristen. Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa Kemenag sangat menaruh perhatian dan kepedulian terhadap pemantapan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Kemenag merupakan representasi dan kepanjangan tangan pemerintah yang antara memikul tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan kerukunan antarumat beragama dan antaretnis di seluruh wilayah negara Indonesia.

Kemenag selalu dituntut untuk secara aktif dan konstruktif membina dan mengembangkan kerukunan antarumat bergama dan kerukunan antaretnis karena menyadari bahwa kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antaretnis akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penguatan sendi-sendi integrasi nasional dan pilar-pilar harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemenag, dengan segala kelebihan dan kekurangannya selama ini, telah memainkan peranan aktif dan konstruktif sebagai perekat dan penabur multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme.

PENTINGNYA WAWASAN MULTIKULTURAL BAGI PENGUATAN KERUKUNAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Pluralitas etnis dan agama merupakan kenyataan empirik yang secara kodrati keberadaannya tidak dapat disangkal dan dipungkiri oleh siapa pun di muka bumi ini. Begitu pun yang terjadi di Indonesia, yang secara nyata telah ditakdirkan menjadi bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, budaya dan agama. Bangsa Indonesia, yang tersebar mendiami ribuan pulau antara Sabang sampai Merauke dan berjumlah 200 juta lebih, telah menjadi sebuah masyarakat bangsa yang besar dan sangat majemuk. Memasuki millenium ketiga, bangsa Indonesia yang besar ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Selama beberapa tahun terakhir ini, terutama pasca Orde Baru telah terjadi konflik dan kerusuhan massa yang sering melibatkan kelompok etnis dan kalangan umat beragama. Situasi tragis seperti ini hampir melenyapkan sosok identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang ramah, lemah lembut dan toleran.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan massa, antara lain faktor ekonomi, politik, budaya dan

sumber daya alam, yang diikuti oleh muatan sentimen-sentimen etnik dan agama. Konflik-konflik yang sering terjadi dan melibatkan sentimen etnik dan agama tersebut belum dapat diatasi secara tuntas dalam kebijakan yang tepat sehingga tidak ada jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali pada waktu dan di tempat yang lain. Penyebab demikian diduga karena penanganan konflik yang dilakukan selama ini lebih cenderung bersifat top down dan dalam bentuk pendekatan keamanan serta penanganan fisik. Bukan penyelesaian yang bersifat kultural dengan menumbuhkan prakarsa dari masyarakat sendiri secara menyeluruh. Akibat pendekatan demikian, masyarakat terutama di tingkat bawah, tidak memiliki ketahanan yang memadai untuk menciptakan keamanan dan ketertibannya sendiri. Dan, mereka selalu rentan menghadapi situasi yang eksplosif-destruktif apabila kerawanan kondisi sosial tertentu mulai muncul di tengah-tengah mereka.

Keadaan demikian semakin diperparah oleh kebijakan masa lalu yang sentralistik sehingga cenderung mematikan fungsi lembaga-lembaga tradisional yang hidup dan berurat berakar di berbagai daerah. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga tradisional ini secara maksimal telah menyebabkan lumpuhnya potensi-potensi kepemimpinan dan kearifan-kearifan masyarakat lokal. Akibatnya, hampir seluruh mekanisme sosial pada masyarakat lapisan bawah menjadi mandul dan tidak berdaya dalam menangkal berbagai konflik yang muncul serta tidak mampu menjembatani kompleksitas persoalan masyarakat yang rawan konflik tadi. Sosok pluralitas masyarakat, sebenarnya, tidak selalu merupakan potensi konflik kalau dikelola secara bijak, santun dan arif. Ia juga berpotensi sebagai sumber energi kekuatan manakala potensi umat beragama tadi dapat dikelola dan dikembangkan ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan

bangsa. Hanya saja upaya-upaya pengembangan ke arah itu memerlukan kerja keras dan kemauan yang sungguh-sungguh serta kerjasama segenap unsur dan lapisan masyarakat, terutama untuk pengembangan ketahanan masyarakat lokal dan wawasan multikultural di seluruh wilayah Indonesia.

Fenomena Budaya Kekerasan

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat di Tanah Air selama ini baik yang berwujud penjarahan, perusakan, penganiayaan dan pembunuhan, dengan sasaran yang bervariasi, telah mengisyaratkan munculnya gejala ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan pemerintahan serta merebaknya budaya kekerasan yang sangat memprihatinkan. Fenomena perusakan markas-markas kepolisian dan kantor-kantor pemerintah dari tingkat lurah hingga bupati, DPRD, dan bahkan rumah-rumah ibadat, menunjukkan bahwa problem kerukunan antarumat beragama bukanlah masalah yang sederhana dan berdiri sendiri. Bagaimana pun agenda pembinaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama bukan sebuah barang jadi. Pembinaan toleransi dan harmoni antarumat beragama bukan merupakan suatu pekerjaan seperti orang membalikkan telapak tangan. Ia lebih merupakan sebuah proses kondisi dinamis-inovatif yang bergerak secara terus menerus, bahkan terkadang berjalan labil dalam proses sosial yang tidak kebal dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, agama, politik dan budaya masyarakat di mana pembinaan kerukunan itu berlangsung.

Muncul dan merebaknya budaya kekerasan, antara lain disebabkan kondisi kehidupan masyarakat kita yang sangat kompleks. Kehidupan rumah tangga, pendidikan di sekolah, serta

kondisi lingkungan perumahan yang tidak kondusif, bisa merupakan faktor yang besar pengaruhnya, langsung atau tidak, terhadap munculnya budaya kekerasan. Demikian pula kelangkaan buku-buku bacaan yang menunjang kerukunan di perpustakaan sekolah serta kurang dipentingkannya pendidikan seni untuk mengembangkan rasa estetika dan kegiatan olah raga untuk menyalurkan energi sekaligus untuk mengembangkan semangat sportivitas, bisa juga memberi andil bagi lahirnya budaya kekerasan. Krisis relasi sosial yang kita alami sekarang, selain menandakan telah mencederai kerukunan antarumat beragama yang telah lama kita bangun, juga menggambarkan masyarakat kita telah terpuruk dalam kehidupan yang diliputi oleh suasana saling curiga. Terdapat berbagai persepsi negatif satu sama lain di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, dalam kehidupan kita sebangsa menyimpan potensi disharmoni dan disintegrasi sosial. Masing-masing golongan merasa terancam eksistensinya oleh golongan lain. Berbagai kasus tragis telah menimbulkan trauma yang memerlukan waktu lama untuk dihilangkan dari memori bangsa kita. Selama tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dan tepat dari semua pihak untuk memulihkan rasa aman dan keyakinan akan terjalinnya kehidupan rukun dan damai, maka benih-benih permusuhan akan tetap hidup di sudut hati masyarakat kita yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi konflik sosial yang mengancam harmoni sosial dan integrasi nasional.

Tantangan dan Peluang

Terdapat beberapa peluang dan sekaligus tantangan untuk memperbaiki kondisi kerukunan, antara lain dapat

dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, adanya pluralitas etnik dan agama yang berkaitan dengan keyakinan tentang sesuatu yang *"ultimate."* Keyakinan tersebut diejawantahkan dalam keberagamaan, tidak hanya dalam wujud keyakinan teologis atau simbolisme ritual melainkan juga dalam wujud kegiatan yang, secara langsung atau tidak, berdampak pula pada tatanan kehidupan sosial. *Kedua,* adanya kesenjangan sosial ekonomi, politik, pendidikan dan hukum. Di samping kondisi rentan di atas, faktor kompleksitas kependudukan dan berkembangnya budaya global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial, seperti pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, dan perjudian, dapat pula menyebabkan kerawanan sosial. Hal tersebut bisa mendorong timbulnya konflik antar-warga dan kelompok masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menyeret pertentangan umat beragama.

Ketiga, adanya pengabaian bahkan perusakan terhadap potensi ekonomi, politik dan budaya masyarakat lokal oleh rezim kekuasaan selama puluhan tahun. Meskipun demikian, menurut penulis, masih ada beberapa peluang untuk memperbaiki kondisi kerukunan antarumat beragama, antara lain: Moralitas yang melandasi setiap pemeluk agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki, apalagi memupuk rasa dendam, mengambil hak orang lain, tidak peduli pada lingkungan dan tidak berbuat baik pada orang lain, termasuk orang yang bukan seagama. Masih ada pranata-pranata dan lembaga-lembaga masyarakat lokal yang menghidupkan berbagai adat, tradisi, norma dan nilai-nilai yang penuh dengan kearifan. Sikap sebagian masyarakat yang masih berpikiran jernih dan berakal sehat untuk menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai pluralitas agama. Misalnya, sikap suatu masyarakat agama yang rela dan bersedia menerima kehadiran kelompok agama lain atas

dasar prinsip hidup tidak saling mengganggu, sikap mengembangkan kerjasama melalui berbagai kegatan sosial yang secara simbolik menunjukkan kehidupan umat beragama yang rukun, dan sikap mencari serta merumuskan titik-titik temu pandangan agama-agama dalam rangka menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia.

Kebijakan Strategis

Pengembangan, pembinaan dan peningkatan kerukunan antarumat beragama ke depan sebaiknya ditempuh melalui pemilihan kebijakan strategis. Ada dua kebijakan strategis yang, menurut saya, masih relevan untuk terus dikembangkan ke depan dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. *Pertama,* pengembangan ketahanan mayarakat lokal yang meliputi: (1) Fungsionalisasi pranata lokal, seperti menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat dan tradisi setempat yang mendukung upaya kerukunan; (2) Menggali nilai-nilai dan norma-norma, kearifan-kearifan lokal yang kondusif yang menunjang kerukunan; (3) Mengembangkan lembaga-lembaga baru yang moderen, seperti pembentukan forum-forum kerukunan sampai ke tingkat *grass-root* (akar rumput/lapisan bawah); (4) Memperluas partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat dengan lebih mengembangkan pendekatan *bottom up* (dari bawah ke atas) melalui kegiatan-kegitan, seperti: dialog, tatap muka, sarasehan, pendataan, monitoring, kerjasama sosial dan sebagainya.

Kedua, kebijakan strategis selanjutnya adalah dengan cara mengembangan wawasan multikultural. Kebijakan strategis ini bisa dijabarkan ke dalam berbagai program kegiatan bersama sebagai berikut: (1) Memberikan pembekalan kepada para tokoh

dan pemimpin masyarakat lokal tentang wawasan dan pengetahuan yang bermuatan pendidikan multikultural dan pengetahuan dasar tentang ajaran agama lain serta kemampuan mengelola setiap konflik yang muncul di tengah masyarakat mereka sendiri agar tidak menimbulkan konflik terbuka; (2) Menyebarkan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kehidupan dan hubungan antarumat beragama; (3) Mencegah jangan sampai agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Implementasi Kegiatan

Kebijakan strategis seperti saya sebutkan di atas, bisa kita implementasikan dengan beragam kegiatan yang kondusif dalam rangka menciptakan kesepahaman bagi unsur-unsur masyarakat yang majemuk. Di antara berbagai kegiatan yang telah, sedang dan harus kita terus upayakan di Pusat Kerukunan Umat Beragama pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut. *Pertama,* dialog antarpemuka agama, elit politik dan kalangan pers. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama tentang bagaimana memberdayakan politik umat agar tidak terjadi radikalisme politik yang mengganggu harmoni umat dan merugikan kepentingan bangsa. *Kedua,* dialog antarcendekiawan agama. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran-pemikiran para cendekiawan dari berbagai agama dalam rangka memahami suatu persoalan sosial keagamaan yang sedang aktual di Tanah Air serta untuk memperoleh jalan keluar dari suatu masalah berdasarkan pengamatan ilmiah dan hasil kajian yang empirik.

Ketiga, dialog antarguru dan antar-dosen agama. Kegiatan ini selain untuk membangun pergaulan akrab antarguru dan antardosen yang berbeda agama, juga sebagai forum tukar informasi dalam rangka membangun persepsi dan interpretasi agama di kalangan anak didik yang lebih kondusif untuk hidup rukun dan damai. *Keempat,* dialog antarpenyiar agama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak penyiaran agama terhadap kerukunan serta membangun kesadaran para penyiar agama tentang perlunya visi baru penyiaran agama yang lebih mendorong masyarakat untuk hidup rukun, damai dan peduli satu sama lain. *Kelima,* dialog antarmahasiswa dan antartokoh organisasi keagamaan pemuda. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk mengakrabkan kalangan generasi muda yang berbeda etnik dan agama, juga untuk membangun kesadaran baru tentang ruginya menggunakan stigma negatif terhadap etnik dan agama tertentu, dan betapa untungnya hidup damai, banyak kawan tiada lawan, bersatu padu membangun bangsa yang lebih maju di masa depan.

Keenam, dialog kerjasama kemitraan antarpengusaha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi konflik yang disebabkan kecemburuan sosial ekonomi. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapakan dapat ditemukan jalan untuk mereduksi kesenjangan ekonomi umat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan para pengusaha. *Ketujuh,* temu wawasan antarpemuka agama pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara pemuka-pemuka agama pusat dan pemuka-pemuka agama daerah. Di samping itu, diharapkan pula dapat diperoleh informasi tentang potensi-potensi konflik dan disintegrasi di daerah-daerah. Sebaliknya, pemuka-pemuka agama daerah memperoleh informasi dan perluasan wawasan tentang

berbagai bentuk kebijakan kerukunan yang relevan dikembangkan untuk membangun harmoni, toleransi dan kerukunan pada sistuasi sekarang dan akan datang.

Kedelapan, peningkatan kerjasama sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya nyata dari kelompok-kelompok agama melalui majelis-majelis agama dan organisasi-organisasi keagamaan untuk mewujudkan kepedulian dalam rangka menghimpun bantuan dan santunan sosial secara bersama-sama dan menyalurkannya kepada kalangan yang sangat membutuhkan di berbagai daerah. *Kesembilan,* pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka ketahanan dan kerukunan masyarakat lokal. Melalui kegiatan ini dapat dibentuk forum atau wadah kerukunan daerah (tingkat kecamatan). Dengan terbentuknya forum bersama ini, maka potensi-potensi pemimpin lokal (pemuka-pemuka agama dan adat) sebagai inti dari anggota forum tadi, dapat didayagunakan untuk membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat bawah agar hidup lebih rukun dan damai. Dalam hubungan ini, mereka bisa berperan pula sebagai mediator masyarakat ketika terjadi suatu konflik di daerah setempat.

Kesepuluh, pelatihan manajemen konflik. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para praktisi dan tenaga-tenaga yang mampu mengelola konflik yang terjadi di berbagai daerah agar konflik tersebut dapat ditangani oleh masyarakat setempat sehingga konflik tadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka dan tidak menjalar ke daerah lain. *Kesebalas,* orientasi petugas penyuluh kerukunan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga penyuluh kerukunan yang handal dan mampu membangun serta mengembangkan wawasan kerukunan yang inklusif-humanis dan wawasan multikultural sesuai dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang.

Selain melalui sebelas kegiatan tersebut, program dan strategi pembinaan kerukunan antarumat beragama juga bisa terus digalakan melalui: (1) dialog antartokoh keagamaan wanita; (2) perumusan materi-materi kerukunan yang diharapkan dapat masuk dalam kurikulum atau materi pelajaran agama di sekolah; (3) mengembangkan model desa binaan kerukunan, serta kemah bersama antartokoh muda, antaretnik dan antaragama, khususnya dari daerah-daerah yang pernah dilanda konflik. Melalui sejumlah agenda dan program kegiatan, sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dibangun kembali kerukunan, keharmonisan, dan pergaulan bangsa yang akrab, terjalin rasa solidaritas dan persaudaraan yang inklusif serta terbentuk berbagai kerjasama sosial di kalangan komunitas-komunitas agama sehingga integrasi dan keutuhan bangsa akan lebih kuat di masa depan.

MULTIKULTURALISME AMERIKA SERIKAT: Sebuah Pembelajaran Sosiokultural

Amerika Serikat (AS), sebagai negara adidaya dewasa ini, mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam percaturan dunia internasional. Kekuatan militer dan politik AS yang sangat kuat membuat negara Paman Sam itu begitu disegani baik oleh kawan maupun oleh lawan. Peranan politik yang dimainkannya dalam pentas internasional sangat memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan-perkembangan dunia. Kebesaran dan kemajuan sains dan teknologi AS berkembang dengan cepat karena adanya iklim kreativitas dan riset dengan menggunakan peralatan-peralatan yang moderen dan canggih. Hasil-hasil teknologi AS yang super moderen dan canggih telah banyak dipakai dan digunakan oleh negara-negara berkembang dalam rangka menopang proses akselerasi modernisasi yang tengah dilakukan oleh negara-negara berkembang tersebut. Pendek kata, AS di mata dunia adalah negara yang serba moderen dan serba canggih. Keputusan-keputusan politik ataupun kebijakan-kebijakan nasional dan internasional yang diambil oleh para pembesar di Gedung Putih tidak saja mempunyai dampak di negara adikuasa itu sendiri akan tetapi juga memiliki pengaruh yang luas di dunia internasional.

Potret Kaum Muda Amerika

Terjadi semacam paradoks di kalangan kaum muda AS pada dekade 1980-an. Fenomena paradoksal ini terlihat dengan munculnya suatu gejala di kalangan kaum muda AS yang bersikap acuh tak acuh terhadap masalah-masalah politik. Ada perbedaan antara generasi muda AS tahun 1960-an dengan generasi muda AS tahun 1980-an. Perbedaan ini tentunya disebabkan oleh perbedaan sosial budaya dan politik yang melatarbelakangi eksistensi kedua generasi tersebut. Generasi muda AS tahun 1960-an banyak mengambil bagian dalam kancah kehidupan politik praktis.

Di tengah-tengah kecamuk Perang Vietnam, angkatan muda AS tahun 60-an banyak terlibat dalam gejolak-gejolak politik praktis. Mereka terlibat dalam aktivitas unjuk rasa dan gerakan protes massa. Mereka juga melakukan protes politik dan menentang keterlibatan AS dalam Perang Vietnam yang, menurut pemerintah AS, bertujuan untuk membendung ekspansi Komunisme. Anak-anak muda AS menyuarakan kampanye dan protes keras menentang berbagai kebijakan pemerintah AS yang mewajib militerkan angkatan mudanya untuk dikirim ke Perang Vietnam. Slogan kampanye dan protes keras yang mereka teriakkan pada waktu itu antara lain *"America: Love it or leave it"*, dan sebuah lagu Bob Dylan yang secara telak ditujukan kepada LBJ (baca: Lyndon B. Johnson, presiden AS pada waktu itu) yang berbunyi *"Heh, heh, LBJ, how many kids did you kill today?"* (He, he, LBJ, berapa banyak anak yang kau bunuh hari ini?).

Sementara pemerintah AS terus melakukan pendaftaran wajib militer bagi para pemudanya untuk dikirim ke Perang Vietnam, sementara itu pula mahasiswa-mahasiswa AS melakukan aksi demonstrasi dan mogok kuliah di kampus-kampus untuk menyatakan protes politik atas semakin jauhnya keterlibatan AS

dalam Perang Vietnam. Dengan suara lantang dan penuh pesan kemanusiaan, mereka meneriakkan slogan *"making love, not war"* (ciptakan perdamaian, bukan peperangan). Sementara itu pula, kaum muda AS yang menolak wajib militer ke perang Vietnam banyak yang minggat ke Kanada dan menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan mereka. Salah seorang yang membangkang dan menolak wajib militer ini adalah Muhammad Ali, petinju AS kulit hitam, yang sedang naik daun.

Berbeda dengan generasi muda AS tahun 1960-an sebagaimana diilustrasikan di atas, angkatan muda AS tahun 1980-an lebih bersikap diam dan tenang. Potret dan sosok diam kaum muda AS tahun 80-an terasa kentara dalam kehidupan politik. Sebagai contoh, ribut-ribut di seputar penjualan senjata AS kepada Iran dan perbaikan hubungan AS-Iran yang ditempuh oleh Presiden Ronald Reagan (banyak pejabat AS yang tidak setuju karena Iran dianggap negara yang berada di belakang kasus penyanderaan warga AS di Beirut), tidak menggugah hasrat kaum muda AS untuk mengambil bagian dalam persoalan-persoalan politik praktis. Kelihatannya kaum muda AS dalam dekade 80-an lebih pasif dan mereka lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan mereka atau dengan program-program studi yang mereka geluti. Hanya ada sedikit riak politik dari kaum muda AS ketika negara adikuasa itu melakukan serbuan terhadap Libya.

Kaum muda dan mahasiswa AS menempelkan pamflet-pamflet dan poster-poster yang menyatakan dukungan politik terhadap keputusan dan kebijakan yang telah ditempuh oleh Presiden Reagan. Kendatipun begitu, secara keseluruhan, kaum muda AS tahun 1980-an tampak lebih bersikap tenang dan memperlihatkan potret dan sosok diam. Benarkah kiranya apa yang diamati dan dicatat dalam "U.S. News and World Report" edisi 5 Juli 1982, yang menyiratkan sinyalemen bahwa "... *today's*

young are quite a-political, a mixture of sophistication and apathy..." (kaum muda AS dewasa ini sangat tak tertarik dengan masalah politik, suatu campuran antara kerumitan dan ketakacuhan).

Dari Liberal ke Konservatif

Gejala lain yang menandai kehidupan generasi muda AS tahun 1960-an adalah cara hidup yang sangat liberal. Gerakan-gerakan yang tampil seputar kurun waktu ini misalnya dapat dicatat dengan meluasnya gerakan "Women's Liberation" (Gerakan Kebebasan Wanita) dan Hippie Generation (Generasi Hippie). Kelompok terakhir ini lebih suka menamakan diri mereka *"The Flower Children."* Rambut gondrong, memakai sandal, pakaian tidak rapi dan perilaku eksentrik adalah merupakan sebagian dari gambaran luar cara hidup hippie. Kurun ini juga menyaksikan menciutnya sebagian orang AS untuk kawin dan mempunyai anak. Kebebasan dan kemandirian merupakan karakteristik dan ciri utama yang secara dominan mewarnai cara hidup orang Amerika sebagaimana tercetus dalam gerakan-gerakan yang mereka lancarkan. Tampak jelas bahwa gerakan-gerakan kebebasan wanita telah mempunyai efek pada perubahan sosial, dan perubahan sosial ini telah memiliki pengaruh pula pada perubahan bahasa. Beberapa kata seperti *policeman, fireman, congressman, mailman dan chairman,* tidak disetujui dan ditentang penggunaannya oleh kaum wanita AS karena tidak mencerminkan konotasi kesamaan dan persamaan derajat. Bahkan beberapa tokoh dan aktivis feminis secara terang-terangan mengubah kata *"history"* menjadi *"herstory."*

Tak kurang dari Gloria Steinem, seorang aktivis feminis yang terkenal, secara terbuka menyatakan bahwa salah satu kekuatan bahasa Inggris adalah bahwa ia dapat diubah

sebagaimana manusia itu sendiri mengalami perubahan. Gerakan-gerakan ini ada hasilnya juga, antara lain dewasa ini orang-orang AS sering menggunakan kata *"firefighter"* sebagai ganti yang netral dari kata *"fireman,"* kata *"chairperson"* sebagai ganti dari kata *"chairman,"* kata *"postcarrier"* sebagai ganti dari *"postman,"* dsb. Penggantian dan perubahan kata-kata demikian, menurut para aktivis feminis, menghilangkan bias gender dan lebih mencerminkan kesetaraan gender *(gender equity*).

Berbeda dengan situasi liberal pada kurun waktu 1960-an, dewasa ini AS, terutama sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan penggantinya Presiden George Bush, mengalami dan menikmati kembali situasi kehidupan konservatif. Orang-orang AS dewasa ini menoleh kembali kepada pentingnya pembinaan keluarga, memandang famili sebagai suatu unit kehidupan yang sangat fundamental untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral, dan menguatnya hasrat di kalangan mereka untuk hidup dalam rumah tangga perkawinan dan mempunyai anak, suatu hal yang pada masa lampau di kurun waktu 1980-an pernah dikesampingkan. Presiden Ronald Reagan saat itu menyampaikan pesannya kepada seluruh bangsa Amerika dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Natal agar tiap-tiap keluarga AS berkumpul bersama anak-anak mereka seraya mengingatkan bahwa keluarga merupakan basis dan unit yang sangat fundamental dalam membina dan melestarikan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan dan tradisi bangsa AS. Tipe dan gaya kepemimpinan Reagan (dan juga Bush) yang konservatif agaknya banyak mendapat simpati di kalangan orang-orang AS. Perhatian Reagan tidak saja tertuju kepada masalah-masalah politik dan kenegaraan, akan tetapi juga tertuju kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan secara luas. Reagan mengarahkan pula

perhatiannya untuk mencegah penyalahgunaan *drugs* seperti marijuana dan kokain.

Reagan berkampanye dan memperingatkan anak-anak muda AS dengan ucapannya yang singkat, padat dan tepat *"just say no to drugs"* (katakan tidak pada narkoba). Perhatian Reagan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat terlarang ini juga menjadi fokus perhatian penggantinya, yaitu Presiden George Bush. Tipe dan gaya kepemimpinan Reagan dan Bush, yang berasal dan Partai Republik ini, membawa AS ke dalam situasi kehidupan yang bercorak konservatif yang berbeda dengan kehidupan liberal Amerika dalam kurun waktu 1960-an.

Kesetaraan Ras

Fenomena sosial lain yang menarik dikomentari adalah dewasa ini AS menyaksikan hubungan yang baik antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih. Terciptanya hubungan yang membaik antara masyarakat kulit hitam dengan masyarakat kulit putih dalam masyarakat AS itu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Setelah mengalami masa suram perbudakan yang panjang pada masa yang lampau, nasib orang-orang kulit hitam lambat laun mengalami perbaikan. Sampai dengan tahun 1960-an, di negara-negara bagian di kawasan selatan negara AS, praktik-praktik diskriminasi dan segregasi masih diberlakukan kepada masyarakat kulit hitam. Ada restoran, sekolah, toilet, dan tempat-tempat khusus tersendiri yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang kulit hitam yang terpisah sama sekali dengan fasilitas-fasilitas umum yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat kulit putih.

Dalam perkembangan selanjutnya, timbulah kesadaran baru di kalangan orang-orang kulit putih sendiri untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan, diskriminasi dan segregasi karena praktik-praktik demikian tidak sesuai sama sekali dengan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keadilan dan perikemanusiaan (HAM). Tokoh seperti Abraham Lincoln merupakan figur penting yang berjuang bagi terhapusnya praktik-praktik diskriminasi dan perbudakan semacam itu. Sementara banyak pula tokoh-tokoh masyarakat hitam yang bangkit dan berjuang menuntut diakhirinya segala bentuk diskriminasi rasial atas orang-orang kulit hitam. Tokoh seperti Martin Luther King, Jr adalah tokoh yang dipandang sangat militan dalam memperjuangkan hapusnya diskriminasi rasial atas masyarakat kulit hitam di AS.

Setelah kurun waktu 1960-an, orang-orang kulit hitam di seluruh AS sudah dapat memasuki universitas-universitas dan sekolah-sekolah, bekerja di berbagai restoran, bank-bank, rumah sakit-rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintah serta swasta, bersama-sama dengan orang-orang kulit putih. Sejak saat itu, era baru telah menyingsing dalam lembaran sejarah AS sebagai suatu bangsa yang sering menyuarakan penegakan demokrasi dan HAM. Duka nestapa dan penderitaan panjang masa lampau yang dialami oleh masyarakat kulit hitam sebagai akibat praktik-praktik perbudakan, diskriminasi dan segregasi itu sudah lama terlupakan terutama di kalangan generasi baru AS.

Dewasa ini, masyarakat kulit hitam AS tidak lagi disebut sebagai orang-orang "Negro," tetapi disebut "*Black American.*" Sebutan dan penamaan ini merefleksikan suatu proses terwujudnya integrasi sosial dan integrasi nasional dalam kehidupan AS sebagai suatu bangsa. Proses ini dibarengi oleh semakin membaiknya hubungan masyarakat kulit putih dengan

masyarakat kulit hitam dalam kehidupan masyarakat AS. Tidak jarang terjadi perkawinan antara pria kulit putih dengan wanita kulit hitam atau sebaliknya, suatu hal yang tidak terjadi pada masa-masa yang lampau. Seorang ahli sejarah sosial dan presiden Bard College, Leon Botstein, mengamati situasi hubungan dan interaksi yang membaik antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih ini dengan mengatakan, *"...we have increased the mutual acceptence and tolerance of blacks and whites, and a generation of young has grown up in a world where there is deep-seated recognition that the color line is not only an illegal but reprehensible basis of judgement."* (kita telah meningkatkan sikap saling menerima dan saling toleransi antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih, dan suatu generasi muda telah tumbuh dalam suatu dunia di mana terdapat pengakuan yang mendalam bahwa perbedaan kulit tidak saja illegal tetapi merupakan suatu dasar sangkaan dan penilaian yang patut dicela). Pengamatan Leon Botstein, yang dimuat sebagai hasil wawancara dalam majalah U.S.News and World Report, edisi 5 Juli 1982, memang merefleksikan sosok kenyataan-kenyataan sosio-kultural yang hidup di tengah-tengah masyarakat AS dewasa ini. Situasi ini tentunya sangat penting dan strategis bagi terciptanya dan terbinanya integrasi sosial dan integrasi nasional yang memperkuat pluralitas kehidupan bangsa Amerika.

Keragaman dalam Kesatuan

AS sebagai negara adikuasa masih menyiratkan fenomena-fenomena budaya lain yang menarik. AS sebagai negara yang didatangi banyak imigran dari mancanegara menyimpan panorama kemajemukan, keragaman dan pluralitas nilai yang berkembang dan mengakar hidup di dalamnya. Profesor Saltzman

dari Pusat Pengkajian Kebudayaan pada Universitas Columbia, New York, menyimpulkan bahwa *"America is the totality of people who live here"* (Amerika adalah keseluruhan masyarakat yang hidup di sini). Bahkan beliau dalam ceramahnya yang berjudul *"American Arts and Values"* mengatakan bahwa sulit untuk menemukan nilai-nilai asli Amerika karena keragaman dan pluralitas masyarakat yang tinggal di dalamnya membawa dan memiliki nilai-nilai kultural etnis sendiri-sendiri.

Keragaman dan pluralitas masyarakat berikut nilai-nilai yang dianutnya mempertegas AS sebagai negara para imigran. Dalam sejarah awal berdirinya negara AS, banyak imigran dari Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, India, Cina, dsb., yang berdatangan ke Amerika untuk mencari sukses, keberuntungan dan kebahagiaan di negeri Paman Sam yang dijuluki sebagai *"land of opportunity"* itu. Dalam proses perkembangan selanjutnya, para imigran tadi menjadi bagian integral dari bangsa Amerika yang sampai saat ini masih tetap memelihara dan mempertahankan serta melestarikan kultur etnisnya masing-masing. Bahasa, tradisi, cara hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang berasal atau dibawa dari tanah asal leluhur tetap mereka pelihara dengan cara me-wariskannya kepada generasi baru mereka yang lahir di AS.

Di New York, misalnya, komunitas Yahudi-Amerika tetap mempertahankan dan melestarikan adat istiadat, tradisi, bahasa dan bahkan agama mereka di tengah-tengah kelompok-kelompok etnis lainnya. Dalam realitas kehidupan sehari-hari di New York, orang sudah terbiasa menyaksikan dan mendengarkan penggunaan bahasa Spanyol di toko, restoran, stasiun subway, dan tempat-tempat umum lainnya. Petunjuk-petunjuk pada dinding-dinding kereta api bawah tanah selain ditulis dalam bahasa Inggris juga ditulis daham bahasa Spanyol. Begitu juga di China Town, pusat kelompok etnis Cina bertempat tinggal, bahasa

dan tradisi budaya Cina dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Papan-papan nama pada toko-toko mereka, mereka tulis dalam bahasa Cina dengan menggunakan huruf-huruf Cina yang besar-besar kemudian di bawahnya mereka tulis dalam bahasa Inggris.

Di tengah-tengah keragaman dan pluralitas masyarakat AS dengan berbagai nilai-nilai yang dilestarikannya, ternyata bahasa Inggris belum merupakan bahasa resmi, walaupun bahasa tersebut dipakai untuk menuliskan Konstitusi Amerika. Memang sudah ada beberapa negara bagian (beberapa waktu yang lalu California) yang mengesahkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Namun masih belum semua negara bagian di AS yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Dari fenomena sosial budaya yang penuh dengan pernik-pernik mosaik ini, sosok kebesaran Amerika dapat dilihat dari keragaman nilai, tradisi, paham, seni dan kultur. Keragaman dan pluralitas ini diikat oleh perasaan kesatuan sebagai bangsa Amerika. Keragaman dalam kesatuan dan kesatuan dalam keragaman *(unity in diversity)* inilah yang barangkali menjadi ciri khas kehidupan bangsa AS. Dengan kata lain, dilihat dari perspektif sosio-kultural, kebesaran AS terletak pada interaksi dialektis-dinamis antarindividu dan antarkelompok etnis yang hidup di negara itu.

BAGIAN DUA

Mengurai Isu-isu Konflik dan Perdamaian

STOP BUDAYA KEKERASAN

Lewis Mumford, pengarang buku *The Condition of Man,* menulis: *"Today every human being is living through an apocalypse of violence ... Now, for the first time in human history there is no spot on earth where the innocent man may find refuge ... Something else has been disclosed to our unwary eyes: the rottenness of our civilization itself. If our civilization should perish, this will come about because it was not good enough to survive."* Artinya: Dewasa ini setiap manusia menjalani hidupnya sepanjang bimbingan kekerasan... Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, tidak ada lagi tempat di muka bumi ini untuk berlindung bagi manusia yang tidak berdosa... Sesuatu yang lain telah ditunjukkan di muka mata kita yang nyalang: kebusukan peradaban kita sendiri. Apabila peradaban kita hancur, ini disebabkan peradaban itu sendiri tidak cukup baik untuk mampu bertahan.

Lewis Mumford secara cermat mengamati situasi di atas dalam konteks budaya kekerasan *(culture of violence)* dalam kehidupan masyarakat Barat. Akan tetapi, apa yang diobservasi secara akurat oleh Mumford itu tidak jauh berbeda dengan keadaan di Tanah Air kita terutama dalam kurun waktu terakhir ini.

Budaya kekerasan, bentrokan, gegeran, tawuran, anarkisme, brutalisme, keberingasan, dan amuk massa terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Budaya kekerasan seperti sudah menjadi peristiwa biasa yang hampir setiap hari menggejala dalam kehidupan masyarakat kita. Banyak orang di Indonesia, seperti dikatakan oleh Lewis Mumford, menjalani hidup mereka sepanjang naluri dan nafsu kekerasan. Rasa aman dalam masyarakat menjadi terancam, sampai-sampai orang yang tidak berdosa sekali pun telah menjadi korban akibat tindakan-tindakan kekerasan tadi.

Kekerasan dan Keberingasan

Akar masalah konflik dan kekerasan antarkelompok masyarakat atau antarwarga memiliki latar belakang yang beragam. Bisa berpangkal dari perselisihan pribadi antara dua orang dari etnis yang berbeda, bisa karena faktor sosial budaya, politis, ideologis, dan kecemburuan ekonomi. Etnis setempat terlibat konflik dengan etnis pendatang. Etnis setempat merasa cemburu secara sosial ekonomi terhadap etnis pendatang yang secara sosial ekonomi lebih baik. Konflik sosial dan horisontal menjadi membesar, meluas, memanas, dan mengeras karena melibatkan sentimen kesukuan, ras, politis, ideologis, dan agama. Karena faktor etnis, politis, ideologis, dan agama inilah yang menjadi simbol dan identitas pemersatu, pengikat, dan perekat kelompok-kelompok masyarakat itu. Jika sentimen kesukuan, politis, ideologis, dan agama sudah masuk dalam suatu konflik sosial, maka konflik tadi menjadi lebih membara, eksplosif, masif, dan eskalatif. Di situ anarkisme, brutalisme, keberingasan dan amuk massa menajdi sangat dominan dalam konflik sosial tadi.

Gelombang konflik antaretnis di banyak daerah di Indoensia terjadi sejak 1998 dan beberapa tahun sesudahnya.

Eskalasi konflik antaretnis pada kurun waktu itu dapat dicatat antara lain terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Samarinda, dan Sambas. Konflik-konflik tadi melibatkan kekerasan, keberingasan, anarkisme, brutalisme dan amuk massa yang eksplosif dan masif dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dan kekerasan antaretnis di Ambon dan Poso, misalnya, diwarnai dengan pembakaran rumah-rumah ibadat dari masing-masing pihak yang terlibat konflik. Kesucian, keagungan dan kehormatan rumah-rumah ibadat tidak digubris oleh masing-masing pihak yang berseteru. Konflik Poso dan Ambon berakhir setelah ditanda tanganinya piagam perdamaian antara kedua belah pihak di Malino.

Konflik yang bermotif politis juga sering terjadi di banyak daerah dewasa ini. Misalnya, kelompok pendukung calon bupati (cabub) yang kalah dalam pemilukada mengamuk dan main hakim sendiri. Mereka menyerang para pendukung cabup yang menang. Tidak hanya itu, mereka membakar mobil, kantor dan fasilitas umum yang ada di daerah itu. Ini dapat dilihat misalnya pada pasca pemilukada di Sidoarjo dan Bima. Perasaan dendam, geram, marah, berang, beringas dan brutal diletupakan semuanya oleh kelompok pendukung cabub yang kalah itu dengan cara-cara main hakim sendiri. Konflik juga terjadi antarpelajar dan antarmahasiswa. Di Universitas Makassar, misalnya, dua kubu mahasiswa bentrok, saling serang dan melakukan tindakan kekerasan. Mahasiswa yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa di masa depan karena kebolehan visi akademis dan penalaran ilmiahnya, tapi masih juga terlibat adu otot dan baku hantam. Ajang kekerasan dan keberingasan belum juga usai. Para pendukung tim sepak bola yang kalah mengamuk dan menyerang para pendukung tim sepak bola yang menang. Mereka merusak dan menghancurkan fasilitas umum seraya meletupkan perasaan

kecewa dan kegeraman mereka dengan cara-cara anarkis dan brutal menyusul kekalahan tim sepak bola kesayangan mereka.

Ledakan kekerasan antarkelompok masyarakat masih terus membara. Dapat disebut antara lain kasus tanah makam Embah Priuk, peristiwa Tambora, insiden Buol, dan terakhir bentrokan di Tarakan. Kekerasan antaretnis di Tarakan, Kaltim, berasal dari masalah pribadi antara dua orang dari etnis yang berbeda. Tewasnya seseorang dari etnis tertentu memicu konflik semakin luas, panas dan beringas. Pihak etnis yang anggota sukunya terbunuh melakukan perlawanan dan pembalasan. Api konflik pun semakin tersulut dan memijar. Lima orang tewas. Terjadi pembakaran, pengusiran dan pengungsian. Kaum perempuan, orang-orang tua dan anak-anak dalam jumlah ribuan mengungsi dan ditampung di Mapolres dan Mako TNI Tarakan. Saat artikel ini ditulis, situasi masih tegang dan mencekam. Toko-toko tutup. Akibatnya, bahan makanan terutama untuk para pengungsi sulit diperoleh. Tak kurang dari 2000 personil polisi dikerahkan untuk melerai konflik dan menegakkan kembali ketertiban dan keamanan di Tarakan. Kekerasan antaretnis di Tarakan diharapkan dapat segera diakhiri agar kehidupan di sana segera normal kembali.

Mencegah Pembusukan Peradaban

Serangkaian gelombang kekerasan yang disebutkan di atas telah banyak merenggut jiwa orang-orang yang sama sekali tidak bersalah dan tidak berdosa. Rasa aman dalam kehidupan masyarakat benar-benar telah terganggu dan bahkan terancam secara serius. Persis, seperti dikatakan oleh Lewis Mumford, tak ada lagi tempat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak berdosa. Pada batas tertentu, itu semua menunjukkan proses pembusukan nilai-nilai peradaban kita. Dengan perasaan

pesimistik barangkali kita akan berucap seperti Mumford: apabila peradaban kita hancur, itu pertanda peradaban kita tidak cukup baik untuk bertahan.

Menyimak berbagai gelombang konflik, kekerasan, keberingasan, dan brutalitas yang mudah terjadi dalam masyarakat, kita lantas bertanya: apa yang salah dengan sistem pendidikan dan peradaban kita? Apa yang keliru dengan sendi-sendi bangunan kebangsaan kita? Pandangan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ramah, suka senyum, dan penuh bertenggang rasa, harus dipertanyakan kembali. Pandangan ini sudah tidak sepenuhnya berlaku bagi masyarakat kita, paling tidak pada saat sekarang ini di mana kekerasan, keberingasan, dan brutalitas sering terjadi. Sedang 'sakitkah' bangsa ini? Mengapa bangsa ini bisa mengalami penyakit mental demikian? Kapankah kita sembuh dari penyakit ini? Kapankah kekerasan tidak lagi 'melukai' republik ini?

Perasaan aman dan bebas dari rasa takut adalah merupakan bagian integral dari HAM yang sangat mendasar, fundamental dan hakiki dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sudah seharusnya perasaan aman dan bebas dari rasa takut terhadap segala bentuk pelanggaran HAM dan segala bentuk kekerasan ditegakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang multietnik dan multiagama ini. Seluruh aparat keamanan dan komponen masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab untuk saling memberikan jaminan rasa aman sehingga kita terbebas dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM itu. Dengan demikian, proses pembusukan peradaban dapat kita cegah dan kita kembali menjadi bangsa yang beradab, berkeadaban dan berperadaban dalam arti seutuhnya dan sebenar-benarnya.

MEMBERDAYAKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENCEGAH KONFLIK KOMUNAL

Pluralitas etnis dan kemajemukan agama merupakan kenyataan empirik yang secara kodrati keberadaannya tidak dapat disangkal dan dipungkiri oleh siapa pun di muka bumi ini. Begitu pun keadaan riil yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia telah ditakdirkan menjadi bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, seni, budaya dan agama. Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang antara Sabang sampai Merauke dan berpenduduk 240 juta, adalah negara besar dengan penduduk yang sangat majemuk. Memasuki millenium ketiga, bangsa Indonesia yang besar ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Selama beberapa tahun terakhir ini, terutama pasca Orde Baru, telah terjadi berbagai konflik dan kerusuhan massa yang sering melibatkan kelompok etnis dan kalangan umat beragama. Situasi tragis seperti ini hampir melenyapkan sosok identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang ramah, lemah lembut dan toleran.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan massa, antara lain faktor ekonomi, politik, budaya dan

sumber daya alam, yang diikuti oleh muatan sentimen-sentimen etnik dan agama. Konflik-konflik yang sering terjadi dan melibatkan sentimen etnik dan agama tersebut belum dapat diatasi secara tuntas sehingga tidak ada jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali pada waktu dan di tempat yang lain. Penyebab demikian diduga karena penanganan konflik yang dilakukan selama ini lebih cenderung bersifat *top down* dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan *(security approach),* bukan penyelesaian yang bersifat kultural dengan menumbuhkan prakarsa dari masyarakat sendiri secara menyeluruh. Akibat pendekatan demikian, masyarakat terutama di tingkat bawah, tidak memiliki ketahanan yang memadai untuk menciptakan keamanan dan ketertibannya sendiri. Mereka selalu rentan menghadapi situasi yang eksplosif-destruktif apabila kerawanan kondisi sosial tertentu mulai muncul di tengah-tengah mereka.

Keadaan demikian semakin diperparah oleh kebijakan masa lalu (rezim Orde Baru) yang sentralistik sehingga cenderung mematikan fungsi lembaga-lembaga tradisional yang hidup dan berurat berakar di berbagai daerah. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga tradisional ini secara maksimal telah menyebabkan lumpuhnya potensi-potensi kepemimpinan dan kearifan-kearifan masyarakat lokal. Akibatnya, hampir seluruh mekanisme sosial pada masyarakat lapisan bawah menjadi mandul dan tidak berdaya dalam menangkal berbagai konflik yang muncul serta tidak mampu menjembatani kompleksitas persoalan masyarakat yang rawan konflik tadi. Sosok pluralitas masyarakat, sebenarnya, tidak selalu merupakan potensi konflik kalau dikelola secara bijak, santun dan arif. Ia juga berpotensi sebagai sumber energi kekuatan manakala potensi masyarakat pada umumnya dan umat beragama pada khususnya dapat dikelola dan dikembangkan ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya saja

upaya-upaya pengembangan ke arah itu memerlukan kerja keras dan kemauan yang sungguh-sungguh serta kerjasama segenap unsur dan lapisan masyarakat, terutama untuk pengembangan ketahanan masyarakat lokal dan wawasan multikultural di seluruh wilayah Indonesia.

Fenomena Budaya Kekerasan

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi secara beruntun seperti di Ambon, Poso, Sampit, Kualakapuas dan di berbagai tempat lainnya di Tanah Air yang mengakibatkan kerusakan, penganiayaan dan pembunuhan, dengan sasaran yang bervariasi, telah mengisyaratkan munculnya gejala ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat keamanan dan pemerintahan. Aparat keamanan dan pemerintah lamban dan tidak segera bertindak menangani berbagai kerusuhan dan konflik tadi. Akibatnya, budaya kekerasan terjadi secara eksplosif-eskalatif dengan tingkat brutalitas yang sungguh sangat memprihatinkan. Fenomena perusakan markas-markas kepolisian dan kantor-kantor pemerintah dari tingkat lurah hingga bupati, DPRD, dan bahkan rumah-rumah ibadat, menunjukkan bahwa problema kerukunan antarumat beragama bukanlah masalah yang sederhana dan berdiri sendiri.

Bagaimana pun agenda pembinaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama bukan sebuah barang jadi. Pembinaan toleransi dan harmoni antarumat beragama bukan merupakan suatu pekerjaan seperti orang membalikkan telapak tangan. Ia lebih merupakan sebuah proses kondisi dinamis-inovatif yang bergerak secara terus menerus, bahkan terkadang berjalan labil dalam proses sosial yang tidak kebal dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, agama, politik dan budaya masyarakat di mana pembinaan kerukunan itu berlangsung. Muncul dan

merebaknya budaya kekerasan *(culture of violence),* antara lain disebabkan oleh kondisi kehidupan masyarakat kita yang sangat kompleks. Kehidupan rumah tangga, pendidikan di sekolah, serta kondisi lingkungan perumahan yang tidak kondusif, bisa merupakan faktor yang besar pengaruhnya, langsung atau tidak, terhadap munculnya budaya kekerasan. Demikian pula kelangkaan buku-buku bacaan yang menunjang kerukunan di perpustakaan sekolah serta kurang dipentingkannya pendidikan seni untuk mengembangkan rasa estetika dan kegiatan olah raga untuk menyalurkan energi sekaligus untuk mengembangkan semangat sportivitas, bisa juga memberi andil bagi lahirnya budaya kekerasan.

Krisis relasi sosial yang kita alami sekarang, selain menandakan telah mencederai kerukunan antarumat beragama yang telah lama kita bangun, juga menggambarkan masyarakat kita telah terpuruk dalam kehidupan yang diliputi oleh suasana saling curiga. Terdapat berbagai persepsi negatif satu sama lain di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, dalam kehidupan kita sebangsa menyimpan potensi disharmoni dan disintegrasi sosial. Masing-masing golongan merasa terancam eksistensinya oleh golongan lain. Berbagai kasus tragis telah menimbulkan trauma yang memerlukan waktu lama untuk dihilangkan dari memori bangsa kita. Selama tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dan tepat dari semua pihak untuk memulihkan rasa aman dan keyakinan akan terjalinnya kehidupan rukun dan damai, maka benih-benih permusuhan akan tetap hidup di sudut hati masyarakat kita yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi konflik sosial yang mengancam harmoni sosial dan integrasi nasional.

Tantangan dan Peluang

Terdapat beberapa peluang dan sekaligus tantangan untuk segera memperbaiki kondisi kerukunan antarkelompok masyarakat dan antarumat beragama, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, adanya pluralitas etnik dan kemajemukan agama yang berkaitan dengan keyakinan tentang sesuatu yang *"ultimate"*. Keyakinan tersebut diejawantahkan dalam keberagamaan, tidak hanya dalam wujud keyakinan teologis atau simbolisme ritual melainkan juga dalam wujud kegiatan yang, secara langsung atau tidak, berdampak pula pada tatanan kehidupan sosial. *Kedua,* adanya kesenjangan sosial ekonomi, politik, pendidikan dan hukum. Di samping kondisi rentan di atas, faktor kompleksitas kependudukan dan berkembangnya budaya global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial, seperti pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, dan perjudian, dapat pula menyebabkan kerawanan sosial. Hal tersebut bisa mendorong timbulnya konflik antarwarga dan kelompok masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menyeret terjadinya pertentangan antarumat beragama.

Ketiga, adanya pengabaian bahkan perusakan terhadap potensi ekonomi, politik dan budaya masyarakat lokal oleh rezim kekuasaan Orde Baru selama puluhan tahun. Meskipun demikian, menurut penulis, masih ada beberapa peluang untuk memperbaiki kondisi ketidakrukunan antarumat beragama, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) moralitas yang melandasi setiap pemeluk agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki, apalagi memupuk rasa dendam, mengambil hak orang lain, tidak peduli pada lingkungan dan tidak berbuat baik pada orang lain, termasuk orang yang bukan seagama; (2) masih ada pranata-pranata dan lembaga-lembaga masyarakat lokal yang menghidupkan berbagai adat, tradisi,

norma dan nilai-nilai yang penuh dengan kearifan; dan (3) sikap sebagian masyarakat yang masih berpikiran jernih dan berakal sehat untuk menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai pluralitas agama. Misalnya, sikap suatu masyarakat agama yang rela dan bersedia menerima kehadiran kelompok agama lain atas dasar prinsip hidup tidak saling mengganggu, sikap mengembangkan kerjasama melalui berbagai kegiatan sosial yang secara simbolik menunjukkan kehidupan umat beragama yang rukun, dan sikap mencari serta merumuskan titik-titik temu pandangan agama-agama dalam rangka menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia.

Kebijakan Strategis

Pengembangan, pembinaan dan peningkatan kerukunan antarumat beragama ke depan sebaiknya ditempuh melalui pemilihan kebijakan strategis. Ada dua kebijakan strategis yang, menurut saya, masih relevan untuk terus dikembangkan ke depan dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Strategi pertama ini (yaitu pembinaan dan toleransi antarumat beragama) ditargetkan untuk (1) pengembangan ketahanan mayarakat lokal yang meliputi fungsionalisasi pranata lokal, seperti menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat dan tradisi setempat yang mendukung upaya kerukunan; (2) menggali nilai-nilai dan norma-norma serta kearifan-kearifan lokal yang kondusif yang menunjang kerukunan; (3) mengembangkan lembaga-lembaga baru yang moderen, seperti pembentukan forum-forum kerukunan sampai ke tingkat *grass-root* (akar rumput/lapisan bawah); (4) memperluas partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat dengan lebih mengembangkan pendekatan bottom up melalui kegiatan-kegitan, seperti: dialog,

tatap muka, sarasehan, pendataan, monitoring, kerjasama sosial dan sebagainya.

Kebijakan strategis yang kedua adalah dengan cara mengembangan wawasan multikultural. Kebijakan strategis ini bisa dijabarkan ke dalam berbagai program kegiatan bersama antara lain: (1) memberikan pembekalan kepada para tokoh dan pemimpin masyarakat lokal tentang wawasan dan pengetahuan yang bermuatan pendidikan multikultural dan pengetahuan dasar tentang ajaran agama lain serta kemampuan mengelola setiap konflik yang muncul di tengah masyarakat mereka sendiri agar tidak menimbulkan konflik terbuka; (2) menyebarkan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kehidupan dan hubungan antarumat beragama; (3) mencegah jangan sampai agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Implementasi Kegiatan

Kebijakan strategis seperti disebutkan di atas, bisa kita implementasikan dengan beragam kegiatan yang kondusif dalam rangka menciptakan kesepahaman bagi unsur-unsur masyarakat yang majemuk. Di antara berbagai kegiatan yang telah, sedang dan mesti terus kita upayakan itu adalah sebagai berikut. *Pertama,* dialog antarpemuka agama, elit politik dan kalangan pers. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama tentang bagaimana memberdayakan politik agar tidak terjadi radikalisme politik yang mengganggu harmoni umat beragama dan merugikan kepentingan bangsa. *Kedua,* dialog antarcendekiawan agama. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran-pemikiran para cendekiawan dari berbagai agama dalam rangka memahami suatu persoalan sosial

keagamaan yang sedang aktual di Tanah Air serta untuk memperoleh jalan keluar dari suatu masalah berdasarkan pengamatan ilmiah dan hasil kajian yang empirik.

Ketiga, dialog antarguru dan antardosen agama. Kegiatan ini selain untuk membangun pergaulan akrab antarguru dan antardosen yang berbeda agama, juga sebagai forum tukar informasi dalam rangka membangun persepsi dan interpretasi agama di kalangan anak didik yang lebih kondusif untuk hidup rukun dan damai. *Keempat,* dialog antarpenyiar agama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak penyiaran agama terhadap kerukunan serta membangun kesadaran para penyiar agama tentang perlunya visi baru penyiaran agama yang lebih mendorong masyarakat untuk hidup rukun, damai dan peduli satu sama lain.

Kelima, dialog antarmahasiswa dan antartokoh organisasi keagamaan pemuda. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk mengakrabkan kalangan generasi muda yang berbeda etnik dan agama, juga untuk membangun kesadaran baru tentang ruginya menggunakan stigma negatif terhadap etnik dan agama tertentu, dan betapa untungnya hidup damai, banyak kawan tiada lawan, bersatu padu membangun bangsa yang lebih maju di masa depan. *Keenam,* dialog kerjasama kemitraan antarpengusaha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi konflik yang disebabkan kecemburuan sosial ekonomi. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapakan dapat ditemukan jalan untuk mereduksi kesenjangan ekonomi umat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan para pengusaha.

Ketujuh, temu wawasan antarpemuka agama pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara pemuka-pemuka agama pusat dan pemuka-pemuka agama daerah. Di

samping itu, diharapkan pula dapat diperoleh informasi tentang potensi-potensi konflik dan disintegrasi di daerah-daerah. Sebaliknya, pemuka-pemuka agama daerah memperoleh informasi dan perluasan wawasan tentang berbagai bentuk kebijakan kerukunan yang relevan dikembangkan untuk membangun harmoni, toleransi dan kerukunan pada sistuasi sekarang dan akan datang. *Kedelapan,* peningkatan kerjasama sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya nyata dari kelompok-kelompok agama melalui majelis-majelis agama dan organisasi-organisasi keagamaan untuk mewujudkan kepedulian dalam rangka menghimpun bantuan dan santunan sosial secara bersama-sama dan menyalurkannya kepada kalangan yang sangat membutuhkan di berbagai daerah.

Kesembilan, pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka ketahanan dan kerukunan masyarakat lokal. Melalui kegiatan ini dapat dibentuk forum atau wadah kerukunan daerah (tingkat kecamatan). Dengan terbentuknya forum bersama ini, maka potensi-potensi pemimpin lokal (pemuka-pemuka agama dan adat) sebagai inti dari anggota forum tadi, dapat didayagunakan untuk membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat bawah agar hidup lebih rukun dan damai. Dalam hubungan ini, mereka bisa berperan pula sebagai mediator masyarakat ketika terjadi suatu konflik di daerah setempat.

Kesepuluh, pelatihan manajemen konflik. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para praktisi dan tenaga-tenaga yang mampu mengelola konflik yang terjadi di berbagai daerah agar konflik tersebut dapat ditangani oleh masyarakat setempat sehingga konflik tadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka dan tidak menjalar ke daerah lain. *Kesebelas,* orientasi petugas penyuluh kerukunan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga penyuluh kerukunan yang handal dan mampu

membangun serta mengembangkan wawasan kerukunan yang inklusif-humanis dan wawasan multikultural sesuai gerak dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang.

Selain melalui sebelas kegiatan tersebut, program dan strategi pembinaan kerukunan antarumat beragama juga bisa terus digalakan melalui: dialog antartokoh keagamaan wanita; perumusan materi-materi kerukunan yang diharapkan dapat masuk dalam kurikulum atau materi pelajaran agama di sekolah; mengembangkan model desa binaan kerukunan, serta kemah bersama antartokoh muda, antaretnik dan antaragama, khususnya dari daerah-daerah yang pernah dilanda konflik. Melalui sejumlah agenda dan program kegiatan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dibangun kembali kerukunan dan pergaulan bangsa yang akrab, terjalin rasa solidaritas dan persaudaraan yang inklusif serta terbentuk berbagai kerjasama sosial di kalangan komunitas-komunitas agama sehingga integrasi dan keutuhan bangsa akan lebih kuat di masa depan.

MENGAMBIL MUTIARA HIKMAH DARI BERBAGAI KONFLIK SOSIAL

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik-konflik yang bermotif SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) meletus secara bertubi-tubi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus Ambon, Poso, Sambas, Sampit dan Kualakapuas adalah sekedar contoh yang sangat mencolok di hadapan mata kita. Konflik-konflik tadi ditandai oleh berbagai tindak kekerasan, dendam, brutalitas, kekejaman dan kebengisan. Pembantaian terhadap etnis tertentu, pembakaran rumah-rumah tempat tinggal, pembakaran rumah-rumah ibadat, dan perusakan harta benda sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Pada batas tertentu, sudah terjadi *ethnic cleansing* (pemusnahan etnis). Tak ada lagi kearifan. Tak ada lagi rasa perikemanusiaan. Anak-anak kecil, orang-orang tua yang lemah dan jompo dan orang-orang yang tidak berdosa diusir dan dibunuh. Akibatnya, terjadi pengungsian secara besar-besaran. Inilah tragedi kemanusiaan yang kita hadapi bersama. Kita sangat prihatin dan sedih dengan situasi konflik yang sangat destruktif dengan eskalasi kehancuran yang berskala luas.

Tulisan ini tidak akan mengungkap penyebab-penyebab kompleks yang memicu terjadinya konflik sosial dan kerusuhan antaretnik di beberapa daerah di Indonesia. Pesan utama tulisan ini ingin mengajak kita semua untuk merenung dan mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa konflik tadi. Dengan belajar dari peristiwa-peristiwa itu, kita belajar kembali untuk menata hubungan sosial kita dalam rangka untuk memaknai kembali motto nasional kita "Bhinneka Tunggal Ika." Dengan melakukan pembelajaran kembali terhadap tatanan sosial yang kita bangun bersama, maka makna etnisitas dan nasionalitas yang menjadi jati diri bangsa akan dapat dikukuhkan kembali.

Indonesia: Unitas dan Pluralitas

Kita harus bisa mengembangkan sikap dan perilaku sosiokultural yang mendukung bagi penguatan etnisitas dan nasionalitas sebagai landasan integritas nasional yang kita cita-citakan bersama. Sikap dan perilaku sosial tadi harus kita bangun dan kita kembangkan atas dasar prinsip-prinsip berikut ini. *Pertama,* kita harus menghargai dan menjunjung tinggi prinsip keragaman dalam kesatuan atau kesatuan dalam keragaman yang menjadi dasar filsafat hidup bangsa kita. Setiap kelompok etnis, siapa pun dan dari mana pun asalnya, hendaknya diterima apabila mereka bermigrasi ke suatu daerah tertentu. Mereka adalah juga saudara sebangsa dan seTanah Air dan warga negara yang sah yang tentunya berhak untuk mencari nafkah di daerah-daerah yang mereka pandang menjanjikan di berbagai daerah di Tanah Air.

Kedua, kelompok etnis pendatang hendaknya menghormati tata nilai dan tata budaya setempat. Dengan menghormati adat istiadat setempat, kelompok etnis pendatang

tadi akan mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Dengan mengembangkan sikap dan perilaku sosial seperti ini, konflik-konflik sosial dapat dicegah dan dihindari. Atau, minimal konflik tadi, jika terjadi, dapat diperkecil sehingga tidak mencapai eskalasi destruksi yang luas dan tinggi. *Ketiga,* masyarakat setempat perlu menjauhkan sifat cemburu yang berlebih-lebihan terhadap kesuksesan etnis pendatang di bidang bisnis. Biasanya, kelompok-kelompok etnis pendatang meraih sukses di bidang bisnis di daerah-daerah yang mereka datangi. Sukses ini dicapai karena mereka lebih ulet, lebih tekun dan lebih mempunyai motivasi dan etos kerja dibanding rata-rata masyarakat setempat. Kehadiran kelompok etnis pendatang, yang juga merupakan saudara sebangsa dan seTanah Air, seharusnya disyukuri karena mereka berjasa dalam menghidupkan dan meningkatkan ekonomi daerah setempat.

Keempat, perlu dikikis habis rasa superioritas etnis dan arogansi kesukuan serta perasaan kesukuan yang sempit *(chauvinistik)* yang kadang-kadang masih tersisa melekat pada beberapa suku di Tanah Air. Bersamaan dengan itu, kita perlu juga untuk tidak memberikan citra jelek kepada suku tertentu. Misalnya, suku A itu kasar, suka berkelahi, dsb. Prasangka-prasangka buruk kesukuan dan prasangka-prasangka sosial (juga prasangka-prasangka agama) sudah seharusnya kita jauhkan karena sifat demikian akan menyulitkan kita dalam pergaulan sosial. *Kelima,* khusus mengenai konflik yang bermotif keagamaan, hendaknya disadari oleh masing-masing kelompok yang terlibat konflik bahwa perusakan rumah-rumah ibadat sangat terlarang keras oleh agama mana pun. Ajaran agama mana pun tidak membenarkan penghancuran dan perusakan rumah-rumah ibadat. Begitu pula anak-anak, orang-orang tua renta, jompo dan tak berdaya, para perempuan dan orang-orang yang tidak berdosa

adalah, secara moral, hukum dan agama, tidak dibenarkan untuk dibunuh dan dibantai. Mereka berhak mendapat perlindungan dari serangan-serangan.

Keenam, kita perlu mengembangkan lebih mendalam lagi sikap pluralis dan inklusif dalam segala aspek hidup kesukuan dan kebangsaan kita. Pluralisme dan inklusivisme merupakan bagian integral dari wawasan Keindonesiaan kita. Ekslusivisme etnis dan eksklusivisme agama harus kita jauhkan dari pergaulan sosial kita. Kita sudah seharusnya bisa hidup bertetangga dan hidup berdampingan secara damai dengan kelompok-kelompok etnis mana pun tanpa memandang latar belakang agama, budaya, politik, jender, tradisi, suku, dan daerah asal. Hanya dengan sifat dan sikap demikian, kita benar-benar memaknai etika dan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" itu dalam kesadaran idealitas dan realitas kebangsaan kita yang majemuk.

Ketujuh, kita perlu mengembangkan secara lebih sadar apa yang disebut "pendidikan multikultural" *(multicultural education).* Saya baru kembali dari Virginia (Amerika Serikat) dan menyaksikan pelaksanaan pendidikan multikultural di sana. Murid-muridnya terdiri dari berbagai etnis (Arab, Asia, Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, dll) dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Sejak dini sudah diperkenalkan dan ditanamkan dalam diri mereka masing-masing tentang makna pendidikan multikultural yang dalam perkembangan selanjutnya bisa mereka praktikkan dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari. Di Indonesia program pendidikan seperti ini perlu diperbanyak dan dikembangkan secara luas dalam kehidupan masyarakat kita. Program pendidikan seperti ini akan dapat menghilangkan eksklusivitas budaya dan bisa menghancurkan *cultural barriers* (sekat-sekat budaya) yang ada di kalangan kelompok-kelompok etnis di Tanah Air kita.

Kedelapan, kita harus menerima pluralitas bangsa ini dengan segala keragaman budaya, tradisi, seni, agama dan suku sebagai rahmat dan anugrah besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemajemukan ini kita tempatkan dalam bingkai kesatuan, dan kesatuan ini kita tempatkan pula dalam bingkai keragaman. Pluralitas dan unitas merupakan pilar utama penyangga kebesaran bangsa kita. Tidak pada tempatnya kita mempertentangkan pluralitas dengan unitas. Juga tidak relevan kita memperlawankan unitas dengan pluralitas. Pluralitas dan unitas harus kita kembangkan secara dinamis dan kreatif dalam rangka memperkaya jati diri dan khazanah kebudayaan bangsa. Kesatuan dalam keragaman atau keragaman dalam kesatuan merupakan cita-cita nasional para Pendiri Republik ini. Itulah sebabnya, cita-cita nasional itu kita hayati dan kita laksanakan dalam hidup kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita di bawah motto 'Bhinneka Tunggal Ika.'

Membangun Kearifan Baru

Demikianlah butir-butir hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari berbagai konflik yang bermotif SARA di Tanah Air kita. Kita berharap kiranya konflik-konflik yang terjadi di Tanah Air dapat dicarikan solusinya dengan segera dan, dengan demikian, konflik-konflik tadi bisa cepat berakhir. Bagi konflik-konflik etnis dan komunal berlatar belakang SARA yang sudah berakhir dan kehidupan masyarakat sudah menjadi normal kembali, kita berharap ke depan keadaan dan kehidupan masyarakat lebih baik dan lebih kondusif. Di daerah-daerah yang belum terjadi konflik, kita sebagai komponen masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara agar konflik (apa pun penyebabnya) tidak terjadi. Mencegah konflik dalam masyarakat, apa pun faktor

penyebabnya, adalah lebih baik daripada menangani dan menanggulangi konflik. Pemberdayaan kearifan lokal *(local wisdom)* yang ada, berkembang dan hidup dalam masyarakat perlu terus diupayakan sebagai cara untuk mencegah terjadinya gesekan sosial dan konflik komunal.

Bersamaan dengan itu, kita berharap dapat memperoleh kearifan-kearifan baru dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembelajaran yang kita hayati dan kita resapi dari berbagai konflik horisontal di Tanah Air. Semoga proses pembelajaran ini akan menjadikan bangsa kita semakin dewasa dalam berpkir dan berbuat, semakin arif, bijaksana, beradab dan berkeadaban dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan di masa depan. Sikap tenggang rasa, *tepo seliro*, toleran dan inklusif merupakan kata kunci dalam menghadapi permasalah dan perbedaan. Jangan ada kelompok etnis atau golongan masyarakat yang di-*exlude* (dikeluarkan) dari bingkai plural kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita. Itulah pesan "Bhinneka Tunggal Ika" yang ditetapkan sebagai motto nasional oleh para Pendiri Republik ini dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di rumah kita bersama yang bernama Republik Indonesia tercinta. Ke depan kita tidak perlu, tidak usah dan tidak boleh terjebak ke dalam konflik yang sama atau serupa karena kearifan baru itu sudah menjiwai perilaku kita dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini.

MENGKRITISI RUDYARD KIPLING DAN SAMUEL HUNTINGTON

O, Timur adalah Timur
Dan Barat adalah Barat
Keduanya tak akan pernah bertemu
Hingga langit dan bumi melingkup
Di Singgasana Agung Pengadilan Tuhan

Demikianlah penyair terkenal Rudyard Kipling menggoreskan pandangannya dalam sebuah lirik puisinya yang diciptakannya pada tahun 1889 dengan judul *The Ballad of East and West* (Balada Timur dan Barat). Dari lirik puisi Kipling tadi, ada sesuatu yang secara mudah dan cepat bisa ditangkap, yaitu pesimisme Kipling dalam melihat hubungan dunia Timur dan dunia Barat. Dalam pandangan Kipling, Timur dan Barat selamanya tidak akan bertemu, dan baru akan bertemu ketika langit dan bumi telah hancur dan segalanya kembali menghadap Tuhan. Mari kita coba mencermati guratan pandangan Kipling dan melihatnya dalam konteks era globalisasi sekarang ini.

Masa Lalu: Timur Vs Barat

Suatu hal yang utama dan pertama-tama perlu dicermati adalah bagaimana situasi dunia yang melatarbelakangi dan mengilhami Kipling ketika menulis lirik-lirik puisinya itu? Atau, dengan kata lain, dalam konteks apa Kipling menuangkan visinya dalam untaian bait puisinya itu? Bagaimanakah situasi politik dan sosiokultural dunia ketika Kipling menulis puisinya itu? Bagaimanakah Kipling melihat Timur dan Barat, apakah dalam konteks gejala politik, konteks fenomena militer, atau dalam konteks pergeseran nilai-nilai budaya? Atau justru ketiga-tiganya? Pertanyaan-pertanyaan mendasar di sekitar masalah ini teramat penting karena dapat membantu kita untuk memahami dan mengkritisi pernyataan Rudyard Kipling itu. Namun, suatu hal yang jelas adalah bahwa Timur dan Barat (apapun konteksnya), dalam benak pandangan Kipling, tidak akan pernah bertemu sampai dunia ini lebur (kiamat) menelingkup di Singgasana Agung Tuhan.

Pada abad-abad silam, Timur dan Barat memang pernah terlibat dalam berbagai konflik politik dan ajang pertarungan militer. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan militer, politik, ekonomi dan sosial-budaya yang saling bersebrangan. Ekspansi-ekspansi teritorial dan penaklukan-panaklukan pasukan Muslim (sebagai representasi dunia Timur) atas Barat (dengan dikuasainya Andalusia atau Spanyol oleh Umat Islam) pada abad ke-8 hingga abad ke-13 mencerminkan terjadinya gelombang benturan dan badai konflik yang sulit mencapai titik temu atau penyelesaian damai. Antara Timur (Islam) dan Barat sering terjadi saling konfrontasi, saling adu kekuatan, dan saling tekuk untuk mengalahkan lawan-lawan politik dan militernya di berbagai medan laga peperangan. Timur dan Barat terlibat dalam kemelut pertarungan politik dan militer yang berlumuran darah.

Demikian pula, arogansi dan supremasi Barat (dengan superioritas perlengkapan teknologi militernya yang sangat moderen dan canggih) telah menyebabkan mereka melakukan eksploitasi, ekspansi dan penjajahan berabad-abad lamanya (dari abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20) atas dunia Timur dan negeri-negeri Muslim. Bangsa-bangsa Timur pun (termasuk Indonesia) bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan kolonialisme-imperialisme Barat dengan melakukan perang kemerdekaan untuk membebaskan negeri-negeri mereka dari penindasan-penindasan dan penjajahan Barat. Ini membuktikan bahwa Timur dan Barat pada abad-abad silam sering bertemu dalam arena konflik peperangan dan ajang pertarungan militer, dan tidak bertemu dalam forum-forum dialog dan kerjasama.

Pertarungan, benturan dan konflik-konflik antarkekuatan dunia yang tercermin dalam Perang Dingin antara Blok Barat (yang dimotori oleh Amerika Serikat) dan Blok Timur (yang dikomandani oleh Uni Soviet) juga pernah terjadi di pentas percaturan dunia, dan ketegangan politik ini sangat mencemaskan masyarakat internasional. Kegamangan dan kecemasan masyarakat internasional yang sangat mendambakan perdamaian dan kedamaian semakin menjadi-jadi karena peralatan militer yang dimiliki baik oleh Blok Barat dan Blok Timur sangat moderen dan canggih dan dapat memunahkan dan memusnahkan jiwa umat manusia dalam waktu sekejap.

Dialog Peradaban, Bukan Benturan Peradaban

Ketika Perang Dingin berakhir beberapa tahun lalu, Samuel P. Huntington, salah seorang pakar politik dan ahli kajian strategis Amerika Serikat, memperingatkan masyarakat Barat akan adanya

ancaman baru, yaitu Islam, terhadap Barat dan sekutu-sekutunya. Peringtan ini diungkap secara jelas oleh Huntington dalam bukunya *The Clash of Civillizations* (Benturan Peradaban). Dalam bukunya itu, ia mengatakan bahwa setelah ambruknya Uni Soviet, komunisme sekarang ini tidak lagi merupakan ancaman terhadap Barat. Menurut dia, ancaman baru terhadap Barat adalah Islam (dan koalisi antara Islam dan Konfusianisme).

Kita perlu mengkritisi analisis dan pendapat Huntington itu. Studi-studi strategis dan analisis-analisis kebijakan pada tingkat internasional yang dilakukan oleh Huntington telah membawa dia berpendapat bahwa Islam akan menjadi momok dan ancaman terhadap Barat. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: Islam atau Umat Islam mana yang merupakan momok dan ancaman terhadap Barat? Islam atau umat Muslim di Arab Saudi? Islam di Indonesia? Islam di Pakistan? Islam di Qatar? Kita bisa mengatakan secara pasti bahwa Islam di Arab Saudi sama sekali tidak merupakan momok dan ancaman terhadap Barat. Justeru Barat (AS) selalu bermesra-mesraan dengan Arab Saudi karena AS mempunyai kepentingan ekonomi (pasokan minyak) dari Arab Saudi dan juga Arab Saudi sebagai lahan empuk pemasaran produk-produk AS.

Islam di Indonesia juga tidak merupakan momok dan ancaman terhadap kepentingan AS. Rasanya lebih tepat dan beralasan jika Huntington tidak menggeneralisasi Islam atau Umat Islam dan membatasi parnyataannya itu pada kelompok-kelompok fundamentalitas Muslim yang ada di Iran, Aljazair, dan negeri-negeri Muslim lainya (jika ada). Cara berpikir Huntington yang menggeneralisasi Islam sebagai momok dan ancaman terhadap Barat sudah pasti tidah *fair*. Dan sebagaimana saya pernah baca di sebuah koran Montreal (Kanada), gerakan-gerakan

fundamentalis Islam di mata seorang analis politik Barat sebenarnya tidak separah bahayanya sebagaimana digambarkan oleh sementara pengamat Barat sendiri. Menurut dia, akibat gerakan-gerakan fundamentalis Islam tak ubahnya seperti sebuah kecelakaan di suatu jalan raya.

Saya tidak sependapat dengan Kipling yang mengatakan bahwa Timur dan Barat tidak akan pernah bertemu. Saya juga tidak sependapat dengan Huntington yang mengatakan bahwa momok besar dan ancaman baru terhadap Barat adalah Islam. Dalam era globalisasi dewasa ini yang ditandai oleh teknologi transportasi dan komunikasi yang moderen dan canggih, dunia sudah seperti sebuah perkampungan di mana batas-batas wilayah dan geografis sudah terlampaui secara cepat dan mudah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Barat (atau pun sebaliknya) secara mudah dan cepat bisa diketahui di belahan bumi masing-masing karena proses globalisasi. Ini berarti terjadi proses pertemuan dan kontak-kontak secara intens antara Timur dan Barat.

Saya merasakan hal yang sama ketika menghadiri konferensi internasional yang membicarakan hubungan dan dialog Muslim-Kristen di Jakarta pada bulan Agustus1997 lalu di mana para sarjana Muslim dan para sarjana Barat (yang beragama Kristen) bertemu dan berdialog. Dalam konferensi MESA (*Middle East Studies Association*) yang saya hadiri di Washington (AS) pada tahun 1991, para sarjana Barat dan para sarjana Muslim bertemu dan menyajikan makalah-makalah mereka yang berbobot tentang Islam dan ilmu-ilmu keislaman. Ini berarti bahwa Timur dan Barat sebenarnya telah berdialog, berinteraksi, saling melakukan kontak, dan bertemu dalam banyak forum dialog dan agenda kerjasama.

Visi Konstruktif Alqur'an

Dengan mengemukakan dan mengutarakan ilustrasi-ilustrasi di atas, saya sebenarnya hendak mengatakan bahwa pandangan pesimistik Kipling dan Huntington perlu dicermati dan dikritisi. Saya lebih menggaris bawahi pandangan penyair Goethe yang lebih optimistik dan konstruktif dalam melihat keberadaan dan hubungan Timur dan Barat sebagaimana terungkap dalam sebuah bait puisinya:

Seantero Timur terbilang kepada Tuhan

Seantero Barat terbilang kepada Tuhan

Seantero tanah Utara dan Selatannya

Berada dalam ketenangan di tangan-Nya

Lebih dari itu, Alqur'an (Surat Albaqarah: 115) dengan nada dan semangat keyakinan yang sangat konstruktif, arif dan optimistik mengatakan:

Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat

Ke mana saja kamu mengahadapkan muka

Di situ ada rahmat Allah

Karena Allah luas rahmat-Nya dan Maha Mengetahui

Ayat Alqur'an itu menegaskan bahwa Timur dan Barat (dan semua yang ada dalam bentangan jarak antara keduanya) adalah milik tunggal Tuhan. Tuhanlah sebagai Pemilik Tunggal yang membawahi dan menguasai segala kekayaan dari arah kutub Timur, Barat, Utara dan Selatan. Lebih jauh Alqur'an (Surat Alhujurat: 13) menyatakan pula bahwa Tuhan telah menciptakan umat manusia di pelataran dunia ini dalam banyak etnis dan bangsa dengan segala ciri khas pluritas etnisitas dan identitas

kebangsaan yang beragam dan multikultural. Tujuan Tuhan dalam penciptaan yang demikian adalah agar para manusia saling kenal mengenal, bukan saling bermusuhan, menjegal, menjajah dan membunuh. Ini berarti bahwa baik orang-orang Barat maupun orang-orang Timur adalah sama-sama makhluk Tuhan yang sudah selayaknya perlu bertemu dalam jalinan persahabatan dan jalinan kemanusiaan.

Secara faktual, Timur dan Barat sudah bertemu dalam forum-forum dialog dan program-program agenda kerjasama, dalam hubungan diplomatik, hubungan dagang, pertukaran program pendidikan, pertukaran kesenian dan kebudayaan, dan dalam forum-forum seminar dan konferensi. Realitas-realitas ini dapat dijadikan dasar untuk menepis pandangan pesimistik Kipling dan Huntington. Begitu juga dalam melihat sosok Islam yang sebenarnya bisa digandeng sebagai mitra Barat dan sekutunya-sekutunya, dan tidak perlu mengecap atau menuduh Islam sebagai momok, ancaman atau musuhnya.

ISLAM DI TENGAH RAMALAN BENTURAN PERADABAN

Bersamaan dengan pecahnya Revolusi Iran yang mengantarkan Ayatullah Ruhullah Khomeini dan para pendukungnya berhasil merebut kekuasaan dari rezim Shah Reza Pahlevi di tahun 1979, media massa Barat semakin gencar mengekspose berita-berita besar tentang munculnya kebangkitan Islam *(Islamic resurgence)*. Dalam pandangan Barat, Islam sudah mulai bangkit kembali dan kebangkitannya itu dirasakan oleh pihak Barat akan menjadi ancaman serius terhadapnya. Demikianlah, lewat jaringan-jaringan media massa moderen dan canggih yang dikuasainya, Barat menyebarkan opini publik ke seluruh dunia dan sekaligus dimaksudkan sebagai suatu peringatan keras kepada dunia Barat akan munculnya ancaman baru yang datang dari Islam yang sedang bangkit.

Benturan Peradaban

Lebih-lebih setelah Perang Dingin antara Blok Barat (yang dimotori oleh Amerika Serikat) dan Blok Timur (yang dikomandoi oleh Uni Soviet) berakhir, kecemasan Barat terhadap "ancaman"

Islam semakin tebal menggumpal. Di masa depan, sebagaimana diramalkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilizations,* akan terjadi benturan peradaban antara Barat dan Islam. Menurut analisis Huntington, pola-pola konflik yang sebelumnya terjadi antara Blok Timur dan Blok Barat masih sebatas kawasan Eropa dan lebih merefleksikan konflik ideologis antara Marxisme-Komunisme versus Liberalisme-Kapitalisme. Di masa depan, pola konflik –dalam paradigma Huntingtonian– akan mengalami transformasi secara signifikan yang akan melibatkan kawasan non-Eropa dan akan mengambil pola baru dalam bentuk benturan peradaban.

Pertanyaan kritisnya adalah: mengapa peradaban semakin menjadi faktor yang penting dalam percaturan politik internasional di masa depan? Huntington menyebut beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama,* perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai kebudayaan, di samping merupakan sesuatu yang semestinya harus ada sebagai suatu realitas, juga bersifat mendasar dan substansial. Masyarakat pendukung peradaban yang berbeda-beda itu mempunyai perbedaan persepsi tentang relasi antara Tuhan dan manusia, antara negara dan warganya, dan sekaligus perbedaan persepsi tentang organisasi dan nilai yang melandasi tatanan sosial, seperti keadilan, hak asasi, kebebasan dan responsibilitas.

Kedua, sejalan dengan gerak laju kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi, sejalan dengan itu pula telah terjadi eskalasi intensitas interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat pendukung peradaban yang berbeda-beda. Eskalasi dan intensitas interaksi ini akan semakin mempertinggi rasa peka kesadaran suatu masyarakat akan eksistensi dan nilai nilai peradabannya sendiri dan sekaligus akan semakin mempertajam

garis demarkasi perbedaan antara peradaban yang satu dengan peradaban yang lain.

Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial telah mengakibatkan negara-negara mulai kehilangan relevansinya sebagai sumber identitas dan jati diri. Sebagai gantinya, muncullah berbagai fenomena revitalisme agama sebagai dasar justifikasi diri yang melibatkan kelompok-kelompok sosial ekonomi yang justru telah bersifat moderen, seperti kelas menengah, kelas profesional dan lain-lain. Tendensi ini banyak menggejala, misalnya, dalam menopang munculnya format-format gerakan baru yang berbentuk gerakan-gerakan fundamentalisme agama di berbagai negara.

Keempat, menguatnya rasa peka kesadaran pada kelompok-kelompok masyarakat akan eksistensi dan nilai-nilai peradabannya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh dampak "peran ganda" superioritas adidaya dan kekuasaan Barat. Bersamaan dengan klimaks kekuasaan yang kini dinikmati oleh negara-negara adidaya Barat, bersamaan dengan itu pula per-adaban-peradaban non-Barat mengalami revitalisasi yang signifikan. Kaum elite dan kalangan terpelajar yang sebelumnya terdidik di lingkungan pendidikan Barat dan berpola pikir seperti Barat kini justru berpikir kritis dan tampil vokal sebagai sosok yang mulai curiga terhadap upaya-upaya ingin mengubah dunia menjadi masyarakat dengan model Barat.

Kelima, biasanya perbedaan-perbedaan di bidang peradaban dan kebudayaan dirasakan begitu rumit sehingga lebih sulit untuk dikompromikan dan diselesaikan. Dalam ajang konflik yang melibatkan kebudayaan dan peradaban, persoalan dasar yang dihadapi antarpihak yang terlibat dalam pertarungan adalah tidak lagi terletak pada berada "di pihak mana" akan tetapi berada "di pihak siapa." Dengan alur pendirian seperti ini, jelaslah bahwa

konflik dan benturan peradaban berbeda dengan konflik yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Dengan kata lain, peradaban adalah merupakan seperangkat atribut atau simbol dan nilai-nilai yang begitu erat melekat pada jati diri atau identitas seseorang (atau sekelompok masyarakat) sehingga sulit untuk dipisahkan dari para manusia pendukung peradaban tadi.

Pijar-Pijar Sentimen Perang Salib

Setelah menyajikan serangkaian analisis sebagaimana diutarakan di atas, Huntington secara terang-terangan menunjuk Islam dan Konfusianisme (dan koalisi keduanya) sebagai ancaman dan musuh bagi Barat. Menurut hemat saya, ciri-ciri pola konflik budaya atau benturan peradaban yang digambarkan oleh Huntington masih terasa merepresentasikan sisa-sisa sentimen Perang Salib *(Crusade),* yang terjadi antara abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi antara Umat Islam dan Kristen-Barat. Baik disadari atau tidak, perasaan Huntington masih mewarisi dan mewakili percik-percik sentimen Perang Salib yang mungkin hingga kini belum lenyap di kalangan sebagian orang Barat.

Benturan peradaban dan agama antara Barat dan Islam memang sudah pernah terjadi di masa lalu dalam ajang Perang Salib yang berlangsung tidak kurang dari tujuh gelombang antara abad ke-11 M hingga abad ke-13 M. Kedua belah pihak silih berganti mengalami getir kekalahan dan gebyar kemenangan dengan mempertaruhkan kucuran darah dan nyawa di berbagai medan laga peperangan. Sudah seharusnya, baik pihak Barat maupun pihak Muslim, mengambil butir-butir pelajaran berharga dan mutiara hikmah dari peristiwa-peristiwa peperangan yang berkuah darah di masa lalu itu dengan harapan agar peristiwa-

peristiwa yang destruktif mengerikan itu tidak akan terulang kembali di masa depan.

Dengan cara ini, baik pihak Barat maupun pihak Muslim, menjadi semakin lebih arif bijaksana dan bisa bekerja sama dalam membangun kehidupan bersama dalam rangka membina ikatan persaudaraan dan perdamaian dunia. "Masa kanak-kanak" Barat dan "masa kanak-kanak" Muslim yang suka berseteru, berkelahi dan berperang di masa-masa lalu, seperti terjadi dalam Perang Salib itu, harus sudah berlalu dan tidak perlu terjadi lagi di masa depan. Dewasa ini, setelah lama memasuki era pasca Perang Salib, Barat dan Muslim sudah (seharusnya) meninggalkan masa kanak-kanaknya masing-masing dan memasuki "masa dewasa" yang ditandai dengan kematangan kepribadian insani yang penuh kearifan, kebijaksanaan dan kedewasaan pribadi untuk saling berdialog dan bekerja sama dengan baik di segala bidang kehidupan.

Sosok Islam yang Mana?

Membaca tesis Huntington di atas, kita seperti tersambar petir di siang bolong. Benarkah Islam akan menjadi ancaman atau musuh bagi Barat? Islam atau umat Islam mana yang dimaksud oleh Huntington itu? Islam di Arab Saudi? Islam di Mesir? Islam di Kuwait? Islam di Emirat Arab? Atau Islam di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan agar terdapat klarifikasi agar terjauh dari cara pandang dan cara berpikir yang mengeneralisasikan Islam atau Umat Islam. Dengan demikian, kita bisa berpikir jernih dan menempatkan Islam atau umat Islam dalam kerangka pemikiran seperti itu.

Menurut hemat saya, "kerisauan" Barat akan munculnya "ancaman" Islam sebenarnya lebih ditujukan kepada gerakan-ge-

rakan radikal Muslim di berbagai negara Islam, seperti gerakan radikal Jihad Islam (terkenal dengan serangan bom bunuh dirinya), gerakan-gerakan radikal Muslim di Aljazair, Afghanistan dan Pakistan. Sebenarnya, bukan hanya Barat yang merasa resah dan risau terhadap munculnya ancaman radikalisme (dan terorisme) yang mengatasnamakan atau memakai label Islam itu. Akan tetapi, masyarakat dan pemerintah di berbagai negeri Muslim sendiri juga merasa cemas dan tidak aman berhadapan dengan gerakan-gerakan radikal Muslim itu. Misalnya, pemerintah Mesir pernah merasa tidak aman dan merasa terancam ketika berhadapan dengan gerakan fundamentalis Ikhwanul Muslimin. Begitu juga yang terjadi di negara-negara Muslim lainnya.

Barangkali tesis Huntington itu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh bara konflik Iran-AS dan Irak-AS, di mana baik Iran maupun Irak (yang nota bene keduanya sama-sama negeri Muslim) tidak mau didikte oleh AS. Dalam Perang Teluk I, AS dan Iran terlibat dalam peperangan yang banyak menelan korban. Konflik tersebut secara diam-diam hingga kini masih berlangsung. Selanjutnya dalam Perang Teluk II, AS dan Irak juga terlibat peperangan dan sampai kini Irak tetap terkena sanksi ekonomi yang begitu ketat sehingga mendatangkan keprihatinan dan penderitaan di kalangan rakyat Irak. Jika kita mengikuti paradigma Huntingtonian, boleh jadi Islam atau umat Islam di Iran dan Irak dapat dipandang sebagai 'ancaman' terhadap kepentingan-kepentingan Barat (AS) karena keduanya tidak menunjukkan sikap bersahabat terhadap AS karena secara nyata AS sendiri mau mendikte mereka.

Tetapi bagaimana dengan Islam di Arab Saudi atau Islam di Indonesia, misalnya? Apakah Islam di Arab Saudi dan Indonesia merupakan ancaman atau musuh bagi Barat (AS)? Secara pasti kita dapat mengatakan bahwa Islam atau umat Islam di Arab Saudi

sama sekali tidak merupakan ancaman atau musuh bagi Barat. Selama ini Barat (AS) selalu bermesraan dengan Arab Saudi karena AS mempunyai kepentingan ekonomi (pasokan minyak) dari Arab Saudi dan produk-produk AS mendapat pasaran yang bagus di Arab Saudi. Kita yakin sepenuhnya bahwa Islam di Indonesia juga tidak (akan) merupakan ancaman atau musuh bagi Barat (AS). Dengan karakteristik dan ekspresi temperamennya yang khas, Islam di Indonesia justru bisa dan telah menjadi sahabat yang baik bagi Barat.

Dari uraian-uraian di atas adalah bahwa Barat dan Islam – walaupun memiliki latar belakang sejarah, tradisi dan peradaban yang berbeda-beda– bisa melakukan dialog dan kerjasama dalam rangka memupuk dan membina saling pengertian untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan hidup bersama. Perbedaan-perbedaan antara Barat dan Islam tidak perlu menjadi perintang dalam melakukan dialog dan kerja sama. Kedua belah pihak sudah sepantasnya untuk selalu hidup berdampingan secara damai, bergandengan tangan dan bahu-membahu dalam jalinan kemanusiaan, persahabatan dan kemitraan, pihak yang satu tidak usah mencurigai atau menganggap pihak lainnya sebagai ancaman atau musuhnya.

PRESIDEN OBAMA, INDONESIA DAN DUNIA ISLAM

Walaupun usia Presiden Barack Hussein Obama jauh lebih muda daripada George W Bush, tetapi sosok penampilan dan gaya kepemimpinan presiden baru Amerika Serikat (AS) itu tampak lebih arif, simpatik dan bijak dari pendahulunya. Jika Bush sering sekali mengumbar jualan politik *"war on terror*," tidak satu pun kata *"War on terror"* diucapkan oleh Obama. Beberapa hari setelah dilantik, dalam suatu wawancara dengan TV Al-Arabia, Presiden Obama mengatakan kepada Dunia Muslim: "Orang-orang AS bukan musuhmu, tetapi sahabatmu." Telah terjadi pergeseran paradigma kepemimpinan secara signifikan di Gedung Putih. Jualan dan dagangan politik Bush berupa "perang melawan teror" yang secara masif dan agitatif dikampanyekan terhadap kelompok-kelompok Muslim garis keras telah di-*reset* oleh Obama dengan mengutamakan dialog. Sebenarnya, Presiden Obama –seperti presiden-presiden AS lainnya– juga menentang dan hendak memerangi segala bentuk terorisme di dunia ini, akan tetapi Obama mengatakannya dengan ungkapan bahasa yang

lebih lunak dan gaya kepemimpinan yang lebih *"smart"* dan menyejukkan. Itu saja perbedaannya. Konon Obama lebih mementingkan *"smart power"* dan *"smart diplomacy,"* suatu kebijakan yang masih memerlukan pembuktian secara riil dan kongkret.

Sesuai dengan janjinya ketika berkampanye sebagai capres dari Partai Demokrat, Obama mulai mengambil langkah-langkah konkrit menarik pasukan AS dari Irak, menutup penjara Guantanamo dan menghentikan proses peradilan terhadap para penghuninya yang dicurigai dan ditahan dengan tuduhan sebagai para pentolan 'teroris' Alqaeda. Semua upaya positif ini dapat mengangkat kembali citra baik AS, terutama di kalangan Dunia Muslim, di bawah kepemimpinan Obama. Dunia Muslim sudah selayaknya menyambut baik langkah-langkah dan perubahan baru yang ditempuh oleh Obama. Dia menugasi Menlu AS Hillary Clinton untuk berkunjung ke Indonesia selain ke China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam agenda Clinton, semula Indonesia tidak termasuk salah satu tujuan lawatannya. Tetapi Presiden Obama menugasi Clinton untuk berkunjung ke Indonesia sebagai salah satu agenda lawatannya di Asia. Kunjungan Menlu Clinton dijadwalkan selama dua hari, yaitu dari 18-19 Februari 2009. Itu berarti Obama memandang penting posisi dan peranan strategis Indonesia, suatu negara yang pernah dia tinggali dari 1967-1971 bersama ibunya (Stanley Ann Dunham) dan ayah tirinya Lolo Soetoro di kawasan Menteng Dalam, Jakarta.

Dunia Muslim hendaknya segera menangkap secara antusias kebijakan-kebijakan positif-konstruktif Obama dengan pendekatan-pendekatan baru yang lebih menekankan kepada dialog dan kerja sama atas dasar kemitraan komprehensif dan kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan

mempunyai wibawa dan pengaruh yang luas di kalangan Dunia Muslim dapat berperan aktif dan positif dalam menjembatani hubungan baru AS (dan Barat pada umumnya) dengan Dunia Muslim.

Peranan Indonesia

Kita yakin bahwa Indonesia, baik secara sendiri maupun dengan bekerja sama dengan OKI (Organisasi Konferensi Islam), dapat memainkan peranan penting dalam menjembatani hubungan baru antara AS-Dunia Muslim karena beberapa faktor. *Pertama*, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan dikenal sebagai Muslim moderat sangat diperhitungkan peranannya dalam percaturan internasional, termasuk dalam membangun hubungan AS-Dunia Muslim yang lebih baik ke depan. *Kedua*, Dunia Muslim sendiri memandang Indonesia sebagai memilki potensi dan kapasitas untuk menjembatani hubungan baru AS-Dunia Muslim karena posisi dan peranan Indonesia yang penting dalam percaturan internasional.

Ketiga, modal politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif (tidak berpihak kepada blok mana pun tetapi aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia). Hal ini antara lain dibuktikan oleh keaktivan dan partisipasi Indonesia dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti di Congo dan Lebanon di bawah bendera PBB. *Keempat,* Indonesia telah berhasil menyelesaikan konflik-konflik kawasan seperti konflik di Kamboja di tahun 1980-an. Sekedar catatan, beberapa minggu lalu Dubes baru Kambodja mengadakan *courtesy call* kepada saya (sebagai duta besar RI untuk Kuwait) di KBRI Kuwait. Dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangsih dan peranan aktif Indonesia (pada masa Menlu Ali Alatas dan Mochtar

Kusumaatmadja) dalam menyelesaikan konflik panjang antara PM Hun Sen dan Pangeran Ranaridh. *Kelima,* keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam negerinya sendiri seperti konflik Ambon, Poso, Sambas dan Aceh. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan rasa percaya dirinya untuk ikut membangun hubungan lebih baik antara Barat dan Islam.

Pamor dan citra AS di bawah kepemimpinan Obama semakin terangkat di mata Dunia Muslim. Jika pendahulunya, Presiden Bush, disambut dengan berbagai hiruk pikuk unjuk rasa ketika berkunjung ke Indonesia (Bogor) beberapa tahun lalu, kita yakin unjuk rasa yang serupa itu tidak akan terjadi jika di kemudian hari Presiden Obama berkunjung ke negeri ini. Kunjungan Presiden Obama akan disambut dengan baik, senang, simpatik, dan meriah, lebih-lebih karena dia sudah tidak melanjutkan kampanye *war on teror* yang secara masif dan agitatif dijual oleh pendahulunya.

Lembaran Baru

Ke depan lembaran baru hubungan AS (Barat pada umumnya) dan Dunia Muslim harus dibina dan dikembangkan agar lebih dekat, lebih bersahabat, lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat internasional pada umumnya. Dalam konteks ini, Indonesia dapat secara aktif-konstruktif memainkan peranan pentingnya dalam menjembatani hubungan baru AS (dunia Barat pada umumnya) dan Dunia Muslim itu. Kita berharap misi Indonesia ini dapat terwujud secara kongret dan nyata dalam bangunan dialog, kerja sama dan kemitraan strategis antara AS (Barat) dan Dunia Muslim sehingga

dampak positif dan manfaat besarnya dapat dirasakan bersama. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI), diharapkan dapat mengembangkan kemitraan strategis dan kerja sama antara Barat dan Islam. Ke depan *Dialog of Civilizations* antara Barat dan Dunia Muslim lebih diutamakan dan dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya *Clash of Civilizations* yang diramalkan oleh Samuel P. Huntington.

DINAMIKA GERAKAN NON-BLOK

Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) ke-15 diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir, dari tanggal 14-16 Juli 2009. Pada awalnya, GNB masih merupakan gerakan yang terbatas, tetapi sekarang sudah berkembang dan melibatkan ratusan negara di dunia. Ini merupakan suatu pertanda bahwa GNB didukung oleh banyak negara di dunia ini karena visi dan misinya yang sejalan dengan negara-negara anggotanya. Dewasa ini GNB sudah beranggotakan 118 negara yang kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara yang tergabung dalam GNB merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir dua pertiga keanggotaan PBB. Sejak tahun 1970, KTT GNB dilaksanakan setiap tiga tahun sekali secara bergiliran di negara-negara anggota yang disepakati sebagai tuan rumah. KTT GNB di Sharm El-Sheikh telah memustuskan bahwa KTT yang akan datang akan dilaksanakan di Teheran, Iran.

Organisasi GNB bersifat lentur dalam arti tidak memiliki markas, konstitusi dan sekretariat internal. Keputusan-keputusan dalam GNB dicapai melalui konsensus di antara negara-negara

anggota yang menghadiri KTT. Berhubung anggota GNB terdiri dari berbagai negara yang mempunyai ideologi dan tujuan yang berbeda-beda, maka konsensus yang dicapai dalam KTT dapat memperkuat solidaritas dan unitas GNB itu sendiri. Ada 16 negara dan 9 organisasi yang berstatus sebagai pengamat dalam KTT GNB.

Gagasan Pendirian GNB

Ide tentang pendirian GNB digagas pada tahun 1956 dalam suatu pertemuan antara Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdel Nasser (Mesir) dan PM Pandit Jawaharlal Nehru (India). Ketiga pemimpin negara ini sangat prihatin dan cemas terhadap meningkatnya konfrontasi militer antara Blok Barat yang dimotori oleh AS (AS) dengan Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet (US). Konfrontasi militer antara Blok Barat dan Blok Timur telah mengakibatkan meningkatnya Perang Dingin yang menyeret juga sekutu-sekutu kedua belah pihak. Salah satu puncak ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin ini adalah 'ancaman' Presiden AS John F. Kennedy terhadap pemimpin Uni Soviet Nikita Krushchev untuk membongkar pangkalan nuklirnya di Cuba. Seandainya Krushchev tidak membongkar pangkalan nuklirnya di Cuba, perang nuklir AS-US sudah pecah pada waktu itu.

Dalam suasana Perang Dingin seperti itulah GNB lahir, bergerak dan tampil memainkan peranan strategisnya di pentas politik internasional. KTT GNB pertama dilaksanakan pada bulan September 1961 di Belgrade atas inisiatif Yugoslavia, Mesir, India dan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya embrio GNB berasal dari komitmen kuat dari para pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955.

Pencetus ide KAA adalah Joseph Broz Tito (presiden Yugoslavia), Soekarno (presiden RI), Gamal Abdel Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (PM India) dan Kwame Nkrumah (presiden Ghana). Negara-negara yang tergabung dalam KAA menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme Barat yang pada waktu itu menguasai negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara KAA juga mendeklarasikan diri tidak memihak baik kepada kekuatan militer Blok Barat maupun Blok Timur, tetapi berupaya aktif memelihara dan membina perdamaian dunia. Sejalan dengan garis perjuangan negara-negara KAA yang netral dan berhaluan 'bebas aktif,' GNB mendeklarasikan lima prinsip perjuangannya: (1) saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan (2) perjanjian non-agresi (3) tidak menginterversi urusan dalam negeri negara lain (4) kesetaraan dan keuntungan bersama (5) memelihara perdamaian.

Agenda dan Isu Penting

Isu-isu politik sudah pasti menjadi perhatian KTT GNB. Di antaranya adalah resolusi yang diambil dalam KTT Colombo tahun 1976 yang menyerukan penarikan pasukan AS dari Semenanjung Korea dan pembubaran Komando PBB di kawasan itu. Dalam KTT Havana tahun 1979, yang dipimpin oleh Fidel Castro, GNB menelorkan konsep aliansi dengan Uni Soviet melawan kekuatan 'imperialis' AS. Dalam kaitannya dengan perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh haknya mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat, GNB memberikan dukungannya yang sangat kuat. Lebih jauh, GNB dalam KTT-nya ke-8 tahun 1989 di Harare mengeluarkan resolusi mengutuk keras diskriminasi rasial dan politik apartheid yang dilakukan oleh pemerintah kulit putih

Afrika Selatan pada waktu itu. Resolusi ini menjadi momentum bersejarah bagi pembebasan Nelson Mandela (Oktober 1989) yang dipenjara selama lebih dari 25 tahun karena menentang diskriminasi rasial dan politik apartheid di negaranya. GNB juga mendukung program nuklir Iran untuk tujuan damai.

Isu ekonomi juga menjadi salah satu perhatian utama KTT GNB. Dalam KTT ke-9 tahun 1989 di Belgrade, GNB menyuarkan pentingnya dibangun tatanan ekonomi yang adil. Tatanan ekonomi yang adil ini harus dicapai melalui dialog dan diskusi tentang isu-isu ekonomi yang penting dan secara sinergis menggalang kerja sama antarnegara anggota GNB di satu pihak dan menggalang kerja sama antara negara-negara GNB dengan negara-negara maju di pihak lain. Isu ekonomi dan keuangan ini menjadi topik dan agenda penting dalam KTT GNB ke-15 di Sharm el-Sheikh, Mesir, 14-16 Juli 2009. Diharapkan dari KTT ini lahir pemikiran-pemikran strategis yang aplikabel dan solutif dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dan keuangan yang memukul banyak negara, termasuk negara-negara anggota GNB.

Memperkuat Diri

Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, GNB bukannya tidak pernah mengalami 'keretakan' internal di kalangan negara-negara anggotanya yang menganut ideologi dan paham politik yang berbeda-beda. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979, negara-negara anggota GNB yang menjadi sekutu Uni Soviet mendukung aksi militer dan invasi Uni Soviet itu. Akan tetapi, di pihak lain, negara-negara anggota GNB yang berpenduduk mayoritas Muslim 'menentang' invasi Uni Soviet. Ketika Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan, keretakan ini dapat diperbaiki kembali.

Dalam KTT-nya yang ke-10 pada tahun 1992 di Jakarta (KTT pertama pasca Perang Dingin), GNB mengeluarkan keputusan penting agar GNB terus memperkuat diri, kompak dan berpegang teguh kepada komitmen dan garis perjuangannya menyusul ambruknya Uni Soviet pasca-Perang Dingin (1991). Tiadanya Uni Soviet sebagai kubu kekuatan militer Blok Timur telah menempatkan AS (dan NATO) sebagai satu-satunya panglima militer dan kekuatan tunggal dunia yang mendektekan kemauan dan keinginannya terhadap negara-negara lain di dunia ini. Walaupun demikian, tiadanya Blok Timur justru harus tidak mengendorkan posisi, kiprah dan peranan GNB dalam mengusung perdamaian dunia. GNB harus berperan sebagai kekuatan politik dan gerakan moral yang harus dapat mengerem dan – meminjam kata-kata Ketua Parelemen Kuwait Jassem Al-Khorafi – menyetop AS menjadi 'polisi dunia.'

DAKWAH ISLAM, PLURALISME,DAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA

Tidak berlebihan kiranya kalau dikatakan bahwa aktivitas dan gerakan dakwah (dalam segala cara, bentuk dan manifestasinya) merupakan tulang punggung kelangsungan hidup agama Islam. Tanpa adanya aktivitas dan gerakan dakwah, agama Islam sudah barang tentu sulit atau bahkan tidak bisa berkembang. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Haditsnya menekankan, "Sampaikanlah apa saja yang berasal dari saya walaupun satu ayat". Ini berarti bahwa dakwah itu merupakan tugas penting atau suatu kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam masyarakat moderen yang memiliki bangunan struktur sosial yang lebih kompleks, pola dan gerakan dakwah memerlukan organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderen, seperti penyusunan program, pelaksanaan program dan evaluasi terhadap pelaksanaan program itu sendiri.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen moderen ini, maka program-program dakwah yang belum

terealisasikan akan dapat dievaluasi dan untuk selanjutnya dapat pula direalisasikan. Sedang program-program dakwah yang sudah dilaksanakan dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan intesitas pelaksanaannya. Atas dasar itu pula, program dakwah dapat disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan perlunya kebutuhan dakwah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menggunakan dana yang memadai dan menerapkan asas-asas manajemen moderen dalam pelaksanaan dakwah serta ditopang pula oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka diharapkan tercapainya tujuan-tujuan dakwah yang telah diprogramkan.

Islam dan Pluralisme

Islam adalah agama dakwah. Ini berarti bahwa Islam, menurut watak dan kodratnya, harus berkembang. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memberikan konfirmasi teologis bahwa dia diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam. Misi ini telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Nabi dengan hasil yang sangat spektakuler: Orang-orang Quraisy di Jazirah Arabia yang sebelumnya menganut kepercayaan politeistik dalam waktu 23 tahun telah diubah oleh Nabi menjadi masyarakat yang menganut kepercayaan monoteistik (Tauhid). Dari jazirah Arabia, Islam terus berkembang ke berbagai pelosok belahan dunia. Keadaan ini membawa Islam tampil dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pluralistik. Berhadapan dengan kompleksitas situasi seperti ini timbullah suatu pertanyaan: bagaimanakah pola dan strategi dakwah Islam di tengah-tengah pluralitas atau keberagaman masyarakat dewasa ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu pandangan Islam tentang pluralisme.

Menurut kodratnya, pluralisme adalah merupakan ciri utama kehidupan suatu masyarakat. Keberagaman dan kemajemukan merupakan sunnatullah sebagaimana dapat dipahami dari firman-Nya: *"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa supaya kamu sekalian saling kenal mengenal."* (QS Al Hujurat: 13). Pluralitas masyarakat telah melahirkan keberagaman bahasa, adat istiadat, tradisi dan budaya. Pluralitas masyarakat ini memang dikehendaki oleh Allah dengan maksud agar kelompok-kelompok masyarakat yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bisa saling kenal mengenal satu sama lain.

Pluralitas masyarakat tidak saja menampakkan manifestasinya pada bentuk-bentuk fisik, bahasa dan budayanya, akan tetapi juga terefleksikan dalam pola kepenganutan agama, ideologi, politik atau paham. Sejauh menyangkut agama, Islam dan umatnya berinteraksi dengan agama-agama dan umat-umat lain seperti Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dll. Di lapangan ideologi dan politik, Islam dan umatnya berinteraksi dengan para penganut ideologi-ideologi dan politik lain seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Pluralisme juga tercermin dalam tubuh umat Islam sendiri: ada aliran Sunni dan Syi'ah. Sejauh menyangkut situasi di Indonesia, terdapat berbagai komunitas Muslim seperti komunitas NU, komunitas Muhammadiyah, komunitas Alwashliyah, dll. Bagaimanakah sebaiknya pola dan kebijakan dakwah di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti ini, baik dakwah itu ditujukan ke dalam tubuh umat Islam sendiri atau pun ditujukan kepada kelompok-kelompok non-Muslim?

Islam dan Etika Dakwah

Secara umum, setiap aktivitas dakwah haruslah berpegang teguh kepada etika dan prinsip dakwah sebagaimana telah digariskan oleh Allah: *"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula."* (QS Annahl: 125). Dalam ayat yang lain Allah berfirman: *"Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu."* (QS Ali Imran: 159). Jadi ada tiga etika dan prinsip dakwah yang harus dikembangkan oleh umat Islam dalam melakukan dakwah, yaitu dengan cara yang bijaksana, memberikan pelajaran dan ketauladanan yang baik, dan apabila diperlukan mengajukan argumen dan bantahan dengan cara yang baik dan bijaksana pula. Cara-cara paksaan dan kekerasan dalam melaksanakan dakwah (baik bersifat nyata atau pun terselubung) sudah seyogyanya dihindari dan dijauhi karena Allah melarang untuk melakukan hal itu sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya: *"Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah."* (QS Albaqarah: 256).

Dakwah, pada prinsipnya, adalah merupakan ajakan, seruan atau panggilan. Sebagai kewajiban agama dan tugas suci agama, sudah selayaknya dakwah itu dijauhkan dari unsur-unsur dan motif-motif paksaan baik dalam bentuk terang-terangan atau pun terselubung. Menghadapi kelompok-kelompok non-Muslim, umat Islam harus tetap berpegang teguh kepada etika dakwah sebagaimana telah digariskan oleh Allah. Hal yang perlu diubah oleh umat Islam adalah penyajian materi dakwah yang kelihatan kurang menarik menjadi (lebih) menarik. Materi dakwah sebaiknya tidak saja dapat menyentuh lubuk hati orang-orang yang didakwahi, tetapi juga harus mampu menggugah akal pikiran mereka. Jadi emosionalitas dan rasionalitas orang-orang yang

didakwahi perlu secara serentak disentuh agar pemahaman dan penerimaan mereka terhadap Islam berjalan secara seimbang dan simultan.

Dalam masyarakat pluralistik di masa moderen sekarang ini, para da'i dan organisasi-organisasi dakwah Islam harus terus mengembangkan kiat-kiat baru dalam mengembangkan kiprah dakwahnya. Selain tetap menggunakan media tradisional (yang dipakai untuk kalangan masyarakat tradisional), umat Islam perlu pula menggunakan media moderen dalam mengembangkan dakwahnya. Majalah, surat kabar, radio, film, teve, internet dan media moderen lainnya perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam mengembangkan dakwahnya. Penggunaan media moderen semacam ini tentunya akan sangat efektif karena dapat menembus jarak yang jauh dan sampai kepada para pendengar, pembaca dan pemirsa di tempat yang jauh pula.

Selain itu, perlu terus dikembangkan pula dakwah bilhal, yang menekankan kepada upaya-upaya peningkatan perbaikan hidup dan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah lewat jalur pembangunan panti-panti asuhan, sarana-sarana pendidikan dan polik klinik atau rumah sakit-rumah sakit. Menggaris bawahi pendapat Prof. Dr. Mukti Ali, umat Islam harus mampu berdakwah lewat penyiaran, pengajaran dan penyembuhan (*preaching*, *teaching*, dan *healing*). Dalam masyarakat plurаristik, umat Islam hendaknya menjauhi pendekatan dakwah yang lebih mengedepankan *nahi mungkar* (melarang kemungkaran) dari pada *amar makruf* (menyuruh kebaikan).

Pendekatan dakwah seperti ini akan terasa vulgar dan terasa kurang manusiawi bagi orang yang didakwahi. Amar makruflah yang perlu lebih didahulukan, baru kemudian nahi mungkarnya sesuai dengan perintah Allah. Dengan pola dan kebijakan dakwah seperti ini maka orang-orang yang didakwahi

akan merasa diperlakukan secara manusiawi dan nilai-nilai insaninya merasa dihargai dan dihormati. Juga, dalam masyarakat pluralistik (seperti masyarakat Indonesia) perlu dihindari materi, tema atau pesan-pesan dakwah yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Dakwah Islam dan Kebebasan Beragama

Sebagaimana dikatakan di atas, dakwah pada dasarnya adalah merupakan ajakan ke jalan Tuhan, bukan paksaan. Allah melarang memaksakan agama Islam untuk dipeluk oleh orang-orang non-Muslim kapan pun dan di mana pun. Tugas umat Islam adalah sekedar menyampaikan dakwah dan bukan memaksa setiap orang untuk memeluk agama Islam. Apakah orang yang didakwahi itu akan menerima ajakan kita atau tidak, itu terpulang sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Jadi tidak dibenarkan adanya motif dan unsur paksaan dalam menyampaikan dakwah itu. Segala bentuk pemaksaan (baik secara terselubung maupun secara terang-terangan) tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu bertentangan dengan ajaran Allah. Sebagaimana secara eksplisit dan jelas dinyatakan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya:

> Dan jika Tuhanmu menghendaki, pastilah (akan) beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Maka apakah engkau (hendak) memaksa para manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS Yunus: 99).

Penegasan Allah di atas sekaligus mengajarkan dan mengakui adanya prinsip kebebasan beragama bagi manusia kapan saja dan di mana saja. Manusia bebas untuk memilih dan menganut suatu agama yang menurut keyakinannya adalah benar. Tentu saja, setiap pilihan keyakinan seseorang dan

kepenganutannya terhadap agama tertentu (seperti halnya memilih sesuatu) disertai oleh suatu pertimbangan, kesadaran dan tanggung jawab etis dan teologis. Dalam hubungan ini, setiap pemeluk agama tertentu sudah sewajarnya untuk menghargai dan menghormati para pemeluk agama lain yang memilih dan menganut agama yang berbeda dengan dia. Dengan menggunakan pola dan kerangka berpikir seperti itu, kebebasan beragama akan tetap dijunjung tinggi sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan beragama itu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, yang realisasinya di negara kita sangat ditekankan dan dijamin oleh UUD 1945.

ISLAM, MORAL KENABIAN DAN MISI PERDAMAIAN

Kebangkitan sentimen agama dan superioritas etnik sebagai sumber konflik disebut oleh sebagian pakar sebagai gejala dunia yang mulai marak kembali di penghujung abad ke-20. Gejala semacam ini sesungguhnya sudah terjadi di berbagai negara, seperti halnya di Irlandia Utara, Israel, India, Balkan, dan akhir-akhir ini juga menjalar ke kawasan Indonesia. Maraknya konflik yang melibatkan umat beragama di berbagai belahan bumi (yang telah menginjak-injak perdamaian, prinsip keadilan dan hak asasi manusia serta mengancam fondasi keutuhan sebuah bangsa) perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak.

Pada awal tahun 1990, *futurolus* John Naisbit dan Patricia Aburdene telah melontarkan prediksi bahwa memasuki babakan abad ke-21, dunia akan menghadapi dasawarsa penting dalam sejarah peradaban manusia karena empat hal: *pertama*, perkembangan teknologi informasi; *kedua,* pasar bebas; *ketiga,* reformasi politik; dan *keempat,* kelahiran kembali kultur yang besar. Revolusi besar dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang ekonomi yang tidak pernah

terjadi sebelumnya. Hal ini telah berpotensi melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional milik negara-negara maju dan sistem ekonomi pasar bebas yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kapitalisme.

Selanjutnya, negara-negara maju berperan besar sebagai penguasa teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus pula menjadi lokomotif di bidang ekonomi, politik, dan kultur. Akibatnya, negara-negara berkembang, suka atau tidak suka, tetap harus puas menerima posisi sebagai negara yang terus bergantung kepada negara-negara maju. Kondisi kehidupan global seperti ini memaksa negara-negara berkembang harus menerima posisi lemah yang tak berdaya. Dalam realita kehidupan global, hukum alam "yang kuat memangsa yang lemah" tetap tidak terelakkan. Bahkan, menurut pandangan sebagian pakar, sampai pada masalah penentuan peta dan situasi politik dalam negeri negara-negara lemah (berkembang), negara-negara maju sering ikut terlibat dan memainkan peranan penting. Samuel P. Huntington menjelaskan lebih jauh tentang gejala dunia baru di abad sekarang ini. Ia menjelaskan bahwa negara-negara di seluruh dunia pada masa pasca Perang Dingin mulai mengembangkan asosiasi-asosiasi primordialisme masa lalu. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang didasarkan pada asas kesamaan dan kemiripan kebudayaan. Pada tingkat dunia, gejala ini ditandai dengan munculnya asosiasi-asosiasi yang ingin menghidupkan kembali semangat Serbia Raya, Turki Raya, Cina Raya, Rusia Raya, Hongaria Raya, dst.

Tesis yang dapat ditarik dari arah kecenderungan ini ialah bahwa dengan semakin menglobalnya dunia, maka pada saat yang bersamaan sebagian masyarakat dunia merasa semakin terancam kehilangan sosok jati diri (identitas) dan hal ini mendorong mereka mencari komunitas-komunitas tempat

berlindung. Komunitas agama dianggap sebagai salah satu alat yang paling ampuh untuk memperoleh tempat perlindungan itu. Itulah sebabnya, sejak krisis melanda Indonesia pada pertengahan 1997, krisis yang berawal dari krisis moneter itu lalu berdampak pula pada krisis multidimensi, termasuk krisis keharmonisan hubungan antarkelompok umat beragama yang muncul di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini memerlukan upaya dan solusi yang tepat serta menyeluruh agar krisis tadi tidak melebar dan meluas dengan kemungkinan potensi eskalasi konflik yang lebih destruktif. Jika hal ini tidak segera dapat dicarikan solusinya yang tepat dan tuntas, bahkan jika persoalan ini berjalan berlarut-larut, maka akan sangat membahayakan nasionalisme dan integritas bangsa kita di masa depan.

Misi dan Moral Kenabian

Bersamaan dengan kondisi yang berkembang di belahan dunia dewasa ini, kondisi di Tanah Air pada tataran kehidupan global abad ke-21 atau era millenium ketiga diprediksikan oleh banyak kalangan akan semakin banyak menyuguhkan perubahan sekaligus membawa kompleksitas problematika kehidupan. Paling tidak, kita telah menyaksikan berbagai serbuan gelombang globalisasi yang sebagian di antaranya membuat institusi-institusi keagamaan kita kian lemah dan kurang berdaya sehingga nilai-nilai moral dan etika kemanusiaan yang dimiliki oleh berbagai agama tampak kurang mampu menyinari kehidupan. Masyarakat kita kini seakan kehilangan pegangan nilai dan norma hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk ini. Sebagian masyarakat cenderung memraktikkan kehidupan serakah dan suka main hakim sendiri tanpa kepekaan hati nurani dan nalar sehat insani. Budaya kekerasan *(culture of violence)* kian menonjol di mana-

mana dan nafsu hewaniyah untuk "menghancurkan lawan" demi mengedepankan kepentingan ego kelompok semakin marak.

Agama merupakan salah satu kekuatan potensial dan aktual yang sangat besar dalam membangun dan mengembangkan tatanan kehidupan sosial. Dalam pengembangan fungsi yang lebih luas, termasuk dalam dimensi nasionalitas, agama merupakan instrumen perekat kehidupan masyarakat dan bangsa. Agama berperan sebagai perekat etnisitas dan nasionalitas dalam kehidupan kenegaraan yang ditegakkan atas dasar konstitusi dan demokrasi. Tentu saja peranan agama ini masih memerlukan berbagai konkretisasi dan optimalisasi dalam banyak hal karena kita selalu berhadapan dengan kompleksitas tantangan modernitas yang selalu menghadang di setiap lini kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah ketepatan pemakaian metode pendidikan dan pengajaran agama yang hasilnya diharapkan dapat lebih mampu mendorong peningkatan kualitas hidup umat tanpa kehilangan substansi dan esensi agamanya.

Dalam konteks ini, peranan dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan agama (yang *notabene* memperkenalkan ajaran agama sebagai landasan nilai, norma, etika dan pegangan hidup) masih sangat diharapkan pada era global sekarang ini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Selain mananamkan nilai-nilai spiritual dalam dimensi kehidupan yang luas, agama juga diharapkan mampu menyuguhkan alternatif perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, dalam konteks Islam, misalnya, misi Rasul untuk mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi semua), tentu sangat diharapkan dapat lebih terlihat secara kongkrit dan riil dalam tatatanan kehidupan umat dan masyarakat dewasa ini.

Sosok kesadaran keagamaan yang dilandasi oleh semangat kearifan yang dijiwai oleh nilai-nilai transendental

Ilahiah dan moral kenabian terasa semakin perlu ditumbuhkan oleh seluruh pemeluk agama. Terutama karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran serta dan sumbangsih umat beragama. Sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia, umat Islam telah menampilkan peran besar dan menentukan bagi masa depan bangsa, baik pada masa perjuangan kemerdekaan, penegakan kemerdekaan maupun pada masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pada masa penjajahan, sejarah Indonesia mencatat perjuangan umat Islam yang gigih melawan penjajah lewat berbagai perjuangan. Pada masa penegakan kemerdekaan, peran serta umat Islam juga sangat besar dan strategis.

Islam: Rahmat bagi Semua

Kehadiran Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah sudah pasti memiliki arti yang sangat penting bagi pertumbuhan paham dan gerakan kebangsaan Indonesia secara luas. Gerakan-gerakan Islam tersebut merupakan manifestasi dari proses *revitalisasi kultural* bangsa Indonesia terhadap dominasi kekuatan luar yang telah tiga abad lebih bercokol sebagai penjajahan kolonial. Di samping itu, gerakan-gerakan Islam juga telah berfungsi sebagai *agen reformasi sosial*, yakni melakukan perubahan dan pembaruan di berbagai bidang kehidupan masyarakat secara luas sejalan dengan agenda kemanusiaan bersama yang mereka garap dan mereka persembahkan bagi negara dan bangsa.

Sebagai agen reformasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan dan institusi-institusi pendidikan keagamaan saat itu mempunyai bidang garapan agenda kemanusiaan bersama. Hasilnya adalah berupa kontribusi kemanusiaan yang merupakan

andil yang amat besar bagi pencerdasan bangsa, peningkatan harkat dan martabat bangsa, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Merujuk pada kenyataan ini, maka lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan yang ada sekarang perlu memainkan kembali fungsi dan peranan mereka yang lebih sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa ini.

Dengan demikian, peranan dan fungsi agama sebagai instrumen perekat etnisitas dan nasionalitas dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis akan dapat terwujud kembali. Peranan dan fungsi agama pada tataran demikian sekaligus membuktikan pembumian makna dan misi agama Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*. Fakta-fakta sejarah ini sengaja diungkap kembali untuk menegaskan lagi betapa besar potensi dan peranan umat dan lembaga-lembaga keagamaan bagi perjuangan bangsa dan negara. Pengungkapan fakta sejarah ini dimaksudkan pula untuk menggugah kembali tanggungjawab historis umat Islam untuk terus menampilkan peran aktif dalam proses membangun dan memajukan bangsa pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Caranya antara lain adalah dengan mangamankan dan meluruskan cita-cita bangsa sebagaimana digagas oleh para *Founding Fathers* Republik ini dan mengamalkan secara konsisten amanat konstitusi dan reformasi dalam kerangka demokrasi, HAM dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Selain visi yang bersifat nasional, sepatutnya pula pembangunan keagamaan Indonesia memiliki visi mengharumkan citra Islam di tengah-tengah pergaulan dunia yang cenderung tidak adil akibat ulah radikal sekelompok kecil gerakan keagamaan. Hal ini sangat wajar mengingat posisi umat Islam Indonesia sebagai sebuah bangsa yang pemeluk Islamnya terbesar di antara negara-negara Muslim di dunia. Dengan demikian, mau tidak mau, kita harus bekerja keras menampilkan alternatif yang

lebih menunjukkan wajah ramah Islam yang bersifat mengayomi sebagai penebar *rahmatan lil-alamin*. Tampaknya pencarian dan sekaligus penemuan alternatif ini menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai agenda kerja umat ke depan. Sebab jika hanya semata-mata mengadopsi sistem Barat yang liberal-kapitalistik-sekularistik-hegemonistik, upaya-upaya mewujudkan kehidupan yang adil, damai dan sejahtera bagi semua pihak tidak akan pernah terwujud. Umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan memerlukan implementasi agenda-agenda kerja yang becorak humanis-religius, bukan humanis-sekuler.

Jika hal-hal di atas itu yang menjadi tujuan dan misi pembinaan keagamaan kita, maka setidaknya masalah ini harus lebih mendorong kita semua kepada upaya yang sungguh-sungguh dalam mengeksplorasi ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diajukan sebagai tawaran-tawaran korektif terhadap kondisi krisis sekarang ini. Misalnya, sistem ekonomi kapitalisme (yang tujuan pokoknya menjurus ke arah individualisme) sudah saatnya dikoreksi oleh Islam dengan memberikan pemikiran-pemikiran alternatif yang konstruktif di bidang ekonomi. Dengan demikian, misi umat Islam senantiasa dituntut untuk berorientasi kepada visi dan makna perubahan yang baik dan bermoral. Perubahan dan transformasi sosial yang dilakukan tadi hendaknya tidak bersifat tambal sulam, melainkan bersifat substantaif-transformatif di mana nilai-nilai Islam dapat mengubah kondisi umat di jalur pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain tanpa kehilangan bobot nilai spritualitasnya.

Dengan menggarisbawahi poin-poin tersebut di atas, perlu ditekankan agar dalam membangun dan menata kembali visi dan misi keagamaan yang bercorak humanis, kita sudah

sepatutnya tidak melupakan bahwa penataan kembali ini merupakan rangkaian dari upaya keras yang telah menjadi agenda kemanusiaan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas iman umat dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya-upaya ini sudah pasti berimplikasi luas pada pelaksanaan agenda kerja yang bertujuan untuk memajukan bidang kehidupan kongkrit lainnya, seperti bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah tantangan riil dan mendesak yang kita hadapi bersama saat ini. Dengan menggali dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan terpadu ke dalam agenda kemanusiaan bersama, maka esensi dan substansi ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin* akan terus hidup dan menjadi kenyataan dalam realitas moral profetik kenabian, baik pada tataran idealitas Ilahiah dan realitas insaniah.

MENABUR AJARAN HUMANIS ISLAM

Dalam Alqur'an dinyatakan bahwa masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memasuki desa Quba, suatu desa di luar Madinah yang dilewati oleh Nabi dan rombongan kaum Muslimin dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Masjid Quba ini sangat sederhana dan menggunakan pelepah-pelepah kurma sebagai atap dan pembatasnya. Akan tetapi, secara historis, pembangunan Masjid Quba ini sangat bernilai karena merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Peristiwa pembangunan Masjid Quba yang sangat bersejarah ini direkam dalam Alqur'an:

> Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih (QS Attaubah: 108).

Dari ayat di atas dapat diketahui pula bahwa kata "masjid" berasal dari bahasa Arab yang telah diserap menjadi kata

Indonesia. Menurut struktur bahasa Arab, kata masjid merupakan masdar (kata benda) yang berarti tempat sujud. Jadi, masjid adalah tempat sujud, tempat melaksanakan salat. Sebenarnya, menurut konsep Islam, seluruh hamparan bumi ini merupakan masjid, merupakan tempat sujud bagi umat Islam. Itulah sebabnya, umat Islam bisa melakukan salat di mana saja di seluruh hamparan bumi ini asal tempat itu bersih dan suci. Secara terminologis, masjid adalah suatu bangunan gedung dengan ukuran tertentu yang relatif besar dan dipakai untuk mendirikan salat. Masjid lazimnya dipakai untuk melaksanakan salat Jum'at (selain salat jama'ah biasa). Di Indonesia dikenal pula istilah surau dan langgar yang biasanya ukurannya lebih kecil daripada masjid. Langgar dan surau biasanya hanya dipakai untuk keperluan melaksanakan salat (baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjama'ah biasa), tetapi tidak dipakai untuk menyelenggarakan upacara salat Jum'at.

Umat Islam mempunyai masjid sebagai salah satu tempat ibadat (salat). Keberadaan masjid identik dengan keberadaan komunitas Muslim. Di mana komunitas Muslim eksis, di situ masjid didirikan. Dengan demikian, pada satu sisi, masjid menjadi simbol keberadaan komunitas Muslim di suatu tempat dan masjid sekaligus menjadi wadah kesatuan sosial umat Islam. Di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Muslim, terdapat ribuan masjid yang tersebar di seluruh Nusantara. Sesuai dengan ruang lingkup dan kedudukan wilayah, tipologi masjid di Indonesia dikategorikan ke dalam beberapa peringkat. Ada masjid kampung, masjid desa, masjid kabupaten, dst. Dilihat dari peringkat posisi dan kedudukan wilayah, di Indonesia dikenal juga adanya masjid negara (Masjid Istiqlal, berada di ibu kota Jakarta), masjid raya (Masjid Al-Akbar, berada di Surabaya dan propinsi-propinsi lain), dan masjid agung yang biasanya ada di kabupaten-kabupaten. Sesuai nama dan kedudukannya, Masjid Istiqlal sebagai masjid negara didanai oleh

negara (pemerintah) untuk membiayai pemeliharaan dan perawatannya. Salah satu fungsi utama masjid yang umum ialah sebagai wadah penyebaran informasi dan pesan-pesan keagamaan kepada para jama'ah pada khususnya dan kaum Muslimin pada umumnya. Melalui mimbar mesjid, khatib menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara reguler. Setiap Jum'at jama'ah mendengarkan khotbah dengan frekuensi rata-rata sebanyak lima puluh tujuh kali dalam setahun.

Jika pesan-pesan itu berkualitas dan komunikatif, maka amat banyak informasi dan pengetahuan yang dapat diserap oleh jama'ah. Akumulasi informasi itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Pengetahuan tersebut, jika diterapkan, dapat mewarnai corak kehidupan umat secara signifikan. Dengan cara ini saja, komunitas muslim akan berkembang ke arah yang lebih positif secara mental spiritual dan intelektual. Namun demikian, kualitas bimbingan keagamaan melalui mimbar mesjid agaknya perlu dicermati karena dampaknya belum maksimal. Kualitas hidup sebagian umat dewasa ini masih belum ideal jika dilihat dari segi moral dan spiritual. Fenemena keagamaan di sebagian kalangan umat masih memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara ajaran dan cita-cita luhur Islam dengan realitas aktual keumatan.

Khotbah dan Fenomena Umat

Alqur'an menyerukan kepada umat Islam untuk menunaikan shalat Jum'at. Shalat Jum'at ditetapkan sebanyak dua raka'at dan didahului dengan khotbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Dengan melaksanakan shalat Jum'at, maka kewajiban shalat Dzuhur sudah tidak ada lagi. Firman Allah SWT:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu me- ngetahui (QS al-Jumu'ah: 9).

Seruan itu, menurut jumhur ulama, hukumnya wajib ditunaikan oleh setiap pria Muslim yang sudah akil baligh. Perempuan dibolehkan (tidak diwajibkan) untuk mengambil bagian dalam kegiatan ibadat ini. Bahkan sebagian ulama menganjurkan hal tersebut bagi perempuan. Seruan itu mengandung arti bahwa Islam menciptakan aturan bagi para pemeluknya agar mereka berkomunikasi dengan Tuhan dalam kebersamaan. Melalui kesempatan itu, mereka dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi aktual, bahan renungan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat. Dalam prosesi shalat jum'at tersebut, khotbah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dari perspektif ini dapat dipahami pula bahwa Islam sangat mementingkan aspek ilmu pengetahuan dalam hidup beragama. Peningkatan bobot dan kualitas pengetahuan dapat mendorong peningkatan kadar penghayatan dan pencapaian prestasi amal umat. Ini terkait dengan maksud ayat Alqur'an yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama (QS Fathir :28)

Islam mewajibkan penganutnya untuk menuntut ilmu. Prosesnya dapat dilakukan melalui kegiatan belajar secara individual atau kolektif. Selain itu, Islam juga memberi kesempatan kepada pemeluknya untuk menyerap pengetahuan yang disampaikan oleh orang lain. Wujudnya, antara lain, melalui khotbah Jum'at. Di sini ada dua pihak, yakni pembicara dan pendengar. Khotbah merupakan suatu bentuk komunikasi satu

arah. Khatib, selaku komunikator, menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan, nasehat, pesan agama, bimbingan dan pengetahuan agama kepada para jama'ah. Sementara para jama'ah (sebagai komunikan) mendengarkan berbagai hal yang disampaikan oleh khatib. Khotbah adalah proses komunikasi dan penyampaian pesan-pesan keagamaan yang mengacu pada aturan syara'. Gerakan tubuh yang tidak penting saat khotbah Jum'at berlangsung akan mengurangi nilai atau pahala Jum'at.

Karena prosesnya berlangsung tidak lama, maka khotbah yang tidak berkualitas sering menimbulkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan semacam itu dapat menimbulkan sikap apatis para jama'ah. Kondisi seperti ini bisa menciptakan asumsi bahwa mereka hanya memandang khotbah sebagai bagian dari syarat sah pelaksanaan ibadat. Mereka tidak berharap banyak dari khotbah seperti itu untuk meningkatan kualitas pemahaman agama mereka. Oleh karena itu, diperlukan khatib yang berkualitas yang dapat menyampaikan khotbahnya dengan bobot pesan dan pengetahuan yang baik. Dengan penyampaian khotbah yang baik, aktual dan berbobot, maka para jama'ah akan merasa puas karena memperoleh dan menyerap hal-hal baru dan relevan dengan kebutuhan spiritual dan intelektual para jama'ah.

Sosok Personalitas dan Kualitas Khatib

Kualitas khotbah sangat ditentukan oleh kualitas seorang khatib. Oleh karenanya seorang khatib harus memiliki kemampuan banyak hal, seperti keterampilan berbicara, pengetahuan agama yang mendalam, pengetahuan sosial yang memadai, dan persiapan yang matang sebelum naik mimbar. Belum lagi persyaratan yang lain, seperti moralitas yang baik, penampilan yang sesuai, wibawa dan kematangan jiwa. Singkat kata, amat

banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang laik naik ke mimbar. Khotbah merupakan sarana untuk menjelaskan persoalan agama yang seirama dengan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, khotbah dapat difungsikan untuk memotret realitas yang ditampilkan oleh umat dan tuntunan kitab sucinya. Dalam kaitan ini diperlukan analisis yang cerdas dengan aneka ragam pendekatan. Pendekatan fikih atau hukum Islam diperlukan untuk menjelaskan kedudukan suatu persoalan secara objektif. Selain itu, diperlukan penjelasan yang rasional tentang hikmah di balik sebuah perintah atau larangan sehingga umat terdorong untuk mematuhi tuntunan agama atas dasar kearifan.

Khatib hendaknya bisa memberi motivasi kepada umat untuk mematuhi ajaran agama dengan sebaik mungkin. Hal serupa diperlukan untuk mengajak umat menghentikan kekeliruan yang mereka lakukan. Khotbah semestinya difungsikan sebagai suluh bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan, penawar hati bagi mereka yang berduka, pagar pembatas bagi mereka yang berada di tepi jurang, pemberi semangat bagi mereka yang dilanda keputusasaan, dan sejumlah perumpamaan lainnya. Dengan kata lain, khotbah merupakan sarana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan Tuhan, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada-Nya, mengajak manusia untuk meningkatkan iman dan amalnya.

Menyemai Ajaran Humanis Islam

Hikmah merupakan daya tarik yang kuat pada sebuah ucapan. Ucapan yang penuh hikmah akan selalu menarik perhatian. Ia memiliki kandungan makna yang dalam untuk direnungkan. Alangkah baiknya jika khotbah sarat dengan penjelasan yang mengandung hikmah. Mengkaji sebuah

kegagalan dengan cermat dan mencari solusinya yang tepat akan lebih baik dari pada sekedar mencaci mereka yang melakukan kesalahan itu. Khotbah (sebagai suatu bentuk dakwah) harus senantiasa mengacu pada tuntunan Alqur'an yang menyatakan:

> Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS an-Nahl: 125).

Tugas sebagai khatib memerlukan kecakapan dan keterampilan. Umat juga harus memberi penghargaan yang layak terhadap orang yang bertugas sebagai khatib. Para khatib yang baik harus dilatih dan disiapkan. Mereka harus melalui jenjang pendidikan yang berkualitas. Kecakapan khatib harus selevel dengan tingkat pendidikan umat. Tugas-tugas dakwah di atas mimbar sudah waktunya dijalankan secara profesional dengan cara mengedepankan tema-tema yang baik, sejuk, teduh, dan penuh hikmah. Dan jika terpaksa harus melakukan argumentasi, hal itu tentunya dilakukan dengan arif, santun dan bijak pula. Paling tidak, mereka yang akan naik mimbar harus menyiapkan kualifikasi dirinya sehingga bisa menjadikan khotbah itu sebagai upaya melakukan perubahan mental umat dengan cara menyampaikan pesan-pesan Islam yang bersifat humanis.

Apakah dan bagaimanakah ciri-ciri ajaran humanis Islam itu? Tentu saja banyak ciri yang dapat dikemukakan dan setiap sarjana atau pakar mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini saya akan mengemukakan ciri-ciri ajaran humanis Islam itu sebagai berikut. *Pertama,* Ajaran humanis Islam mengakui dan menghargai adanya keberagaman, tidak saja dalam

hubungan intra-agama tetapi juga dalam hubungan antaragama. Sudah merupakan hukum alam (sunnatullah) dan kenyataan sosiologis bahwa kemajemukan agama, etnisitas, nasionalitas, budaya, dan tradisi menjadi salah satu ciri penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tidak beragam dalam hal etnisitas, agama, budaya, dan tradisi. Justeru keberagaman dan kemajemukan etnis, tradisi, seni budaya, dan agama merupakan khazanah kekayaan yang sangat bernilai dalam hidup ini.

Kedua, Ajaran humanis Islam memandang manusia seagama dan atau manusia di luar agamanya sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Ajaran humanis Islam tidak mempunyai prasangka-prasangka buruk terhadap etnis, ras, budaya dan agama tertentu. Labelisasi dan stigmatisasi buruk terhadap manusia adalah bertentangan dengan kodrat dan fitrah kejadian manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Prinsip ini akan membawa Muslim humanis ke dalam sikap yang arif, santun dan bijak untuk hidup berdampingan secara damai (koeksistensi damai) dengan kelompok-kelompok agama dan etnis lain tanpa suatu prasangka buruk apa pun. Keadaan demikian akan menciptakan harmoni, kerukunan dan toleransi antarumat beragama. *Ketiga*, Ajaran humanis Islam menaruh respek dan hormat kepada orang seagama dan orang yang berbeda agama. Manusia, menurut fitrah dan kodratnya, ingin mendapat penghargaan dan penghormatan dari manusia sesamanya sebagaimana layaknya. Sikap saling menghargai dan menghormati antarmanusia, antarumat beragama dan antaretnis merupakan pangkal dan dasar kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Keempat, Ajaran humanis Islam menghargai dan merealisasikan toleransi dan harmoni antarumat beragama. Setiap

perbedaan yang terjadi dalam hubungan antarumat beragama dicoba untuk dipecahkan dengan jalan musyawarah, legal konstitusional. Ajaran humanis Islam tidak menggunakan cara-cara kekerasan, apalagi cara-cara main hakim sendiri, dalam memecahkan perkara-perkara yang timbul dalam hubungan antarumat beragama dan antaretnis. *Kelima,* Ajaran humanis Islam menyajikan teks-teks kitab suci agama tidak bersifat hitam-putih, tekstualis-skripturalis, tidak rigid, tidak kaku, tidak sempit, dan tidak ekslusif. Penafsiran teks-teks keagamaan dilakukan dengan cara mencari titik-titik temu hubungan antarayat, fleksibel, dialektis, dan kontekstual. Dengan penafsiran demikian, Muslim humanis dapat menerima perbedaan-perbedaan dengan lapang dada, toleran dan apresiatif.

Keenam, Ajaran humanis Islam lebih mengedepankan agenda kemanusiaan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan-perbedaan doktrinal teologis diserahkan kepada masing-masing umat beragama untuk mempercayainya. Muslim humanis lebih mengutamakan persamaan visi dan kesamaan misi agama, yaitu agenda kemanusiaan bersama untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. *Ketujuh,* Ajaran humanis Islam lebih mengedepankan dan mengutamakan dialog. Karena melalui dialog antarumat beragama ini, suatu persoalan yang menyangkut hubungan antarumat beragama diharapkan dapat dipecahkan dengan jalan musyawarah, secara adil dan damai, yang dapat diterima oleh komunitas-komunitas agama yang terlibat dalam dialog tadi. Sikap antipati, apa lagi prasangka buruk, penyelesaian sepihak atau cara-cara kekerasan sangat tidak membantu bagi terciptanya dialog yang kritis-apresiatif. *Kedelapan*, Ajaran Islam humanis lebih mengedepankan dan mengutamakan saluran institusi-institusi pendidikan (ketimbang institusi politik) dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Bagi Muslim humanis, esensi dan substansi nilai Islam lebih penting daripada bungkus atau kemasan kulit luar yang berlabel Islam.

Itulah ciri-ciri ajaran humanis Islam yang perlu dikembangkan dan ditabur melalui mimbar-mimbar Jum'at, khotbah, tausiah, ceramah, kuliah dan pesan-pesan keagamaan lainnya. Penaburan, penyebaran dan pendidikan ajaran humanis Islam akan dapat mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme yang menggunakan label dan mengatasnamakan agama Islam. Ajaran humanis Islam seperti itu perlu pula dimasukkan dalam kurikulum dan program-program kegiatan sosial keagamaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Komunitas-komunitas agama selain Islam juga dituntut melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Keberhasilan setiap keluarga, tempat ibadat dan sekolah dalam mengembangkan dan menabur ajaran humanis agama sudah pasti akan ikut memberikan kontribusi bagi penguatan sendi-sendi kebangsaan dan penguatan pilar-pilar kenegaraan kita di Indonesia.

BAGIAN TIGA

Mengurai Isu-isu Kependidikan

MEMPERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DI TENGAH PERGUMULAN ERA GLOBAL

Kita sekarang hidup di abad sofistikasi kemajuan sains dan teknologi dan berada dalam pusaran arus gelombang globalisasi yang dari waktu ke waktu terus mendesakkan kompleksitas tantangan yang semakin menggebu-gebu. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, gelombang globalisasi telah, sedang dan akan terus menerpa seluruh belahan dunia, termasuk kawasan Indonesia. Seperti halnya arus industrialisasi dan modernisasi, gelombang globalisasi mendesakkan berbagai pengaruh positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai komponen bangsa maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Dihadapkan secara serius dengan berbagai kompleksitas tantangan globalisasi dewasa ini, pertanyaan besar dan krusial yang harus kita jawab secara kritis adalah: Bagaimanakah seharusnya bangsa Indonesia –terutama para mahasiswa– menata, membina, dan membangun karakter di tengah-tengah arus dan gelombang globalisasi yang terus bergerak menghadang bangsa

Indonesia di setiap lini kehidupan dewasa ini? Inilah persoalan besar yang harus kita respons secara serius jika bangsa Indonesia ingin tetap *survive* di tengah-tengah gelombang era globalisasi yang terjadi secara gencar di berbagai belahan dunia sekarang ini.

Globalisasi: Arti dan Dampaknya

Istilah globalisasi sudah merupakan sebuah istilah yang banyak dipakai oleh para pakar untuk menjelaskan bahwa kehidupan antar-bangsa di seluruh dunia sekarang ini terjadi secara saling mempengaruhi dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Seluruh kawasan dunia dewasa ini sudah menggelobal, menyempit dan mengecil seperti suatu ruangan yang batas-batasnya (hampir) tidak jelas lagi. Apakah sebenarnya makna dan pengertian globalisasi itu? Robertson secara akurat mendefinisikan globalisasi itu sebagai *"the compression of the world into a single space and the intensification of consciousness of the world as a whole."*[1] Artinya, pemadatan dunia menjadi satu ruang tunggal dan terjadi peningkatan kesadaran tentang dunia ini sebagai satu kesatuan.

Dunia ini terasa menjadi semakin kecil dan sempit karena terciptanya sarana komunikasi, informasi dan transportasi moderen dan canggih yang bisa dengan cepat dan mudah dapat menghubungkan berbagai tempat di berbagai belahan bumi ini walaupun letaknya saling berjauhan satu sama lain. Jarak dan area sepertinya sudah tidak menjadi masalah karena berada dalam jangkauan yang cepat dan mudah melalui media moderen, teknologi komunikasi, informasi dan transportasi. Dengan demikian, hampir tidak ada bagian dari sisi-sisi kehidupan

---

[1] Dikutip dalam Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 46.

masyarakat dunia yang luput dari persentuhan dan persinggungan di era global seperti sekarang ini. Segalanya seperti berjalan secara transparan karena mudah tersiar dan tersebar melalui sarana teknologi komunikasi yang moderen dan canggih, baik media cetak maupun media elektronika. Dunia sudah menjadi *global village,* desa global, suatu desa yang seakan tanpa batas dan amat cepat dan mudah terjangkau karena kemajuan jaringan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi yang mendunia.

Globalisasi dewasa ini sudah menjadi salah satu isu aktual yang sering diperbincangkan secara luas oleh berbagai pakar, termasuk di negeri ini. Hal ini dapat dimaklumi karena globalisasi itu telah semakin menghadapkan kita kepada berbagai tantangan besar yang bersifat global dan kita dituntut untuk merespons isu-isu dan tantangan itu secara cepat dan akurat. Jika tidak, kita akan terlindas oleh tantangan-tantangan besar dan kompleks yang menyertai gelombang globalisasi itu. Tantangan tersebut sudah tentu meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek ekonomi, sosial budaya, dan kependidikan. Kehidupan antarmanusia dan antar-bangsa menjadi semakin kehilangan batas karena arus dan gelombang globalisasi semakin berdampak luas dan menerpa seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial-budaya, misalnya, kita dihadapkan kepada persentuhan nilai-nilai sosial budaya yang majemuk dan sangat intens, yang pada gilirannya, akan membawa dan memberi dampak terhadap pergeseran nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Globalisasi, menurut Featherstone, melahirkan "*global culture which is encompassing the world at the international level" (*budaya global yang merambah seluruh dunia pada tingkat internasional).[2] Pernyataan ini menunjuk pada adanya unsur-unsur

---

[2] *Ibid.*

dan nilai-nilai budaya yang menggejala dalam skala global dan mondial yang melintasi dinding-dinding budaya umat manusia di dunia ini. Kehidupan masyarakat menjadi ajang benturan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber dari ajaran, filsafat, sistem sosial dan pandangan hidup yang berbeda-beda.

Tantangan-tantangan dahsyat era globalisai dengan berbagai dampaknya yang luas tidak dapat dihindarkan lagi oleh seluruh umat manusia di dunia dewasa ini, termasuk oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kita secara kritis-selektif harus dapat mengambil segi-segi positif yang dibawa oleh arus globalisasi itu untuk memperkaya nilai-nilai budaya kita. Di sisi lain, yang perlu kita usahakan ialah menyadari adanya tantangan-tantangan eral globalisasi tersebut dan melakukan langkah-langkah antisipatif yang strategis dan tepat agar kita tidak larut dalam arus pengaruh negatif yang ditimbulkannya. Salah satu langkah strategis ke arah itu ialah membentuk daya tahan di kalangan bangsa Indonesia melalui penataan, penguatan dan pemberdayaan institusi-institusi pendidikan.

Tantangan Sosial-Budaya

Globalisasi, pada dasarnya, merupakan suatu proses dinamis yang bersifat dua arah. Artinya, dalam hubungan antarnegara, antarbudaya dan antar-bangsa terdapat kemungkinan besar untuk saling mempengaruhi secara timbal balik. Pada tataran praktik di lapangan, kita menyaksikan bahwa industrialisasi dan teknologi komunikasi berada di tangan bangsa-bangsa yang telah maju secara sosial budaya dan ekonomi. Karena itu, dinamika proses saling mempengaruhi itu akan berlangsung secara tak berimbang atau berat sebelah. Dalam hubungan ini, ada benarnya pendapat pakar yang menyatakan bahwa dalam arti

yang amat terbatas, globalisasi dapat ditafsirkan sebagai proses saling mempengaruhi; akan tetapi dalam arti yang luas, globalisasi lebih merupakan proses munculnya berbagai pengaruh dari kubu atau pusat yang kuat terhadap lingkaran yang lemah. Arus globalisasi dalam hubungan antar-bangsa dan antarnegara akan berlangsung satu-arah, yaitu dari negara-negara yang telah maju dan canggih di bidang industri dan teknologi ke negara-negara lain yang dalam kedua bidang ini masih tertinggal.[3]

Jika kita mengacu pada pernyataan pakar di atas, maka kita dapat mengetahui posisi masyarakat kita dalam percaturan informasi dan pergeseran budaya global dewasa ini. Masyarakat kita lebih banyak menyerap informasi yang dikemas oleh negara-negara maju. Masyarakat kita lebih sering diterpa pengaruh budaya asing. Sedikit atau banyak, lambat atau cepat, hal tersebut akan membawa pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku warga masyarakat kita jika mereka tak memiliki daya tahan mental, edukasional dan kultural yang kuat. Akibat dari persentuhan dan persinggungan sosial budaya ini, kita dengan sangat mudah dapat menyaksikan fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari, terutama orang-orang yang hidup di kawasan perkotaan. Hal ini terjadi karena kota merupakan pusat lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi dengan cepat akibat kemajuan teknologi informasi yang canggih. Media elektronik dan media cetak secara cepat menyuguhkan kepada masyarakat kota berbagai berita, informasi dan peristiwa-peristiwa, baik yang positif maupun yang negatif, yang terjadi di belahan dunia lain. Banyak orang di kota-kota besar yang memperlihatkan gaya hidup dan perilaku yang tidak lagi mengacu pada nilai-nilai budaya yang dianut oleh kebanyakan masyarakatnya. Gejala ini sering disebut sebagai gejala keterasingan dari budaya sendiri.

---

[3] Fuad Hasan, *Studium Generale* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), hlm. 16.

Gejala seperti disebutkan di atas tampaknya melanda sebagian golongan dan lapisan masyarakat kita, terutama di kota-kota besar. Banyak orang dari golongan kaya, misalnya, memperagakan gaya hidup mewah dan pola hidup konsumtif di tengah masyarakat miskin yang merupakan jumlah mayoritas. Hal yang disebut pertama ini dapat disaksikan, misalnya, pada gaya hidup selebriti dunia yang mempengaruhi para selebriti kita di Tanah Air. Kini banyak lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi dan selebriti dunia yang terkesan vulgar, mengguncang dan menghujat kemapanan. Fenomena ini berbeda dari lirik-lirik lagu yang didendangkan oleh penyanyi tempo dulu yang terkesan santun dan lembut. Demikian pula penampilan sebagian penyanyi dan penari latarnya. Mereka tertular gaya penyanyi dan musisi top dunia. Jika disebut satu demi satu mungkin banyak sekali perilaku warga masyarakat kita yang telah mengalami titik-titik pergeseran dan penyimpangan dari nilai-nilai budaya masyarakat yang semula dijunjung tinggi secara bersama-sama. Salah satu manifestasi dan bentuk pergeseran sistem nilai yang paling menonjol ialah makin longgarnya tata nilai yang menyangkut hubungan antarmanusia yang berbeda jenis, terutama di kota-kota besar di mana kontak-kontak ke dunia luar sangat dipermudah oleh tersedinya media elektronik dan media cetak.

Belum lagi kita berbicara tentang pengaruh cara hidup hedonistis yang hanya menekankan pada kesenangan duniawi semata. Pornografi dalam segala bentuk dan manifestasinya dapat diakses secara cepat dan mudah melalui jejaring sosial. Semua ini merupakan ancaman serius terhadap moralitas dan karakter bangsa, terutama kaum muda. Mereka yang rentan terhadap pengaruh negatif budaya luar adalah mereka yang pada umumnya memiliki kualitas pendidikan agama yang rendah dan lemah. Kebanyakan mereka kurang mampu memahami dan menghayati ajaran dan nilai-nilai agama, wawasan keagamaan mereka dangkal

dan sempit, sehingga mereka tidak memiliki daya tahan mental-spiritual dan daya tangkal moral terhadap pengaruh-pengaruh negatif globalisasi kebudayaan.

Daya tangkal yang lemah ini semakin parah apabila tingkat pendidikan mereka sangat rendah dan kehidupan sosial-ekonomi mereka sangat lemah. Akumulasi berbagai kelemahan ini menyebabkan pengaruh budaya luar yang negatif semakin mudah merasuki relung-relung kehidupan masyarakat, terutama kaum muda kita yang secara emosional kejiwaan masih rentan dan labil. Kita, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, tentu tidak ingin kehilangan sosok identitas dan jati diri di tengah-tengah gencarnya arus dan gelombang globalisasi budaya dewasa ini.

Di samping memiliki dampak negatif, era globalisasi tentu saja mempunyai dampak positif. Karena dunia sudah begitu menggelobal berkat kecanggihan teknologi informasi, komunikasi dan media massa, kita dengan sangat mudah dan cepat dapat mengetahui, misalnya, perkembangan sains dan teknologi yang dihasilkan oleh suatu negara. Info tentang perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di suatu belahan dunia dapat kita ketahui dengan cepat dan mudah berkat kecanggihan teknologi informasi, komunikasi, jejaring sosial dan media massa. Orang dapat berkomunikasi antar-benua dengan sangat mudah dan cepat berkat kecanggihan teknologi komunikasi. Dunia benar-benar menjadi *global village.*

Penguatan (Kembali) Karakter Bangsa

Usaha menangkal pengaruh negatif era globalisasi, bangsa Indonesia – terutama para mahasiswa – harus memperkuat (kembali) moralitas dan kararkter agar tidak terbawa arus negatif

era globalisasi itu. Menurut *The Random House Dictionary of the English Language, character* adalah *"the aggregate of features and traits that form the individual nature of some persons or things"*[4] (keseluruhan ciri khas sifat dan perangai yang membentuk watak sekelompok orang atau barang). Dalam kamus yang sama, *morality* (moralitas) diartikan sebagai *"conformity to the rule of right conduct ; moral or virtuous conduct"*[5] (sesuai dengan aturan perilaku yang benar ; moral atau perangai yang baik). Jadi karakter, watak dan moralitas sangat berkaitan melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang.

Karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis, maka pembentukan moralitas dan karakter bangsa Indonesia banyak diwarnai oleh ajaran agama. Sudah barang tentu agama mempunyai peranan penting dalam membangun dan menguatkan (kembali) moralitas, perilaku dan karakter bangsa Indonesia. Selain didasarkan pada agama, karakter bangsa Indonesia dibentuk oleh sistem nilai budaya dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi unsur-unsur ajaran agama, Pancasila (sebagai pandangan hidup bangsa) dan sistem nilai budaya yang hidup dan berkembang di Tanah Air ikut membentuk dan mewarnai kepribadian, moralitas dan karakter bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, penguatan dan pemberdayaan kembali nilai-nilai moral dan karakter bangsa hendaknya diarahkan kepada :

Pertama, penguatan (kembali) sendi-sendi kepercayaan dan keberagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan penguatan kembali pilar-pilar kepercayaan agama, diharapkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, sifat amanah dan tanggung jawab akan selalu menuntun dan membimbing perilaku

---

[4] *The Random House Dictionary of the English Language* (New York : Random House, Inc., 1983), hlm. 346.

[5] *Ibid.*

bangsa Indonesia. Dengan demikian, para pejabat, polisi dan aparat hukum tidak (lagi) melakukan perilaku koruptif-manipulatif. *Kedua,* penguatan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bangsa hendaknya dimaksimalkan. Hal ini penting sebagai benteng dan pertahanan moral, mental dan kepribadian bangsa Indonesia agar tidak mudah terhangut ke dalam arus perilaku a-moral (dekadensi moral), cara hidup hedonistis dan *split personality* (kepribadian yang pecah).

Ketiga, penguatan identitas sebagai bangsa Indonesia. Penguatan identitas dan jati diri bangsa ini penting agar bangsa Indonesia tetap memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat di tengah-tengah benturan paham, budaya, filsafat, nilai dan ideologi dari luar yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi itu. *Keempat,* pengembangan dan penguatan sikap mandiri dan sikap kompetitif yang sehat. Di tengah-tengah persaingan yang keras di era global, bangsa Indonesia perlu mempunyai sikap mandiri yang kuat dan sikap kompetitif yang sehat agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jika tidak memiliki kemandirian dan sikap kompetitif, bangsa Indonesia akan tersisih dan kalah dalam persaingan era global.

Kelima, penguatan sikap berorientasi ke depan *(future oriented)* agar lebih termotivasi dan terpacu untuk berprestasi besar di bidang ekonomi, sosial budaya, sains dan teknologi. Pencapaian yang besar dan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sains dan teknologi akan lebih meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. *Keenam,* penguatan dan pengembangan institusi-institusi pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan. Pendidikan adalah kunci kemajuan. Dari para sarjanalah diharapkan lahir ide-ide baru, temuan-temuan baru, ilmu pengetahuan baru dan teknologi baru yang, pada gilirannya, dapat mendorong dan memacu kemajuan bangsa di bidang sains dan teknologi.

Ketujuh, penguatan daya kreativitas dan pemberdayaan mental membangun dalam rangka melaksanakan modernisasi di segala bidang kehidupan. Pembangunan, reformasi atau modernisasi di segala bidang kehidupan merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia secara berkesinambungan dalam rangka menanggulangi keterbelakangan, pengangguran, kebodohan dan kemiskinan. *Kedelapan*, penegakan hukum, HAM dan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya dan sejatinya. Dengan cara demikian, diharapkan kasus mafia hukum dan mafia pajak dapat ditekan dan dihilangkan. Dalam pada itu, perlu dikembangkan pula sistem demokrasi yang solid dan sejati yang ditandai dengan berfungsinya demokratisasi dalam kehidupan bangsa, berlakunya sistem *checks and balances* yang efektif dan berjalannya penegakan HAM dan persamaan semua orang di muka hukum.

Demikianlah antara lain upaya-upaya strategis penguatan (kembali) moralitas dan karakter bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan dan diberdayakan di tengah-tengah arus globalisasi dewasa ini. Kita sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai komponen bangsa mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama untuk terus membangun, mengembangkan, memperkuat dan memberdayakan kembali moralitas dan karakter bangsa itu. Penguatan dan pemberdayaan (kembali) moralitas dan karakter bangsa dewasa ini sangat urgen dan strategis mengingat kompleksitas tantangan yang menyertai arus globalisasi itu. Segi-segi positif era globalisasi tentu saja kita ambil karena itu bermanfaat bagi kehidupan kita, tetapi hal-hal negatifnya tentu saja kita tolak. Kita memang dituntut untuk bersikap selektif dalam menghadapi era globalisasi.

VISI, MISI, DAN DESAIN PENDIDIKAN AGAMA

Di tengah munculnya berbagai gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dihadapkan pada kompleksitas tantangan yang menghadang di setiap lini kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, perlu penentuan prioritas program yang diharapkan dapat memberikan daya guna dan hasil guna dalam menjalankan kebijakan pembangunan itu sebagai realisasi amanat rakyat. Bagi Kementerian Agama, kompleksitas tantangan sosial sebagai akibat dari konflik-konflik komunal dan horisontal, langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan masalah keagamaan. Karena itu, usaha penanggulangan berbagai masalah tersebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, efektif, dan efisien dengan semangat persatuan dan kesatuan, sikap keberagamaan yang santun dan toleran, serta memberikan bimbingan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya dan usaha ke arah itu sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saja dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan REPETA bidang agama serta enam program pokok Kabinet Gotong Royong. Berdasarkan arah kebijaksanaan pembangunan tersebut, maka Kementerian Agama telah metetapkan visi dan misi hendak menjadikan agama sebagai pelopor etika berbangsa, inspirator dan motivator bagi terciptanya toleransi beragama. Kementerian Agama ingin meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual, etika keagamaan dan penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan agama; pengembangan kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadat, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan, serta memperkukuh kerukunan antarumat beragama atas dasar rasa saling hormat dan respek. Dalam usaha pencapaian visi dan misi tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan Pembangunan Bidang Agama sebagai berikut:

1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama yang tidak dogmatis;

4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadat, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadat haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya;
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat sendi-sendi kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 bab VI tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengenai sektor agama, telah disusun enam program pembangunan agama, yaitu: *Pertama*, program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadat; mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun kegiatan-kegiatan pokok yang terdiri dari: (1) pemberian bantuan untuk peningkatan sarana kehidupan beragama, penyediaan sarana dan prasarana penerangan agama, pembangunan dan rehabilitasi balai nikah; (2) penyediaan kitab suci dan literatur berbagai agama; (3) peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan haji; (4) pembangunan dan rehabilitasi asrama haji; (5) peningkatan mutu pelayanan ibadat haji; (6) pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf; (7) pembinaan keluarga sakinah; (8) optimalisasi fungsi dan peran tempat ibadat; dan (9) peningkatan pengelolaan zakat.

Kedua, program peningkatan penghayatan, pemahaman dan pengamalan agama serta peningkatan sendi-sendi kerukunan antarumat beragama. Program penting ini sudah barang tentu

memerlukan landasan idiil dalam pelaksanaannya di lapangan agar program tersebut bersifat inspiratif, integratif dan aplikatif. Perangkat-perangkat penunjang terciptanya sinergisitas antara struktur dan kultur, antara cita dan realita di lapangan, harus mampu mendasari program pengayaan penghayatan dan pengamalan agama serta memperkuat pemeliharaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama itu sendiri. Bertolak dari cara pandang teologis-sosiologis dan perspektif agamis-humanistis seperti ini, maka pembinaan dan pengembangan kehidupan umat beragama ini dituangkan dalam Tri Program Inti Kementerian Agama, yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agama;
2. Terhindarnya masyarakat dari prilaku radikal, ekstrim dan tidak toleran serta eksklusif dalam kehidupan beragama;
3. Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara; memperkuat dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat bergama dan membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah diprogramkan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas penyuluh agama; (2) pemberdayaan tempat ibadat; (3) rehabilitasi mental korban pasca-kerusuhan sosial dan penyalahgunaan narkoba; (4) pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama; (5) pembentukan jaringan kerjasama antarumat beragama; (6) pemberdayaan lembaga-lembaga

keagamaan; dan (7) meningkatkan mutu pelayanan informasi keagamaan terhadap masyarakat.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan agama. Peningkatan kualitas pendidikan agama di Sekolah Umum (SD, SMP dan SMA) dan Perguruan Tingggi Umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa dan mahasiswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Sasarannya adalah menanggulangi pelanggaran etik dan moral siswa dan mahasiswa, baik di lingkungan sekolah/Perguruan Tinggi maupun di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun program pokok sebagai berikut: (1) penyempurnaan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata sehari-hari; (2) mengintegrasikan materi budi pekerti dengan mata pelajaran lain yang relevan; (3) penataran peningkatan kualitas tenaga kependidikan; penyediaan bantuan sarana peribadatan sekolah; (4) pengembangan manajemen pendidikan; penyempurnaan metode belajar mengajar pendidikan agama; uji coba kurikulum pendidikan agama berbasis kompetensi; (5) mengadakan lomba keterampilan antarpelajar; dan (6) pengembangan pesantren kilat. Sementara untuk tingkat Perguruan Tinggi telah dirancang kegiatan pokok sebagai berikut: (1) peningkatan mutu dosen; (2) penambahan literatur; (3) peningkatan fasilitas penunjang; dan (4) pendalaman substansi serta materi guna penambahan pengetahuan agama.

Keempat, pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Pembinaan lembaga ini meliputi: pesantren, meunasah, dayah, ormas Islam, lembaga dakwah, sekolah minggu, yayasan pendidikan Hindu maupun

Budha. Sasaran pembinaan ini adalah meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam perubahan sosial. Kegiatan pokok dalam pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan meliputi: (1) pengembangan lembaga sosial keagamaan dan perannya dalam pembangunan nasional; (2) pemberdayaan kelembagaan; (3) peningkatan peran lembaga pendidikan tradisional keagamaan yang mengemban misi dakwah dan pendidikan; (4) peningkatan kualitas manajemen; (5) pemberian subsidi; dan (6) pemberdayaan kelompok kerja pesantren.

Kelima, program pembinaan pendidikan di sekolah umum berciri khas Islam dan Perguruan Tingggi Agama. Sasaran program ini, antara lain adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah); terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat; terwujudnya manajemen berbasis sekolah di lingkungan madrasah.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan pokok-pokok program sebagai berikut: (1) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di MI dan MTs; (2) pemberian subsidi bagi madrasah swasta; (3) penerapan pendidikan alternatif bagi masyarakat kurang beruntung (korban kerusuhan sosial, anak jalanan, yatim piatu dll.); (4) revitalisasi dan penggabungan MI-MI dan MTs-MTs agar tercapai efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh fasilitas yang memadai; (5) memberikan beasiswa bagi anak miskin dan berprestasi; (6) memperluas daya tampung Madrasah Aliyah (MA); (7) ujicoba kurikulum berbasis kompetensi; (8) meningkatkan standar mutu MA; (9) pengembangan lomba karya ilmiah; (10) pengembangan program keterampilan; (11)

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan; (12) transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Program di bidang Perguruan Tinggi Agama diarahkan pada penerapan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi; peningkatan kualitas; pemerataan kesempatan memasuki Perguruan Tinggi. Berbagai program yang disusun untuk mencapai sasaran tersebut antara lain adalah penyesuaian program studi dengan kebutuhan pembangunan nasional; peningkatan kualitas tenaga pengajar; peningkatan fasilitas; penyempurnaan kurikulum; meningkatkan kerjasama antar Perguran Tinggi.

Keenam, pembangunan bidang hukum melalui Peradilan Agama. Sasaran program ini adalah terciptanya lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Untuk mencapai hal tersebut, telah dirancang program kegiatan: meningkatkan pengawasan; pembenahan sistem rekrutmen hakim agama; menyempurnakan kurikulum pendidikan hukum; serta meningkatkan profesionalisme para hakim agama.

Kementerian Agama, sebagai ujung tombak pembangunan di bidang agama diharapkan lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan rensponsif terhadap laju perubahan dan gerak perkembangan di berbagai sektor kehidupan, baik perubahan yang berdampak positif maupun perubahan yang berdampak negatif. Kontribusi dan darma bakti yang signifikan dari Kementerian Agama selalu dituntut bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-citakan oleh masyarakat melalui program pembangunan bidang agama. Kontribusi dan amal bakti Kementerian Agama semacam ini sejalan dengan mottonya: "Ikhlas Beramal."***

MENAKAR KARYA KEPENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

Sejak kelahirannya (1926) sampai sekarang (2010), Nahdlatul Ulama (NU) sudah berusia 84 tahun. Sejarah NU dapat dibagi ke dalam lima kurun waktu. Kurun waktu pertama, 1926-1945, NU berkiprah sebagai organisasi sosial keagamaan. Dari 1945-1952 (kurun waktu kedua), NU terjun ke dalam bidang politik, bergabung dengan Masyumi. Keluar dari Masyumi, NU memasuki perode ketiga sejarahnya (1952-1973), berkarier secara mandiri dan total di pentas politik. Menyusul restrukturisasi politik oleh rezim Orde Baru, NU dari 1973-1984 (kurun waktu keempat) tetap berkiprah di arena politik, berfusi dengan PPP. Kurun waktu kelima (1984-sekarang), NU menggeluti lagi bidang sosial keagamaan dengan mengusung panji-panji kembali ke khittah 1926.

Kiprah Politik

Dari fakta sejarah di atas, NU berkiprah di gelanggang politik selama 39 tahun dan 45 tahun beramal di bidang sosial keagamaan. Di pentas politik nasional, NU memperlihatkan kiprah

yang menonjol. Misalnya, di tahun 1947 NU mengeluarkan resolusi jihad yang antara lain berisi seruan kepada warga NU dan para pejuang Indonesia untuk melawan Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia, mempertahankan kemerdekaan RI yang baru saja diproklamasikan, membela kedaulatan RI, dan mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Melalui tokohnya, Wahid Hasyim, NU ikut mereformulasi Pancasila (usulan Soekarno) sehingga Pancasila dapat disepakati dan diterima sebagai dasar negara.

Ketua syuriah NU, KH Mahfudz Siddiq, pada tahun 1980-an mempertegas visi kenegaraan NU, bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila sudah final, bukan merupakan tujuan antara atau sementara. Visi kebangsaan NU, sebagaimana diartikulasikan oleh Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), juga sangat kuat dengan mengusung pluralisme sebagai asas dan pilar keindonesiaan. Ketika menjabat presiden RI ke-4, Gus Dur menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional (fakultatif), yang kemudian dijadikan hari libur nasional resmi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Lebih jauh, Gus Dur menghidupkan kembali tradisi keagamaan dan kesenian Tionghoa (seperti barongsai) sehingga mereka dapat melaksanakan ibadat dan mementaskan kesenian mereka secara terbuka. Praktik-praktik seperti ini sangat terlarang pada masa rezim Orde Baru.

Karya Kependidikan

Naluri dan keterlibatan NU dalam ajang politik praktis bukannya tanpa resiko. Perhatian NU di bidang kependidikan menjadi terpecah dan kurang efektif. Bukan saja kurang efektif dalam merawat lembaga-lembaga pendidikan yang ada, tetapi juga dalam upaya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang

baru. Bidang garapan kependidikan telah 'terkalahkan' oleh naluri dan keterlibatan NU di arena politik selama 39 tahun (hampir separuh dari usianya). Sudah saatnya NU mengubah visi dan paradigmanya untuk lebih banyak berkonsentrasi di bidang amal sosial keagamaan, khususnya di bidang kependidikan, sesuai khittah berdirinya di tahun 1926. Di bidang pendidikan umum, terdapat sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang dikelola oleh Ma'arif NU. Begitu pula, di bidang pendidikan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi (seperti Universitas Wahid Hasyim Semarang) yang bernaung di bawah NU. Tapi jumlahnya sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah warga NU yang sangat besar. Belum lagi berbicara tentang karya-karya sosial seperti pendirian rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. NU belum memiliki rumah sakit yang dapat dibanggakan secara nasional.

Terkesan bahwa NU tidak mempunyai akar tradisi kependidikan yang kuat. Pesantren-pesantren yang bergabung di bawah NU sebenarnya bukan karya murni NU. Pesantren Tebuireng, misalnya, didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai pendiri dan tokoh NU, tetapi tidak didirikan oleh NU sebagai organisasi. Banyak tokoh NU yang mendirikan dan mengelola pesantren, kemudian pesantren-pesantren tersebut bergabung di bawah NU karena kesamaan visi keagamaan yang disebut *ahlussunnah wal jama'ah*. Komunitas pesantren-pesantren inilah yang banyak menyumbang perolehan suara NU ketika NU masih berkiprah sebagai partai politik. Sampai saat ini, belum ada pesantren yang merupakan karya tunggal NU dan karya murni NU. NU sebagai organisasi belum mendirikan dan mengelola pesantren sebagai karya kependidikannya. Hal ini tentunya sangat memperihatinkan jika diingat usia NU sudah mencapai 84 tahun.

Naluri dan kegenitan politik NU harus dikurangi, bahkan dihentikan. Godaan politik terhadap pimpinan penting dan pimpinan teras NU – seperti terlihat pada KH Hasyim Muzadi dan Shalahuddin Wahid yang mau digandeng sebagai cawapres pada pilpres 2004 (tanpa mengurangi rasa hormat kepada kedua beliau dan hak politik kedua beliau) – tidak usah terjadi lagi di masa depan. Sebaiknya NU dan jajaran pimpinannya sepenuhnya berkonsentrasi di bidang kependidikan agar melahirkan karya-karya kependidikan yang besar dan strategis yang manfaatnya dirasakan secara signifikan oleh umat dan bangsa secara keseluruhan.***

MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN ISLAM

Ada dua fenomena penting yang sangat mewarnai sikap, perilaku dan gerakan Muhammadiyah. Dua fenomena menarik ini adalah gerakan purifikasi dan gerakan reformasi Islam yang mengalir deras dalam tubuh Muhammadiyah. Dua ciri khas ini tak dapat dipisahkan karena telah terintegrasi dan menyatu dalam sikap, perilaku dan gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Purifikasi dan reformasi Islam sebagai watak dasar dan karakteristik gerakan Muhammadiyah selalu mengilhami dan mendasari pergumulan Muhammadiyah dengan perubahan-perubahan zaman yang dilalui dan dihadapinya. Apakah sebenarnya arti penting karakteristik dasar purifikasi dan reformasi Islam itu dalam teologi Muhammadiyah?

Purifikasi Islam

Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) setelah dia pulang dari studinya di Mekkah. Pada masa studinya di Mekkah, Dahlan secara

intens dan kreatif melakukan dialog ide dan dan dialog pemikiran dengan tokoh-tokoh pembaru Muslim di Timur Tengah pada waktu itu. Salah seorang di antaranya adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahab (meninggal pada tahun 1792) dan para pendukungnya. Muhammad Ibnu Abdul Wahab dipandang sebagai tokoh pembaru Muslim bukan karena dia menghasilkan pemikiran atau interpretasi baru tentang doktrin-doktrin Islam, akan tetapi karena seruannya untuk kembali kepada Alqur'an dan hadits, atau kembali kepada ajaran-ajaran Islam klasik sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam konteks inilah, paham dan gerakan Ibnu Abdul Wahab dikenal sebagai paham dan gerakan puritan dalam Islam. Kaum Wahabi menolak setiap bentuk inovasi keagamaan (*bid'ah*).

Dapat dipastikan bahwa puritanisme Islam yang dianut oleh Dahlan dan kemudian diajarkannya dalam perkumpulan Muhammadiyah mendapatkan sebagian inspirasinya dari Wahabisme. Dengan berpegang teguh kepada ide puritanisme Islam ini, Muhammadiyah mengesampingkan segala bentuk yang dianggapnya sebagai bid'ah karena hal itu diyakininya sebagai bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah, penolakan terhadap inovasi (*bi'dah*) dan akresi (*acretion,* tambahan) dalam agama itu dimaksudkan untuk memelihara kemurnian agama, kemurnian akidah dan kemurnian ibadat. Inilah sesungguhnya makna hakiki dan arti penting paham puritanisme Islam yang dianut oleh Muhammadiyah.

Karena wataknya yang puritan, Muhammadiyah tidak mengapresiasi atau tidak menganjurkan tradisi budaya dan praktik keagamaan seperti *tahlil*, upacara kematian seseorang, *tawasul*, tarekat dan lain-lain yang dilakukan oleh kelompok komunitas Muslim yang lain. Jika contoh-contoh ini diturunkan di sini, hal

tersebut bukan dimaksudkan untuk membesar-besarkan masalah *"khilafiah furui'yah"* ke permukaan kembali, tetapi untuk lebih memperjelas dan mempertegas wacana yang saya angkat tentang watak puritanisme Islam yang dipegangi oleh Muhammadiyah.

Reformasi Islam

Ide reformasi Islam diperoleh oleh KH Ahmad Dahlan antara lain dari dua tokoh pembaru Muslim, yaitu Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) beserta murid sekaligus sahabatnya Muhammad Abduh (1849-1905). Dua tokoh pembaru Muslim inilah yang mewarnai dan meniupkan angin pembaruan Islam di Timur Tengah dan pengaruhnya berhembus sampai ke Indonesia. Dahlan menampung ide-ide reformasi dan modernisasi yang dicanangkan oleh Afghani dan Abduh serta mengajarkannya dalam perkumpulan Muhammadiyah yang didirikannya. Seperti halnya Afghani dan Abduh, Dahlan melalui saluran organisasi Muhammadiyah mengumandangkan semangat untuk berijtihad, menyerukan umat Islam untuk melawan penjajah, membangkitkan umat Islam dari kelelapan tidurnya untuk membangun kehidupan duniawi yang maju. Dengan seruan ini, umat Islam menjadi sadar dan tergerak untuk bekerja, berupaya dan berkarya untuk melepaskan diri dari kebodohan, keterbelakangan, kebekuan dan kejumudan berpikir.

Gerakan modernisasi dan reformasi Islam terus dilakukan oleh Muhammadiyah dalam segala aspek kehidupan. Keterlibatan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia mendenyutkan gerak aktivitas yang luas dan kompleks. Dalam lapangan pendidikan, Muhammadiyah telah membangun sekolah-sekolah dari Taman Kanak Kanak sampai Perguruan Tinggi. Dalam bidang pelayanan kesehatan, Muhammadiyah telah mendirikan

klinik, balai pengobatan, rumah bersalin dan rumah sakit yang cukup banyak dan bertebaran di seluruh Tanah Air. Dalam bidang pelayanan sosial, Muhammadiyah berhasil membangun panti asuhan (untuk menampung anak yatim piatu) dan panti-panti untuk orang jompo dan sebagainya. Belakangan ini Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang perbankan (mendirikan Bank Persyarikatan Muhammadiyah) untuk melayani dan membantu perkreditan bagi umat dan rakyat yang membutuhkannya. Di bidang komunikasi massa, Muhammadiyah mengelola dan menerbitkan majalah *Suara Muhammadiyah* yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan ide-ide para tokoh Muhammadiyah kepada para anggotanya.

Jika di tingkat praksis Muhammadiyah menunjukkan sejumlah prestasi besar, tapi tidak demikian halnya dalam bidang pembaruan dan reformasi pemikiran Islam. Para pengamat menilai gerakan reformasi pemikiran Islam di kalangan Muhammadiyah berjalan lamban dan bahkan mandek. Melihat kenyataan ini, sudah saatnya para tokoh Muhammadiyah mencari terobosan baru untuk mendobrak kebekuan dan kemandekan kreativitas berpikir dalam tubuh Muhammadiyah. Sudah saatnya Muhammadiyah yang mempunyai banyak intelektual melakukan refungsionalisasi dan revitalisasi gerakan berpikir rasional dan kontekstual untuk melahirkan karya-karya pemikiran yang strategis dan bertanggung jawab.

Dalam hubungan ini, Muhammadiyah perlu mengintegrasikan kemampuan rasional ilmiah dengan kemampuan ijtihad Alqur'aniyah dalam merespon setiap fenomena perubahan masyarakat dan zamannya. Pada tahun 1916, Profesor Snouck Hurgronje menulis, *"every new period in the history of civilization obliges a religious community to undertake a*

general revision of the contents of its treasury" (Setiap periode baru dalam babakan sejarah peradaban mengharuskan suatu komunitas agama melakukan revisi menyeluruh terhadap isi khazanah perbendaharannya). Pandangan Profesor Snouck Hurgronje ini sangat tepat dilakukan oleh Muhammadiyah.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Muslim modernis, hendaknya mengerahkan segala kemampuan untuk menyusun pemikiran-pemikiran baru guna melakukan revisi, reformulasi, reinterpretasi dan restrukturisasi gerakan, program, ideologi dan segala isi khazanah pembaruannya. Revisi, perbaikan, revitalisasi dan refungsionalisasi ini sangat penting dan strategis karena dengan demikian organisasi sosial keagamaan semacam Muhammadiyah akan tetap mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah transformasi sosial dan arus perubahan masyarakat dan zamannya.

Lima Bidang Pembaruan

Tampaknya revisi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap isi khazanah perbendaharaan Muhammadiyah itu disadari betul oleh fungsionaris dan tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri. Prof Dr M Amien Rais, misalnya, pernah mengajukan gagasan *tajdid* (pembaruan) yang terdiri dari lima bidang pokok. *Pertama, tajdid* (pembaruan) dalam bidang pembersihan dan pemurnian akidah dari kotoran-kotoran syirik, baik yang bersifat fisik maupun syirik dalam masalah sosial, budaya, ekonomi dan ideologi. *Kedua*, pembaruan dalam bidang organisasi. Amien Rais memandang pembaruan organisasi sebagai suatu hal yang sangat penting dan mendesak sebab, menurut dia, kebenaran yang tidak didukung oleh organisasi yang kuat akan dilindas oleh ketidakbenaran yang ditopang oleh organisasi yang rapi dan kuat.

K*etiga,* pembaruan dalam tubuh Muhammadiyah hendaknya ditujukan untuk memperbanyak kader Muhammadiyah baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Dengan bertambahnya kader-kader Muhammadiyah dalam arti kuantitas maupun kualitas, maka Muhammadiyah akan memiliki lebih banyak lagi tenaga-tenaga potensial dan profesional untuk menunjang kegiatan-kegiatan organisasi. *Keempat*, *tajdid* yang berkaitan dengan etos kerja yang selama ini sudah tergambar secara kuat dalam gerak aktivitas Muhammadiyah dan organisasi-organisasi pendukung yang dibentuknya. Pembaruan di bidang ini menghendaki terciptanya reaktualisasi dan revitalisasi kegiatan dan program Muhammadiyah. *Kelima*, pembaruan kepemimpinan dalam tubuh Muhammadiyah dengan menempatkan personel-personel yang andal dan bersifat kolektif. Sosok pribadi yang andal ini mencakup keandalan dalam pengertian agama, ilmu pengetahuan, moral, kejujuran, kepribadian, dan tak kalah pentingnya adalah menghindarkan diri dari kepemimpinan berdasar satu tokoh sentral. Kepemimpinan kolektif dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan kepemimpinan kolegial dan multidimensional.

Pembaruan Pemikiran Islam

Pembaruan dan perbaikan yang digagas oleh Amien Rais di atas tampaknya sudah cukup mendasar dan menyeluruh. Gagasan *tajdid* dari Amien Rais itu terasa baik dan segar dan tentu saja dapat diterima oleh warga Muhammadiyah. Akan tetapi, dalam kaitan ini, gagasan pembaruan Amien Rais tersebut perlu dibarengi dengan gagasan reaktualisasi pembaruan pemikiran Islam. Kesinambungan gagasan pembaruan pemikiran Islam hendaknya tetap menjadi proyek Muhammadiyah agar citra

pembaruan yang melekat pada diri Muhammadiyah tetap hidup dan memancar. Tanpa diikuti revisi dan pembaruan pemikiran Islam, maka Muhammadiyah hanya cenderung mengalami perbaikan dan pembaruan dalam bentuk fisik luarnya saja (formalitas).

Pembaruan pemikiran Islam bertumpu pada kerja-kerja *ijtihad*. Ijtihad adalah upaya nalar untuk memformulasikan hukum-hukum baru agama bagi perkara-perkara yang timbul akibat gerak laju kehidupan masyarakat dan tetap mengacu kepada sumbernya, yaitu Alqur'an dan hadits. Ijtihad juga merefleksikan penggunaan potensi akliah dan ruhaniah untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang digali dari Alqur'an dan hadits. Banyak pengamat yang menggugat Muhammadiyah bahwa kerja-kerja ijtihad di kalangan Muhammadiyah terasa kurang atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, pembaruan pemikiran Islam berjalan lamban, untuk tidak mengatakan mandek, dalam tubuh Muhammadiyah.

Profesor Harun Nasution pernah mengatakan bahwa Muhammadiyah hanya mengambil gagasan pembaruan Muhammad Abduh dari segi gerakan amal sosialnya saja, dan tidak mengambil kerangka landasan teologinya yang rasionalistik. Akibarnya, Muhammadiyah hanya mencapai prestasi-prestasi besar di bidang sosial kemasyarakatan, tetapi kurang atau tidak terlalu menyentuh prestasi pembaruan pemikiran Islam. Suatu organisasi keagamaan yang tidak berasaskan teologi rasionalistik, menurut Harun Nasution, adalah tradisional. Prof Harun tampaknya ingin mengatakan agar Muhammadiyah mengambil segi-segi positif pemikiran rasional Mu'tazilah. Dalam hal ini, tentu saja Muhammadiyah tidak harus mendewa-dewakan akal. Pemikiran Mu'tazilah dalam beberapa hal memperlihatkan aspek-aspek positif, misalnya dalam mengartikan ayat-ayat *mutasyabihat*

yang antara lain menafsirkan ”tangan Tuhan” sebagai kekuasaan Tuhan atau kemurahan Tuhan. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengartikan ”tangan” Tuhan secara harfiyah, yaitu sebagai ”tangan” Tuhan tanpa harus ditanyakan bagaimana tangan Tuhan itu *(bila kaifa, without asking how).*

Menyadari realitas di atas, sudah seharusnya Muhammadiyah melakukan revisi terhadap ideologinya yang terkesan bersifat skripturalis dan tekstualis, karena hal itu amat penting untuk mendobrak kemandekan dalam gerakan ijtihad. Dengan melakukan revisi terhadap tatanan ideologinya itu, maka Muhammadiyah akan mampu menempatkan ijtihad pada posisi yang dinamis, kreatif dan inovatif dalam rangka mempercepat pembaruan pemikiran Islam. Dalam konteks historis dan ideologis inilah, revisi yang mendasar dan menyeluruh terhadap khazanah perbendaharaan Muhammadiyah akan mempunyai nilai dan makna yang sangat luas dan mendalam pada masa masa mendatang.

MENGAPRESIASI KARYA-KARYA KEMANUSIAAN MUHAMMADIYAH

Pada masa hidupnya, KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) sangat prihatin menyaksikan banyaknya adat istiadat dan perilaku animistis dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya. Adat istiadat dan perilaku animistis ini berkembang dan diwarisi dari sistem kepercayaan masyarakat Indonesia pra-Islam. Setelah Islam masuk dan berkembang di Indonesia, adat dan perilaku animistis ini belum hapus sama sekali dan justeru terjadi proses sinkritisasi dengan sistem kepercayaan Islam dalam sebagian kehidupan masyarakat Islam di Jawa. Menyaksikan kenyataan-kenyataan seperti itu, Ahmad Dahlan sebagai orang yang taat beragama merasa prihatin sekali dengan banyaknya praktik dan perilaku yang dipandangnya sebagai tahyul, khurafat dan bid'ah. Ahmad Dahlan terpanggil hatinuraninya untuk melenyapkan perilaku dan praktik-praktik semacam itu karena dipandangnya tidak cocok dan tidak sesuai dengan ajaran tauhid Islam. Karena dorongan inilah, Ahmad Dahlan kemudian mendirikan perkumpulan Muhammadiyah pada tahun 1912, yang salah satu tujuan pokoknya hendak membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh luar dan praktik-praktik yang dinilainya sangat merusak itu.

Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan setelah dia kembali dari studinya di Mekkah.

Pemurnian Ajaran Islam

Sistem kepercayaan Islam terletak pada sentralitas puritas tauhid. Tauhid adalah pengakuan dan keyakinan secara mendasar, total dan integral tentang keesaan Allah. Allah dalam Islam merupakan titik awal, titik sentral dan titik tuju dari setiap akidah dan ibadat yang mewarnai perilaku dan amal setiap Muslim. Kepada Allah sajalah setiap Muslim berakidah, menyembah dan beribadat. Segala bentuk tuhan-tuhan sekuler sama sekali tidak mendapat tempat dalam sistem kepercayaan Islam. Inilah sebenarnya ide pemurnian Islam yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyahnya. Ahmad Dahlan merasa terinspirasi dan terpanggil oleh firman Allah dalam Kitab Suci Alqur'an:

> Hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah segala yang mungkar… (Q.S. Ali Imran/3:104).
>
> Kamu sekalian adalah umat terbaik yang ditampilkan ke tengah-tengah manusia untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah segala yang mungkar... (Q.S. Ali Imran/3: 110).

Bagaimanakah respons dan cara Ahmad Dahlan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu? Dia mendirikan Muhammadiyah agar ″ajakan″ kepada kebaikan dan ″pencegahan″ terhadap kemungkaran itu berjalan secara terencana, terprogram, terarah dan efektif hasilnya. Dalam

keyakinan Ahmad Dahlan, tanpa suatu organisasi yang kuat dan rapi yang melibatkan kerjasama dan tanggung-jawab sekelompok orang, ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran itu tidak atau kurang berhasil dengan baik. Logikanya, dengan menggunakan dan melalui organisasi yang baik, kuat, rapi dan terprogram dalam kerja sama dan tanggungjawab bersama, maka ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran akan sangat efekti dan jauh lebih berhasil.

Visi dan misi Ahmad Dahlan benar. Organisasi Muhammadiyah yang didirikannya tampil sebagai organisasi dakwah yang moderen dalam arti ia melakukan aktivitas dakwah secara terorganisir, rapi dan baik. Gerakan dakwah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah selain mencakup dakwah *bil lisan* juga meliputi dakwah *bil hal* yang menekankan kepada keteladanan, perbuatan kongkret dan karya-karya kemanusiaan yang bermanfaat kepada orang-orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Gerakan dakwah *bil hal* yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikannya dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah baik yang formal maupun yang non-formal memegang peranan penting dan strategis dalam melakukan proses edukasi dan purifikasi Islam. Secara kangkret hasilnya terasa sekali dalam lapisan masyarakat kota di mana Muhammadiyah mempunyai basis dan akar-akar kekuatannya.

Panti-Panti Sosial

Gerakan dakwah *bil hal* yang digarap oleh Muhammadiyah diwujudkan pula dalam bentuk membangun dan mengelola panti-

panti sosial seperti panti asuhan anak-anak yatim piatu dan panti jompo. Di sini Muhammadiyah memiliki 'kepekaan' moral dan sekaligus 'kepekaan' sosial dan tanggungjawab sosial terhadap anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin dan orang-orang yang terhempas dan tercampak dari kelayakan hidup. Sensitivitas moral, kepekaan sosial dan tanggungjawab sosial dalam diri Ahmad Dahlan (yang kemudian diterapkan dalam gerakan Muhammadiyah) dimotivasi oleh ajaran Allah:

> Tahukah kamu, siapakah para pendusta agama itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin… (Q.S. Al-Ma'un/107: 1-3).

Untuk tidak tergolong ke dalam golongan pendusta agama, Muhammadiyah memikul tanggung jawab moral dan tanggungjawab sosial dengan menampung dan menyantuni anak-anak yatim piatu, orang-orang jompo dan orang-orang fakir miskin di panti-panti yang didirikannya. Betapa banyak anak yatim piatu, orang-orang miskin dan orang-orang terlantar yang telah tertolong hidup mereka oleh gerakan dakwah *bilhal* Muhammadiyah ini. Anak-anak yatim piatu yang berada di panti-panti asuhan Muhammadiyah itu dibina dan dididik mental spiritual mereka sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental mereka. Telah banyak dari mereka yang dapat hidup mandiri setelah mereka ditampung, diasuh dan dibesarkan untuk beberapa tahun lamanya di panti-panti Muhammadiyah. Muhammadiyah dewasa ini (1989) sudah mempunyai 114 panti asuhan anak yatim dan 5 panti jompo. Dalam hubungan ini, jelas bahwa Muhammadiyah telah membantu negara dalam memelihara anak-anak yatim piatu, orang-orang fakir miskin dan orang-orang terlantar sebagaimana diamanatkan oleh UUD-45

Bab XIV pasal 34 yang berbunyai, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

Dakwah Lewat Majalah

Sebagai organisasi modernis Muslim, Muhammadiyah melakukan kiprah dan gerakan dakwahnya dengan menggunakan majalah sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa yang moderen. *Suara Muhammadiyah* adalah majalah resmi Muhammadiyah yang terbit di Yogyakarta, kota yang menjadi pusat organisasi ini. *Suara Muhammadiyah* terbit secara teratur dan merupakan kebanggaan para anggota dan simpatisannya yang tersebar di seluruh Tanah Air. Kecuali memuat informasi-informasi tentang perkembangan dunia Islam, gerak dinamika Islam di Indonesia, kamuhammadiyahan dan perkembangan-perkembangan Muhammadiyah di tingkat lokal atau daerah di seluruh Indonesia, *Suara Muhammadiyah* memuat pula tulisan-tulisan dakwah.

Majalah *Suara Muhammadiyah* tersebar ke daerah-daerah melalui cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah di seluruh pelosok Tanah Air. Dengan demikian, jangkauan pesan-pesan dakwah yang disampaikan lewat majalahnya itu bisa mencapai ribuan atau jutaan anggotanya di seluruh Tanah Air. Dakwah lewat majalah akan memiliki daya gugah yang efektif karena ia dapat dibaca berulang-ulang oleh para anggota Muhammadiyah sendiri. Ia terekam dalam bentuk tulisan dan bisa didokumentasikan. Tentu saja, dakwah melalui majalah "Suara Muhammadiyah" ini akan terus memberikan kesadaran kepada para anggota Muhammadiyah (bisa jadi pula masyarakat di luar Muhammadiyah) untuk meningkatkan keimanan dan keberagamaan.

Harapan ke Depan

Muhammadiyah telah menampilkan dirinya sebagai sosok organisasi moderen dalam gerakan dakwah Islam di Indonesia. Gerakan dakwahnya selain meliputi dakwah *bil lisan* juga mencakup dakwah *bil hal* yang bertitik tekan kepada keteladanan, amal-amal sosial kemasyarakatan, karya-karya kemanusiaan dan perbuatan/pelayanan sosial yang kongkret yang bermanfaat bagi kemaslahatan dan kebajikan orang banyak. Dakwah yang bertujuan untuk pemurnian dan purifikasi Islam banyak dilakukan oleh Muhammadiyah terutama melalui saluran-saluran edukasi di lapisan masyarakat kota. Sedang dakwah *bil-hal* diwujudkan oleh Muhammadiyah dalam bentuk pembangunan dan pengelolaan panti-panti sosial seperti panti asuhan anak yatim piatu dan panti jompo.

Dakwah *bil hal* ini dikerjakan oleh Muhammadiyah sebagai refleksi dan realisasi kepekaan sosial dan tanggung jawab sosial yang didorong oleh ajaran-ajaran sosial Islam. Tak dapat diragukan bahwa Muhammadiyah telah, sedang dan terus akan berkiprah dalam bidang garapan ini. Itu berarti bahwa Muhammadiyah terus ikut membantu negara dalam memelihara para fakir miskin dan anak-anak terlantar seperti yang diamanatkan oleh UUD-45 Bab XIV pasal 34. Semoga Muhammadiyah selalu sukses dalam memacu gerak dan kiprahnya yang beragam dan berskala luas, terutama dalam mewujudkan dan meningkatkan amal-amal sosial kemasyarakatan dan karya-karya kemanusiaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena sebaik-baik orang (tentu juga organisasi atau institusi) adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain.***

MENATAP SOSOK MUHAMMADIYAH KINI

Tampaknya sangat beralasan apabila Prof Kurshid Ahmad dalam artikelnya yang berjudul *"Islam and the Problem of Educational Reconstruction"* mengatakan, *"Of all the problems that confront the Muslim World today, the educational problem is the most challenging. The future of the Muslim World will depend upon the way it respons to this challenge."* (Di antara semua problem yang dihadapi oleh Dunia Muslim dewasa ini, problem pendidikan adalah yang paling menantang. Masa depan Dunia Muslim akan bergantung pada cara bagaimana ia menjawab tantangan ini). Prof Fazlur Rahman mengemukakan ide yang senada dengan Prof Kurshid Ahmad. Dalam bukunya yang bertajuk *"Islam,"* Prof Fazlur Rahman, sarjana asal Pakistan yang (pernah) mengajar sebagai guru besar bidang studi pemikiran Islam di Universitas Chicago (Amerika Serikat) berpendapat, *"Any Islamic reform now must begin with education"* (Pembaruan Islam dalam bentuk apa pun harus mulai dengan pendidikan).

Dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1912 KH Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya telah menjawab dan memulai pembaruan Islam itu, dengan menggarap bidang sosial, dakwah, dan pendidikan. Gagasan dan gerakan pembaruan

yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terutama lewat institusi-institusi pendidikannya, berlangsung begitu memikat dan mengesankan di Tanah Air ini. Saat melakukan pembaruan pendidikan, Ahmad Dahlan berani "melawan arus" dengan mengadopsi sistem pendidikan Barat (Belanda) ke dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Sistem kelas dengan pemberian mata pelajaran umum (seperti matematika, ilmu hayat, ilmu bumi, dst) yang diterapkan di sekolah-sekolah Belanda diadopsi oleh Dahlan ke dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Seraya memberikan mata pelajaran umum dengan sistem kelas, Dahlan tetap mempertahankan pemberian mata pelajaran agama (seperti tauhid, fikih, akhlak, tarikh, st) dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Inilah "pembaruan" yang dilakukan oleh Dahlan dan sekaligus diterapkan dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Ini pulalah yang membedakan sistem pendidikan Muhammadiyah dengan sistem pendidikan pesantren yang saat itu hanya mengajarkan mata pelajaran agama dengan memakai sistem tradisional yang disebut sistem *sorogan* dan *wetonan*.

Empat Agenda Pokok

Secara garis besar, agenda utama dan gerakan tajdid Muhammadiyah dapat diformulasikan ke dalam empat bidang garapan. Empat bidang garapan ini sebenarnya mengacu kepada ide dan gerakan Muhammad Abduh, sang pembaharu dari Mesir, sebagai salah satu ikon inspirator gerakan pembaruan Muhammadiyah, yaitu:

(1) Memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh dan praktik luar yang merusak;

(2) Reformasi pendidikan tinggi Islam;

(3) Reformulasi doktrin Islam berdasarkan pemikiran moderen;

(4) Mempertahankan Islam dari pengaruh-pengaruh Eropa dan serangan-serangan Barat-Kristen.

Bidang garapan strategis Muhammadiyah yang pertama (memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh dan praktik luar yang merusak seperti *bid'ah* dan *khurafat)* telah dan terus diupayakan oleh Muhammadiyah melalui pranata-pranata pendidikan dan berbagai aktivitas dakwahnya. Secara keseluruhan, upaya-upaya keras dan serius Muhammadiyah di bidang ini sudah berhasil, terutama dalam lapisan masyarakat urban perkotaan, di mana organisasi modernis Muslim ini mempunyai basis massa yang luas dan kuat. Begitu pula dalam hal reformasi pendidikan tinggi Islam (bidang kedua yang menjadi lahan strategis garapannya) Muhammadiyah telah menunjukkan banyak prestasinya. Sekolah-sekolah tinggi dan universitas-universitas Muhammadiyah terus berdiri di berbagai kota besar di Indonesia. Reformasi ini tidak saja menyangkut gedung dan sarana-sarananya, tetapi juga di bidang metode, sistem, dan kurikulum pendidikannya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah dalam banyak hal telah berhasil melakukan modernisasi dan reformasi pendidikan tingginya, termasuk memperbarui dan memperlengkapinya dengan prangkat keras *(hardware)* dan prangkat lunak *(software)* yang memang diperlukan bagi penyelenggaraan sistem pendidikan moderen.

Adapun bidang garapan strategis ketiga, yaitu reformasi doktrin Islam berdasarkan perkembangan pemikiran moderen, Muhammadiyah dewasa ini dinilai oleh banyak pengamat berada dalam keadaan lamban dan bahkan mandek. Stagnasi ini terjadi

karena – mengutip Azyumardi Azra – Muhammadiyah tercekam dalam "ketegangan teologis." Di satu pihak, Muhammadiyah menganut paham teologi Salaf atau Neo-Salaf yang bercorak skripturalis atau tektualis, sementara di pihak lain, Muhammadiyah secara tegar menggaungkan kerja-kerja ijtihad. Jika teologi Salaf atau Neo-Salaf ini dianut dan dipraktikkan secara ketat oleh Muhammadiyah, yang berarti berpegang teguh kepada teks-teks Alqur'an saja, itu berarti Muhammadiyah tidak atau kurang leluasa untuk melakukan gerakan pemikiran rasional dan kontekstual yang menjadi ciri utama kerja-kerja ijtihad itu.

Menurut Prof Harun Nasution (pakar pemikiran Islam dan guru besar Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Muhammadiyah hanya mencontoh pembaruan Muhammad Abduh yang berkaitan dengan gerakan amal sosialnya saja, tetapi tidak mengadopsi kerangka landasan teologinya yang rasionalisitik. Karena itu, kata Prof Harun, Muhammadiyah sebenarnya merupakan organisasi tradisional, bukan organisasi moderen. Terlepas dari penilaian seperti ini, sudah saatnya Muhammadiyah keluar dari lingkaran stagnasi pemikiran ini dan untuk selanjutnya melakukan kajian ulang, redefinisi, reinterpretasi, dan rekonstruksi terhadap ideologi teologisnya agar dapat melakukan kerja-kerja ijtihad yang bertanggungjawab dalam upaya pembaruan pemikiran Islam.

Dalam bidang garapan yang keempat (mempertahankan Islam dari pengaruh-pengaruh Eropa dan serangan Barat), Muhammadiyah telah ikut melakukan dan berkontribusi dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan Indonesia dari kaum penjajah Barat (Belanda). Untuk sekedar menyebut contoh, dua tokoh penjuang besar Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan KH Kahar Muzakkir, terkenal sebagai pelaku aktif

dan saksi sejarah yang telah ikut berjuang mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan. KH Kahar Muzakkir adalah salah seorang tokoh dari kelompok Nasionalis Muslim yang mereformulasi Pancasila (usulan Soekarno) sehingga Pancasila diterima sebagai dasar falsafah negara. Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh Muhammadiyah yang mewakili kelompok Nasionalis Mulim yang menyepakati penggantian ″dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya″ dengan ″Yang Maha Esa″ pada rumusan sila Ketuhanan (sila pertama Pancasila). Dengan penggantian itu, masyarakat Kristiani yang banyak tinggal di wilayah timur Indonesia merasa diperhatikan dan tidak jadi memisahkan diri dari NKRI.

Karena penjajahan teritorial Barat telah lama berakhir di negeri ini, maka agenda dan gerakan Muhammadiyah hendaknya diteruskan dan ditujukan untuk menangkal pengaruh dan melawan ″penjajahan″ kultural Barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai kultural Islam yang dianut dan diperjuangkan secara konsisten oleh Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah (dan umat Islam secara keseluruhan), perjuangan melawan "penjajahan" kultural bangsa-bangsa asing tidak kalah beratnya dibandingkan dengan perjuangan melawan penjajahan teritorial.

Karya Kependidikan dan Kemanusiaan

Sejak berdirinya pada tahun 1912 hingga sekarang (1990), Muhammadiyah telah genap berusia 78 tahun. Agenda kerja dan kiprah panjang Muhammadiyah di bidang pendidikan khususnya patut dihargai dan diapresiasi setinggi-tingginya. Gerak dan kiprah di bidang pendidikan ini telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang dan, tentu saja, di

masa-masa yang akan datang dengan segala kompleksitas tantangan modernitas yang selalu dihadapi oleh Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan, apabila dikatakan, bahwa Muhammadiyah telah memainkan peranan penting dan telah berjasa sangat besar dalam rangka ikut mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Peranan signifikan dan strategis Muhammadiyah dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini terealisasikan lewat lembaga-lembaga pendidikannya yang beragam dan berskala luas, sejak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Secara keseluruhan, aset yang dimiliki, dikelola dan dioperasikan oleh Muhammadiyah adalah:

3.485 TK (Taman Kanak-Kanak/Bustanul Anfal)

3.027 SD (Sekolah Dasar/Ibtidaiyah)

4.375 SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)

5.084 SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)

65 PT (Perguruan Tinggi)

114 panti asuhan anak yatim piatu

5 panti jompo

83 klinik/rumah bersalin

317 balai pengobatan

12 rumah sakit.

Tidak diragukan lagi bahwa aset yang dimiliki, dikelola dan dioperasikan oleh Muhammadiyah sangat besar, beragam dan berskala luas. Tentunya ini semua harus ditangani dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sesuai sistem

manajemen moderen yang rasional, berdaya guna dan berhasil guna agar seluruh mekanisme kerja dalam tubuh Muhammadiyah berfungsi dengan baik dan rapi. Dalam upaya mengantisipasi dan merespon perubahan-perubahan zaman, Muhammadiyah hendaknya lebih bisa mengembangkan potensi dirinya, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Suatu tugas penting yang mendesak bagi Muhammadiyah dewasa ini ialah melakukan redefinisi dan reinterpretasi terhadap tatanan ideologisnya agar mampu mengembangkan pembaruan pemikiran Islam (*tajdid*) yang telah digelutinya selama ini.

BAGIAN EMPAT

Mengurai Isu-isu Keagamaan

PUASA MEMANUSIAWIKAN MANUSIA

Sebenarnya, seluruh gerak dan aspek kehidupan seorang Muslim adalah identik dengan amal-amal ibadat. Zikir, iktikaf, membaca Alqur'an (mengaji), berdo'a, infak, sadakah, shalat (wajib dan sunnat), zakat (mal dan fitrah), puasa (wajib dan sunnat), umrah, dan haji adalah merupakan rangkaian ibadat yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam gerak dan perilaku hidupnya. Semua aktivitas ibadat ini merupakan kegiatan ritual-agamis dan momentum humanis transendental-Ilahiah yang secara sinergis selalu mengukuhkan dan memperkuat kembali sendi-sendi spiritualitas dan pilar-pilar moralitas Muslim sehingga personalitas sang Muslim tadi mengalami penyegaran dan penguatan imaniah-agamawiah secara berkesinambungan.

Sesungguhnya, setiap saat daya kepekaan spiritualitas dan daya penguatan moralitas Muslim selalu direvitalisasi, didinamisasi, dan dicerahkan (kembali) dalam konstruk totalitas keberimanan dan keberagamaan yang intens. Puasa Ramadan merupakan salah satu ajaran pokok Islam yang dapat mengasah, mempertajam dan memperkuat nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kefitrian dalam diri seorang Muslim. Penajaman dan penguatan ini sudah pasti akan menempatkan

sosok pribadi Muslim tadi selalu berada dalam suasana dan gerak kesadaran Ketuhanan dalam dirinya. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama dia di mana pun dan kapa pun dia berada.

Muslim yang Kaffah

Puasa Ramadan adalah ibadat wajib yang setahun sekali kita tunaikan. Dasar perintahnya adalah firman Allah yang tercantum dalam Alqur'an Surat Albaqarah ayat 183. Mengambil pengertian dari ayat itu, sebenarnya ibadat puasa telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Umat Muhammad. Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada Umat Islam agar dapat meraih derajat takwa. Puasa Ramadan ditetapkan sebagai rukun Islam ke-4 dalam bangunan lima pilar Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji). Kelima rukun Islam ini adalah pilar atau penyangga yang fungsinya saling menopang, menunjang dan memperkuat. Kita tidak dibenarkan mengerjakan yang satu tapi meninggalkan yang lain. Kita harus mengamalkannya secara total, terpadu dan utuh agar kita menjadi pemeluk Islam yang *kaffah* (komplit).

Selain rukun Islam, kita juga harus memegangi rukun Iman: percaya kepada Allah yang Maha Esa, para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul-Nya (termasuk Nabi Isa atau Yesus Kristus), Hari kiamat (Hari akhir), dan qada qadar-Nya. Dengan demikian, lengkaplah Islam sebagai agama yang terdiri dari tatanan doktrin kepercayaan *(faith)* dan ibadat *(practice),* yang inti tujuannya adalah membentuk sosok pribadi Muslim dengan kualitas iman, amal dan takwa yang prima. Sosok pribadi Muslim yang bertakwa ini pulalah yang menjadi inti dan substansi ajaran puasa Ramadan.

Selain menguatkan (kembali) sendi-sendi spiritualitas dan nilai-nilai moralitas, ajaran puasa Ramadan sekaligus berfungsi sebagai metode untuk memanusiawikan manusia. Seluruh ritus puasa bertujuan untuk memerangi hawa nafsu yang selalu bergejolak dalam diri manusia. Hawa nafsu adalah teman dekat dan sekutu selingkuh setan. Itulah sebabnya, setiap kali kita hendak melakukan suatu pekerjaan yang baik dan terpuji, kita tidak lupa membaca *"a'uzu billahi minasysyaithanirrajim"* (aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk) yang kemudian kita sambung dengan bacaan basmalah (*"bismillahirrahmanirrahim,"* dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang).

Identitas Kefitrian

Dalam kitab suci Alqur'an, Allah telah menyatakan bahwa setan adalah makhluk yang terlaknat dan terkutuk yang kerjanya sejak awal sampai hari kiamat hanya menggoda manusia dan menjerumuskannya ke dalam jurang kesesatan, kemaksiaatan dan kemungkaran. Karena setan itu adalah makhluk yang gaib (tak terlihat oleh mata dan tidak terasa oleh panca indra), ia selalu mengintai manusia kapan saja dan di mana saja dan menggunakan setiap celah kesempatan untuk selalu menggoda dan terus menjebak manusia ke dalam perangkap kesesatan, kemaksiatan, keingkaran dan kedurhakaan kepada Allah. Setan adalah musuh bebuyutan manusia, karena itu manusia harus selalu waspada, mawas diri, kontrol diri, dan berani melawan godaan setan ini.

Allah telah mempersenjatai Umat Islam dengan berbagai benteng pertahanan berupa perangkat kepekaan iman dan pengamalan ibadat sebagai cara untuk melawan dan memerangi

nafsu syaitaniyah. Mari kita gunakan senjata iman dan ibadat itu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin agar nafsu syaitaniyah dalam diri kita dapat kita taklukkan kapan pun dan di mana pun kita berada. Iman dan ibadat adalah taming dan benteng yang sangat kuat bagi kita untuk menangkis segala godaan dan jebakan setan.

Lebih-lebih lagi pada bulan suci Ramadan saat para setan dikrangkeng, kita tingkatkan internalisasi iman dan intensitas pengamalan ibadat, baik ibadat yang bersifat wajib maupun ibadat yang bersifat sunnat. Keberhasilan kita menundukkan nafsu syaitaniyah ini akan menjadikan diri kita memilki sifat-sifat insaniah yang sejati dan fitri. Di sinilah sebenarnya letak inti, substansi dan signifikansi ajaran puasa Ramadan itu, yaitu sebagai wujud amalan ubudiyah dan sebagai metode Ilahiah yang sangat efektif untuk memanusiawikan manusia agar dapat menemukan konstruk jati diri kesejatiannya. Memanusiawikan manusia menuju dan merengkuh identitas kefitriannya.***

PUASA MEMBENTUK TIGA PILAR KEJUJURAN

Usai Perang Badar (perang melawan kaum musyrikin Quraisy di Mekkah), Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, *"Kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi."* Para sahabat bertanya kepada Nabi, *"Perang apa itu ya Rasulullah?"* Nabi menjawab, *"Perang melawan nafsu!"* Ini sebagai peringatan Nabi bahwa nafsu dalam diri manusia itu merupakan musuh terbesar. Nafsu merupakan musuh yang tak terlihat, musuh dalam selimut, dan selalu siap menerkam manusia yang lalai dalam hidupnya. Ini sangat berbeda dengan musuh di medan perang yang secara fisik bisa dideteksi dan dilawan dengan menggunakan senjata. Dalam Alqur'an, Allah menegaskan "*innannafsa laammaratun bissui illa ma rahima rabbi*," (sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku; QS Yusuf: 53). Berikut ini digambarkan tentang nafsu berkuasa, nafsu serakah, dan nafsu bersenag-senang.

Nafsu berkuasa yang tanpa batas telah membuat seseorang menjadi diktator dan tiran. Tahta kekuasaan ini biasanya

dikelilingi wanita-wanita yang ia kawini atau ia pelihara sebagai pemuas nafsu seksnya. Fir'aun (Pharao), raja Mesir kuno itu, adalah contoh kongkret dari seorang raja zalim yang mabuk kekuasaan. Ia memegang kekuasaan tanpa batas, membunuh siapa saja yang menentangnya, bertindak Machiavellistis, dan dengan arogan mengklaim sebagai tuhan. Banyak lagi para penguasa otoriter, diktator dan tiran dalam sejarah yang mirip Fir'aun dan bermental Fir'aunisme. Selanjutnya, nafsu serakah juga dapat membuat manusia menjadi rakus, tamak, dan selalu haus akan harta benda. Ia tidak pernah puas dan selalu ingin memperbanyak harta bendanya sesuai dengan nafsu serakah yang menguasai dirinya. Dalam memperoleh harta itu, ia tak segan-segan menempuh prinsip 'tujuan menghalalkan cara.' Baginya, uang dan harta menjadi tujuan hidup dan harta kekayaan itu menjadi ukuran segala-galanya. Ia sangat mengesampingkan atau bahkan meninggalkan nilai-nilai spiritual dan rohaniah dalam hidupnya.

Nafsu bersenang-senang pada manusia dapat membuat dirinya menjadi manusia hedonis-permisif. Gebyar kesenangan duniawiah menjadi orientasi dan tujuan utama hidupnya. Manusia hedonis-permisif selalu ingin melampiaskan dorongan hawa mafsunya pada pemuasan seks di luar nikah dan nafsu-nafsu rendah lainnya. Manusia hedonis-permisif tidak mengenal batas haram-halal, karena yang penting adalah kesenangan duniawiah yang didorong oleh gejolak pemuasan nafsunya. Dalam Alqur'an Surat Yusuf ayat 53 yang dikutip di atas dijelaskan bahwa tidak semua nafsu itu jelek (mendorong manusia berbuat jahat dan maksiat). Tapi ada pula nafsu yang baik, yaitu nafsu 'yang dirahmati oleh Tuhan,' yang mendorong manusia berbuat amal-amal kebaikan dan kebajikan. Nafsu yang baik dan dirahmati Tuhan inilah yang harus selalu unggul dan menang atas nafsu-

nafsu rendah dalam diri manusia. Allah mengajarkan metode untuk memenangkan nafsu yang baik atas nafsu yang rendah itu dengan cara melaksanakan ibadat puasa Ramadhan.

Trilogi Kejujuran

Manusia yang sukses mengalahkan nafsu jelek dan memenangkan nafsu yang baik akan membentuk, secara umum, tiga macam kejujuran dalam dirinya: kejujuran kepada Allah, kejujuran kepada orang lain, dan kejujuran kepada diri sendiri. Trilogi kejujuran ini, dalam pandangan Islam, sangat erat berkaitan. Ketiganya terintegrasi dalam jalinan dan rajutan yang sangat kuat, utuh dan padu dalam totalitas sistem ajaran Islam. Tak mungkin kejujuran kepada Allah tidak mempunyai efek terhadap kejujuran kepada orang lain dan kejujuran kepada diri sendiri. Kejujuran kepada Allah, misalnya, tercermin pada tabiat, perangai dan perilaku seorang Muslim yang secara konsisten tetap menjauhi larangan Allah, walaupun ia tidak melihat Allah. Ia tidak melihat Allah, tetapi ia merasa dirinya selalu diperhatikan terus menerus dan diawasi secara langsung oleh Allah. Karena itu ia, misalnya, tidak mau melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) karena sifat-sifat kejujurannya kepada Allah sudah merasuk ke dalam tulang sumsum dan urat nadi pribadinya.

Kejujuran kepada orang lain tercermin, misalnya, pada perilaku seseorang yang tidak mau mengambil atau tidak mengurangi hak-hak orang lain. Ia secara sadar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu karena ia tidak ingin merugikan orang lain. Ia tidak ingin mengambil atau mencuri hak-hak orang lain karena ia sadar bahwa perbuatan demikian adalah a-moral dan bathil. Sebenarnya, kalau mau, ia bisa saja melakukannya. Tetapi ia tidak melakukannya karena ia jujur

kepada orang lain. Kejujuran kepada diri sendiri tercermin pada perilaku seseorang yang sangat konsisten dengan nilai-nilai moral pribadinya yang kuat, baik dan benar. Di bulan Ramadhan misalnya, ia bisa saja tidak berpuasa karena para tetangga dan orang lain di sekitarnya tidak tahu atau tidak melihatnya. Tetapi ia tidak melakukannya karena ia jujur kepada dirinya dan jujur kepada Allah. Ia sebenarnya punya peluang untuk melakukan KKN, tapi ia tidak melakukannya karena ia jujur kepada dirinya sendiri. Karena kejujuran itu harus juga berlaku bagi dirinya.

Dari sudut pandang agama, kejujuran kepada Allah sangat mempunyai korelasi positif dengan kejujuran kepada orang lain dan kejujuran kepada diri sendiri. Kalau kejujuran kepada Allah tidak mempunyai korelasi dan efek positif dan signifikan terhadap kejujuran kepada orang lain dan kejujuran kepada diri sendiri, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri seseorang dalam melakukan kejujuran kepada Allah. Akan tetapi, kalau kejujuran kepada Allah itu dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang, maka sudah pasti hal itu akan mempunyai korelasi dan dampak positif dan signifikan pada diri orang itu dalam melaksanakan kejujuran kepada orang lain dan kejujuran kepada diri sendiri.

Korelasi Positif

Nilai-nilai ajaran puasa Ramadhan sebagaimana dilukiskan di atas hendaknya dapat kita laksanakan di luar bulan Ramadhan. 'Berpuasa' di luar bulan Ramadhan sebenarnya sama dengan 'berpuasa' di bulan Ramadhan minus menahan diri dari makan dan minum sejak fajar terbit sampai dengan matahari terbenam. Dengan kata lain, kita hendaknya 'berpuasa' di luar bulan Ramadhan dalam arti kita harus mampu mencegah diri dan menahan diri untuk tidak mengumbar nafsu berkuasa yang tanpa

batas (absolut, seweng-wenang, menyimpang dari aturan main, dan bermental Fir'aunisme); menahan diri dan mencegah diri untuk tidak mengumbar nafsu serakah, rakus, dan tamak; dan menahan diri dan mencegah diri untuk tidak mengumbar nafsu bersenang-senang (berperilaku hedonis-permisif).

Kita 'berpuasa' di luar bulan Ramadhan dalam arti menahan diri dan mencegah diri untuk tidak melakukan kebohongan kepada Allah, kebohongan kepada orang lain (publik), dan kebohongan kepada diri sendiri. Dengan kata lain, di luar bulan Ramadhan pun kita harus tetap jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Trilogi kejujuran ini merupakan fondasai dan benteng moral yang sangat kuat bagi kita dalam menghadapi pergerseran nilai-nilai moral yang dewasa ini banyak dilumuri oleh godaan syahwati yang hedonis dan permisif.

Jika kita mampu 'berpuasa' di bulan Ramadhan dan mampu pula 'berpuasa' di luar bulan Ramadhan, itu berarti kita berhasil melaksnakan puasa dengan nilai baik. Kita yakin, ajaran dan nilai-nilai 'puasa' di bulan Ramadhan sangat berkorelasi secara positif dan signifikan dengan 'puasa' di luar bulan Ramadhan. Jika tidak, ada sesuatu yang salah dengan puasa Ramadhan kita. Kita harus introspeksi diri dan sekaligus memperbaiki diri sebelum terlambat!***

RITUALISME DAN EGALITARIANISME HAJI

"Sesungguhnya rumah suci pertama yang dibangun untuk tempat beribadat bagi manusia adalah Baitullah yang ada di Mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Di situ ada tanda-tanda yang nyata tentang kebesaran Allah, di antaranya makam Nabi Ibrahim. Barangsiapa yang masuk ke dalam Baitullah itu, ia merasa aman. Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi (berhaji) ke Baitullah itu. Yaitu, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya." (QS Ali Imran: 96-97). Inilah rujukan ayat yang menjadi dasar perintah Allah kepada Umat Islam untuk berhaji ke Tanah Suci Mekkah. Ibadat haji merupakan pilar ke-5 dalam struktur rukun Islam. Jika Muslim sudah berhaji, maka itu berarti lengkaplah dia melaksanakan lima rukun Islam yang diajarkan agamanya.

Ibadat haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup dan hanya diwajibkan bagi Muslim yang mampu. Kemampuan di sini mencakup dua hal, yaitu kemampuan fisikal-mental (sehat rohani dan jasmani) dan kemampuan finansial (keuangan). Muslim yang tidak mampu tidak berkewajiban melaksanakan ibadat haji. Muslim yang melaksanakan ibadat haji lebih dari sekali, maka haji

yang kedua dst dinilai sunnat. Bagi mereka yang sudah haji, sebaiknya tak usah berhaji lagi dalam waktu yang dekat, tetapi memberikan kesempatan kepada Muslim yang belum pernah berhaji. Ide ini dikemukakan mengingat daftar tunggu jama'ah haji di Kementerian Agama yang akan berhaji sangat panjang. Muslim yang sudah berhaji itu akan mendapat pahala yang banyak karena memberikan kesempatan kepada mereka yang belum pernah naik haji.

Ibadat dan Teknologi

Sampai sekitar tahun 1960-an, para jama'ah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci Mekkah dengan kapal laut. Mereka jauh lebih lama menempuh perjalanan seraya menghadapi tantangan, resiko dan bahkan "ancaman" yang jauh lebih besar. Hal ini menuntut kondisi fisik dan mental yang prima dan tahan banting dari semua jama'ah. Berminggu-minggu mereka di lautan dalam ancaman badai, topan, arus, cuaca buruk, dan gelombang besar yang menakutkan. Mereka dihantui perasaan takut dan bayangan kekhawatiran akan tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi. Ada jama'ah yang mabuk, pingsan, sakit dan meninggal dunia. Jenasah mereka ditenggelamkan begitu saja ke dalam lautan. Tapi tantangan dan ancaman seperti itu tidak menyurutkan para jemaah untuk melaksanakan ibadat haji karena mereka sudah mendapat panggilan suci dari Allah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi modern, perjalanan ibadat haji dari Indonesia ke Mekkah lantas menggunakan kapal terbang. Perjalanan jama'ah jauh lebih mudah, efisien, dan singkat. Penerbangan dapat dihitung dalam hitungan jam. Kita lihat, ternyata kemajuan teknologi secara teknis

dapat membantu pelaksanaan ibadat (haji). Dengan menggunakan teknologi modern (kapal terbang), penerbangan jama'ah haji ke Tanah Suci jauh lebih dipermudah, dipersingkat dan dipernyaman. Secara teknis, teknologi modern sangat membantu dan mempermudah ibadat haji tanpa mengurangi nilai dan substansi ibadat haji itu sendiri.

Ritualisme

Para jama'ah haji itu datang dari berbagai belahan dunia dengan berjalan kaki, melalui daratan, mengarungi lautan, dan melintasi udara. Berbagai kesulitan dan lika liku penderitaan (sejak dari kampung halaman, di tengah perjalanan dan sesampainya di tempat tujuan) mereka hadapi sabar dan tawakkal demi ingin beribadat secara total kepada Allah dan memperoleh pahala-Nya yang besar dan berlipat ganda. Mereka berharap untuk memperoleh predikat dan derajat haji mabrur, haji yang diterima dan diridhai Allah. Sebagian dari jama'ah haji itu ada yang datang bersama anak, isteri atau keluarga mereka, sedang sebagian lainnya ada yang datang dengan meninggalkan anak isteri dan keluarga mereka di kampung halaman yang jauh. Dalam prosesi ibadat haji yang khusyuk, mereka dengan suara gemuruh mengumandangkan kalimah talbiyah *"Labbaik, Allahumma Labbaik, la syarika laka labbaik"* (Aku datang menunjukkan kataatan kepada-Mu, ya Allah. Tidak ada sesuatu yang menyamai Kekuasaan dan Keagungan-Mu).

Ibadat haji menggambarkan paduan ritualitas dan historisitas. Para jama'ah melakukan ritus-ritus haji seperti ihram, tawaf, sa'ie, wukuf di Arafah, melempar jumrah dan tahallul sebagai suatu rangkaian ibadat yang intens dan khusyu'. Semua ritus ini merupakan pengalaman kerohanian yang mengungkap

napak tilas historisitas dan relijiusitas ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Horison sejarah kenabian Muhammad, dari Mekkah ke Madinah, terkuak dan terbentang di hadapan para jema'ah. Dari sinilah lahir agama besar dunia, Islam, yang pada waktu itu pengikutnya dapat dihitung dengan jari, kini telah berjumlah lebih dari satu miliar. Ka'bah diyakini sebagai sentrum universe, dan di situlah jutaan jama'ah haji dan seluruh Umat Islam menghadapakan kiblat shalat dan tunduk bersujud ke hadapan-Nya. Makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, Madinah, menjadi saksi dan bukti nyata bahwa Nabi bukan tokoh yang hidup dalam dongeng-dongeng yang keburannya tidak diketahui, tetapi merupakan realitas historis yang dapat dilihat dengan mata kepala. Kepercayaan Muslim akan kenabian Muhammad dan agama Islam yang dibawanya lebih diperkuat dengan fakta-fatkta historis itu.

Egalitarianisme

Dilihat dari dimensi ritual-keagamaan dan dimensi sosial-kemasyarakatan, ajaran ibadat haji adalah merupakan simbol egalitarianisme, lambang persaudaraan, kesatuan dan persamaan manusia. Para jama'ah dalam melaksanakan ibadat haji telah melupakan dan menanggalkan atribut-atribut duniawiyah mereka (seperti pangkat, gelar, kedudukan, status sosial, kekayaan, jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, dll). Mereka juga memakai pakaian ihram yang sama (warna serba putih) sehingga benar-benar melambangkan ajaran tentang kesamaan dan persamaan manusia dalam Islam. Derajat, status dan kedudukan mereka adalah sama di hadapan Allah, Sang Maha Pencipta. Hanya bobot muatan ibadat dan kualitas takwa saja yang membedakan seseorang dengan orang lain di hadapan Allah.

Melalui ibadat haji, para jama'ah haji dari seluruh pelosok dunia juga disatukan dan dipersaudarakan di bawah ikatan akidah dan jalinan ukhuwah Islamiyah tanpa mempersoalkan latar belakang etnisitas, ras, nasionalitas, bahasa, sosio-kultural, aliran politik, dan lokalitas-geografis mereka. Mereka semua datang ke tanah suci dengan status yang sama, yakni sebagai tamu-tamu Allah (*duyuf Allah*) dengan membawa harapan yang sama pula, yaitu ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam menjalankan ibadat. Bagi kita yang tidak berhaji, sudah sepantasnya untuk memberikan dukungan moral dan do'a semoga para jama'ah haji itu dapat menyelesaikan rangkaian ibadat mereka dengan sempurna, tenang, tenteram, aman, lancar dan baik, sekaligus mereka memperoleh predikat haji yang *mabrur*.

Satu-satunya yang membedakan seorang jama'ah haji dengan jama'ah haji lainnya (lebih luas lagi: antarpribadi di kalangan Umat Islam) adalah derajat, bobot dan kualitas takwanya kepada Allah. Manusia secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri kepada Allah di akhirat kelak. Sama sekali tidak ada lagi campur tangan institusi-institusi duniawi seperti partai politik, organisasi sosial, perusahaan, lembaga pemerintahan, aparat negara atau pun lembaga bantuan hukum kepada manusia dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatan pribadinya kepada Allah di akhirat kelak. Pertanggungjawaban manusia kepada Allah bersifat individual, bukan institusional dan massal.

Selain dibingkai dan dirangkai oleh pernik-pernik ritualisme, historisme, dan egalitarianisme, ibadat haji juga dicirii oleh simbol perlawanan terhadap setanisme. Para jama'ah haji melempar jamarat sebagai simbol perlawanan terhadap setan, musuh bebuyutan manusia sepanjang sejarah. Karena setan tidak pernah mati dan terus menerus hidup dari nenek moyang sampai ke anak keturunannya sampai sekarang ini, maka godaan dan

ancaman setan untuk menjerumuskan manusia ke jurang kemaksiatan dan kemunkaran semakin besar, brutal dan ganas. Di setiap lini kehidupan di dunia ini, iblis dan anak keturunannya yang dinamakan setan itu siap menerkam manusia yang lalai sebagai mangsanya. Bagi Muslim, tak ada kompromi dengan setan dan setanisme. Setan, setanisme dan setanisasi harus ditentang, dilawan dan dikalahkan!***

PROSESI IBADAT HAJI : Catatan Pribadi

Koperasi pegawai pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, setiap tahunnya menyelenggarakan haji luar negeri (luneg). Program ini diperuntukkan secara khusus bagi kepala perwakilan RI di luar negeri, para *home staff* dan keluarga mereka. Pelaksanaan haji luneg tahun 2009 diselenggarakan dari 18 Nopember–1 Desember 2009 (1–14 Dzulhijah 1430 H). Seluruh peserta dari berbagai negara berjumlah 173 orang, termasuk empat orang duta besar. Saya dan isteri beserta enam orang dari KBRI Kuwait mengikuti program haji luneg ini. Setelah bermalam di Jeddah (18 Nopember), kami pada tanggal 19 Nopember langsung menuju Mekkah, tinggal di sebuah hotel kira-kira 7 KM dari Masjidil Haram. Dengan pakaian ihram, kami pada malam hari mengerjakan umrah (tawaf, sa'ie dan tahalul). Kami melaksanakan haji tamattu'. Dengan demikian, usai umrah, pakaian ihram dapat dilepas, dan kami pun berpakaian biasa. Karena kami melaksanakan haji tamattu', kami harus membayar dam nusuk sebanyak 410 Real Saudi perorang.

Sebelum tanggal 9 Dzulhijah (26 Nopember 2009), kami memanfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadat di Masjidil Haram. Panitia menyediakan bis besar untuk membawa kami dari

hotel ke Masjidil Haram. Ada sebagian jama'ah yang berangkat ke Masjidil Haram sebelum zuhur dan pulang ke hotel sesudah Isya'. Ada juga sebagian jama'ah yang berangkat ke Masjidil Haram menjelang Asar dan pulang ke hotel setelah Isya'. Ada lagi sebagian jama'ah yang berangkat tengah malam ke Masjidil Haram dan kembali ke hotel pada pagi hari. Kegiatan salat jama'ah juga dilakukan di hotel dan yang menjadi imam adalah mahasiswa dari Universitas Madinah yang sekaligus bertindak sebagai pemandu haji kami.

Tenda di Arafah Basah Kuyup

Tanggal 25 Nopember (8 Dzulhijah 2009), tanah haram diguyur hujan deras. Mekkah banjir besar. Pada saat ini, kami sudah berpakaian ihram dan sudah siap menuju Arafah. Setelah tertunda beberapa jam, bis kami dengan susah payah –karena lalu lintas padat– tiba tengah malam di Arafah. Karena diguyur hujan deras, tenda-tenda kami di Arafah basah kuyup. Kasur, bantal dan hambal di bawahnya juga basah. Atas kesepakatan bersama, sebagian besar kasur dilipat dan kami tidur di atas karpet yang basah. Walaupun tidak merasa nyaman, tidur terganggu, tidak enak dan tidak nyenyak, tetapi kami harus sabar dengan situasi darurat ini. Ibadat haji menuntut kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Esok harinya (26 Nopember, 9 Dzulhijah), sejak tergelincir matahari sampai tenggelam matahari, kami wukuf di Arafah. Seluruh jama'ah dengan cara yang khidmat dan kusyu', memanjatkan do'a kepada Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat serta memanjatkan do'a permohonan lainnya kepada-Nya sesuai keinginan masing-masing.

Setelah tenggelam matahari, kami bergerak menuju Muzdalifah dan kemudian menginap di Mina. Di Muzdalifah, kami

turun dari bis sekitar 20 menit, mengambil kerikil sebanyak 49 buah untuk melontar jumrah. Jarak Arafah ke Mina sekitar 6–7 KM, tetapi ditempuh selama 7 jam. Jadi setiap satu kilometer ditempuh selama satu jam. Kendaraan yang membawa jama'ah ke Mina benar-bebar padat merayap, bergerak pelan-pelan dalam hitungan menit. Bayangkan, sebanyak 2,5–3 juta jama'ah haji dari seluruh dunia Muslim tumplek dan sama-sama menuju ke satu titik yang sama: Mina. Ada sebagian jama'ah yang lebih memilih jalan kaki. Ada juga jama'ah yang naik di atas atap bis (yang biasa dipakai untuk menempatkan barang bawaan). Ada pula yang ngojek (memakai jasa angkutan speda motor).

Lepas dari Rombongan

Tanggal 10 Dzulhijah (27 Nopember 2009), kami melontar jumrah Aqobah di Mina, tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Untuk melontar jumrah Aqobah, kami jalan kaki dari tenda penginapan sepanjang 3 KM (pulang pergi). Peristiwa pelontaran jumrah hanya berlangsung sekitar 7 menit, tetapi untuk mencapai tempat pelontaran harus jalan kaki sepanjang 3 KM. Kemudian kami ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf ifadah. Kami tawaf di sekitar Ka'bah dengan jama'ah haji yang sangat padat. Saling pepet. Bergerak sangat pelan dan susah payah. Tenaga menjadi terkuras dan lelah sekali. Saking padatnya para jama'ah yang tawaf, salah seorang anggota jama'ah kami (laki-laki) lepas dari rombongan. Kami cemas di mana dia berada. Setelah berkali-kali ditelpon melalui HP, dia ternyata sudah berada di Mina, kembali dengan kendaraan umum. Hal ini diketahui setelah kami selesai melaksanakan sa'ie. Usai sa'ie, kami bertahalul dan melepas pakaian ihram. Pada tanggal 10 Dzulhijah (27 Nopember) itu, kami melakukan kegiatan dan perjalanan ibadat sepanjang kurang lebih

17 KM: berjalan ke tempat pelontaran jumrah (pp) sepanjang 3 KM, melakukan tawaf sepanjang 7 KM (7 kali putaran), dan melaksanakan sa'ie sepanjang 7 KM.

Hari berikutnya, 11 Dzulhijah (28 Nopember 2009), kami dengan berpakaian biasa melempar tiga jumrah (Ula, Wustha dan Aqobah). Esok harinya, 12 Dzulhijah (29 Nopember), kami melontar tiga jumrah lagi dan kemudian melakukan tawaf wada' (pamitan) di Masjidil Haram. Tengah malam kami ke Madinah, siang harinya salat zuhur berjama'ah di Masjid Nabawi, ziarah dan berdoa di makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar ibn Khattab, ke makam Baqi menyaksikan makam Utsman bin Affan, menyaksikan bukit Uhud, melihat masjid Qiblatain, dan salat maghrib (dijamak dengan Isya') di masjid Quba. Kemudian bertolak menuju Jeddah untuk kembali ke negara masing-masing. Ibadat haji menuntut kesadaran, ketabahan dan kesabaran di samping stamina fisik dan energi spiritual yang prima.

Bahasa Indonesia Makin Populer

Ternyata ibadat haji (dan umrah) memiliki multiefek ekonomi yang besar bagi Arab Saudi. Negara kaya minyak itu semakin makmur dengan pelaksanaan ibadat haji (dan umrah). Hotel, penginapan, restoran, biro perjalanan (uadara, laut dan udara), sovenir, dan barang-barang dagangan mereka laku keras pada musim haji dan umrah. Belum lagi pendapatan negara dari pembayaran biaya visa oleh para jama'ah haji dari seluruh dunia yang berjumlah 2,5–3 juta orang. Ekonomi Arab Saudi terus bergerak dan semarak sepanjang tahun. Berhubung jama'ah haji dan umrah dari Indonesia merupakan lapisan yang terbanyak, maka banyak penjaga toko yang fasih berbahasa Indonesia.

Seorang ibu yang mau membeli gelang emas menawar harga gelang itu, kemudian sang penjaga toko dengan bercanda bilang kepada ibu itu: ″Kamu pelit!″ Kata-kata ini dia ucapkan karena penawaran ibu itu dirasakan masih kurang. Setelah ibu itu meninggikan harga tawarnya, sang penjaga toko setuju melepas barang dagangannya.

Sementara itu, di dekat masjid Quba di Madinah sekumpulan anak-anak perempuan yang polos dan manis menyapa kami dengan penuh keramahan: ″Apa kabar?″ Kami jawab: ″Baik!″ Anak-anak perempuan itu tersenyum dengan kepolosan mereka. Bahasa Indonesia makin populer di Mekkah dan Madinah, sudah menjadi bahasa transaksi dagang yang semakin luas. Isu *swine flue* (flu babi) tidak mengurangi gairah dan semangat jama'ah untuk berhaji. Di tengah-tengah kekhawatiran flu babi yang akan mudah menular di antara kerumunan jama'ah, justeru jumlah jama'ah haji tetap membengkak. Diperkirakan 2,5 – 3 juta jama'ah haji tahun ini dari seluruh Dunia Muslim. Seorang jama'ah haji dari suatu negara asing mengatakan kepada saya: ″Flu babi tidak mengurangi hasrat kami untuk berhaji. Orang bisa meninggal kapan saja dan di mana saja karena suatu sebab. Bahkan di tempat tidur sekali pun, kematian bisa terjadi.″***

ASAL MULA PEMBAYARAN BPIH DENGAN DOLAR

Pada pertengahan tahun 1997, mulai terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi di Indonesia dengan dampak yang luas dan parah. Kebijakan moneter yang tidak tepat, terutama di bidang sistem perbankan dan keuangan, telah memicu terjadinya krisis moneter yang pada gilirannya berlanjut pada krisis ekonomi. Seluruh lapisan rakyat, terutama rakyat kecil di seluruh Tanah Air, sangat terpukul secara keuangan dan ekonomi. Dengan penghasilan yang pas-pasan, kehidupan rakyat kecil menjadi lebih sulit karena harga-harga barang kebutuhan pokok melonjak secara drastis. Bukan hanya menimpa rakyat dan usaha kecil, tetapi krisis moneter dan ekonomi juga dirasakan akibatnya oleh perusahaan-perusahaan besar. Sejumlah perusahaan besar ada juga yang gulung tikar. Krisis keuangan dan ekonomi di Tanah Air diiringi pula dengan krisis politik yang mengakibatkan pemerintahan rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998.

Akibat Krisis Moneter

Sebagai akibat krisis moneter dan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi fluktuatif. Nilai tukar rupiah pada saat itu mencapai kisaran Rp 16.000 - Rp 18.000 persatu dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa berubah dalam hitungan jam sehingga terjadi perbedaan kurs dari waktu ke waktu. Setiap harinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dipastikan. Hal ini, antara lain, secara drastis menyebabkan menurunnya calon jemaah haji (calhaj) yang mendaftar di Kementerian Agama/Kemenag (dulu Kementerian Agama/Kemenag) untuk menunaikan ibadat haji ke Tanah Suci Mekkah. Jumlah pendaftar calhaj berkurang sampai 30 persen dari kuota 200 ribu jama'ah yang disediakan. Itu berarti kuota tak terpenuhi. Mereka mengalami kesulitan finansial untuk melunasi BPIH/biaya penyelenggaraan ibadat haji (dulu disebut ONH/ongkos naik haji) ke bank-bank penerima setoran. Sebelum krisis terjadi, kuota haji selalu terpenuhi dan bahkan bisa melampui batas seandainya tidak ada pembatasan kuota.

Masalah lain yang dihadapi Kemenag pada masa krisis moneter dan ekonomi di tahun 1998 dan beberapa tahun sesudahnya adalah berapa besaran BPIH yang pantas dan ideal yang harus disetor oleh para calhaj pada waktu itu. Menteri Agama dan jajarannya berkali-kali mengadakan rapat dengan Komisi VI DPR untuk membahas jumlah setoran BPIH ini, tapi belum terpecahkan karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuasi dan gonjang ganjing dari waktu ke waktu. Berkali-kali Kemenag dan Komisi VI DPR mengadakan rapat membahas penetapan besaran setoran BPIH, tapi tak tercapai kesepakatan. Karena tidak tercapai titik temu, dalam suatu rapat lain disepakati agar Kemenag menanyakan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang nilai tukar rupiah yang pantas dan

ideal terhadap dolar AS sehingga dapat ditetapkan besaran BPIH yang harus disetor dan dilunasi oleh para calhaj. Tapi Kemenkeu tidak memberikan jawaban yang pasti karena kurs rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuatif.

Adalah Menteri Agama Mohammad Tolhah Hasan yang menggagas suatu ide agar BPIH itu dibayar dengan dolar saja. Ketika pertama kali ide itu dicetuskan pada tahun 2000 di banyak media massa, ada yang keberatan karena –dengan membayar BPIH dalam dolar– akan mengurangi nilai-nilai nasionalisme kita sebagai bangsa yang telah mempunyai mata uang tersendiri (rupiah). Itu berarti tidak menghargai rupiah sebagai mata uang sendiri yang secara resmi berlaku di Indonesia. Isu lain yang berkembang ketika rapat di Komisi VI DPR adalah, apakah para jama'ah haji yang kebanyakan dari desa-desa, dusun-dusun dan tidak melek huruf itu tahu tentang mata uang dolar.

Peran Menag Tolchah Hasan

Setelah Kemenag menjelaskan dalam suatu rapat dengan Komisi VI DPR bahwa bagian terbesar BPIH yang diterima dari calhaj (terutama pembelian tiket pesawat dan biaya-biaya di luar negeri) itu menggunakan dolar, maka usulan Kemenag diterima. Kemenag juga menjelaskan bahwa cicilan atau setoran BPIH itu dibayar oleh para calhaj kepada bank-bank penerima setoran dalam rupiah, kemudian bank-bank tadi mengalihkannya ke dalam mata uang dolar AS sesuai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat itu. Demikianlah, cara ini berlaku bagi setiap calhaj yang menyetor cicilan BPIH-nya sampai lunas. Pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat seperti sekarang ini, para calhaj diuntungkan karena jumlah rupiah yang disetor sebagai BPIH berkurang.

Inilah asal mula pembayaran BPIH dalam dolar itu. Sebelum itu, BPIH dibayar dalam rupiah. Ketika BPIH masih dibayar dalam rupiah, titik temu dan kesepakatan antara Kemenag dan Komisi VI DPR tentang penetapan besaran setoran BPIH tidak mudah dicapai. Hal ini memerlukan berkali-kali rapat dan pembahasan di DPR bisa berlangsung melampaui tengah malam. Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Tolhah Hasan telah menemukan terobosan baru dan meretas jalan bagi lebih praktisnya pembayaran BPIH dalam dolar. Kebijakan ini diteruskan oleh Menag-Menag penggantinya karena memudahkan pembahasan penetapan pembayaran BPIH dengan Komisi yang menjadi mitra Kemenag di DPR.***

KURBAN: MAKNA TEOLOGIS, SIMBOLIK DAN SOSIOLOGIS

Dalam tradisi Islam, ajaran berkurban pada saat Idul Adha (Idul Kurban) bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengurbankan putranya Ismail (QS As-Shafat:102-107). Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail yang sangat dikasihi itu merupakan ujian maha berat terhadap keimanan, kepatuhan, dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim dengan rasa keimanan yang kuat ternyata benar-benar mematuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim pun sudah siap melaksanakan penyembelihan dan meletakkan pisaunya di leher anak kesayangannya. Kemudian ia pun memejamkan matanya untuk tetap tegar dan tabah menyembelih Ismail. Pada momen-momen yang sangat mencekam dan detik-detik yang sangat genting seperti itu, Allah dengan Kemahakuasaan-Nya secepat kilat mengganti Ismail dengan seekor domba, dan domba itulah yang akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dan awal mula perintah berkurban itu, dan perntah ini diteruskan dan dilestarikan oleh Nabi Muhammad sebagai suatu ajaran dan tradisi Islam.

Pelaksanaan pemotongan hewan-hewan kurban ini dilaksanakan setelah selesai salat Idul Adha. Daging hewan-hewan kurban tadi diberikan secara tulus ikhlas kepada orang-orang yang berhak menerimanya (kaum dhu'afa). Setiap kali Hari Raya Kurban datang, kita menyaksikan di seluruh Tanah Air (dan di Dunia Muslim) begitu banyak orang Islam yang melaksanakan perintah berkurban. Mereka menyerahkan hewan-hewan kurban (kambing, domba, lembu) kepada panitia atau takmir masjid agar hewan-hewan kurban itu disembelih dan dagingnya diberikan kepada kaum dhu'afa.

Kadang-kadang ada di antara hewan-hewan kurban itu yang diserahkan dalam keadaan hidup oleh panitia kurban ke masjid-masjid desa atau kampung. Barangkali hal ini merupakan cara yang mudah dan praktis. Ada pula sekelompok mahasiswa Muslim yang mengoordinasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban dengan cara membagi-bagikan daging hewan-hewan kurban itu kepada masyarakat di desa-desa binaan mereka. Desa-desa binaan ini biasanya berasal dari desa-desa yang pernah mereka tempati sebagai lokasi kegiatan kuliah kerja nyata (KKN).

Makna Teologis, Simbolik, dan Sosiologis

Ada makna teologis, simbolik dan sosiologis yang sangat esensial yang terkandung dan dapat dipetik dari ajaran kurban itu. *Pertama,* Allah (dan Rasul-Nya) haruslah lebih kita cintai daripada yang lain dengan cara memperlihatkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada perintah-perintah-Nya. Nabi Ibrahim telah menjalankan perintah Allah tanpa syarat, kendatipun beliau harus menyembelih anaknya yang sangat disayangi dan dicintainya. Ismail, sebagai seorang anak yang patuh kepada perintah Allah, juga rela untuk disembelih oleh ayahnya. Ini berarti bahwa urusan-

urusan duniawi seperti anak, harta benda, pangkat, kedudukan dan status sosial jangan sampai menjadi kendala bagi Muslim dalam mencintai, berbakti, mengabdi, dan beribadat secara total dan maksimal kepada Allah.

Kedua, kita dididik untuk ikhlas dan rela berkorban dengan memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang (pihak) lain. Logikanya, memberikan sesuatu yang tidak kita cintai kepada orang lain adalah bukan esensi ajaran kurban yang dituntunkan oleh agama. Sesuatu yang tidak kita cintai adalah merupakan sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berharga. Oleh karena itu, tidak sepantasnya sesuatu yang tidak bernilai itu kita berikan kepada orang lain. Sebaliknya, apabila yang kita berikan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang kita cintai dan bernilai, maka pemberian dan pengorbanan yang demikian itu akan mempunyai makna yang sangat esensial dan memiliki arti yang sangat besar bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan.

Contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai bangsa adalah pengorbanan para pahlawan yang telah mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Jiwa, raga dan harta telah mereka korbankan untuk kemerdekaan Tanah Air tercinta. Berkat pengorbanan jiwa, raga dan harta mereka itulah negeri ini akhirnya menjadi bebas merdeka, dan kita pun bisa mereguk udara kebebasan dan kemerdekaan di bumi persada tercinta ini. Karena jiwa, raga dan harta itu adalah sesuatu yang sangat mereka cintai, berharga dan bernilai, maka pengorbanan mereka pun pasti sangat memiliki makna yang esensial dan mempunyai arti besar yang tak terlupakan sepanjang perjalanan sejarah. Pengorbanan mereka adalah sangat berharga dan bernilai yang terus tercatat dalam lembaran emas sejarah perjuangan bangsa.

Ketiga, Idul Kurban adalah simbol tentang kepedulian seseorang kepada orang lain. Idul Kurban adalah lambang kepekaan sosial. Adanya kepedulian dari seseorang (kelompok masyarakat) kepada orang (kelompok) lain adalah merupakan pertanda adanya kebersamaan, kesetiakawanan dan solidaritas sosial. Apabila kepekaan sosial ini luntur atau mati, maka solidaritas dan kesetiakawanan sosial juga akan luntur atau lenyap. Apabila ini terjadi, maka tidak mustahil akan terjadi kecemburuan sosial yang pada gilirannya akan menimbulkan gejolak dan kerusuhan-kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya disharmoni dan disintegrasi sosial yang tentunya akan berdampak luas dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keempat, ajaran kurban mendidik manusia untuk senantiasa bersikap ikhlas dan tulus sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Melalui ajaran kurban, manusia dididik untuk berkurban secara ikhlas dan tulus dalam hidupnya. Para syuhada' dan pahlawan kemerdekaan yang telah gugur dalam rangka membela Tanah Air adalah merupakan contoh kongkret yang perlu kita warisi semangat juang dan semangat pengorbanan mereka dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan dan ketulusan. Sifat-sifat terpuji dan kualitas mental dan akhlak seperti inilah yang masih tetap diperlukan oleh umat Islam pada khususya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam mengabdi dan berdedikasi kepada nusa dan bangsa sekarang ini.

Kelima, ajaran kurban memiliki makna simbolik yang sangat tinggi. Manusia dididik untuk "menyembelih" nafsu-nafsu hewaniyah yang ada dalam dirinya. Nafsu-nafsu hewaniyah yang mewujud dalam bentuk egoisme, ananiyah, keserakahan,

ketamakan, perampokan, perkosaan, eksploitasi manusia atas manusia, penindasan, kesewenangan, tirani, nepotisme, perampasan hak-hak asasi dan bentuk-bentuk kemungkaran serta kejahatan lainnya haruslah dikekang dan bahkan harus dilenyapkan dalam diri manusia. Dengan kata lain, perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban itu sebenarnya adalah melambangkan penyembelihan nafsu-nafsu hewaniyah yang terdapat dalam diri manusia itu. Makna simbolik ajaran kurban itu bukan terletak pada darah dan daging kurban itu, juga bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah, akan tetapi terletak pada derajat kemanusiaan dan kualitas takwa dari orang yang berkurban itu, dan kualitas takwa itulah yang pada hakikatnya sampai kepada Tuhan.

Kepekaan dan Kepedulian Sosial

Ajaran berkurban yang terkandung dalam Idul Kurban menggugah kembali daya kepekaan iman dan kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang lemah dan tidak/kurang beruntung secara sosial ekonomi. Orang-orang yang mampu hendaknya memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang tidak mampu atau kaum dhu'afa. Lebih-lebih di tengah-tengah gelombang dan guncangan musibah yang terjadi secara bertubi-tubi di banyak daerah di Tanah Air dewasa ini. Musibah banjir Wasior, tsunami Mentawai, erupsi Merapi, dan berbagai musibah dan bencana alam lain di banyak daerah (tanah longsor, banjir bandang, puting beliung, gelombang pasang, dll) telah sangat banyak merenggut korban meninggal dunia, hilang, luka-luka, harta benda ludes dan terhanyut, sawah ladang terendam, dan rumah luluh lantak.

Peristiwa-peristiwa tragis seperti itu sudah selayaknya mengetuk hati nurani kita dan menggugah kepekaan sosial kita untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan dan sumbangan kemanusiaan kepada para korban, keluarga korban dan para pengungsi yang berjumlah puluhan ribu. Mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa seTanah Air yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Ajaran berkurban selalu dan tetap relevan untuk dimalkan karena ajaran tersebut merupakan cerminan kepekaan dan kepedulian sosial yang menjadi inti sejati pengamalan kemanusian yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila.***

MEMAKNAI MOMENTUM HIJRAH NABI MUHAMMAD

Setiap kali tahun baru Hijriah datang, harapan-harapan baru selalu membersit di hati Umat Islam. Tahun baru ditengarai akan membawa harapan-harapan baru dalam kehidupan umat. Sebenarnya bukan hanya harapan-harapan baru yang membentang di hadapan Umat Islam, tetapi sekaligus juga tantangan-tantangan baru yang menghadang di setiap lini kehidupan umat. Hidup memang merupakan pergulatan keras antara harapan dan tantangan. Harapan harus dibumikan dengan kerja-kerja keras agar menjadi kenyataan. Harapan harus diraih melalui keberhasilan mengatasi berbagai tantangan. Tak ada pergumulan hidup tanpa tantangan. Tantangan adalah suatu keniscayaan. Setiap tantangan harus direspons dengan tepat untuk menggapai harapan (baru) yang dipertaruhkan oleh Umat Islam.

Inilah secercah pengantar yang perlu kita resapi dalam rangka memasuki tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1432 H, yang jatuh pada tanggal 7 Desember 2010. Secara historis, tahun Hijriah ditetapkan oleh Umar ibnul Khattab yang menjabat sebagai khalifah ar-Rasyidin ke-2 (13-23 H/634-644 M). Penetapan tahun baru Hijriah bermula dari sepucuk surat penting yang dikirim oleh

seorang gubernur kepada Khalifah Umar. Surat itu ternyata tidak bertanggal. Menurut pengamatan Umar, ada sesuatu yang tidak lengkap pada surat itu karena surat itu tidak disertai tanggal pengiriman. Surat yang tidak bertanggal itu ternyata pada gilirannya membawa hikmah besar dalam penetapan kalender Islam.

Peristiwa Hijrah

Setelah mengadakan sidang dengan jajaran pemerintahannya, Khalifah Umar menetapkan bahwa awal penanggalan Islam (tahun Hijriah) didasarkan pada momentum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Tahun Hijriah tidak dihitung berdasarkan peristiwa kelahiran Nabi. Tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Hijrah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya karena pada saat itu kaum kafir Quraisy berkomplot hendak membunuh Nabi dan para pengikutnya. Kaum Quraisy menentang keras penyiaran Islam yang dilakukan oleh Nabi karena gerakan Nabi itu dianggap sebagai ancaman yang hendak meruntuhkan tradisi dan kepercayaan politeistik kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang jumlahnya sangat sedikit lantas melaksanakan hijrah dari Mekkah ke Madinah, mencari tempat yang aman dan strategis dalam rangka menyebarkan agama Islam.

Di Madinah, Nabi benar-benar berhasil melaksanakan dakwah dan membangun komunitas (umat) Islam. Ketika masih di Mekkah, Nabi belum secara maksimal melaksanakan misi dakwahnya dan belum dapat membangun komunitas karena oposisi keras dan sengit yang dilancarkan oleh pihak Quraisy. Ini berarti, dengan melakukan hijrah, Nabi berhasil melaksanakan misi

dakwahnya dan sekaligus berhasil pula membangun komunitas muslim yang diidam-idamkan. Selain didasarkan pada momentum hijrah Nabi, perhitungan tahun Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan. Pergantian hari terjadi pada saat tenggelamnya matahari (Maghrib).

Ajaran, Makna dan Pesan Hijrah

Merayakan tahun baru Hijriah bukan sekedar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial yang hanya bersifat instan-dekoratif, setelah itu usai. Tetapi peringatan dan perayaan tahun baru Hijriah itu hendaknya lebih substantif dan bermakna. Umat Islam hendaknya dapat mengambil butir-butir makna dan pesan yang terkandung dalam persitiwa hijrah Nabi itu. Makna dan pesan ini hendaknya diterapkan dalam kehidupan umat dan sekaligus dijadikan sebagai kontribusi Umat Islam bagi kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ada beberapa makna dan pesan yang terkandung dalam momentum hijrah Nabi.

Pertama, Umat Islam hendaknya berhijrah dari alam kebodohan ke alam kecerdasan, pencerahan, kepandaian, dan keterampilan. Ini berarti, lembaga-lembaga pendidikan Islam di setiap tingkat dan satuan hendaknya ditata secara lebih baik agar menghasilkan keluaran yang lebih baik, lebih pandai, lebih terampil dan lebih cerdas sehingga mampu memasuki dunia kerja di era persaingan global. Perbaikan mutu pendidikan Islam berarti ikut memperbaiki pendidikan bangsa Indonesia. *Kedua*, Umat Islam hendaknya berhijrah dari keburukan ke kebaikan. Segala perilaku tercela dan perilaku koruptif harus ditinggalkan, sebaliknya perilaku terpuji, kebaikan, dan kebajikan harus dilaksanakan. Sifat-sifat jahili harus ditinggalkan, sedang sifat-sifat Islami harus dilakukan.

Ketiga, Umat Islam harus berhijrah dari konflik ke perdamaian. Segala bentuk tawuran, konflik, kekerasan, brutalisme, dan anarkisme harus dijauhkan. Sedang persatuan, kedamaian, perdamaian, toleransi dan kerukunan harus ditempatkan sebagai bagian integral kehidupan keumatan dan kebangsaan. *Keempat*, Umat Islam hendaknya berhijrah dari ketidakpedulian ke kepedulian. Bagi yang mampu dan mempunyai kelebihan harta, hendaknya menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu saudara-saudara yang miskin, kaum dhu'afa, dan para korban bencana alam. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Umat Islam hendaknya dapat mempercepat hijrah dari kemiskinan ke kehidupan yang layak sehingga tingkat kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan.

Kelima, Umat Islam hendaknya mempercepat hijrah dari kepekaan moral ke kepekaan sosial. Kalau ada anjing yang masuk ke rumah orang Islam, anjing itu cepat diusir. Sedang kalau melihat orang miskin, ada orang Islam yang tidak mau peduli. Ini berarti, kepekaan sosialnya tumpul dan harus diubah dengan cara berhijrah ke kepekaan sosial yang hidup, aktif dan kreatif. *Keenam*, Umat Islam hendaknya berhijrah dari sifat egoistis ke sifat sosialistis. Agama melarang dan menutup jalan egoisme, tetapi melatih dan mendidik penganutnya bersifat sosial humanis. Demikian antara lain butir-butir makna dan pesan hijrah Nabi. Kita hendaknya menangkap, meresapi dan melaksanakan pesan dan makna hijrah Nabi itu dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan. Selamat tahun baru 1 Muharram 1432 Hijriah.***

ZAKAT = PAJAK?

Ada pendapat yang menyamakan zakat dengan pajak. Pendapat ini sudah pasti bersifat kontroversial di telinga kaum Muslimin karena tidak terbiasa didengar sebelumnya. Sebenarnya, samakah zakat dengan pajak itu? Menurut saya, tidak sama. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama. Zakat diwajibkan oleh Nabi Muhammad (lihat misalnya QS Annisa: 77) pada tahun kedua Hijriah dan merupakan *fardu ain* (kewajiban individual) bagi setiap Muslim yang mampu mengeluarkannya. Pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara demi keberlangsungan eksistensi dan kehidupan negara. Dalam Islam, pajak disebut *kharaj* (pajak hasil bumi/tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut *dharibah* (Inggris: *tax*).

Dalam dunia akademik atau dunia ilmiah, para pakar menyusun dan menciptakan suatu istilah (terminologi) yang dipakai sebagai pegangan atau acuan yang sama dalam memulai suatu kajian. Para pakar atau ilmuan itu membuat suatu batasan, definiisi dan konsep keilmuan yang mereka pakai sebagai landasan yang sama bagi pemikiran mereka. Dengan berpegang kepada takrif, definisi dan konsep keilmuan yang sama dan baku, maka tidak akan terjadi silang pendapat atau ketidaksepahaman di

kalangan ilmuan itu. Ini berarti bahwa setiap terminologi mengandung pengertiannya sendiri-sendiri. Begitu pun pengertian zakat dan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Sebagai ilmuan, kita tidak mungkin dan tidak dapat menggebyah-uyah atau menggeneralisasi pengertian istilah yang telah baku dalam dunia keilmuan dan keagamaan. Menggebyah uyah pengertian istilah tertentu dengan istilah lain sudah pasti rancu dan tidak ilmiah dan –kalau terkait masalah agama– menjadi tidak diniah. Berikut ini saya akan mengemukakan seperangkat argumen perbedaan zakat dengan pajak itu.

Perbedaan

Pertama, zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa si pembayar zakat (QS Attaubah: 103). Jadi zakat merupakan kewajiban agama sebagai cara untuk menyucikan jiwa dan menyucikan harta pembayar zakat (dari sumber-sumber pendapatan atau penghasilan yang tidak jelas/subhat) dan sebagai bentuk dan manifestasi kepedulian Muslim yang mampu kepada Muslim yang tidak mampu (tidak berkecukupan). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Dengan pajak, negara akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memberikan pelayanan umum kepada seluruh warga negara. *Kedua*, zakat harus memenuhi nisab (jumlah minimal harta yang harus dizakati). Kalau belum memenuhi nisab, harta seorang Muslim tidak wajib dizakati. Pajak tidak mengenal nisab. Tulisan yang dimuat di koran (dengan honor Rp 300 ribu), misalnya, langsung dikenakan pajak.

Ketiga, zakat harus memenuhi haul (sudah dimiliki selama satu tahun). Harta kekayaan yang sudah dimiliki (sebagai hasil

usaha) selama satu tahun dan memenuhi nisab wajib dizakati. Pajak tidak mengenal haul. Seorang dosen penguji skripsi (dengan honor sekitar Rp 100 ribu) langsung dipajaki. *Keempat,* besarnya zakat bervariasi tergantung kepada harta yang kita miliki (zakat hasil pertanian, hewan ternak, harta perdagangan, emas, perak, atau uang). Misalnya, harta kekayaan (berupa uang) dikenakan zakat sebesar 2,5 persen. Jenis pajak juga sangat beragam (pajak barang mewah, pajak kendaraan, pajak pembelian, pajak usaha, dan pajak bumi dan bangunan). Ringkas kata, ada PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan). PPh, misalnya, ditentukan sebesar 15 persen. Ini berarti pajak jauh lebih besar daripada zakat.

Kelima, zakat secara spesifik dikeluarkan dan diperuntukkan kepada delapan golongan (QS Attaubah: 60), yaitu fakir, miskin, panitia zakat, mu'alaf, memerdekakan budak, orang yang dililit hutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Di luar delapan golongan ini, tidak disebut zakat. Sifatnya memang lebih merupakan "jalan keluar" dari suatu problema dan kesulitan yang dihadapi oleh delapan golongan itu. Sedang pajak diperuntukkan (kembali) oleh negara untuk memberikan pelayanan umum *(public services)* kepada seluruh warga negara tanpa mengenal kaya-miskin. Dengan pajak, negara dapat membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, jalan tol, jalan layang, jembatan, sekolah, gedung pemerintahan dan taman kota yang dinikmati oleh semua warga negara, baik kaya maupun miskin. Negara juga membayar gaji para pegawai negeri, polisi dan tentara antara lain dengan uang pajak.

Keenam, zakat diwajibkan secara khusus kepada Umat Islam, sedang pajak diwajibkan kepada semua warga negara tanpa

memandang agama. Non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Ini lebih mempertegas bahwa zakat adalah kewajiban agama, sedang pajak adalah kewajiban negara.

Tidak *Make Sense*

Di negara yang menerapkan syari'at Islam seperti Kuwait, pajak belum dijadikan target pendapatan keuangan negara. Karena APBN Kuwait dengan hasil penjualan minyaknya sudah sangat surplus. Tak ada pajak barang mewah, pajak pembelian atau PBB. Pendidikan di Kuwait gratis. Dengan kata lain, Kuwait tidak mengenakan pajak kepada warga negaranya. Dengan hasil penjualan minyaknya yang melimpah ruah, Kuwait dapat membangun sarana dan prasarana serta fasilitas dan pelayanan umum bagi rakyatnya. Dalam hal zakat, banyak orang Kuwait yang membayar zakat secara individual seperti yang terjadi di Indonesia. Mereka memberikan zakat kepada orang yang mereka kehendaki sesuai ketentuan agama. Di Kuwait, para ulama tetap membedakan zakat dengan pajak.

Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak. Tentu, hal ini memerlukan pemikiran dan koordinasi yang baik dan tepat dalam merealisasikannya. Tapi saya tidak menerima pendapat yang menyamakan zakat dengan pajak. Berdasarkan argumen-argumen yang saya kemukakan di atas, saya berkesimpulan bahwa pendapat yang menyamakan zakat dengan pajak sangat tidak *make sense*.***

POLITIK DAN SOSIOLOGI DAKWAH

Kata kunci yang perlu djelaskan dalam tulisan ini adalah pengertian ’politik’ dan ’sosiologi’ yang dikaitkan dengan kata dakwah. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan tiga pengertian tentang kata politik. Salah satu pengertian ’politik’ yang, menurut saya, sangat terkait dengan uraian ini adalah ”cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah); kebijakan.[1] Jadi ”politik dakwah” adalah kebijakan atau cara bertindak dalam menangani, menata dan melaksanakan dakwah. Kamus yang sama mengartikan kata ’sosiologi’ sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya.[2] Berdasarkan pengertian ini, ”sosiologi dakwah” adalah suatu kajian tentang tata cara, aktivitas, gerakan, proses perkembangan dan pelaksanaan dakwah yang dilakukan dengan mempertimbangkan sifat, perilaku dan struktur masyarakat tertentu. Dalam tulisan ini, politik dan sosiologi dakwah akan

---

[1] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 886-887.

[2] *Ibid;* hlm. 1085-1086.

dibahas secara bersamaan (tidak terpisah). Sebelum membahas lebih jauh tentang politik dan sosiologi dakwah, kita perlu membicarakan tentang makna, signifikansi, urgensi dan pentingnya gerakan dakwah bagi Umat Islam.

Urgensi Gerakan Dakwah

Tidak berlebihan kiranya kalau dikatakan bahwa aktivitas dan gerakan dakwah (dalam segala cara, bentuk dan manifestasinya) merupakan tulang punggung kelangsungan hidup agama Islam. Tanpa adanya aktivitas dan gerakan dakwah, agama Islam sudah barang tentu sulit atau bahkan tidak bisa berkembang. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Haditsnya menekankan, "Sampaikanlah apa saja yang berasal dari saya walaupun satu ayat."

Ini berarti bahwa dakwah itu merupakan tugas penting atau suatu kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam masyarakat moderen yang memiliki bangunan struktur sosial yang lebih kompleks, pola dan gerakan dakwah memerlukan organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderen, seperti penyusunan program, kebijakan dan strategi dakwah, pelaksanaan program dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dakwah itu.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen moderen ini, maka program-program dakwah yang belum terealisasikan akan dapat dievaluasi dan untuk selanjutnya dapat pula direalisasikan. Sedang program-program dakwah yang sudah dilaksanakan dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan intesitas pelaksanaannya. Atas dasar itu pula, program dakwah dapat

disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan perlunya kebutuhan dakwah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menggunakan dana yang memadai dan menerapkan asas-asas manajemen moderen dalam pelaksanaan dakwah serta ditopang pula oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka diharapkan tujuan-tujuan dakwah yang telah diprogramkan dapat tercapai.

Islam, Dakwah, dan Pluralitas Masyarakat

Islam adalah agama dakwah. Ini berarti bahwa Islam, menurut watak dan kodratnya, harus berkembang. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memberikan konfirmasi teologis bahwa dia diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam. Misi ini telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Nabi dengan hasil yang sangat spektakuler: Orang-orang Quraisy di Jazirah Arabia yang sebelumnya menganut kepercayaan politeistik dalam waktu 23 tahun telah diubah oleh Nabi menjadi masyarakat yang menganut kepercayaan monoteistik (Tauhid). Dari jazirah Arabia Islam terus berkembang ke berbagai pelosok belahan dunia. Keadaan ini membawa Islam tampil dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pluralistik. Berhadapan dengan kompleksitas situasi seperti ini timbullah suatu pertanyaan: bagaimanakah pola dan strategi dakwah Islam di tengah-tengah pluralitas atau keberagaman masyarakat dewasa ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu pandangan Islam tentang pluralisme.

Menurut kodratnya, pluralitas (sifat atau keadaan beragam) adalah merupakan ciri utama kehidupan suatu masyarakat. Keberagaman dan kemajemukan merupakan

sunnatullah sebagaimana dapat dipahami dari firman-Nya: *"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa supaya kamu sekalian saling kenal mengenal."*[3] Pluralitas masyarakat (yang mewujud dalam keberagaman dan kemajemukan ras, bangsa dan etnis) telah melahirkan keberagaman bahasa, adat istiadat, tradisi dan budaya. Pluralitas masyarakat ini memang dikehendaki oleh Allah dengan maksud agar kelompok-kelompok masyarakat yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bisa saling kenal mengenal satu sama lain.

Pluralitas masyarakat tidak saja menampakkan manifestasinya pada bentuk-bentuk fisik (tubuh), bahasa dan budayanya, akan tetapi juga terefleksikan dalam pola kepenganutan agama, ideologi, politik atau paham. Sejauh menyangkut agama, Islam dan umatnya berinteraksi dengan agama-agama dan umat-umat lain seperti Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dll. Di lapangan ideologi dan politik, Islam dan umatnya berinteraksi dengan para penganut ideologi-ideologi dan politik lain seperti Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme. Pluralisme juga tercermin dalam tubuh umat Islam sendiri: ada aliran Sunni dan Syi'ah. Sejauh menyangkut situasi di Indonesia, terdapat berbagai komunitas Muslim seperti komunitas NU, komunitas Muhammadiyah, komunitas Alwashliyah, dll. Bagaimanakah sebaiknya pola dan kebijakan dakwah di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti ini, baik dakwah itu ditujukan ke dalam tubuh umat Islam sendiri atau pun ditujukan kepada kelompok-kelompok non-Muslim?

---

[3] QS Alhujurat: 13.

Visi Islam dan Etika Dakwah

Secara umum, setiap aktivitas dakwah (baik itu ditujukan ke dalam tubuh umat Islam sendiri atau pun ditujukan kepada kelompok-kelompok non-Muslim) haruslah berpegang teguh kepada etika dan prinsip dakwah sebagaimana telah digariskan oleh Allah: *"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula."*[4]. Dalam ayat yang lain Allah berfirman: *"Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu."*[5]

Jadi ada tiga etika dan prinsip dakwah yang harus dikembangkan oleh umat Islam dalam melakukan dakwah, yaitu dengan cara yang bijaksana, memberikan pelajaran dan ketauladanan yang baik, dan apabila diperlukan mengajukan argumen dan bantahan dengan cara yang baik dan bijaksana pula. Cara-cara paksaan dan kekerasan dalam melaksanakan dakwah (baik bersifat nyata atau pun terselubung) sudah seyogyanya dihindari dan dijauhi karena Allah melarang untuk melakukan hal itu sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya: *"Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah."*[6]. Dakwah, pada prinsipnya, adalah merupakan ajakan, seruan atau panggilan. Sebagai kewajiban agama dan tugas suci agama, sudah selayaknya dakwah itu dijauhkan dari unsur-unsur paksaan baik dalam bentuk terang-terangan atau pun terselubung. Menghadapi kelompok-kelompok non-Muslim, umat Islam harus tetap berpegang teguh kepada etika dakwah sebagaimana telah digariskan oleh Allah. Yang perlu diubah oleh umat Islam adalah penyajian materi dakwah yang

---

[4] QS Annahl: 125.
[5] QS Ali Imran: 159.
[6] QS Albaqarah: 256.

kelihatan kurang menarik menjadi (lebih) menarik. Materi dakwah sebaiknya tidak saja dapat menyentuh lubuk hati orang-orang yang didakwahi, tetapi juga harus mampu menggugah akal pikiran mereka. Jadi emosionalitas dan rasionalitas orang-orang yang didakwahi perlu secara serentak disentuh agar pemahaman dan penerimaan mereka terhadap Islam berjalan secara seimbang dan simultan.

Dalam masyarakat pluralistik di masa moderen sekarang ini, para daie dan organisasi-organisasi dakwah Islam harus terus mengembangkan kiat-kiat baru dalam mengembangkan kiprah dakwahnya. Selain tetap menggunakan media tradisional (yang dipakai untuk kalangan masyarakat tradisional), umat Islam perlu pula menggunakan media moderen dalam mengembangkan dakwahnya. Majalah, surat kabar, radio, film, teve, internet dan media moderen lainnya perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam mengembangkan dakwahnya. Penggunaan media moderen semacam ini tentunya akan sangat efektif karena dapat menembus jarak yang jauh dan sampai kepada para pendengar, pembaca dan pemirsa di tempat yang jauh pula.

Selain itu, perlu terus dikembangkan pula dakwah bilhal, yang menekankan kepada upaya-upaya peningkatan perbaikan hidup dan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah lewat jalur pembangunan panti-panti asuhan, sarana-sarana pendidikan dan polik klinik atau rumah sakit-rumah sakit. Menggaris bawahi pendapat Prof. Dr. Mukti Ali, umat Islam harus mampu berdakwah lewat penyiaran, pengajaran dan penyembuhan (*preaching*, *teaching*, dan *healing*). Dalam masyarakat plurarisitik, umat Islam hendaknya menjauhi pendekatan dakwah yang lebih mengedepankan *nahi mungkar* (melarang kemungkaran) dari pada *amar makruf* (menyuruh kebaikan). Pendekatan dakwah

seperti ini akan terasa vulgar dan terasa kurang manusiawi bagi orang yang didakwahi.

Amar makruflah yang perlu lebih didahulukan, baru kemudian nahi mungkarnya sesuai dengan perintah Allah. Dengan pola dan kebijakan dakwah seperti ini maka orang-orang yang didakwahi akan merasa diperlakukan secara manusiawi dan nilai-nilai insaninya merasa dihargai dan dihormati. Juga, dalam masyarakat pluralistik (seperti masyarakat Indonesia) perlu dihindari materi, tema atau pesan-pesan dakwah yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Korelasi Politik dan Sosiologi Dakwah

Sebagaimana dikatakan dalam uraian di atas, dakwah pada dasarnya merupakan ajakan ke jalan kebaikan atau ke jalan Allah dengan cara yang baik, bijak, penuh perkataan sopan santun dan –kalau diperlukan– dengan cara berargumentasi dengan baik pula. Jadi, dakwah tidak dibenarkan dilakukan dengan cara paksaan (baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung). Allah melarang memaksakan agama Islam untuk dipeluk oleh orang-orang non-Muslim. Tugas umat Islam adalah sekadar menyampaikan dakwah, dan bukan memaksa setiap orang untuk memeluk agama Islam. Segala bentuk pemaksaan (baik secara terselubung maupun secara terang-terangan) tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu bertentangan dengan ajaran Allah. Sebagaimana secara eksplisit dan jelas dinyatakan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya:

> Dan jika Tuhanmu menghendaki, pastilah (akan) beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Maka apakah engkau (hendak) memaksa para

manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?[7]

Penegasan Allah di atas sekaligus mengajarkan dan mengakui adanya prinsip kebebasan beragama bagi manusia. Manusia bebas untuk memilih dan menganut suatu agama yang menurut keyakinannya adalah benar. Tentu saja, setiap pilihan teologis dan kepenganutan seseorang terhadap agama tertentu (seperti halnya memilih sesuatu) disertai oleh suatu pertimbangan, kesadaran dan tanggung jawab etis dan teologis. Dalam hubungan ini, setiap pemeluk agama tertentu sudah sewajarnya untuk menghargai dan menghormati para pemeluk agama lain yang memilih dan menganut agama yang berbeda dengan dia. Dengan menggunakan pola dan kerangka berpikir seperti itu, kebebasan beragama akan tetap dijunjung tinggi sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan beragama itu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, yang realisasinya di negara kita sangat ditekankan dan dijamin oleh UUD 1945.

Bagi Umat Islam, politik dakwah hendaknya dirancang secara serius dan diprogram secara baik dan rapi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen moderen. Kebijakan dakwah harus disusun dan dilaksanakan sesuai keadaan masyarakat yang dihadapi baik dakwah yang ditujukan kepada internal Umat Islam sendiri maupun dakwah yang ditujukan kepada non-Muslim. Materi dakwah dan metode dakwah harus pula disesuaikan dengan kemampuan daya pikir dan daya tangkap masyarakat yang dihadapi. Dakwah harus dikerjakan secara profesional, bukan asal-asalan. Oleh karena itu, perlu terus digalakkan pendidikan dakwah yang berorientasi untuk mencetak

---

[7] QS Yunus: 99.

kader-kader daie yang mumpuni, profesional dan siap diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan dakwah.

Dakwah sebagai profesi harus terus digarap, dikembangkan dan digalakkan di setiap lini aktivitas dan gerakan dakwah. Profesionalisme dalam berdakwah sangat penting dan menjadi bagian integral dari politik dakwah dewasa ini. Kebijakan dan politik dakwah tanpa didukung oleh profesionalisme akan kurang memperoleh hasil yang maksimal. Sebaliknya, politik dakwah yang dilandasi dan didukung oleh khittah dakwah dan profesionalisme akan membuahkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Segala macam media, baik media konvensional-tradisional (wayang, drama, seni lakon, dll) dan media moderen/media elektronik dan media cetak (radio, bioskop, teve, majalah, surat kabar, internet, dsb) hendaknya dimanfaatkan secara maksimal demi suksesnya dakwah dalam masyarakat. 'Modernisasi' dakwah berikut perangkatnya (perangkat lunak dan perangkat keras) harus terus diupayakan dan dilakukan secara serius dan bertanggung jawab agar program dakwah dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Tak kalah pentingnya adalah para daie atau lembaga-lembaga dakwah harus memahami sosiologi dakwah. Memahami sosiologi dakwah adalah mempelajari dan memahami lingkungan sosial atau keadaan komunitas yang akan menerima dakwah. Setiap kelompok masyarakat mempunyai sifat, watak, tradisi, perangai, kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Itu semua harus dipelajari dan dipahami oleh para daie atau lembaga-lembaga dakwah agar dakwah yang mereka laksanakan di tengah-tengah suatu kelompok masyarakat (etnis) tertentu bisa berhasil dengan baik. Contoh baik yang pantas ditiru adalah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka berdakwah dengan menggunakan metode 'kultural edukatif', tidak secara

membabi buta menyerang keras paham dan praktik-praktik yang tidak Islami, tetapi mereka lakukan secara persuasif, edukatif, etis dan humanis. Cara-cara santun, bijak, arif dan edukatif mereka terapkan dalam metode dakwah mereka sehingga kalbu orang-orang yang didakwahi tersentuh dan akhirnya masuk Islam.

Politik dan sosiologi dakwah hendaknya berjalan secara beriringan dan bergandengan. Yang satu memerlukan dan menopang yang lain; yang satu melengkapi dan memperkuat yang lain. Dengan demikian, terjadi efektivitas dan sinegisitas dalam aktivitas dan gerakan dakwah sehingga dakwah akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna di setiap lini gerakan dakwah. Diperlukan komunikasi, koordinasi dan kooperasi yang baik dan rapi di kalangan para daie dan lembaga-lembaga dakwah agar aktivitas dan gerakan dakwah berjalan secara sinergis dan berkesinambungan. Politik dan sosiologi dakwah juga harus ditopang dan diperkuat oleh profesionalisme yang kuat dan tinggi karena dakwah merupakan profesi dan bukan pekerjaan sampingan dan bukan pula pekerjaan tambahan. Penggunaan materi, metode, dana, sarana dan media yang tepat dan maksimal, penerapan politik dan pemahaman sosiologi dakwah yang pas dan terarah, yang ditopang oleh profesionalisme kerja yang tinggi akan banyak menentukan keberhasilan suatu misi dakwah.***

BAGIAN LIMA

Mengurai Isu-isu Sosial Budaya

TKW DIBUNUH SECARA SADIS

Problem kesulitan ekonomi yang melilit kehidupan suatu keluarga di banyak desa di negeri ini telah mendorong kaum perempuannya bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita) di luar negeri, termasuk di Timur Tengah (Timteng). Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Adalah Ami binti Turkia, TKW asal desa Pegagan, kecamatan Kapetakan, Cirebon, yang juga mencoba menyabung nasib dengan menjadi TKW di Bahrain. Tentu, dengan menjadi TKW, Ami bermaksud ikut memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di desanya. Setiap bulannya ia berharap dapat menyisihkan sebagian upahnya untuk dikirim ke keluarganya di Cirebon. Demikian kira-kira angan-angan yang terlintas dalam benak pikiran Ami. Dikirim oleh sebuah PPTKIS (perusahaan pengirim tenaga kerja Indonesia swasta) di ibu kota, Ami berangkat dari Jakarta menuju Manama, Bahrain. Ia bekerja beberapa lama di suatu keluarga di Bahrain.

Ditusuk dengan Obeng

Kemudian, apa yang terjadi? Suatu ketika pengguna jasa (majikan) menusuk leher Ami dengan sebilah obeng. Lehernya

tembus dan berlumuran darah. Ami tewas seketika. Nyawanya melayang. Mayatnya dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam mobil hendak dibuang di kawasan Sitra, Bahrain. Saat sang pengemudi hendak membuang mayat Ami di semak-semak, kebetulan sudah ada orang di sana. Karena curiga, orang itu sempat mencatat nomer mobil tersebut. Sang pengemudi melarikan mobilnya dengan kencang ke kawasan lain, lantas membuang mayat Ami. Atas laporan orang yang mencatat nomer mobil itu, polisi Bahrain dengan tangkas dan cekatan menangkap majikan itu dalam hitungan jam. Sang majikan diringkus polisi.

Dalam investigasi, si majikan mengklaim bahwa Ami telah menghina dirinya. Karena harga diri sang majikan merasa sangat terhina, ia pun menjadi kalap dan meluapkan geram amarahnya dengan menusukkan obeng ke leher Ami dengan sadis dan bengis sehingga Ami tewas secara tragis. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009. Selaku duta besar RI untuk Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain, saya mengadakan rapat dengan staf dan Atnaker (Atase Tenaga Kerja) di KBRI Kuwait untuk menangani kasus ini dan memberitahu keluarga Ami di Cirebon tentang peristiwa ini. Jenazah Ami diotopsi dan beberapa lama kemudian dikirim ke daerah asalnya atas permintaan keluarga. Ahli waris Ami memperoleh asuransi sebesar Rp 45 juta dari pihak perusahaan asuransi di Jakarta.

Langkah berikutnya, membawa kasus Ami ke pengadilan Bahrain. KBRI telah menyewa pengacara untuk menangani kasus ini secara serius sehingga dapat diperoleh rasa keadilan yang seadil-adilnya. Kami minta pengacara untuk terus memantau, mengawal, dan menangani kasus pembunuhan Ami itu secara sungguh-sungguh agar pengadilan Bahrain dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai perbuatan sadis, bengis, dan kejam si majikan. Sampai dengan selesainya tugas saya sebagai dubes pada akhir Juni 2010, kasus pembunuhan Ami belum

diputus oleh pengadilan. Mengapa proses peradilannya harus berjalan sangat lama?

Nasib Tragis

Nasib tragis yang menimpa Ami melengkapi kisah-kisah tragis penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan, dan pembunuhan TKW di Timteng seperti yang terjadi pada Kikim Komalasari (dibunuh dan dimasukkan ke dalam tong sampah) dan Sumiati (disiksa dan digunting bibirnya) di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Sudah saatnya pemerintah RI (Kemnakertrans) mendesak negara-negara penerima TKW di Timteng untuk memasukkan masalah pekerja domestik ini ke dalam UU Ketenakerjaan di negara-negara setempat agar para TKW kita lebih terlindungi. Perlu pula dibuat MoU tentang tenaga kerja non-formal antara pemerintah RI dan pemerintah negara-negara di Timteng yang menjadi tujuan pengiriman dan penempatan TKW agar TKW kita lebih terlindungi di negara-negara tersebut.

Di negara-negara Timteng, selama ini masalah tenaga kerja di sektor rumah tangga masih dimasukkan ke dalam UU Keluarga, bukan ke dalam UU Ketenagakerjaan. Selama masalah tenaga kerja di sektor rumah tangga belum dimasukkan ke dalam UU Ketenagakerjaan, TKW kita di negara-negara Timteng sangat tidak terlindungi dan sangat rentan terkena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh majikan dan keluarga majikan. Karena tidak terlindungi secara maksimal, masih dimungkinkan terjadinya kasus-kasus yang sama atau serupa dengan kasus yang dialami oleh Ami di Bahrain atau yang dialami oleh TKW lain di negara-negara Timur Tengah yang menjadi tujuan pengiriman dan penempatan TKW Indonesia. Kapan nasib tragis yang menimpa TKW kita berakhir?***

ADAKAH ALTERNATIF HUKUMAN PANCUNG?

Alqur'an Surat Albaqarah ayat 178 memang mewajibkan perintah pelaksanaan hukuman kisas (Arab: *qishash*). Kisas adalah pemberian hukuman yang setimpal kepada seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan kejahatan yang ia lakukan. Dalam hukum kisas antara lain dinyatakan bahwa 'nyawa' harus dibalas dengan 'nyawa' (pembunuh harus dibunuh). Hukuman kisas tidak dilaksanakan apabila keluarga dari yang terbunuh memaafkan atau keluarga terbunuh meminta diyat (tebusan) dan diyat itu dipenuhi oleh pembunuh (keluarga pembunuh). Dalam sistem hukum seperti ini, raja Arab Saudi tidak mempunyai otoritas untuk mengubah atau 'memaafkan' si pembunuh tadi. Ayat ini antara lain yang menjadi dasar hukum, legitimasi, dan rujukan pemerintah Arab Saudi dalam memberlakukan hukuman kisas itu.

Ruyati Dikisas

Tulisan ini sama sekali tidak akan membicarakan bagaimana proses peradilan yang berlangsung di pengadilan Arab

Saudi sehingga Ruyati (dan orang-orang yang senasib dengan dia) dijatuhi hukuman pancung baru-baru ini. Yang menjadi pertanyaan penting kita adalah: apakah kita harus secara harfiah melaksanakan hukuman kisas itu dengan cara 'membunuh' dalam arti memancung/menebas tengkuk atau leher seorang terpidana dengan memakai pedang yang dilakukan oleh pemancung? Adakah alternatif hukuman pancung itu?

Ruyati adalah salah satu saja dari sekian banyak terpidana yang mengalami hukuman pancung. Karena Ruyati dituduh membunuh majikan dan ia dinyatakan terbukti bersalah menurut sistem hukum di Arab Saudi, ia dikisas (dihukum mati dengan cara dipancung). Diberitakan di media massa bahwa di Arab Saudi masih ada 28 orang lagi yang dinyatakan terbukti bersalah dan menunggu hukuman pancung. Darsem lolos dari hukuman pancung karena pemerintah RI telah bayar diyat sebesar Rp 4 miliar lebih.

Walaupun sudah diserukan oleh para aktivis hukum dan HAM (seperti Amnesti Internasional) agar hukuman mati dihapus, tetapi masih ada negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Alasan negara yang memraktikkan hukuman mati adalah demi rasa keadilan dan memberi efek jera. Indonesia masih menganut hukuman mati. Berbeda dari Arab Saudi yang melaksanakan hukuman mati dengan cara memancung terpidana, Indonesia mengeksekusi hukuman mati dengan cara menembak terpidana. Contohnya, Amrozi (salah seorang pelaku bom Bali) ditembak mati oleh regu penembak. Singapura dan Malaysia memberlakukan hukuman mati (hukuman gantung) bagi pengedar narkoba yang dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan.

Sebuah Analogi

Ada praktik transaksi jual beli di masa lalu yang dapat dianalogikan dengan hukuman pancung. Dalam masyarakat tradisional di abad-abad lalu, transaksi jual beli masih berlangsung secara konvensional, yaitu dengan cara barter. Pembeli dan penjual saling tukar barang dagangan (misal, ubi ditukar dengan ikan) karena saat itu belum ditemukan alat tukar yang disebut uang. Cara transaksi jual beli konvensional itu akhirnya tidak dipakai lagi setelah diciptakan uang sebagai cara transaksi moderen. Cara transaksi konvensional digantikan dengan cara transaksi moderen (non-konvensional).

Dapatkah cara seperti digambarkan di atas diterapkan di bidang hukum Islam? Di tengah-tengah perkembangan teknologi moderen yang semakin canggih dewasa ini, para ulama Arab Saudi perlu melakukan 'ijtihad' untuk menemukan cara lain dalam pelaksanaan kisas di negara itu. Orang yang dituduh membunuh dan terbukti bersalah di pengadilan Arab Saudi, ia dikisas tanpa dipancung. Hukuman 'konvensional' pancung diganti dengan hukuman 'non-konvensional' karena telah ditemukan alat teknologi moderen yang bisa menggantikan hukuman pancung itu. Seorang pembunuh yang terbukti bersalah di pengadilan, misalnya, disuntik mati sehingga rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan tidak terlalu lama dan tidak terlalu menyakitkan. Pancung adalah hukuman konvensional, sedang suntik mati adalah hukuman non-konvensional. Caranya beda, tapi esensi hukuman kisasnya sama: sama-sama dihukum mati, nyawa dibalas dengan nyawa. Logis apa tidak? Ini hanya pemikiran saya sebagai seorang sejarawan sosial, bukan sebagai ahli hukum. Wallahu a'lam bissawab.***

HUKUMAN (TANPA) PANCUNG

Eksekusi hukuman pancung terhadap Ruyati (TKI) yang bekerja di Arab Saudi beberapa waktu lalu mengundang reaksi keras dari banyak kalangan di negara kita. Suatu hal yang sangat tidak lazim adalah pemerintah Arab Saudi tidak memberitahu terlebih dulu kepada KBRI di Riyadh tentang eksekusi hukuman pancung atas Ruyati itu. Sikap seperti itu dari segi etika hukum dan etika diplomatik terasa sangat melecehkan pemerintah RI. Menanggapi eksekusi hukuman pancung atas Ruyati tersebut, pemerintah RI mengirim nota protes keras kepada pemerintah Arab Saudi dan sekaligus melakukan moratorium pengiriman TKI nonformal ke negara kerajaan di Timur Tengah itu. Prof Syafii Maarif dalam wawancara dengan teve swasta di Jakarta mengecam eksekusi hukuman pancung atas Ruyati itu sebagai perilaku biadab dan menghimbau pemerintah Arab Saudi untuk belajar menjadi menusia beradab.

Hukuman mati dengan cara pancung (leher atau tengkuk pembunuh ditebas dengan sebilah pedang panjang yang sangat tajam) telah menjadi sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi. Ruyati adalah salah satu saja dari sekian banyak terpidana yang mengalami hukuman pancung. Diberitakan di media, di Arab

Saudi masih ada 28 orang lagi yang dinyatakan terbukti bersalah dan menunggu hukuman pancung. Pemerintah RI telah membentuk Satgas yang ditugasi untuk menyelesaikan kasus hukum dan 'menyelamatkan' nyawa TKI yang terancam hukuman pancung itu. Dasrem lolos dari hukuman pancung karena pemerintah RI telah membayar diyat (tebusan) kepada keluarga terbunuh sebesar Rp 4 miliar lebih. Dalam sistem hukum Islam seperti di Arab Saudi, terpidana (pembunuh) tidak akan dieksekusi apabila keluarga terbunuh memberi maaf kepada pembunuh. Bisa pula pembunuh tidak akan dieksekusi apabila pembunuh tadi (keluarga pembunuh) membayar diyat kepada keluarga terbunuh sesuai permintaan (tuntutan) keluarga terbunuh.

Legalitas Hukum Kisas

Orang yang dituduh melakukan pembunuhan dan dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan Arab Saudi, ia dihukum mati dengan cara dipancung. Dalam peristilahan hukum Islam, hal itu dinamakan kisas (Arab: qishash). Kisas adalah hukuman setimpal yang dijatuhkan oleh pengadilan Islam (dalam hal ini pengadilan Arab Saudi) kepada orang yang dinyatakan terbukti bersalah sesuai kejahatan (perbuatan kriminal) yang ia lakukan. Karena Ruyati dituduh membunuh majikan dan ia dinyatakan terbukti bersalah menurut sistem hukum di Arab Saudi, ia dikisas (dihukum mati dengan cara dipancung).

Walaupun sudah diserukan oleh para aktivis hukum dan HAM (seperti Amnesti Internasional) agar hukuman mati dihapus, tetapi masih ada negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Alasan negara yang memraktikkan hukuman mati adalah demi rasa keadilan hukum dan memberi efek jera agar orang lain tidak melakukan perbuatan kriminal yang sama. Indonesia masih

menganut hukuman mati. Berbeda dari Arab Saudi yang melaksanakan hukuman mati dengan cara memancung terpidana, Indonesia mengeksekusi hukuman mati dengan cara menembak terpidana. Contohnya, Amrozi dan Imam Samudra (dua pentolan pelaku bom Bali) ditembak mati di hadapan regu penembak. Singapura memberlakukan hukuman mati (hukuman gantung) bagi pengedar narkoba. China menembak mati para koruptor.

Alqur'an Surat Albaqarah ayat 178 memang memerintahkan pelaksanaan hukuman kisas. Ayat ini yang menjadi rujukan hukum dan legitimasi keagamaan pemerintah Arab Saudi dalam memberlakukan hukuman kisas itu. Ayat ini sudah bersifat qath'i (pasti dan gamblang) dan merupakan nash atau perintah dari Tuhan yang isinya sama sekali tidak dapat diragukan lagi. Hanya yang menjadi pertanyaan kita adalah: apakah hukuman kisas itu harus dilaksanakan dengan cara 'membunuh' dalam arti memancung atau menebas tengkuk (leher) seorang terpidana dengan memakai pedang yang dilakukan oleh pemancung?

Kisas Tanpa Pancung

Tulisan ini tidak mempermasalahkan keabsahan hukum kisas itu. Karena teks (nash) Alqur'an memang sudah jelas dan terang benderang memerintahkan demikian. Seseorang yang dituduh membunuh dan tuduhan itu dibuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan Islam seperti di Arab Saudi, maka pembunuh itu harus dihukum bunuh (kisas). Hukuman yang diterima oleh pembunuh setimpal: nyawa dibalas dengan nyawa. Pertanyaannya: apakah 'pedang' (senjata tajam) merupakan satu-satunya alat yang harus dipakai dalam eksekusi hukum kisas? Tidak bisakah alat 'konvensioal' pedang itu diganti dengan alat 'modern'

yang canggih? Dalam praktik euthanasia, pasien disuntik mati agar ia mengalami *"mercy killing"* (pembunuhan penuh belas kasihan): ia mati dengan cepat, nyaman, dan tidak merasa sakit.

Di tengah-tengah perkembangan teknologi moderen yang semakin canggih dewasa ini, para ulama hukum Arab Saudi atau ulama Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kenferensi Islam) perlu melakukan 'ijtihad' untuk menemukan cara lain dalam pelaksanaan kisas. Orang yang dituduh membunuh dan terbukti bersalah di pengadilan Islam, ia dikisas tanpa dipancung. Ia, misalnya, disuntik mati sehingga rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan tidak lama, tidak menyakitkan, dan tidak berdarah-darah. Fungsi pedang sebagai alat pancung (eksekusi mati) diganti dengan suntik mati. Alat yang dipakai berbeda, tapi esensi hukuman kisasnya sama: sama-sama hukuman mati, nyawa terbunuh dibalas dengan nyawa pembunuh. Dapatkah praktik semacam *"mercy killing"* itu diterapkan dalam hukuman kisas?***

B(D)ERITA TKI BELUM BERAKHIR

Baru-baru ini dalam *running tex* di sebuah teve Jakarta, Migrant Care menyatakan terdapat 417 TKI di beberapa negara di luar negeri yang terancam hukuman mati dan 32 orang di antaranya telah divonis mati. Migrant Care sebagai lembaga swadaya masyarakat tentunya mempunyai data yang valid dan akurat tentang kasus-kasus TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati dan telah divonis mati. Jumlah sebanyak 417 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati adalah jumlah yang sangat besar. Kita sangat perihatin dengan banyaknya kasus TKI yang terancam hukuman mati itu karena masalahnya menyangkut nyawa manusia yang tak dapat dianggap remeh. Juga, jumlah sebanyak 32 TKI di luar begeri yang telah divonis mati adalah jumlah yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui, TKI yang telah dieksekusi mati terjadi di Arab Saudi, Singapura, dan negara lain. Tragis. Benar-benar tragis. Ingin cari kerja dan upah di negeri orang, tapi pulang-pulang sudah jadi mayat. Ayah, ibu, anak dan keluarga korban di Tanah Air *shock* menerima kenyataan tragis ini. Berapa banyak lagikah nyawa TKI yang harus melayang? Kapankah b(d)erita TKI ini berakhir?

Kasus Tuti, Ruyati, dan Dasrem

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengungkapan data oleh Migrant Care tentang TKI yang terancam hukuman mati dan telah divonis mati itu, muncul pula kasus Tuti Tursilawati (TKI yang bekerja di Arab Saudi). Dia terancam hukuman mati di negara itu. Sebagaimana diketahui, Arab Saudi memberlakukan hukum kisas (Arab: *qishash*), yakni pemberian hukuman setimpal kepada seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bersalah telah membunuh orang lain. Eksekusi mati terhadap terpidana ini dilaksanakan dengan cara memancung yang bersangkutan. Merasa sangat peduli terhadap nasib Tuti yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, mantan Presiden BJ Habibie melakukan pendekatan dan upaya kemanusiaan. Habibie langsung menemui dan meminta kepada Pangeran Walid agar Tuti dibebaskan dari hukuman mati. Kita berharap upaya Habibie ini membuahkan hasil. Setelah berjalan beberapa lama, upaya Habibie tak terdengar lagi dan tenggelam di tengah isu-isu lain yang terus mencuat ke permukaan.

Kasus Tuti yang terancam hukuman mati sekarang ini mengingatkan kita kepada kasus TKI Ruyati dan Dasrem. Beberapa bulan lalu, Ruyati dihukum pancung karena pengadilan di negara setempat menyatakan bersalah telah membunuh sang majikan. Kasus ini menjadi isu kemanusiaan yang sangat sensitif di negara kita. Para simpatisan Ruyati dan pengunjuk rasa melakukan demonstrasi di muka Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, mengecam hukuman pancung atas Ruyati itu. Dasrem sebenarnya juga dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Kerajaan Arab Saudi. Akan tetapi, karena pemerintah RI membayar diyat sebesar Rp 4 miliar lebih, akhirnya Dasrem dibebaskan dari hukuman pancung. Dasrem kembali ke desa kelahirannya, merasa senang dan

bersyukur karena terbebas dari hukuman pancung itu. Sebenarnya, sebelum pemerintah RI membayar diyat, banyak kalangan masyarakat di Tanah Air yang menggalang dana untuk membayar diyat agar Dasrem dapat dibebaskan dari hukuman mati.

Penuturan kasus tragis yang menimpa TKI di atas sebenarnya merupakan sebagian kecil dari kasus tragis yang lebih besar dan berkepanjangan sejak dimulainya pengiriman TKI ke luar negeri di tahun 1970-an. Selain dihukum mati, para TKI (TKW) mengalami kasus lain yang juga sangat memperihatinkan. Di negara-negara Timur Tengah, kasus yang dialami oleh para TKW antara lain pelecehan seksual, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, diberi beban kerja yang berlebihan (terutama di bulan Ramadan) sehingga kurang istirahat, dan gaji tidak dibayar. Di Kuwait, misalnya, seorang TKW disiksa sehingga kondisinya sangat memperihatinkan dan 'dibuang' dekat tong sampah. Ia ditolong oleh pekerja migran lain dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di Bahrain, seorang TKW ditusuk lehernya dengan obeng dan nyawanya melayang seketika. Akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan atau anak laki-laki majikan, sejumlah TKW yang hamil melarikan diri ke KBRI di Kuwait. Atase Tenaga Kerja dan petugas KBRI Kuwait membawa mereka ke rumah sakit saat mereka melahirkan bayi mereka. Bayi mereka menjadi masalah keimigrasian. KBRI menghendaki agar para bayi itu dapat dipulangkan ke Indonesia bersama ibu-ibu mereka. Di pihak lain, Kemlu Kuwait tidak membolehkan para bayi itu dipulangkan ke Indonesia karena nama-nama bayi itu tidak tercantum dalam paspor ibu mereka.

Derita Belum Berakhir

Benar, para TKI yang bekerja di luar negeri memperoleh gaji atau upah yang dapat menopang ekonomi keluarga di Tanah Air. Pemerintah juga mendapatkan pemasukan dana dari program pengiriman TKI ke luar negeri ini. PJTKI dan PJTKA juga meraup keuntungan besar dari sektor ini. Tapi masih banyak masalah yang harus dibenahi untuk mengelola pengiriman TKI ke luar negeri. *Pertama,* sistem rekrutmen TKI oleh PJTKI harus benar-benar selektif, tidak hanya asal-asalan dan acak-acakan dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan, kepolosan dan keluguan calon TKI. *Kedua*, cek kesehatan para TKI yang benar-benar akurat karena, tak lama setelah bekerja di negara penempatan, mereka meninggal dunia. *Ketiga,* pelatihan kerja yang baik dan berkualitas di Tanah Air agar mereka benar-benar terampil, cakap dan siap bekerja secara mental dan fisikal. *Keempat,* pelatihan bahasa agar para TKI dapat berkomunikasi dengan majikan asing (pengguna jasa) dengan baik sehingga tidak terjadi salah pemahaman. *Kelima,* khusus untuk pengiriman TKI ke negara-negara Timteng, harus dibuat MoU *(Memorandum of Understanding)* bagi TKI non-formal agar keselamatan, keamanan dan hak-hak mereka terlindungi. *Keenam,* tindakan tegas membekukan dan mencabut izin operasional PJTKI yang melanggar peraturan seperti memalsu dokumen keimigrasian atau paspor (nama dan umur) dan mengirim para (calon) TKI secara ilegal.

Sampai saat ini, MoU antara pemerintah RI dengan negara-negara Timteng (seperti Arab Saudi dan Kuwait) tentang pengiriman TKI non-formal belum terealisasikan. Pemerintah RI sudah sering melakukan inisiatif, tapi respons dari negara-negara Timteng belum seperti yang diharapkan. Sangat aneh, walaupun belum ada MoU tentang pengaturan pengiriman TKI non-formal, pengiriman TKI oleh para PJTKI (tentunya setelah mendapat izin

operasional dari Kemnakertrans dan BNP2TKI) terus berjalan selama bertahun-tahun. Sudah dapat diprediksi, tanpa adanya MoU dimaksud, pengiriman TKI ke negara-negara penempatan di Timteng akan terus bermasalah dan permasalahannya terus berakumulasi dan menumpuk dari waktu ke waktu sehingga menjadi semakin kompleks, rumit dan sulit untuk dipecahkan. Walaupun sudah ada moratorium pengiriman TKI ke negara-negara Timteng, tapi hal itu belum menyelesaikan akar masalah yang sebenanya. Yang terus menanggung penderitaan berkepanjangan adalah para TKI. Berita dan derita TKI belum juga berakhir.***

SEPAK BOLA PANCASILA

Di tahun 1980-an, Pancasila diterapkan oleh pemerintah Orde Baru (Orba) sebagai landasan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat itu, diperkenalkan sistem ekonomi Pancasila yang oleh pemerintah dipercayakan kepada Profesor Mubiyarto (pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) untuk menyusun dan merumuskannya. Sistem ekonomi Pancasila memuat dasar-dasar etika yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, terjauh dari prinsip *free fight liberalism,* dan tidak menghendaki kalangan kaya bertambah kaya dan kaum miskin bertambah miskin. Pancasila juga diterapkan dalam sistem perburuhan sehingga muncullah sistem perburuhan Pancasila. Sistem perburuhan Pancasila menekankan agar kaum buruh tidak menjadi sapi perah para pengusaha.

Menolak demokrasi terpimpin *(guided democracy)* ala Presiden Soekarno di zaman Orde Lama (Orla), pemerintahan Orba tampil menerapkan demokrasi Pancasila. Dalam konteks ini, pemerintahan Orba di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai dasar, landasan, dan cita-cita demokrasi. Maka lahirlah demokrasi Pancasila di era itu. Pada masa

pemerintahannya pula, Presiden Soeharto mendambakan pembangunan kampus berwajah Pancasila. Kampus bercorak Pancasila merefleksikan paduan antara nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadaban, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial dengan nilai-nilai keilmuan di lingkungan akademis. Selanjutnya, Pancasila diterapkan sebagai sistem politik dan sosial kemasyarakatan dalam bentuk asas tunggal. Semua partai politik dan Golkar harus berasas tunggal Pancasila. Begitu pun dengan organisasi kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ormas. Kebijakan asas tunggal bertujuan untuk memperkuat komitmen semua parpol dan ormas kepada Pancasila.

Sepak Bola dan Etika Pancasila

Di tengah-tengah maraknya wacana dan kebijakan penguatan komitmen terhadap Pancasila di zaman Orba, muncul pula ide perlunya Pancasila diterapkan dalam permainan sepak bola. Gagasan ini melahirkan sepak bola Pancasila. Adakah hubungan antara sepak bola dengan Pancasila? Sepak bola adalah suatu cabang olah raga yang menggunakan bola dengan tim berjumlah sebelas pemain. Sepak bola termasuk cabang olah raga yang sangat diminati dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Banyak para pencandu sepak bola di Tanah Air kita. Konon di Amerika Latin seperti di Brasil, Argentina, dan Kolombia, sepak bola sangat dipuja dan seolah-olah menjadi agama kedua bagi mereka. Itu yang kita ketahui tentang sepak bola.

Sedang Pancasila adalah filsafat, dasar, dan ideolgi negara. Pancasila sebagai dasar negara dicetuskan untuk pertama kalinya oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan maha karya dan kontribusi Bung Karno kepada bangsa Indonesia

sehingga bangsa yang besar ini dapat bersatu walaupun berbeda-beda dalam hal etnis, budaya, agama, dan aliran politik. Di bawah lambang negara kita, burung Garuda, tercantum motto nasional berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda, tetapi tetap satu). Persatuan inilah yang menjadi salah satu sila Pancasila. Itu yang kita ketahui tentang Pancasila. Adakah hubungan korelatif-etis antara sepak bola dan Pancasila?

Sepak bola selain mengandalkan kemampuan fisik, teknik, ketangguhan mental, dan kualitas permainan, ia juga harus menampilkan sportivitas, aturan main, dan etika. Untuk menegakkan aturan main dan etika bermain, maka dalam pertandingan sepak bola diperlukan adanya wasit dan hakim garis yang benar-benar profesional sehingga dapat menegakkan *fairness* dalam pertandingan. Wasit dan hakim garis inilah yang menegakkan aturan main dan etika bermain di lapangan ketika pertandingan digelar. Seorang pemain yang diketahui *handball,* ia dinyatakan bersalah oleh wasit dan tendangan bebas bagi tim lawan. Sebuah gol bisa dianulir oleh wasit kalau si pemain dinyatakan *offside.* Seoarng pemain akan diganjar kartu kuning dan bahkan kartu merah kalau melakukan pelanggaran sangat berat terhadap pemain dari lawan timnya. Pernah juga terjadi seorang pemain sepak bola yang bermain di suatu tim terkenal di Eropa dilarang tampil dalam beberapa kali pertandingan karena pemain tadi diketahui telah mengeluarkan kata-kata rasis terhadap pesepak bola dari lawan timnya yang kebetulan berkulit hitam.

Permainan bersih dan Jujur

Saya yakin Pancasila dapat diterapkan dalam permainan dan pertandingan sepak bola. Bukan hanya berlaku bagi para pemain, tetapi nilai-nilai etis Pancasila harus juga berlaku bagi para

penonton *(supporters),* para pembina dan para pengelola. Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai kebaikan, susunan nilai-nilai moral, dan himpunan nilai-nilai etika. Sepak bola Pancasila merefleksikan suatu permainan dan pertandingan yang didasarkan pada nilai-nilai sportivitas dan *fairness.* Selain sikap sportif dan *fair*, nilai-nilai Pancasila dalam pertandingan sepak bola harus tercermin pada perilaku para pemain Indonesia. Mereka harus dapat mengendalikan emosi, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah mengeluarkan kata-kata ejekan.

Kasus Zidane-Materezi yang terjadi dalam World Cup 2006 hendaknya menjadi pelajaran bagi pemain Indonesia. Zidane (pesepak bola Prancis) menanduk Materizi (pemain Italia) karena pemain yang disebut belakangan ini diduga telah menghina Zidane. Para pemain sepak bola Indonesia juga hendaknya tidak sombong dan takabur tatkala menang. Kemenangan justru jadi modal motivasi untuk lebih berprestasi lagi. Mereka juga tidak larut dalam kesedihan, keperihan, kepedihan, dan keputusasaan jika kalah. Kekalahan justru menjadi pembelajaran dan pemicu untuk bangkit dan bangkit kembali. Inilah etika Pancasila dalam sepak bola!

Para penonton dan supporter yang Pancasilais tidak tawuran, tidak mengamuk, dan berbuat anarkis apabila tim kesayangan mereka kalah. Terimalah kekalahan sebagai kenyataan karena dalam suatu pertandingan memang harus ada tim yang menang dan harus ada tim yang kalah. Tidak mungkin kedua tim menang semua atau kalah semua. Yang ada hanya *draw*. Euforia dan dukungan penuh dan kuat yang kita berikan kepada tim kita tidak perlu membuat sebagian kita merendahkan tim negara lain, mengeluarkan kata-kata rasis, dan melecehkan lagu kebangsaan tim sepak bola negara lain karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etis Pancasila. Sebaliknya, kita juga mengutuk tim sepak bola

negara lain dan para pendukungnya jika ada di antara mereka berbuat rasis dan melecehkan lagu dan lambang kebangsaan kita.

Kita salut kepada timnas sepakbola kita yang saat ini sudah memasuki babak final setelah mampu mengalahkan tim-tim lainnya di ajang AFF (Asian Football Federation) 2010. Di babak final, tim Merah Putih akan berhadapan dengan tim Malaysia. Leg pertama diselenggarakan di stadion olah raga Bukit Jalil, Malaysia, 26 Desember 2010. Leg kedua di Istora Glora Bung Karno, Jakarta, 29 Desember 2010. Di atas kertas, tim Indonesia lebih unggul karena dalam pertandingan babak penyisihan sebelumnya tim Indonesia mampu mengalahkan tim Malaysia dengan skor telak 5-1. Demi bangsa dan demi nasionalisme Indonesia, kita pasti mendukung sepenuhnya tim Garuda –yang diarsiteki oleh Alfred Riedl dan dimotori oleh Christian Gonzales dkk– untuk memenangi pertandingan. Jika tim Garuda menang, sejarah baru terukir karena selama ini tim kita belum pernah merebut piala di ajang kejuaraan AFF. Dengan semangat burung Garuda dan etika Pancasila dalam bersepakbola, tim Merah Putih sudah waktunya mengukir sejarah dan tampil sebagai juara di ajang AFF 2010 ini! Semoga!***

WAJAH RETAK PERADABAN

Sila kedua Pancasila mengajarkan ″Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.″ Ini berarti bahwa filsafat hidup kita mengajarkan agar seluruh bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keadaban dan peradaban. Ajaran luhur dan mulia ini sudah seharusnya selalu mendasari segala perilaku masyarakat Indonesia dalam segala aspek hidup dan kehidupannya. Nilai-nilai luhur dan agung yang terkandung dalam ajaran ″Kemanusiaan yang Adil dan Beradab″ ini bersumber dari sistem nilai budaya dan ajaran agama yang berakar kuat dalam struktur kehidupan dan tradisi kemasyarakatan yang kita warisi dari para leluhur kita secara turun-temurun.

Sangat tepat dan bijak para Pendiri Republik ini yang telah menjadikan prinsip ″Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab″ ini sebagai salah satu sila Pancasila. Lebih-lebih lagi prinsip ″Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab″ ini disinari oleh dasar ″Ketuhanan Yang Maha Esa,″ ajaran yang Ilahiah sebagai prinsip pertama Pancasila. Atas dasar pandangan hidup inilah, sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita ditegakkan dalam rangka membangun pilar-pilar nasionalisme, konstitusionalisme dan pluralisme.

Mari kita coba melakukan evaluasi dan bahkan kritik diri, sejauh mana kita telah melaksanakan prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" ini dengan mengaitkan pada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini. Sejauh yang dapat diamati, tergambar di hadapan kita sebuah potret buram peradaban. Bingkai kebangsaan kita retak. Bingkai peradaban keagamaan kita pecah. Terjadi disharmoni sosial di berbagai wilayah di Tanah Air. Nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang diajarkan oleh Pancasila telah terkoyak-koyak dan robek di tangan sebagian orang-orang Indonesia sendiri. Konflik, tawuran, perseteruan dan bentrokan berdarah sebagaimana akan diutarakan berikut ini dapat dijadikan indikator.

Tawuran dan Gegeran

Serangkaian tawuran antarpelajar terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Beberapa korban terluka parah akibat gegeran, perseteruan dan bentrokan berdarah ini. Tawuran serupa terjadi pula antarmahasiswa, kelompok yang lebih terpelajar. Tawuran sengit dan berdarah tadi mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka berdarah-darah. Contoh terkini adalah gegeran dan tawuran antarmahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar. Ironisnya, tawuran terjadi antarmahasiswa dari dua fakultas di lingkungan unuiversitas itu sendiri. Banyak fasilitas kampus yang dirusak dan hancur. Gegeran juga pernah terjadi di kalangan anggota DPR. Perilaku tidak simpatik di hadapan publik telah dipertontonkan oleh anggota Dewan yang terhormat.

Konflik dan tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa biasanya dipicu oleh hal-hal sepele yang terjadi antara dua orang pelajar atau mahasiswa. Persolan-persoalan pribadi tadi kemudian semakin meluas dan memanas menjadi persoalan kelompok. Dan

kelompoknya harus dibela, walaupun mereka harus rela menderita, luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Luapan emosi, perseteruan, kebencian, arogansi dan agresivitas lebih banyak berbicara ketimbang bisikan suara hati nurani dan akal sehat yang lebih mengedepankan visi kebenaran.

Fenomena ini bisa disebut sebagai gejala taasub kelompok yang picik, sempit dan chauvinistik. Solidaritas kelompok di kalangan mereka yang terlibat perkelahian, egeran dan tawuran itu sudah pasti lebih dominan daripada pertimbangan rasionalitas, logika, akal sehat dan hati nurani. Yang penting, bagi mereka, membela kawan secara membabi buta dan tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Irasionalitas, emosionalitas dan sentimen-sentimen egoistik pribadi dan kelompok terasa sangat dominan dan menyulut bara kemarahan yang diletupkan pada pihak yang dianggap lawan.

Konflik Sosial

Tindakan anarkis, agresif dan brutal juga terlihat pada kasus-kasus konflik antaretnis yang bermotif SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan). Kasus Sambas, Pontianak, Poso, Ambon dan kasus-kasus lain yang melibatkan perkelahian antaretnis terjadi dalam skala yang luas. Ada kecenderungan penguatan identitas etnis yang chauvinistik di kalangan suatu komunitas tertentu yang dibarengi dengan pengusiran terhadap masyarakat di luar etnisnya. Akar penyebabnya terkait dengan persoalan sosial, ekonomi atau masalah kemasyaratan lainnya. Tampak terjadi kecenderungan yang sangat berlebihan pada etnis tertentu untuk mengusir dan menghabisi etnis lain di luar kelompoknya, walaupun yang disebut terakhir ini sudah beberapa generasi hidup menyatu dengan mereka dan menjadi warga atau

penduduk setempat. Bukan hanya pengusiran, akan tetapi etnis setempat tadi sudah melakukan semacam pembunuhan dan pembantaian *(ethnic cleansing)* terhadap etnis pendatang.

Akibat konflik sosial ini, ribuan rumah tinggal (termasuk rumah-rumah ibadat), kontor-kantor pemerintahan dan gedung-gedung universitas dibakar dan luluh lantak akibat ulah dari kedua belah pihak yang bertikai. Sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan biaya yang besar dan memakan waktu yang lama tiba-tiba musnah begitu saja karena aksi saling bakar oleh kedua belah pihak yang berkelahi. Semua jadi arang dan abu. Semua kalah. Tidak ada yang menang. Segalanya sia-sia. Musnah harta, punah jiwa. Akibat konflik ini, satu generasi telah hilang. Konflik antaretnis ini telah mengakibatkan terjadinya problem kemasyarakatan yang sangat serius dan kompleks. Kelompok etnis yang terusir ini hidup di daerah-daerah pengungsian dan menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat memprihatinkan di tenda-tenda penampungan yang serba kekurangan fasilitas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Depnakertrans (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) pada tanggal 31 Agustus 2002, total pengungsi di Indonesia mencapai 1.353.963 jiwa atau 293.228 kepala keluarga.

Amuk Massa

Anarkisme massa juga tercetus antarpendukung cabup (calon bupati)-cawabup (calon wakil bupati) dalam pemilukada di beberap daerah. Para pendukung cabup dan cawabup yang kalah mengamuk melawan para pendukung cabup-cawabup yang menang. Di Sidoarjo, misalnya, massa pendukung cabup-cawabup yang kalah dengan keberingasan dan keganasan yang sangat

anarkis membakar kantor, sejumlah mobil dan fasilitas umum lainnya. Agresivitas dan brutalitas massa yang sama tercetus juga di beberapa daerah, baik sebelum atau pun sesudah pilkada. Biaya pilkada yang sangat mahal (miliaran rupiah) masih diperparah oleh kerugian (hancurnya fasilitas umum) akibat amuk massa yang anarkis dan brutal. Pesta *democracy* berubah menjadi pesta *democrazy*! Perkelahian dan amuk massa antarpendukung tim sepak bola semakin melengkapi retaknya peradaban kita. Para pendukung tim sepak bola yang kalah mengamuk, berkelahi dan melempar batu para pendukung tim sepak bola yang menang. Beberapa orang terluka dan berdarah-darah. Mereka tidak siap mental untuk kalah, yang ada di benak mereka hanya fanatisme tim.

Kekalahan tim sepak bola kesayangannya membuat mereka marah, berang dan beringas, lantas mengamuk dengan tindakan penuh anarkis dan brutal. Aneh, kaca-kaca jendela kreta api dirusak dan rumah-rumah penduduk yang dilalui dilempar batu dan dirusak. Mereka tidak dapat mengendalikan diri akibat kecewa dan frustasi terhadap tim sepak bola kesayangannya yang kalah dalam pertandingan liga sepak bola. Sadar atau tidak, sendi-sendi peradaban kita telah goyah dan tercoreng-bopeng. Kalau keadaan ini mengalami erosi yang berkepanjangan, tidak mustahil fondasi kemanusiaan dan sendi peradaban kita akan semakin parah. Apa yang retak pada visi keagamaan kita? Apa yang salah dengan sistem sosial kemasyarakatan kita? Apa yang melenceng dengan sistem pendidikan kita? Apa yang pecah pada bingkai peradaban kita? Apa yang bengkok dalam orientasi nilai kebangsaan kita?***

MERAYAKAN KEMENANGAN

Manusia dan malaikat adalah makhluk yang secara kodrati diciptakan oleh Tuhan dengan sifat yang sangat berlainan. Diciptakan Tuhan tanpa memiliki pernik-pernik nafsu, kerja malaikat hanya berbakti, menyembah, dan beribadat kepada Tuhan. Sedang manusia diciptakan oleh Tuhan dengan seperangkat nafsu yang mempunyai fungsi tersendiri. Nafsu seks, misalnya, berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk mengembangkan keturunan. Tanpa dilengkapi nafsu seks, kehidupan manusia sudah punah sejak dulu kala karena manusia tidak dapat menghasilkan keturunan yang akan melanjutkan kehidupannya. Agar hubungan seks antara pria-wanita menjadi legal dan sakral, maka hubungan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin itu diatur dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebagai elemen yang hidup dan aktif, nafsu itu mendesakkan dorongan dalam diri manusia. Jika manusia dapat mengendalikan nafsunya, ia menjadi pemenang. Jika tidak, ia menjadi pecundang.

Dalam Alqur'an, Tuhan memberikan ilustrasi tentang nafsu ini. Tentu saja, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dalam mengungkap perilaku nafsu yang ada dalam diri manusia. Maksud dan tujuan Tuhan adalah agar manusia sadar dan menyadari

bahwa dalam dirinya selalu ada dorongan nafsu yang selalu mendorong manusia ke jalan keburukan dan kejahatan di setiap lini kehidupan. Kesadaran demikian akan menjadi perisai dan tameng bagi manusia untuk menghalau dan sekaligus mengalahkan dorongan nafsu yang akan menggelincirkan dirinya ke jalan keburukan dan kejahatan itu. Tuhan mengatakan, *"Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku."* (QS Yusuf: 53). Ayat ini menjelaskan bahwa nafsu itu secara umum selalu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang destruktif, tercela, kebejatan, kemaksiatan, dan kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Nabi Muhammad memperingatkan kepada Umat Islam secara keseluruhan agar selalu ingat, awas, dan waspada terhadap godaan nafsu ini. Hal ini memberikan pemahaman bahwa nafsu itu secara umum adalah jelek dan destruktif, tetapi ada pula nafsu yang baik, positif, dan konstruktif yang dirahmati oleh Tuhan.

Destruktif dan Konstruktif

Usai Perang Badar (perang besar antara pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy yang terjadi di Mekkah), Nabi berkata kepada para sahabat, "Kita akan menghadapi perang yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi." Para sahabat lantas bertanya, "Perang apa itu, ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab dengan nada yang meyakinkan, "Perang melawan nafsu!" Perang melawan pasukan musuh dapat dideteksi dan diantisipasi karena secara fisik pasukan musuh tadi dapat dipantau dan dilihat dengan mata kepala atau diteropong dari jarak jauh sehingga gerak gerik, manuver, dan gerakan musuh dapat dilihat secara jelas. Tetapi godaan dan serangan nafsu sangat sulit dideteksi dan diantisipasi

karena nafsu itu tidak tampak secara fisik. Nafsu adalah musuh dalam selimut atau musuh yang dapat menikam dari belakang kapan saja dan di mana saja.

Dalam diri manusia, ada lima macam nafsu yang saling bergolak. Dua di antaranya bersifat negatif dan destruktif, sedang tiga lainnnya bersifat konstruktif dan positif. *Pertama,* nafsu hayawaniah (hewaniah) yang selalu mendorong manusia berperilaku seperti hewan atau binatang buas. Secara fisik, ia adalah manusia, tetapi perbuatannya sangat jahat dan buas seperti predator. Cara hidup manusia dengan nafsu hewaniah ini ditandai dengan penggunaan hukum rimba, teror, dan praktik *homo homini lupus* (yang kuat memangsa yang lemah), mau menang sendiri, rakus dan tamak, arogan dan angkuh, berperilaku kolonialistik, imperialistik, dan kapitalistik, dan berperilaku koruptif. *Kedua,* nafsu amarah yang selalu mendorong manusia suka melampiaskan arogansi dan mengumbar kemarahan. Manusia dengan sifat seperti ini sering berperilaku brutal, menghardik dan mengata-ngatai orang lain dengan perkataan keji dan kotor, suka berbaku hantam, dan berlaku anarkis. Perang antara dua bangsa yang bertikai pada mulanya dipicu dan disulut oleh nafsu amarah yang tak terkendali. Perang adalah bentuk pelampiasan amukan kemarahan yang sudah mengalahkan akal sehat manusia.

Ketiga, nafsu mulhimah yang memberikan bimbingan dan ilham kepada manusia untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dalam gerak gerik hidupnya. *Keempat*, nafsu lawwamah (kesadaran *eling* dan kekuatan koreksi diri) yang selalu mengajak manusia ke jalan kejujuran, kebenaran, dan keadilan sesuai petunjuk Tuhan. *Kelima,* nafsu mutmainnah yang menanamkan rasa tulus, ikhlas, damai, tenteram, dan tenang dalam diri manusia sehingga ia mampu menerima dan

melaksanakan kebenaran perintah Allah atas dasar ketakwaan kepada-Nya. Segala macam keinginan dan perbuatan yang tercela terjauh dari manusia yang memiliki jiwa mutmainnah ini.

Merengkuh Kemenangan

Dengan melaksanakan puasa Ramadan, semua Muslim ditempa untuk selalu memenangkan dan meningkatkan nafsu yang baik, konstruktif, dan positif, yaitu nafsu mulhimah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah. Ketiga nafsu ini akan mampu menciptakan sosok pribadi yang selalu mendorong manusia untuk melakukan kebajikan, ketakwaan, dan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Sementara itu, selama puasa Ramadan itu juga, nafsu hewaniah dan amarah (yang mendorong manusia berbuat yang tercela, destruktif, maksiat, dan jahat) terus dikendalikan dan dikalahkan. Secara doktrinal-teologis dan praktikal-psikologis, puasa merupakan ajaran Ilahiah yang mampu mencetak pribadi yang sangat unggul dari segi pembinaan dan perbaikan moral-mental-spiritual. Dengan mengamalkan ibadat puasa (dan ibadat-ibadat yang lain), lahirlah pribadi yang berkualitas unggul dan tahan uji terhadap bujukan nafsu hewaniyah dan amarah. Dalam waktu yang sama, terbentuklah pribadi yang berkualitas unggul dalam mempertahankan dan meningkatkan nafsu mulhimah, lawwamah, dan mutmainnah.

Nafsu hewaniah dan amarah tidak hanya dikendalikan dan dikalahkan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Nafsu mulhimah, lawwamah, dan mutmainnah tidak hanya dibina dan ditingkatkan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Tujuan utama puasa bukan hanya berdampak postif dan signifikan pada bulan Ramadan itu sendiri, tetapi juga di bulan-

bulan di luar Ramadan. Dampak puasa yang hanya terasa di bulan Ramadan, puasa semacam itu tidak efektif, mandul, bahkan sia-sia belaka. Benar sinyalemen Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan nilai dan pahala apa-apa dari puasanya itu, kecuali lapar dan dahaga. Logikanya, puasa itu harus berdampak positif dan signifikan sepanjang hayat. Jika kita menang melawan nafsu hewaniah dan amarah serta berhasil mempertahankan dan memantapkan nafsu mulhimah, lawwamah, dan mutmainnah, maka kita baru layak menyatakan lahir kembali sebagai sosok yang fitri dan layak pula merayakan Idul Fitri. Dalam kondisi keberagamaan dan momentum kesadaran Ilahiah seperti itu, kita boleh merasa yakin bahwa kita termasuk orang-orang yang meraih dan sekaligus merayakan kemenangan.***

PUISI-PUISI TANAH SUCI
KARYA SOEPARNO S. ADHY

Kekuatan utama yang memijar dan membersit dari ”Puisi-Puisi Tanah Suci” karya Soeparno S. Adhy ini terletak pada daya kemampuannya mengekspresikan bobot religiusitas ke dalam puisi-puisinya. Mengeduk dan menyerap pengalaman spiritual-keagamaan ketika melaksanakan ibadat haji di Tanah Suci, Soeparno menulis puisi-puisinya dengan sangat mengesankan dan sarat suasana keagamaan yang intens. Orang yang sudah menunaikan ibadat haji dan membaca puisi-puisi Soeparno, ia akan merasakan pengalaman kerohanian dan penghayatan keagamaannya terlahir dan hadir kembali secara kental. Bagi orang yang belum menunaikan ibadat haji dan membaca puisi-puisi Soeparno, ia akan merasa terbawa ke dalam pengalaman dan penghayatan keagamaan yang hidup seolah-olah ia sedang melaksanakan ibadat haji.

Sarat dan kaya dengan muatan religiusitas, puisi-puisi Soeparno banyak menggunakan simbol-simbol keagamaan yang terdapat di Tanah Suci. Semua ini dapat ditengarai dari puisi-puisinya yang menggunakan ungkapan kata-kata yang bernas,

impresif dan ekspresif. Kosa kata seperti Allah, Muhammad, Ka'bah, Masjidil Haram, ayat, Safa, Marwah, Jabal Rahmah, Gua Hira', ihram, Muzdalifah, dan simbol-simbol keagamaan lain yang terdapat di Tanah Suci sangat banyak menghiasi baris-baris puisinya. Tepat sekali apabila Soeparno memberi judul ″Puisi-Puisi Tanah Suci″ bagi buku kumpulan puisinya ini.

″Puisi-puisi Tanah Suci″ dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari tujuh puisi dan dirangkum di bawah judul ″Puisi-Puisi Madinah.″ Bagian kedua terdiri dari 17 puisi dan dihimpun di bawah judul ″Puisi-Puisi Makkah.″ ″Puisi-Puisi untuk Istriku″ (yang terdiri dari tujuh puisi) merupakan bagian ketiga. Jadi, secara keseluruhan ″Puisi-Puisi Tanah Suci″ karya Soeparno memuat 31 puisi. Ditulis dalam waktu relatif singkat (selama dua minggu menjelang bulan Ramadan 1431 H), puisi-puisi tersebut dimaksudkan oleh Soeparno sebagai ekspresi kerinduannya untuk dapat kembali ke Tanah Suci dan sekaligus sebagai ekspresi kerinduannya kepada almarhumah istrinya yang wafat dan dimakamkan di Tanah Suci ketika menunaikan ibadat haji bersamanya.

Puisi-Puisi Madinah

Dalam bagian pertama (Puisi-Puisi Madinah), Soeparno memulainya dengan puisi ″Ayat-Mu Memantuli Telingaku.″ Ia bercerita tentang tempat menginapnya di sebuah hotel ketika mengerjakan salat *arbain* di Madinah. Setelah beribadat tengah malam *(qiyamul lail),* ia membaca ayat-ayat Allah dan merasakan kekuatan ayat-ayat itu sangat dahsyat dan ″mem-bor″ dinding telinganya. Soeparno merasa takjub terhadap kekuatan ayat-ayat Allah itu dan sekaligus mengaku kepada-Nya akan

kekurangfasihan dan kekurangmerduannya dalam melafazakan ayat-ayat Allah:

.....

aneh. ayat-ayat-Mu memantuli dinding telingaku
dengan gema yang berlipat dari suaraku
ayat-ayat-Mu mem-bor dinding telingaku
dengan kekuatan berlipat dari tenagaku.
aku termenung
apakah Kau tidak berkenan
dengan lafalku yang kurang fasih
dan qiraahku yang kurang merdu?

Pengalaman kerohanian Soeparno di Tanah Suci semakin intens dan mengental ketika ia berada di Masjid Nabawi. Dalam masjid, ia mendengar firman Allah dilafazkan dengan sangat mengesankan dan ia merasakan kebahagiaan tersendiri seraya meresapi makna firman itu. Bagi Soeparno, firman itu sangat menyejukkan dan mencerahkan kalbunya karena menghadirkan kebahagiaan sangat mendalam yang tidak terkira. Firman Allah yang dilafazkan dalam masjid itu antara lain berisi penegasan Allah bahwa Dia telah menyempurnakan agama Islam, menyempurnakan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad dan meridai Islam sebagai agama terakhir. Pengalaman kerohanian ini dituangkan oleh Soeparno dalam puisinya yang berjudul "Firman Yang Membahagiakan":

....

bagiku firman itu
menjadi pertanda
menjadi pemandu

menjadi pencerah
iman dan takwaku

firman itu melengkapi ikrarku
maklumat keikhlasanku:
aku rela bertuhan Allah
aku rela Islam agamaku
aku rela pula Muhammad
Nabi dan Rasul penutup zaman.

Puisi-Puisi Mekkah

Dalam "Puisi-Puisi Makkah" (bagian tiga), Soeparno mengawalinya dengan sajak "Tahun Baru di Makkah," yaitu tahun 2005 ketika ia menunaikan ibadat haji bersama istri tercinta. Bagi penyair kelahiran Salatiga 26 Mei 1949 ini, tahun baru adalah bukan tahun hura-hura yang penuh pesta meriah atau penuh seremoni duniawiah yang gaduh, instan dan mudah menguap tanpa kesan kerohanian dan pesan keagamaan. Bagi penyair-wartawan ini, tahun baru adalah tahun kontemplasi, mawas diri, muhasabah dan peningkatan ibadat baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Demikianlah, Soeparno memaknai dan menghayati tahun baru yang ketika itu ia dan istri tercintanya sedang melaksanakan ibadat haji di Tanah Suci. Hal ini ia rekam dalam puisinya:

...
aku tengah di negeri asing
aku tengah mengasingkan diri
dari hiruk pikuk gemerlap yang bising

aku lagi menuju

dunia mawas diri
dunia kontemplasi
dunia kalkulasi
dunia muhasabah
dunia kuantitas
kualitas ibadat

bus terus melaju
menuju jantung kota Makkah
jantung tanah ibadat
tempatku bergantung diri
nyadhong ridla Ilahi
di atas hamparan sajadah.

Pengalaman kerohanian dan keagamaan Soeparno bertambah kaya dan kental lagi ketika dia sudah berada di lingkungan Ka'bah. Ka'bah diyakini oleh Umat Islam sebagai sentrum bumi. Ka'bah adalah pusat kiblat salat bagi seluruh kaum Muslimin di seluruh dunia. Ka'bah melambangkan kesatuan dan persatuan kiblat Umat Islam di mana pun mereka berada. Semua jamaah haji, tak terkecuali, harus melakukan tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Ka'bah. Saking banyaknya, jamaah haji terlihat sebagai lautan manusia, bergerak secara dinamis, mengelilingi Ka'bah suci. Di saat-saat seperti itulah Soeparno merasa Ka'bah itu mengajaknya mendekat, menyambut dan menyampaikan salam kepadanya. Ia terharu, menyeka air matanya, merasa sangat bahagia karena doanya untuk melaksanakan ibadat haji ke Tanah Suci dan langsung melihat Ka'bah dikabulkan oleh Allah:

...

inilah rumah Tuhanku
yang gambarnya kulihat pertama kali
pada malam pertama membuka juz 'Amma
kemudian mengeja alif ba ta

kuseka air mataku
yang sebening zamzam
air mata bahagia
karena Allah mengabulkan doaku
berziarah ke Makkah dan Madinah
seperti ibu, ayah dan moyangku
memenuhi panggilan suci-Mu.

Puisi-Puisi untuk Istriku

Di tengah-tengah merasakan nikmatnya beribadat di Tanah Suci, Soeparno diuji kesabaran dan ketabahannya oleh Allah. Tampaknya sudah menjadi takdir Allah, istri Soeparno jatuh sakit ketika melaksanakan ibadat haji. Karena sakit, tak ada jalan lain bagi Soeparno untuk menempatkan istrinya di kursi roda agar ibadat hajinya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Soeparno sangat cinta dan sangat setia kepada sang istri. Ia bersusah payah mendorong kursi roda istrinya di tengah gelombang lautan manusia agar ritual haji istrinya (mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan ibadat-ibadat yang lain) tetap berlangsung dengan baik. Soeparno tidak mengeluh sedikit pun walaupun ia harus bekerja keras mendorong kursi roda sang istri. Justru pekerjaan mendorong kursi roda itu dimaknai oleh Soeparno sebagai bentuk pengabdian yang tulus ikhlas. Kecintaan,

kesetiaan, ketulusan, keikhlasan dan pengabdian ini ia tuangkan dalam puisinya yang berjudul "Kudorong Kursi Rodamu":

....

istriku, terimalah pengabdianku
dengan sekadar mendorong kursi rodamu
sebagai persembahan terima kasihku

terima kasihku, karena kau
telah memberiku 4 anak yang sehat
mengasuh dan mendidiknya

terima kasihku, karena kau
dengan ikhlas mendampingiku
mengais rezeki di hari terik
menyelimutiku di malam rintik

kudorong kursi rodamu
mengelilingi Ka'bah
bersama menggapai ijabah.

Detik-detik yang paling sangat mengharukan bagi Soeparno adalah ketika jenazah istri tercintanya dibaringkan bersama lima jenazah lainnya. Soeparno dengan perasaan penuh haru, tabah dan pasrah yang sangat mendalam menyaksikan jenazah sang istri dengan iringan doa yang sangat tulus yang terucap dari lubuk hatinya yang terdalam. "Yang terbungkus kain hijau itu milikku/jenazah istriku," kata dia dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Ini merupakan ekspresi Soeparno bahwa dia adalah

seorang suami yang sangat baik, cinta dan setia sehidup semati pada istrinya. Dia terima cobaan berat ini dengan perasaan pasrah, tabah, dan merasa lega karena dia dapat menyalatkan jenazah sang istri dengan perasaan khusyuk di Masjidil Haram.

Perasaan sedih Soeparno merasa lebih terobati lagi karena jutaan jamaah haji lainnya juga menyalatkan jenazah sang istri bersama jenazah-jenazah yang lain. Dalam momen yang penuh kesedihan dan kehilangan sang istri seperti itu, sesosok malaikat seolah berbisik akrab di telinga Soeparno dan berpesan kepadanya untuk tetap berbahagia karena jenazah sang istri bersama jenazah-jenazah yang lain akan disalalatkan jutaan umat. Semua ini terekam dalam puisi Soeparno yang bertajuk ”Jenazah di Depan Ka’bah”:

sekelebat
sesosok malaikat
berbisik akrab di telingaku:
berbahagialah kau sebagai suaminya
karena sebentar lagi jenazahnya
akan disalatkan jutaan umat
dari segenap penjuru jagad

aku termangu
aku percaya pasti
malaikat itu tidak sedang menghiburku.

Pesan Moral untuk Anak-Anak Tercinta

Di tengah-tengah gebyar kemilau pergumulan kehidupan duniawi yang dikuasai oleh sikap rakus materialisme, Soeparno tampil sebagai sosok manusia yang mengambil jarak dari

gelimang kehidupan duniawi yang 'tidak' halal. Ia mempunyai prinsip hidup yang sangat teguh dan kuat. Ia tidak terhanyut ke dalam kehidupan materialistis kebendaan yang diraup dengan jalan tidak hal. Ia sama sekali menolak semua yang haram dan hanya memilih dan mendapatkan sesuatu yang halal. Inilah prinsip hidup yang ia pertahankan dan ia jalani secara konsisten. Bukan hanya utuk dirinya dan istrinya, tetapi prinsip hidup itu ia ajarkan dan ia tanamkan ke dalam lubuk jiwa putra-putrinya tercinta.

Soeparno berpesan kepada putra putri tercintanya agar jangan "menghamba dan dikuasai uang." Ia meyakinkan kepada putra putrinya bahwa makanan, nasi, lauk pauk, minuman, pakaian dan biaya sekolah dan kuliah yang ia berikan kepada mereka tidak diperoleh dari barang-barang yang haram (terlarang oleh agama). Tetapi diupayakan dan didapat dari sumber-sumber yang halal sebagai hasil kucuran keringatnya yang benar-benar bersih "sebening air zamam" di kota suci Mekkah. Degan sangat mengesankan, Soeparno menyampaikan pesan moral keagamaan itu kepada putra putrinya lewat puisinya yang berjudul "Sepenggal Kisah Tentang Almarhumah":

anakku, melalui sepenggal kisah itu
ayahmu ingin menitip pesan
wanti-wanti dan berwasiat:
jangan sekali-kali hidupmu
menghamba dan dikuasai uang

jadikan uang sekadar sarana
mememuhi kebutuhan hidup sederhana
tanpa melupakan keikhlasan berderma

kuasai secukupnya saja
agar kau tak tergopoh mengejar
agar tak tergoda berbuat tak wajar
agar kau tak silau dunia gemebyar

anakku, ingin kuyakinkan kepadamu
nasi dan lauk yang kusuapkan
insya Allah kukais dari ladang yang bersih
pakaian yang kalian kenakan
alhamdulillah kutemukan dari bahan thoyyiban
biaya sekolah dan kuliah yang kubayarkan
terkumpul berkat keringat sebening zamzam.

Rekam Jejak Karier

Demikianlah sekilas ulasan atas puisi-puisi Soeparno S. Adhy yang terhimpun dalam ″Puisi-Puisi Tanah Suci″ yang diterbitkan oleh Forum Silaturrahmi Wartawan Muslim Yogayakarta (cetakan pertama, Desember 2010). Beberapa puisi yang saya ulas di atas diharapkan telah mewakili keseluruhan pusinya yang terbagi menjadi tiga bagian: Puisi-Puisi Madinah, Puisi-Puisi Makkah dan Puisi-Puisi untuk Istriku. ″Puisi-Puisi Tanah Suci″ merupakan buku kumpulan puisi karya ketiga Soeparno. Karya pertama dan kedua masing-masing berjudul ″Bara Presada″ (1966) dan ″Sepanjang Bukit Barisan″ (1971). ″Bara Persada″ memuat sajak-sajak 'protes' yang ditulis oleh Soeparno sebagai anak muda yang ikut aktif berjuang menumbangkan rezim Orde Lama di Yogyakarta. Sedang ″Sepanjang Bukit Barisan″ memuat

puisi-puisi yang dicipta oleh penyairnya ketika ia bertugas sebagai 'anak panah' Muhammadiyah di Pagaralam (Sumatra Selatan).

Soeparno dan beberapa rekan sastrawan-penyair muda lainnya mendirikan Persada Studi Klub (PSK) di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1969. Puisinya yang berjudul "Gadis Kecil Buruh Kecil Perkebunan Teh" memenangkan hadiah *runner up* sayembara penulisan puisi yang diselenggarakan oleh BBC London dalam rangka mengenang almarhum Aoh K. Hadimadja. Antara 1972-1989, ia bekerja sebagai wartawan Masa Kini Yogyakarta dan kemudian sebagai wartawan SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (1989-sekarang). Pada tahun 2005, ia menerima penghargaan Piagam Kesetiaan Profesi Kewartawanan (30 tahun) dari PWI Pusat.***

ISLAM, DOKTRIN DAN PERADABAN

Dewasa ini terjadi perkembangan kemajuan peradaban (tamaddun) moderen yang sangat menakjubkan dan sekaligus sangat mencemaskan. Dikatakan "menakjubkan" karena kemajuan-kemajuan yang dicapai dari segi material sangat pesat dan membawa kemudahan serta kesenangan bagi manusia. Dikatakan "mencemaskan" karena kemajuan tersebut sering membawa dampak yang sangat buruk bagi manusia sendiri, terutama dari segi spiritual dan moral yang semakin kering kerontang dan hampa. Terjadi krisis teologis dan kevakuman spiritual dalam tubuh peradaban moderen. Bersamaan dengan itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen sering dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dengan demikian, kemajuan peradaban yang menonjol pada masa kini adalah peradaban yang timpang antara aspek material dan spiritual.

Kemajuan peradaban pada masa kini dimotori oleh bangsa-bangsa yang memiliki kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi. Dengan kemajuan tersebut, negara-negara maju (Barat) memainkan peran yang sangat dominan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada masa lalu, keunggulan persenjataan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Barat dipakai untuk menjajah bangsa-bangsa lain, terutama untuk kepentingan ekonomi bangsa penjajah. Sampai kini pun keunggulan persenjataan sering dipergunaan dengan cara-cara yang arogan untuk melindungi kepentingan ekonomi negera dan bangsa yang lebih kuat tanpa ada kekuatan efektif untuk mencegahnya. Perilaku semacam itu mengahadapkan bangsa-bangsa di dunia pada benturan peradaban yang sulit dielakkan.

Dominasi bangsa yang lebih maju atas bangsa lain tidak hanya terjadi secara pisik, melainkan juga secara kultural. Budaya mereka mendominasi budaya bangsa lain. Gejala ini terutama diakibatkan oleh arus globalisasi informasi dan komunikasi yang lebih kuat yang menerpa budaya bangsa yang kurang maju di bidang sains dan teknologi. Gejala ini berlangsung dengan mudah bila bangsa-bangsa yang diterpa arus informasi global itu tidak memiliki daya tahan dalam bidang budaya. Penganut agama Islam yang terdiri dari berbagai bangsa dan tersebar di berbagai negara terlibat dalam gesekan antarbudaya atau pun percaturan antarperadaban. Dalam kaitan ini, umat Islam yang sampai kini masih berada pada posisi yang lemah diharapkan dapat memahami gejala yang disebutkan itu secara tepat dan melakukan antisipasi secara konseptual. Hal tersebut dapat dilakukan sebab Islam mempunyai konsep yang jelas tentang pembinaan peradaban. Seyyed Hossein Nasr, misalnya, menyatakan bahwa dunia Islam adalah realitas yang hidup dengan nilai-nilai keagamaan dan peradabannya sendiri. Lebih dari 1,2 milyar Umat Islam menempati wilayah-wilayah yang luasnya dapat ditarik dari Timur sampai ke Barat.

Hakikat Peradaban

Dari segi bahasa, istilah peradaban mencerminkan: (1) kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; dan (2) hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Kata tamaddun diserap dari bahasa Arab, sinonim dari *madaniyah* dan *hadharah*. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut *civilization*. Semenatara itu, *civil society* sering diidentikkan dengan *civilized society* (masyarakat berbudaya atau berkeadaban). Istilah peradaban biasanya dipakai untuk menunjuk bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan dan sistem pergaulan yang kompleks dalam suatu masyarakat dengan struktur yang kompleks pula. Tetapi istilah peradaban dipakai juga untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat maju, canggih dan kompleks.

Menurut Yusuf Qardhawi, kata peradaban dipertentangkan dengan kata Badui atau sifat “biadab” dan “liar.” Kata “perkotaan” diperlawankan dengan kata “padang pasir.” Cara hidup menetap adalah kebalikan dari cara hidup “nomaden.” Orang-orang yang hidupnya menetap adalah penghuni kota, desa, dan pantai. Sedangkan orang-orang Badui adalah mereka yang tinggal di kemah-kemah di kawasan padang pasir. Orang-orang Badui terkenal dengan perangainya yang kasar, kejam, keras, tampak lugu, dan buta huruf. Dengan demikian, peradaban sesungguhnya terkait dengan hasil rasa, cipta dan karya manusia yang mencerminkan ketinggian perilaku yang merefleksikan keluhuran budi bahasa. Hal ini sejalan dengan penjelasan Yusuf Qardhawi yang menyebutkan tiga perkara penting yang berkaitan

dengan peradaban, yaitu: fikih (pemahaman) peradaban, perilaku peradaban, dan pembangunan peradaban.[1]

Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah

Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab sering diledek soal kenabian. Karen Armstrong menyatakan bahwa penganut agama Yahudi dan Kristen yang mereka temui sering mengejek bahwa bangsa Arab telah disisihkan dari rencana Agung-Nya. Di seluruh jazirah Arab, suku-suku bertempur satu sama lain dan berada dalam lingkaran balas dendam. Semakin banyak pemikir di Arabia yang berpendapat bahwa bangsa Arab adalah pecundang yang selamanya terbuang dari dunia beradab dan diabaikan oleh Tuhan sendiri. Tetapi situasi ini secara spektakuler berubah pada malam ke-17 Ramadhan ketika Muhammad bangun dan mendapatkan dirinya dirangkul oleh sebuah kekuatan yang Agung yang mendekapnya sangat erat sampai dia mendengar kata-kata pertama dari kitab suci baru atau wahyu yang menandai pengangkatannya sebagai Nabi.

Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca dengan nama Tuhan. Perintah pertama ini berisi ajakan kepada orang yang mempercayai Alqur'an agar ia menjadi cerdas. Ia diajak untuk melakukan aktivitas membaca dalam arti luas sesuai dengan tuntunan Tuhan dan untuk tujuan yang diridai-Nya. Ini adalah langkah awal untuk membangun peradaban. Langkah itu menjadi jelas dengan penulisan wahyu setiap kali diturunkan. Penulisan wahyu ini dilakukan oleh sejumlah sahabat penulis wahyu dalam rentang

[1] Yusuf Qardhawi, *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban.* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Abduh Zulfidar (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 363

waktu selama 23 tahun. Umat Islam yang sejak awal memelihara kitab sucinya melalui tradisi lisan (pengahafalan) yang dibarengi dengan pelestraian secara tertulis merupakan suatu gejala peradaban yang tinggi. Umat Islam secara bersama-sama memelihara orisinalitas kitab sucinya sebagai sumber utama dalam membina peradaban. Orisinalitas kitab suci ini merupakan salah satu keunggulan etos kreatif yang dimiliki umat Islam dalam membina peradaban.

Adalah benar pernyataan Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Islam sejak pertama kali datang telah membawa ide, visi dan misi peradaban yang tidak diragukan lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia dan mengeluarkannya dari kekolotan dan kebodohan menuju kecerdasan dan kemajuan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa peradaban Islam membawa manusia kepada kepercayaan terhadap kemahakuasaan dan kemahabesaran Tuhan. Dalam hal ini, bumi terkait dengan langit, dunia dijadikan sebagai jembatan menuju akhirat, materi dipadukan dengan spiritual, akal diseimbangkan dengan hati, dan ilmu disatukan dengan hati. Islam menghendaki kemuliaan akhlak, sebagaimana halnya kemajuan fisik. Sosok peradaban seperti ini tidak melupakan Tuhan dan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan manusia, penuh etika dan norma, dibangun atas dasar kerjasama yang baik antara individu dan jamaah. Cita-cita Nabi Muhammad SAW untuk mengembangkan peradaban Islam menemukan momentumnya yang tepat ketika ia hijrah ke Madinah. Nabi mulai membentuk masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk membangun masyarakat dan peradaban Muslim yang besar. Dasar-dasar pembentukan masyarakat Muslim yang menjadi cikal bakal pembentukan masyarakat madani itu dibangun oleh Nabi Muhammad dengan cara:

(1) Mendirikan masjid yang berfungsi sebagai wadah persatuan dan kesatuan sosial Muslim karena persatuan dan kesatuan adalah pilar penyangga utama kekuatan umat.

(2) Mempersaudarakan kaum Ansor (Muslim asli Madinah) dan Muhajirin (Muslim asal Mekkah). Dengan demikian, kabilaisme, sukuisme dan tribalisme telah dihancurkan dan sebagai gantinya dibangun persaudaraan dan persatuan yang didasarkan pada jiwa ukhuwah Islamiah yang kuat dan kukuh dengan berpegang kepada tali Allah (hablun minallah) dan tali manusia dan kemanusisan (hablun minannas).

(3) Mengadakan perjanjian antara kaum Muslimin dan kelompok non-Muslim (komunitas Arab non-Muslim dan komunitas Yahudi). Peristiwa sejarah ini disebut Piagam Madinah yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi penghargaan akan pluralisme, toleransi dan kerukunan antarumat dan antarkomunitas.

(4) Meletakkan secara kukuh dan kuat dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk memberdayakan fungsi-fungsi pranata sosial dan memberdayakan peran aktif masyarakat dalam mengelola kebersamaan, kemasyarakatan dan pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

Nabi Muhammad SAW mengawali langkah konkrit pembinaan peradaban Islam melalui penataan sistem pemerintahan yang sangat maju diukur dengan keadaan zamannya. Sayed Husen Nasr menyatakan bahwa di kota Madina inilah, Islam untuk pertama kalinya telah menjadi tatanan sosial politik, suatu kota yang lambat laun kelak berkembang pesat menjadi salah satu peradaban besar dunia. Sementara itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Nabi di Madinah membangun mansyarakat berperadaban berdasarkan ajaran

Islam, masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa ciri mendasar masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi, antara lain: (1) egalitarianisme, (2) penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya), (3) keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, (4) penegakan hukum dan keadilan, (5) toleransi dan pluralisme, dan (6) musyawarah.

Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Islam di Madinah sehingga melahirkan peradaban tinggi. Keberhasilan tersebut menjadi landasan atau model bagi terbentuknya peradaban Islam di kemudian hari di berbagai negeri Islam. Kehadiran Islam di bumi Andalusia telah berhasil membangun peradaban yang tinggi dalam berbagai wujudnya. Sebagai misal, Cordova memantulkan harmoni antara kemegahan istana, keagungan masjid, kewibawaan perguruan tinggi, dan keindahan taman kota. Simbol-simbol itu mencerminan kemajuan arsitektur, ilmu pengatahuan, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pemerintahan yang maju, dan pembangunan peradaban yang berkeseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah. Keseimbangan tersebut seseuai dengan hakikat Islam sebagai *as-sirat al-mustaqim* (jalan lurus, jalan yang benar, dan jalan yang mencerminkan keseimbangan sempurna) dan kaum Muslimin sebagai *ummatan washatha*.

Salah satu faktor penting keberhasilan membangun peradaban tersebut adalah pemimpin yang berkualitas. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia maupun Daulah Abbasiah yang berpusat di Baghdad selalu digerakkan oleh para penguasa, dengan sebutan *amir* ataupun khalifah, yang terkenal dengan berbagai kelebihannya. Sebaliknya, kemunduran peradaban Islam berangsur-angsur terjadi ketika

kendali pemerintahan berada di tangan kahlifah yang lemah dan ketika umat Islam senantiasa bertikai dalam perebutan kekuasaan. Tidak jarang kita jumpai dalam sejarah Islam, penguasa Muslim meminta bantuan pada pihak lain untuk memerangi penguasa Muslim lainnya. Belajar dari pengalaman ini, maka umat Islam di berbagai negeri perlu memiliki pemerintahan yang kuat dan berwawasan ke-Islam-an. Strategi ini sangat penting dalam rangka membina peradaban Islam pada masa kini dan pada masa-masa seterusnya. Pembinaan peradaban memerlukan kebijakan politik dari pemerintah dan dukungan seluruh warga masyarakat Muslim. Selain itu, pemerintah yang kuat, jujur, berani dan cerdas diperlukan untuk menghindari pengaruh asing yang selalu datang dalam berbagai bentuk kepentingan yang bersifat menggerogoti.

Perlu disebutkan pula contoh kemajuan peradaban Islam di Nusantara. Dalam bukunya *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam*, Hasan Muarif Ambary mengatakan bahwa peradaban Islam di Cirebon (dan Banten), seperti disebutkan dalam *Babad Cerbon*, telah mengubah dua desa nelayan yang semula tidak berarti menjadi dua kota metropolis. Seperti dilaporkan oleh saksi asing, Cirebon pada saat itu adalah kota yang ramai dengan penduduk sekitar 1.000 keluarga dan Banten dinyatakan lebih besar dan lebih ramai dari Amsterdam. Kemajuan semacam ini tentu saja hanya bisa dilakukan karena ada motivasi ke arah itu dan ada prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam membangun peradaban. Selanjutnya, Hasan Muarif Ambary mengatakan bahwa Cirebon telah menjadi salah satu bandar perdagangan yang pesat pada masanya dan sekaligus menjadi pusat peradaban Islam yang memiliki beberapa karakter antara lain sebagai berikut:

(1) Pertumbuhan pola kehidupan kota bernapaskan Islam dengan pola-pola penyusunan masyarakat serta hirarki sosial yang kompleks;

(2) Perkembangan arsitektur baik sakral maupun profan, seperti masjid dan keraton;

(3) Pertumbuhan seni lukis kaca dan seni pahat yang menghasilkan karya-karya kaligrafi khas Cirebon;

(4) Perkembangan bidang seni lain seperti tari, membatik, musik, dan seni pertunjukan tradisional;

(5) Pertumbuhan penulisan naskah-naskah keagamaan;

(6) Karya-karya sastra dalam bentuk *serat suluk* yang berisi ajaran tarekat;

(7) Tumbuhnya pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di sekitar Cirebon, Indramayu, Kerawang, Majalengka dan Kuningan.[2]

Pada permulaan abad ke-16, perkembangan peradaban Islam di Cirebon seperti disebutkan di atas belum memberikan perhatian yang memadai terhadap ilmu pengetahuan (sains). Kondisi tersebut agaknya serupa dengan kondisi umat Islam di berbagai negeri lainnya pada masa itu. Ketertinggalan tersebut berlangsung lama dan baru disadari setelah umat Islam bersentuhan dengan pengaruh bangsa-bangsa Barat yang selama ratusan tahun pernah menancapkan dominasi mereka dalam bidang politik di negeri-negeri jajahan. Kini era penjajahan dalam bentuk teritorial sudah berlalu, namun penjajahan dalam bentuk

[2] Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 109-110.

kultural dan penjajahan pemikiran *(ghaswatul fikr)* belum berakhir. Kondisi seperti ini merupakan kendala besar dalam membina peradaban Islam. Umat Islam di berbagai belahan dunia belum secara maksimal menunjukkan kebangunan mental untuk bangkit membangun peradaban Islam yang berkualitas tinggi dan unggul.

Sejak kebangkitannya pada abad ke-7, perhatian umat Islam Arab terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sangat menonjol dan luar biasa. Pada perkembangan selanjutnya, umat Islam masih memberi perhatian secara seimbang terhadap berbagai disiplin ilmu secara terpadu. Pada masa keemasan dan kejayaan peradaban Islam, umat Islam memiliki tokoh-tokoh ilmuan dan saintis besar yang mengusai ilmu agama dan ilmu umum, seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan Jabir ibnu Hayyan. Sesudah mengalami gebyar kebesaran dari abad ke-7 sampai abad ke-13, peradaban Islam mengalami kemunduran dan banyak bangsa-bangsa Muslim yang hidup di bawah cengkraman penjajahan Barat dari abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20. Dalam keadaan terjajah dan tereksploitasi, Umat Islam tidak mampu mengembangkan kreativitas mereka untuk mengembangkan sains dan teknologi. Sementara itu, Islam yang tersebar ke berbagai belahan dunia adalah Islam psca-Baghdad dan Islam pasca-Cordova yang sudah kehilangan elan vital dan kreativitas keilmuan, yakni Islam yang lebih menekankan pada olah spiritual-kerohanian (bersifat sufistik) ketimbang Islam yang menekankan pada olah akal-intelektual. Setelah bebas dari penjajahan Barat, bangsa-bangsa Muslim mulai bangkit. Tapi hingga kini masih banyak bangsa-bangsa Muslim yang sangat tertinggal dalam bidang sains dan teknologi.

Peradaban Muslim vis-a-vis Peradaban Barat

Konsep-konsep Barat mengenai manusia, budaya, dan peradaban bersifat antroposentrik (berpusat pada manusia), sementara konsep-konsep Islam bersifat teosentrik (bepusat pada Tuhan). Konsep Islam mengandung nilai dan norma untuk mengatur kehidupan manusia ke dalam empat dimensi, yaitu hubungan dengan Allah (*hablun minallah*), hubungan sesama manusia (*hablun minannas*), hubungan dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Menurut Kuntowijoyo, pandangan antroposentrisme di dunia Barat muncul secara revolusioner sebagai pendobrak pandangan keagamaan mitologis. Pandangan antroposentrisme, atau yang juga sering disebut humanisme, beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan, pada dewa-dewa, tapi pada manusia. Manusia yang menjadi penguasa realitas; oleh karena itu, manusialah yang menentukan nasibnya, bukan para dewa. Manusia bahkan dianggap dapat menetukan kebenaran. Itulah sebabnya, dewa-dewa dan kitab-kitab suci tidak diperlukan lagi.

Penolakan terhadap esensi dan fungsi agama seperti itulah yang telah melahirkan sekularisme di Barat. Sekularisasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, lahirlah peradaban Barat sekuler yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Kemajuan peradaban menghasilkan kekeringan spiritual. Kedudukan manusia kemudian mengalami degradasi. Manusia yang tadinya dianggap sebagai pusat alam semesta, kini telah berubah sekedar sebagai unsur suatu sistem ekonomi atau sistem politik. Dalam bidang ekonomi, misalnya, manusia menjadi elemen pasar. Kualitas kerja manusia, bahkan kualitas kemanusiaan itu sendiri, ditentukan oleh pasar. Demikian seterusnya dalam bidang kehidupan yang lain. Dalam beberapa

aliran filsafat Barat, kedudukan manusia digambarkan secara absurd sekali.

Islam mempunyai visi dan prinsip yang berbeda dari cara pandang Barat tentang ilmu pengetahuan dan kedudukan manusia di dunia ini. Islam memerintahkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang diridai oleh Allah, yakni untuk mengembangkan dan mencapai kemaslahatan umat manusia lahir dan batin yang didasarkan kepada etika dan moral agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Dengan demikian, Islam menolak pengembangan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang hanya bersifat pragmatik-sekularistik-hedonistik dan destruktif, karena manusia mendapat tugas dari Allah SWT sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi bagi kemaslahatan bersama dan segenap makhluk ciptaan-Nya. Arifin Bey mengatakan:

> *Although Islam places very great importance on science and knowledge, it is not value free but value oriented. Knowledge is meant to increase man's ability to persue a better life but at the same time to increase understanding about the greatness of God. Such knowledge would increase belief and loyality to Him*.[3] (Walaupun Islam menekankan sangat pentingya ilmu pengetahuan, ia bukan agama bebas nilai tetapi mmerupakan agama yang berorietasi pada nilai. Pengembangan ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, tetapi pada waktu yang sama meningkatkan pemahaman akan kebesaran Tuhan.

[3] Arifin Bey, *Beyond Civilizational Dialogue* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 130.

> Pengetahuan semacam itu akan meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada-Nya)

Arifin Bey selanjutnya mengatakan:

> … *If during the Middle Ages Islam helped to re-institute science and philosophy to the absolute domination of religious dogma, which was the West, today Islam seeks to contribute by re-intorducing the idea of the sacred to the totally secularized and science dominated life of the West*.[4] (Jika selama Abad Tengah Islam membantu menempatkan kembali sains dan filsafat di atas dominasi absolut dogma agama, maka dewasa ini Islam berupaya untuk memperkenalkan kembali ide tentang hal-hal yang bersifat suci terhadap hal-hal yang bersifat sekuler dan terhadap sains yang secara total telah tersekularisasikan yang mendominasi kehidupan masyarakat Barat).

Pandangan Barat tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban secara umum telah menyebar ke berbagai dunia Islam. Banyak generasi Islam yang mungkin terpengaruh dengan pandangan tersebut, terutama melalui pendidikan. Pendidikan menjadi saluran efektif dan empuk bagi Barat dalam membuat orang-orang non-Barat menjadi Barat. Westernisasi dan sekularisasi berlangsung melalui proses sistemik yang terus menerus sehingga tidak terasa orang-orang non-Barat telah di-Barat-kan dalam cara berpikir, pandangan hidup, filsafat hidup, perilaku, sistem politik dan sistem sosial mereka. Westernisasi dan sekularisasi akan menjauhkan agama dari orang-orang yang telah di-*westernized* dan di-*secularized* itu. Jika mereka adalah orang-orang Muslim, maka secara akidah agama, mereka

[4] *Ibid;* hlm. 129.

adalah Muslim, tetapi secara kultural, mereka adalah Barat. Mereka adalah orang-orang Muslim yang berbudaya dan berperadaban Barat. Mereka mengalami *split personality* (kepribadian yang pecah). Mereka bukan sosok pribadi Muslim yang utuh dan seutuhnya. Di kalangan Muslim yang kritis, ide-ide dan unsur-unsur peradaban Barat diterima sepanjang elemen-elemen itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka menolak ide-ide dan unsur-unsur kebudayaan dan peradaban Barat yang dinilai berlwawan dengan nilai-nilai Islam.

Sikap Muslim terhadap kebudayaan dan peradaban Barat berlaku pula terhadap kebudayaan dan peradaban lainnya. Bahwa Umat Muslim tidak dapat menerima ide-ide dan unsur-unsur peradaban non-Muslim yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi Umat Muslim dapat menerima ide-ide dan unsur-unsur peradaban non-Muslim sepanjang ide-ide dan unsur-unsur peradaban non-Muslim tadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penerimaan Muslim terhadap ide-ide dan unsur-unsur peradaban non-Muslim yang tidak berlawanan dengan nilai-nilai Islam adalah sangat penting dan strategis bagi Umat Muslim dalam rangka memperkaya dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Muslim. Sikap Muslim dalam hal kebudayaan dan peradaban adalah kritis-apresiatif. Artinya, Umat Muslim menerima ide-ide dan unsur peradaban dari mana pun datangnya sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi menolak semua ide dan unsur peradaban dari mana saja datangngnya yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Awal kebangkitan kebudayaan dan peradaban Muslim pada abad ke-7 Masehi dirintis oleh para sarjana dan ilmuan Muslim dengan menyerap dan mengambil ide-ide dan unsur-unsur peradaban Yunani klasik. Kemudian para sarjana dan ilmuan Muslim itu mengolah dan mengembangkan ide-ide dan unsur-unsur peradaban Yunani

klasik itu sehingga terciptalah *'the golden age'* kebudayaan dan peradaban Muslim dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Baghdad dan Cordova menjadi saksi sejarah kebesaran dan kejayaan peradaban Muslim pada abad-abad itu yang belum tertandingi oleh bangsa-bangsa Barat sekali pun.

Alqur'an dan Sunnah: Landasan Peradaban

Umat Islam mempunyai landasan yang kokoh dan jelas untuk membangun peradaban, yaitu Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber itu harus dikaji secara murni sehingga melahirkan interpretasi yang cerdas. Dengan cara seperti itu, semangat dan kandungan Alqur'an dan Sunnah benar-benar dapat digali secara orisinal dan utuh. Alqur'an mengajak manusia untuk mengkaji kitab suci, berpikir rasional, dan melakukan pengamatan atau observasi sebagai bagian dari metode berpikir empirik. Ajakan seperti itu mendorong ke arah pengembangan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dan, pada gilirannya, mampu mengembangkan peradaban yang utuh pula. Selain itu, Sunnah Nabi yang dikembangkan selama 23 tahun merupakan contoh praktis dalam mengimplementasikan pesan-pesan Ilahi dan model dialog kultural antara pesan-pesan tersebut dengan realitas kehidupan manusia yang senantiasa memerlukan ijtihad. Tindakan untuk sekedar menjadikan ayat Alqur'an dan Hadis sebagai alat justifikasi terhadap gagasan yang dikembangkan pihak lain (non-Muslim) adalah tidak sepantasnya dilakukan.

Islam mengajarkan sejumlah nilai dan norma yang unggul dalam membangun peradaban. Hanya saja pengembangan ke arah itu memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan harus berhadapan dengan tantangan yang kompleks dan berat. Segala kompleksitas tantangan hendaknya dapat direspon secara tepat

oleh Umat Islam. Dewasa ini, sistem perbankan syari'ah, sebagai misal, mulai disadari banyak pihak sebagai sistem yang lebih adil dan pengunaannya semakin luas, tidak saja di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negera sekuler (non-Muslim). Tentu saja, hal ini memerlukan kerja keras dan dukungan dari umat Islam sendiri. Kasadaran seperti itu timbul setelah manusia melakukan pencarian yang lama dan memiliki pengalaman yang banyak. Kesadaran akan keunggulan nilai dan norma yang diajarkan oleh Allah SWT akan semakin terbukti pada masa datang. Ini adalah tugas para cendekiawan dan praktisi Muslim. Kini umat Islam secara keseluruhan dituntut untuk membangun dan mengembangkan peradaban yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, bukan bencana bagi kemanusiaan.***

DAFTAR PUSTAKA

Abrasyi, Al. *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha.* Mesir: Isa al-Babi wa Surakah, 1969.

Ahmad, Khurshid. ″Islam and the Problem of Educational Reconstruction.″ Dalam *Al-Jami'ah,* no. 5 Th XII, 1974, hlm. 55-73.

Ali, A. Mukti. ″Beberapa Pertimbangan Tentang Peningkatan Mutu IAIN dan Kurikulum.″ Dalam *Al-Jami'ah,* no. I, Januari 1971, hlm. 3-10.

Ali, A. Mukti. ″Universitas dan Prinsip-Prinsip Perubahan Masyarakat.″ Dalam *Al-Jami'ah,* No. 1, 1973, hlm. 1-7.

Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam*. Jakarta: Logos, 1998.

Amijaya, D.A. Tisna. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1976-1985*. Jakarta: Dirjen Dikti, 1976.

Amin, Mustafa. *Tarikh at-Tarbiyah.* Cet. ke-2. Kairo: Al-Ma'arif, 1926.

Anshari, Endang Saifuddin. *Kuliah al-Islam: Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi*. Bandung: Perpustakaan Masjid Salam ITB,

1970.

Arifin, Anwar. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas.* Jakarta: POKSI VI FPG-DPR RI, 2003.

Attas, S.N. Al. *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979.

Attas, S.N. Al. *The Concept of Education in Islam: A Framework for Islamic Philosophy of Education.* Jeddah: King Abdul Azis University, 1979.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru.* Jakarta: Logos, 1999.

Bailyn, Bernard. *Education in the Forming of American Society.* New York: W.W. Norton & Company, Inc. 1972.

Baseline Study of IAIN: The Guidelines of IAIN Development Plan for Twenty-Five Years. Jakarta: Censis-IAIN Jakarta-Ditbinperta, 1996.

Basyuni, Muhammad M. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006.

Bey, Arifin H. *Beyond Civilizational Dialogue*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Bilgrami, Hamid Hasan dan Sayid Ali Asyraf. *Konsep Universitas Islam.* Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1989.

Bok, Derek. *Higher Learning.* Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Tahun 1977.

Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama RI, 1977.

Dhofier, Zamakhsyari. "The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyais in the Maintenance of the Traditional Ideology in Java." Disertasi doktor, Monash Universitry, 1960.

Fajar, A. Malik et al. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1999.

Fajar, A. Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas.* Bandung: Mizan, 1998.

Faruqi, Ismail dan Lois Lamya al-Faruqi. *The Cultural Atlas of Islam.* New York: Macmillan Publishing Company, 1986.

Faruqi, Ismail Raji. *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.

Gibb, Hamilton A.R. *Studies on the Civilization of Islam.* Disunting oleh S.J. Shaw dan W.R. Polk. Boston: Beacon Press, 1962.

Gilet, M. "The IAIN in Indonesian Higher Education." Dalam *Muslim Education Quarterly*, Vol. 8, 1990, hlm. 21-32.

Gutek, Gerald L. *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. Boston: Allyn and Bacon, 1989.

Hamidjojo, Santoso S. et al. *Platform Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional, 1998.

Hamm, Cornel M. *Philosophical Issues in Education: An Introduction*. New York: The Falmer Press, 1989.

Hidayat, Komaruddin dan Hendro Prasetyo, eds. *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama RI, 2000.

Hoesin, Oemar Amin. *Kultur Islam.* Cet. ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Holt, P. M. et al. *The Cambridge History of Islam.* 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah.* Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 1993.

Ikram, S.M. *Muslim Civilization in India*. Disunting oleh Ainshie T. Embree. New York: Columbia University Press, 1964.

Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam.* Jakarta: Mitra Cendekia, 2004.

Jabali, Fuad dan Jamhari. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia.* Jakarta, Logos, 2002.

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, eds. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Adicipta, 2001.

Kelompok Kerja. *Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasioanl*. Jakarta: Depdikbud 1999.

Khan, Mohammad Abdur Rahman. *Muslim Contribution to Science and Culture*. Lahore: Mohammad Ashrof, 1946.

Khayyat, Muhyiddin al. *Durus at-Tarikh al-Islâmi.* Jilid III. Beirut: tp.; t.t.

Khazin, William al. *Al-Hadlarah al-Abbasiyah.* Cet. ke-3. Beirut: Dar al-Masyriq, 1992.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia,1974.

Kompas, 18 September 2010, hlm. 12. Lihat berita "Daya Saing Pendidikan Naik."

Kompas, 20 September 2010, hlm. 12. Lihat berita "Pendidikan: 8 PTN Indonesia Masuk Top Dunia."

Leibbrandt, Gottfried. "The Unisco World Conference on Higher Education in the 21st Centurey and its Follow-up." Makalah dipresentasikan dalam seminar internasional tentang "Managing Higher Education in the Third Millennium," Jakarta, 25-26 Oktober 1999.

Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.

Maududi, Abul A'la Al. *Toward Understanding Islam*. Lahore: Islamic Publication Ltd, 1966.

Nadwi, Abu Hasan An. *Nahwa at-Tarbiyah al-Islamiyah al-Hurrah*. Kairo: Al-Mukhtar al-Islami, 1974.

Nakamura, Mitsuo dan Setsuo Nishino. "Islamic Higher Education in Indonesia." Dalam *Higher Education Policy,"* Vol. 6, No. 2, hlm. 51-54.

Nasr, Sayyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Edisi ke-2. Cambridge: The Islamic Text Society, 1987.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006. Jakarta: Puslitbang Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006.

Perwiranegara, Alamsjah Ratu. *Pembinaan Pendidikan Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 1982.

Pondok Pesantren Al-Amien. Sumenep: Pustaka Al-Amien, 1996.

Post Graduate Prospectus 1994-1995. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic University, 1995.

Prasodjo, Sudjoko et al. *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Qardhawi, Yusuf. *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban.* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Abduh Zulfidar (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 363

Ranuwihardjo, Sukaji. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1986-1995.* Jakarta: Dirjen Dikti, 1986.

Rasjidi, HM. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Richardson, Alan. *Religion in Contemporary Debate.* Philadelphia: Westminstar Press, 1966.

Robinson, Francis. *Atlas of the Islamic World since 1500.* New York: Facts on File, Inc., 1989.

Schacht, Joseph dan C. E. Bosworth, eds. *The Legacy of Islam.* Edisi. ke-2. Oxford: The Clarendon Press, 1963.

Shaleh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

Sharif, M. M. *Alam Pikiran Islam: Peranan Umat Islam dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan.* Cet. ke-2. Terj. Fuad Moh. Fachruddin. Bandung: Diponegoro, 1979.

Sirozi, Muhammad. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1998*. Leiden-Jakarta: INIS, 2004.

Soecipto, H.A. dan Agussalim Sitompul. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan IAIN*. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga, 1986.

Soehendro, Bambang. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*. Jakarta: Dikti, 1996.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Sulaiman, Fathiah Hasan. *Mazahib fit-Tarbiyah: Bahtsun fil Mazhab 'inda al-Ghazaali.* Kairo: Maktabah Nahdiyah Misty, 1964.

Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam.* Terj. Mukhtar Yahya. Jakarta: Jayamurni, 1973.

Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tilaar, HAR. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia, 1998.

UNESCO. *Higher Education in the Twenty First Century: Vision and Action*. Paris: UNESCO, 1998.

Wahib, Ahmad. *Pergolakan Pemikiran Islam*. Disunting oleh Djohan Effendi dan Ismet Natsir. Jakarta: LP3ES, 1982.

Vatikiotis, Michael. "Faith in Teaching: Muslims Say New Education Law is too Secular." Dalam *Far Eastern Economic Review,* vol. 30, no. 141 (July 28, 1988), hlm. 25.

Watt, William Montgomery. *A History of Islamic Spain.* Edinburgh: Edinburgh University Press, *1977.*

Watt, William Montgomery. *The Influence of Islam on Medieval Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987.

Watt, William Montgomery. *The Majesty That was Islam.* New York: Praeger Publishers, 1974.

William, John Alden. *Themes of Islamic Civilization.* Berkeley: University of California Press, 1982.

Zaidan, Jurji. *Tarikh at-Tamaddun al-Islami.* Lima jilid. Kairo: Dar al-Hilal, 1957.

SUMBER TULISAN

BAGIAN SATU:

MENGURAI ISU-ISU MULTIKULTURALISME

1. Islam, Doktrin dan Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia (Artikel ditulis tahun 2005 dan dikembangkan tahun 2012, belum pernah dipublikasikan)
2. Agama, Konstitusionalisme dan Pendidikan Multikultural (Artikel ditulis tahun 2011, belum pernah dipublikasikan)
3. Sinergisitas Agama dan Negara dalam Memperkuat Nasionalisme, Konstitusionalisme dan Multikulturalisme (Makalah disampaikan dalam Program Internship Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 6 Oktober 1999).
4. Kementerian Agama: Perekat Kerukunan, Penguat Kebangsaan (Artikel ditulis tahun 2010, belum pernah dipublikasikan)
5. Pentingnya Wawasan Multikultural bagi Penguatan Kerukunan Antarkelompok Masyarakat (Artikel ditulis tahun 2005, belum pernah dipublikasikan)

6. Multikulturalisme Amerika Serikat: Sebuah Pembelajaran Sosiokultural (Artikel ditulis tahun 2004, belum pernah dipublikasikan)

BAGIAN DUA:

MENGURAI ISU-ISU KONFLIK DAN PERDAMAIAN

7. Stop Budaya Kekerasan (*Seputar Indonesia*, 1 Oktober 2010)
8. Memberdayakan Kearifan Lokal dalam Mencegah Konflik Komunal (Makalah dipresentasikan dalam rapat koordinasi Pejabat Eselon I dan II serta Kakanwil Kementerian Agama dan Rektor IAIN seluruh Indonesia, Jakarta, tanggal 10-12 Oktober 2000)
9. Mengambil Mutiara Hikmah dari Berbagai Konflik Sosial (*Kedaulatan Rakyat*, 3 Agustus 2001)
10. Mengritisi Rudyard Kipling dan Samuel Huntington (*Kedaulatan Rakyat,* 25 Oktober 1997)
11. Islam di Tengah Ramalan Benturan Peradaban (*Pikiran Rakyat,* 14 Nopember 1977)
12. Presiden Obama, Indonesia dan Dunia Islam (*Kedaulatan Rakyat*, 12 Februari 2009)
13. Dinamika Gerakan Non-Blok (*Kedaulatan Rakyat*, 28 Juli 2009)
14. Dakwah, Pluralisme dan Masalah Kebebasan Beragama (*Kedaulatan Rakyat,* 27 Februari 1997)
15. Islam, Moral Kenabian dan Misi Perdamaian (Artikel ditulis tahun 2004, belum pernah dipublikasikan)

16. Menabur Ajaran Humanis Islam (Artikel ditulis tahun 2003, belum pernah dipublikasikan)

BAGIAN TIGA:

MENGURAI ISU-ISU KEPENDIDIKAN

17. Memperkuat Pendidikan Karakter Bangsa di Tengah Pergumulan Era Global (Makalah dipresentasikan dalam seminar nasional "Pendidikan Berbasis Karakter" yang diselenggarakan oleh Majalah Suara Kalijaga bekerja sama dengan penerbit Nuha Litera, Yogyakarta 29 Januari 2011)
18. Visi, Misi dan Desain Pendidikan Agama (Makalah ditulis tahun 2004, belum pernah dipublikasikan)
19. Menakar Karya Kependidikan Nahdlatul Ulama (Artikel ditulis tahun 2010, belum pernah dipublikasikan)
20. Muhammadiyah dalam Perspektif Pembaruan Islam (Artikel ditulis tahun 1989, belum pernah dipublikasikan)
21. Mengapresiasi Karya-Karya Kemanusiaan Muhammadiyah (Artikel ditulis tahun 1989, belum pernah dipublikasikan)
22. Menatap Sosok Muhammadiyah Kini (*Kompas*, 21 Oktober 1990)

BAGIAN EMPAT:

MENGURAI ISU-ISU KEAGAMAAN

23. Puasa Memanusiakan Manusia (*Kedaulatan Rakyat*, Kolom Hikmah Ramadhan 2010)

24. Puasa Membentuk Tiga Pilar Kejujuran (*Seputar Indonesia*, 1 September 2010)
25. Ritualisme dan Egalitarianisme Haji (*Seputar Indonesia*, 27 Oktober 2010)
26. Prosesi Ibadat Haji: Catatan Pribadi (Artikel ditulis setelah melaksanakan ibadat haji tahun 2009, belum pernah dipublikasikan)
27. Asal Mula Pembayaran BPIH dengan Dolar (*Kedaulatan Rakyat,* 14 Januari 2011)
28. Kurban: Makna Teologis, Simbolik dan Sosiologis (*Seputar Indonesia*, 17 September 2010)
29. Memaknai Momentum Hijrah Nabi Muhammad (*Seputar Indonesia*, 7 Desember 2010)
30. Zakat = Pajak? (*Kedaulatan Rakyat*, 25 April 2011)
31. Politik dan Sosiologi Dakwah (Makalah dipresentasikan di seminar Temu Pengasuh Pondok Pesantren sekabupaten Cirebon, diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Yogyakarta, 24 Oktober 2011)

BAG**IAN LIMA:**

MENGURAI ISU-ISU SOSIAL BUDAYA

32. TKW Dibunuh Secara Sadis (*Kedaulatan Rakyat*, 13 Mei 2011)
33. Adakah Alternatif Hukuman Pancung? (*Kedaulatan Rakyat*, 15 Juli 2011)
34. Hukuman (Tanpa) Pancung (*Jurnal Nasional,* 27 Juli 2011)
35. B(D)erita TKI Belum Berakhir (*Seputar Indonesia*, 2 Januari 2012)

36. Sepak Bola Pancasila (*Seputar Indonesia,* 23 Desember 2010)
37. Wajah Retak Peradaban (*Koran Jakarta*, 7 Agustus 2010)
38. Merayakan Kemenangan (*Seputar Indonesia*, 27 Agustus 2011)
39. Puisi-Puisi Tanah Suci Karya Soeparno S. Adhy (Resensi disampaikan dalam diskusi para penyair Yogya di Gedung Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 13 Juli 2011).
40. Islam, Doktrin dan Peradaban (Makalah ditulis tahun 2005, belum pernah dipublikasikan).

TENTANG PENULIS

Faisal Ismail lahir di Sumenep (Madura), 15 Mei 1947. Sebagai anak sulung dari pasangan Muhammad Ismail Baidaie (ayah) dan Siti Munirah (ibu), Faisal lahir dari latar belakang keluarga pamong di desanya (Prenduan). Kakeknya, Haji Baidaie, adalah Kepala Desa Prenduan untuk masa yang panjang. Ayahnya adalah Sekretaris Desa (1957–1967), orang kedua di jajaran pemerintahan desa. Pada tahun 1976, Faisal menikah dengan Farida Herawati (puteri Magelang) dan dikaruniai tiga anak: Mila Maduri, Fitri Hidayati, dan Izzun Nadhif.

Faisal Ismail menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN; dulu: SRN = Sekolah Rakyat Negeri) di Prenduan, Sumenep, tamat 1959. (Seraya belajar di SDN pada pagi hari, ia belajar di Madrasah Diniah Mathlabul Ulum pada sore hari di desanya); Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Pamekasan (tamat 1963); Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta (tamat 1966); dan Program S-1 Fakultas Tarbiyah UIN (Universitas Islam Negeri; dulu: IAIN, Institut Agama Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta (tamat 1973). Melalui Program Fulbright (USA), ia melanjutkan studinya ke jenjang S-2 (1986-1988) dalam bidang kajian Sejarah Islam di Department of Middle East

Languages and Cultures, Columbia University, New York, Amerika Serikat.

Sebelum memulai program MA-nya, Faisal Ismail mengikuti kursus intensif bahasa Inggris di English Program for Internationals (EPI), University of South Carolina, Columbia, Amerika Serikat (musim semi 1986) dan kemudian melanjutkan pelatihan bahasa yang sama di American Language Program (ALP), Columbia University, New York (musim panas-musim gugur 1986). Di bawah Program McGill-Indonesia IAIN Development Project, pada September 1991 ia memulai program doktornya di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada, dan menyelesaikannya pada Desember 1995. Faisal tercatat sebagai doktor dan profesor pertama di Fakultas Dakwah dan doktor pertama lulusan universitas Barat di UIN Sunan Kalijaga.

Pada bulan September 1997, Faisal Ismail memperoleh gelar guru besar (profesor) di bidang Sejarah Peradaban Islam. Ia menekuni karier akademisnya sebagai dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1977-2000); staf pengajar di beberapa Program Pascasarjana (PPs): PPs UIN Sunan Kalijaga (1996-2000); Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1996-1999); PPs Teologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta (1996-1999); PPs Teologia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (1997-1999); dan PPs IAIN Walisongo Semarang (1999). Selama satu kuartal, Januari-April 1999, ia mengajar sebagai profesor tamu di almamaternya, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada. Di McGill ia mengampu mata kuliah "Modern Islamic Development in Indonesia."

Selain memberi kuliah, Faisal juga aktif membimbing para mahasiswa dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi (1977-2000). Selama empat tahun (2002-2006) ia tercatat sebagai salah

seorang anggota Dewan Guru Besar di Kementerian Agama yang bertugas menilai karya-karya ilmiah para dosen UIN/IAIN/STAIN yang mengajukan usulan promosi ke pangkat guru besar. Sejak 2003 sampai sekarang, ia ditugasi oleh Institut Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai penguji luar (*external reader* atau *external examiner*) tesis/disertasi yang diajukan oleh para mahasiswa kepada Institut tersebut.

Sebagai seorang ilmuan, Faisal Ismail banyak mencurahkan waktu, perhatian, dan dedikasinya pada masalah-masalah ilmiah dengan komitmen yang sangat kuat. Buku-buku karya Faisal yang telah diterbitkan: (1) Islamic Traditionalism in Indonesia: A Study of the Nahdlatul Ulama's Early History and Religious Ideology (Tesis M.A.; judul asli: The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Religious Ideolgy); (2) Islam vis-à-vis Pancasila: Political Tensions and Accomodations in Indonesia 1945-1995 (Disertasi doktor; judul asli: Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila); (3) Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid: Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam; (4) Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam-Pancasila (terjemahan disertasi); (5) Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisis Historis; (6) Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur; (7) Momentum Historis Gerakan Pencerahan Islam: Peranan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Al-Rasyidin dalam Membangun Masyarakat Madani; (8) Islam: Idealitas Ilahiah dan Realitas Insaniah; (9) Islam, Transformasi Sosial, dan Kontinuitas Sejarah; (10) Masa Depan Pendidikan Islam di Tengah Kompleksitas Tantangan Modernitas; (11) Pencerahan Spiritualitas Islam di Tengah Kemelut Zaman Edan; (12) Islam: Melacak Teks, Menguak Konteks; (13) NU, Gus Durisme dan Politik Kiai; (14) NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik; (5) Obsesi (kumpulan puisi).

Faisal telah banyak berpartisipasi dalam berbagai diskusi, sarasehan, seminar, dan konferensi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di antara konferensi dan seminar internasional yang pernah ia hadiri adalah: peserta Konferensi MESA/Middle East Studies Association (Washington, 1992); peserta seminar tentang Muslim-Christian Relations: Past, Present, and Future (Jakarta, 1997); peserta seminar tentang Islam and the Challenge of New Millennium (Montreal, 1999); peserta seminar tentang Said Nursis's Thought (Jakarta, 2000); peserta seminar tentang Towards a Civilized Project for the Renaissance of the Muslim World (Kairo, 2000); peserta seminar tentang Educational Leadership and Policy Development: American Principles, Indonesian Practices di George Mason University (Virginia, Amerika Serikat, 2001); penyaji makalah berjudul "Common Responsibilities of Believers" di Universitas Kristen Duta Wacana bekerja sama dengan International Lutheran Church (Yogyakarta, 2002); peserta Bishops-Ulama Conference (Manila, 2003); penyaji makalah bertajuk "Islam Hadhari dalam Pembinaan Tamaddun Masa Kini" di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Kuala Lumpur, 2004); penyaji makalah berjudul "Pancasila as the Basis of Indonesian State" di Symposium on Law and Religion di Brigham Young University (Provo, Utah, USA, 2005).

Di antara makalah-makalah ilmiah yang telah Faisal presentasikan di berbagai forum diskusi/seminar di dalam negeri adalah: Munawir Sjadzali dan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia (di Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996); Islam, Sains, dan Sekularisasi (di Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998); Islam, Nahdlatul Ulama, dan Toleransi Antarumat Beragama (di Universitas Duta Wacana Yogyakarta, 1998); Fenomena Politik Islam di Era Reformasi di Indonesia (di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 1999).

Karier awal Faisal adalah pegawai negeri sipil golongan II/a di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali di Denpasar (1973-1974). Pada tahun 1974, ia pindah ke almamaternya, UIN Sunan Kalijaga, dan bertugas sebagai Kepala Departemen Umum pada Lembaga Bahasa (1976-1983) seraya mengajar bahasa Inggris di lembaga tersebut selama hampir sepuluh tahun. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Dakwah (1983-1985) dan Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas yang sama (1985-1986). Masa jabatan sebagai pembantu dekan ini tidak sempat dilaksanakan secara penuh karena ia lebih tertarik meneruskan studinya ke jenjang program S-2 di Univesitas Columbia, New York, Amerika Serikat.

Setelah menyelesaikan program doktornya di Universitas McGill, Kanada, Faisal kembali ke Yogyakarta dan menjabat sebagai Asisten Direktur II Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Mei 1996-Februari 1997). Dari Februari 1997-Februari 2000, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Dakwah, Faisal secara otomatis menjadi Ketua Senat Fakultas. Selama tiga bulan (Maret-Mei 2000), ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pascasarjana dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, ia secara otomatis menjadi anggota Senat Universitas. Ia tercatat pula sebagai anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1997-2000) karena statusnya sebagai dosen/guru besar luar biasa di fakultas tersebut.

Menapaki rekam jejak karier struktural selanjutnya, Faisal Ismail pindah dari kota gudeg Yogyakarta ke ibu kota Jakarta. Menteri Agama Tolhah Hasan memberinya tugas baru sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Kementerian Agama RI, Jakarta, dan jabatan ini ia laksanakan dari Mei 2000-

Februari 2002. Kemudian, selama empat tahun lima bulan (5 Februari 2002-23 Juni 2006), ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, orang ke-2 di jajaran struktural di Kementerian itu.

Selama kurun waktu empat tahun lima bulan itu, Faisal bertugas di bawah kepemimpinan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar dan Maftuh Basyuni. Usai melaksanakan tugas sebagai Sekjen Kementerian Agama, ia memangku jabatan baru sebagai Staf Ahli Menteri Agama bidang Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia selama lima bulan (Juli–November 2006). Beralih dari birokrat ke diplomat, Faisal menempati pos barunya di Kuwait City sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain. Ia diangkat sebagai duta besar berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 40/P tanggal 26 September 2006. Setelah berkiprah selama 3 tahun 7 bulan, ia mengakhiri tugasnya sebagai duta besar pada tanggal 30 Juni 2010. Ia pun kembali ke kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melanjutkan profesi lamanya sebagai guru besar di Fakultas Dakwah.

Faisal Ismail telah banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, antara lain ke Asia (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Filipina), India (New Delhi, Agra), Australia (Melbourne), Amerika Serikat (New York, Washington, Virginia, New Jersey, Chicago), Kanada (Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto), Eropa (Jerman, Italia, Austria, Belanda, Inggris), Timur Tengah (Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Lebanon), dan Afrika (Mesir, Tunisia, Afrika Selatan). Pada tahun 2004, ia memimpin misi rombongan para ketua majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, Muhammadiyah, dan NU) melakukan kunjungan ke Kairo, Vatikan, Bangkok, dan New Delhi dalam rangka melakukan studi banding dan sekaligus untuk memperluas visi,

prespektif, dan wawasan tentang pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivisme yang sangat diperlukan dalam mengembangkan dialog, kerukunan, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Di tengah berbagai kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Kepala Badan Litbang Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Duta Besar, Faisal Ismail masih sempat memanfaatkan sebagian waktunya untuk tetap menulis dengan penuh dedikasi dan komitmen yang kuat. Bagi Faisal, mengarang merupakan panggilan jiwanya yang telah ia tekuni sejak muda. Kegiatan menulis artikel ini telah Faisal rintis sejak tahun 1960-an ketika ia masih belajar di PHIN Yogyakarta. Ia mempublikasikan karya-karyanya yang ditulis tangan di majalah dinding sekolahnya.

Sepanjang karier kepengarangannya, Faisal telah banyak menulis artikel. Artikel-artikelnya dengan tema sosial-keagamaan, sejarah, dan kebudayaan banyak muncul di berbagai majalah dan koran yang terbit di berbagai kota di Tanah Air antara lain: Al-Jami'ah, Arena, Ath-Thalabah, Bangkit, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Masa Kini, Mercu Suar, Muhibbah, Suara Muhammadiyah, dan Yogya Post (semuanya terbit di kota gudeg Yogyakarta); Adil (terbit di Solo); Suara Merdeka (terbit di Semarang); Jawa Pos (terbit di Surabaya), Abadi, Harmonis, Kompas, Media Indonesia, Panji Masyarakat, Pembina, Pelita, Republika, Seputar Indonesia, Studia Islamika, dan Ululmul Qur'an (semuanya terbit di Jakarta); Pikiran Rakyat (terbit di Bandung).

Selain menulis artikel, Faisal Ismail juga mengarang sajak (puisi) terutama ketika ia masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta. Ia memublikasikan sajak-sajaknya di berbagai majalah dan koran antara lain: Abadi, Adil, Arena, Ath-Thalabah, Mahasiswa Indonesia, Mercu Suar, Mimbar Demokrasi,

Muhibbah, Panji Masyarakat, Pelopor Yogya, dan Pembina. Sajak-sajak Faisal pernah dimuat di majalah bergengsi: Sastra, Horison, Basis, dan Mimbar.

Kumpulan sajak tunggal pertamanya berjudul *Obsesi* (1982) diterbitkan oleh CV Nur Cahaya, Yogyakarta. Sajak-sajaknya juga terhimpun dalam antologi Nyanyian Tanah Air (diterbitkan oleh Lembaga Seni Budaya UIN Sunan Kalijaga, 1972); Tugu: Bunga Rampai Sajak Penyair Yogya (1983); dan Tonggak: Bunga Rampai Puisi Indonesia Kontemporer, buku 3, (Jakarta: Gramedia, 1987), dieditori oleh Linus Suryadi AG. Faisal pernah menjadi pemenang pertama lomba penulisan puisi yang diselenggarakan oleh Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia) Cabang Yogya (1966); juara harapan kedua lomba cipta puisi yang diselenggarakan oleh HSBI (Himpunan Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia) Pusat, Jakarta (1970), dan pemenang pertama lomba mengarang esei yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (1971).

Kerja-kerja keredaksian di beberapa media penerbitan pernah juga ditekuni oleh Faisal. Ketika masih kuliah, ia menjadi salah seorang anggota redaksi buletin "Kebangkitan," media komunikasi milik PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kombes UIN Sunan Kalijaga. Ketika bekerja sebagai guru honorer di sekolah PGAL (Pendidikan Guru Agama Laboratorium) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1970-an, ia menjadi pengasuh majalah dinding yang diperuntukkan bagi para murid di sekolah itu. Pada tahun-tahun terakhir masa kuliahnya, ia menjadi anggota redaksi Ath-Thalabah, majalah yang diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ia tercatat pula sebagai aktivis Takmir Masjid UIN Sunan Kalijaga dan sekaligus menjadi pemimpin redaksi buletin Al-Mauizah, media dakwah dan informasi masjid itu. Terakhir, dalam kapasitasnya sebagai guru

besar, ia pernah menjadi salah seorang anggota redaksi Majalah Al-Jami'ah (diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga) yang memublikasikan artikel-artikelnya dalam tiga bahasa : Indonesia, Arab, dan Inggris.

Antara tahun 1966-1970, Faisal aktif dalam perhimpunan para pengarang muda Yogya, Persada Studi Klub (PSK), di bawah bimbingan penyair Umbu Landu Paranggi (pengasuh lembaran seni budaya di Koran *Pelopor* Yogya). Keanggotaan PSK sangat inklusif dan pluralis, merangkul anak-anak muda dari berbagai latar belakang etnis, tradisi, kultur, dan agama. Di PSK, ia banyak mendapatkan pencerahan intelektual dan wawasan kultural, dan sekaligus memasuki interaksi pergaulan antaretnis, antarbudaya, dan antar-iman. Di PSK, ia secara intens menghayati dan meresapi arti penting nilai-nilai multikulturalisme, pluralisme, dan inklusivisme.

Piagam-piagam penghargaan yang pernah Faisal terima antara lain: Piagam Penataran P-4/Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (1983); Sertifikat Sarjana Fulbright (1988); Piagam Penataran P-4 Tingkat Lektor Ke Atas (1996); Lancana Karya Satya 25 Tahun dari Presiden RI (1996); dan Lancana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden RI (2001). ***

Kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama di Indonesia mengalami pasang-surut. Dalam posisi demikian, diperlukan beberapa aspek untuk merespons, yakni cara hidup yang multikulturalis, pendidikan, penguraian isu-isu yang menyebabkan konflik, dan pendekatan sosial keagamaan. Dalam konteks ini, peran negara juga menjadi penting, karena disanalah bangsa dan rakyat Indonesia bergantung.

Agama beserta unsur-unsurnya, baik itu model dakwah dan instrumen ormasnya, memiliki kontribusi yang erat dalam mengurai persoalan konflik. Model pendekatan kearifan lokal juga tidak bisa dilepaskan dalam menghadapi serangan budaya global, yang tidak saja berpengaruh positif, tetapi juga dampak negatif.

ISBN 978-602-8739-10-8